



**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SEMARANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 144);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 147);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
  - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; dan
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - f. BAB VI PENUTUP.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Juli 2024  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 16 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD yang telah ditetapkan tersebut kemudian menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam satu tahun anggaran. RKPD Kota Semarang Tahun 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dan merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tema “Pemantapan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan”.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 hingga triwulan II ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan pandemik COVID-19 yang melanda semua negara di belahan dunia, yang berimbas pada terbatasnya mobilitas yang mempengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia yang berakibat pada melemahnya aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan penguatan dan kerjasama tingkat individu sampai tingkat negara, upaya recovery pasca pandemic menunjukkan tren positif, Namun demikian dunia menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina, dilanjutkan dengan konflik Israel-Palestina, yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang berimbas pada ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Di samping itu perubahan iklim semakin mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, serta kerusakan bangunan dan infrastruktur, yang berpotensi menyebabkan kerugian dari aspek ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, pertanian dan aspek lainnya. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu-isu strategis terkini.

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

RKPD Perubahan 2024 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan tersebut yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. RKPD Perubahan 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2021-2026. Penyusunan RKPD Perubahan 2024 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
4. Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan penyusunan RKPD Perubahan 2024 yang komprehensif dan partisipatif, Pemerintah Kota Semarang dapat lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan pembangunan serta lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara

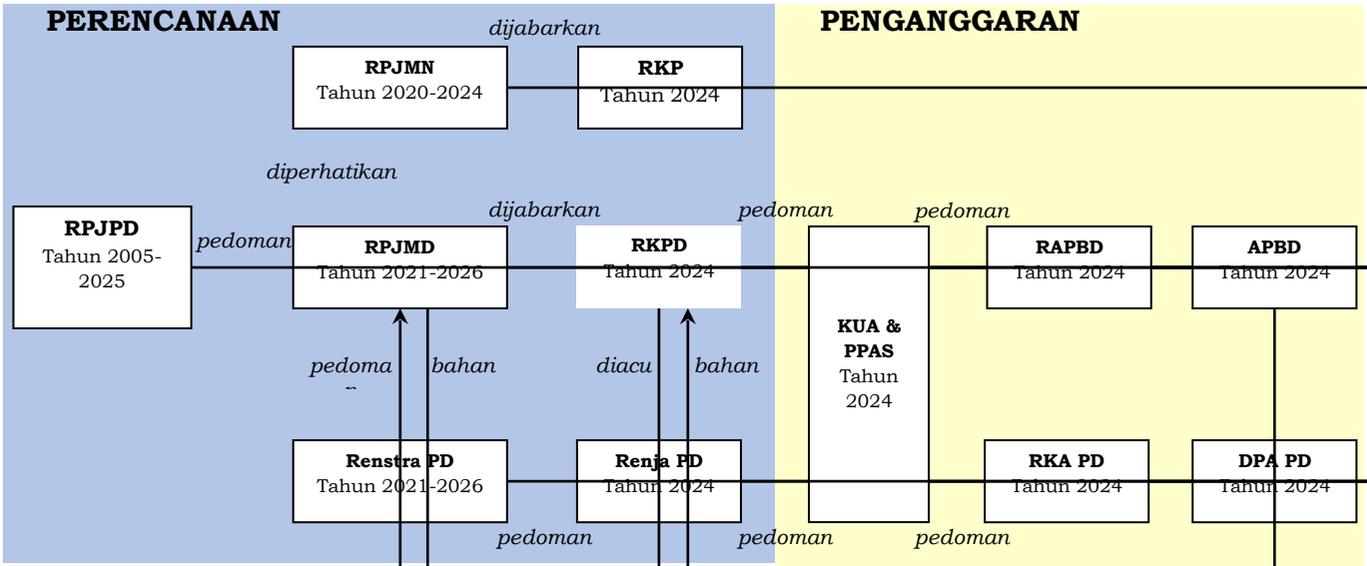
- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  24. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
  29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
  30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
  31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
  32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
  33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
41. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam proses pembangunan diperlukan suatu pedoman guna memastikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pedoman yang digunakan menurut jangka waktunya dibagi atas dokumen jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang atau RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang dalam penyusunannya juga memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, RPJMD menjadi bahan penyusunan Renstra PD yang kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja PD. RPJMD sendiri dijabarkan ke dalam RKPD yang disusun secara simultan dengan Renja PD. RKPD dan Renja PD beserta perubahannya kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS yang digunakan sebagai acuan untuk RAPBD sampai dengan disahkan menjadi APBD. Untuk lebih jelasnya, hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD Tahun 2024

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai upaya memastikan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024, serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu untuk mengakomodir perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan penyesuaian arah kebijakan berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan Triwulan II untuk menjadi pedoman kepada seluruh *stakeholder* pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah di sisa Tahun 2024. Selain itu, penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD-Perubahan Tahun 2024 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKPD dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang di Tahun 2024;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2024 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2024;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024; dan
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

#### 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, yang terdiri dari: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

##### BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2024

Memuat Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua dengan tetap memperhatikan dokumen RPJMD

##### BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang capaian kondisi ekonomi tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 (yoy), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah berdasarkan kerangka pendanaan.

#### BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

#### BAB VI PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024**

**2.1. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama menggambarkan kinerja Kepala Daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan strategis yang diyakini mampu menjawab permasalahan dan isu di daerah, dan memberi daya ungkit terhadap perwujudan visi dan misi pembangunan. Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Semarang kondisi sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Semarang  
Kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD
			Target (Induk)	Realisasi s.d. Triwulan II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	84,40-86,00	84,43	100,00		ST	Koord Bappeda (Capaian 2023)
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	Persen	61,5	54,12	88,00		T	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,6-6,5	5,99	100,00		ST	Koord Dinas Tenaga Kerja (Capaian 2023)
4	Angka Kemiskinan	Persen	4-3,82	4,03	99,25		ST	Koord Bappeda
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	5,7-6,5	5,79	100,00		ST	Koord Bappeda (Capaian 2023)
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)	Juta Rupiah	104,12	146,87	100,00		ST	Koord Bappeda (Capaian 2023)
7	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (27,362,089)	4,27 (14.128.827)	61,00		R	Koord DPMPSTP
8	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Persen	6	6,57	100,00		ST	Koord Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Indeks Demokrasi	Nilai	72,8	95,18	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Capaian 2023)
10	Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	95,8	95,96	100,00		ST	Koord DP3A (Capaian 2023)
11	Persentase Penurunan	Persen	9,9	3,23	100,00		ST	Satpol,16 Kec

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD
			Target (Induk)	Realisasi s.d. Triwulan II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Gangguan Keamanan dan Ketertiban							
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	56,06	56,84	100,00		ST	DLH (Capaian 2023)
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	Nilai Indeks	85	95,65	100,00		ST	Koord Bappeda
14	Persentase Kawasan Banjir dan Rob terhadap luas wilayah keseluruhan	Persen	3,19	3,29	96,87		ST	Koord DPU
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks	76	84,14	100,00		ST	Koord Setda (Capaian 2023)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,35	90,34	100,00		ST	Koord Setda (Capaian 2023)
17	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100,00		ST	Koord Inspektorat (Capaian 2023)

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024     : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Dari sebanyak 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Semarang yang dijadikan ukuran keberhasilan, sampai dengan triwulan II terdapat 13 indikator yang telah mencapai target tahun 2024 dan 4 indikator lainnya mempunyai predikat Akan Tercapai atau mempunyai tingkat pencapaian kinerja dalam rentang 50% sampai dengan 99,99% dari target yang ditetapkan tahun 2024, karena memang evaluasi ini masih dalam proses pencapaiannya (*On Going* evaluasi). Sepuluh indikator yang diukur masih menggunakan data kinerja tahun 2023 (karena pengukuran dan publikasinya dilakukan satu kali setiap tahun dan publikasi hasilnya pada periode tahun setelahnya). Selain itu, berdasarkan predikat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, dari 17 IKU terdapat 15 indikator yang memiliki kriteria Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator ber kriteria Tinggi (T). Namun, masih terdapat 1 indikator yang ber kriteria Rendah (R) yaitu Persentase peningkatan nilai investasi.

## 2.2. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah di Kota Semarang. Adapun kinerja sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2024 pada indikator kinerja daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.  
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Kondisi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,35	0,90	100,00	●	ST	Bappeda
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7-6,5	5,79	100,00	●	ST	Bappeda (Capaian 2023)
3	Laju inflasi	%	2,4	2.56	100,00	●	ST	Bappeda
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,84	29,88	100,00	●	ST	Dinperdag/ Bappeda (Capaian 2023)
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,72	28,78	100,00	●	ST	Dinperin/ Bappeda (Capaian 2023)
	Fokus Kesejahteraan Sosial							
6	Indeks Pembangunan Manusia	nilai indeks	84,40 – 86,00	84,43	100,00	●	ST	Bappeda (Capaian 2023)
a	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp/thn	16.000	16.420	100,00	●	ST	Bappeda (Capaian 2023)
b	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,54	77,9	100,00	●	ST	Dinkes (Capaian 2023)
c	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,61	10,81	100,00	●	ST	Disdik (Capaian 2023)
d	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,60	15,58	99,87	▶	ST	Disdik (Capaian 2023)
7	Angka Kemiskinan	%	4,00-3,82	4,03	99,25	▶	ST	Dinsos/ Bappeda
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,6-6,5	5,99	100,00	●	ST	Disnaker/ Bappeda (Capaian 2023)
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	98,78	98,81	▶	ST	Disdik

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	61,05	54,12	88,65		T	Disbudpar
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib							
1	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1.01	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100,00		ST	Disdik
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)							
a	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100,00		ST	Disdik
b	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100,00		ST	Disdik
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100,00		ST	Disdik
4	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	65,5	75,64	100,00		ST	Disdik
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	65,7	55,55	84,55		T	Disdik
6	Angka Partisipasi Kasar							
a	PAUD (3-6 tahun)	%	81,75	124,2	100,00		ST	Disdik
b	SD/MI	%	100	99,45	99,45		ST	Disdik
c	SLTP/MTs	%	100	94,5	94,50		ST	Disdik
7	Angka Partisipasi Murni							
a	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	90	89,89	99,88		ST	Disdik

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	SD/MI/Paket A							
	b Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	83,41	100,00		ST	Disdik
8	Angka Putus Sekolah							
	a Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	100,00		ST	Disdik
	b Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,01	100,00		ST	Disdik
9	Angka Kelulusan							
	a Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	98,87	98,87		ST	Disdik
	b Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	99,45	99,45		ST	Disdik
10	Angka Melanjutkan (AM)							
	a Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	98,18	98,18		ST	Disdik
11	Fasilitas Pendidikan							
	a Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96,5	86,16	89,28		T	Disdik
	b Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,3	92,47	93,12		ST	Disdik
12	Rasio Guru / Murid perkelas Rata-rata							
	a Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18	100,00		ST	Disdik
	b Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32	100,00		ST	Disdik
	c Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17	100,00		ST	Disdik
	d Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30	100,00		ST	Disdik
13	Guru berkualifikasi S1/D-IV							
	a Jenjang PAUD	%	98,8	81,53	82,52		T	Disdik
	b Jenjang SD/MI	%	100	96	96,00		ST	Disdik
	c Jenjang SMP/MTs	%	100	96,55	96,55		ST	Disdik
1.02	Kesehatan							
	1 Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,38	0,35	92,11		ST	Dinkes
	2 Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	93,7	94,59	100,00		ST	Dinkes
	3 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	46,06	46,06		SR	Dinkes

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	45,67	45.67		SR	Dinkes
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	46,04	46.04		SR	Dinkes
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100	58,91	58.91		R	Dinkes
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100	72,11	72.11		S	Dinkes
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100	59,18	59.18		R	Dinkes
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100	65,37	65.37		R	Dinkes
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100	65,90	65.90		R	Dinkes
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	70,13	70.13		S	Dinkes
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	63,53	63.53		R	Dinkes
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100	69,97	69.97		S	Dinkes
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100	57,94	57.94		R	Dinkes
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100,000 kelahiran hidup)	(per 100,000 kelahiran hidup)	71,32	57,85	100,00		ST	Dinkes
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,06	8,90	53.14		R	Dinkes
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/100,000 pddk	6,88	10,77	43.46		SR	Dinkes
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	78	97,35	100,00		ST	RSWN
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+	A+	100,00		ST	RSWN
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	96,78	97,00	100,00		ST	Disperkim
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,41	97,25	97,83		ST	Disperkim
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	84,2	83	98,57		ST	DPU
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100	99,62	99,62		ST	Disperkim
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	92,86	99,04	100,00		ST	Disperkim
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94	93	98,94		ST	DPU
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	64,6	96,65	100,00		ST	Distaru
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43	43	100,00		ST	DPU
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	%	36,34	33,62	92,52		ST	DLH
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	36	40,55	100,00		ST	Disperkim
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	28	27,02	96,50		ST	DLH
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	30	70,58	100,00		ST	Disperkim
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	%	(84 Unit)	100	100,00		ST	Disperkim

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II						
			kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)							
	3		Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	(64% x 431,54 Ha = 276,192 Ha)	59,45	92,89		ST	Disperkim
	4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000	230	23,00		SR	Disperkim
	5		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	45	45,00		SR	Disperkim
	6		Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	19,28	38.74	100,00		ST	Disperkim
1.05			Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
	1		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	50	50,00		SR	Satpol PP
	2		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	68	68	100,00		ST	Satpol PP
	3		Indeks Resiko Bencana	%	109	99,41	91,20		ST	BPBD
	4		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	50	50,00		SR	BPBD
	5		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	50	50,00		SR	BPBD
	6		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	50	50,00		SR	BPBD
	7		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100	78	78,00		T	Dinas Damkar
	8		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,57	78	88,07		T	Dinas Damkar
1.06			Sosial							
	1		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	%	100	87,6	87,60		T	Dinsos/ Bappeda

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)							
	a Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00		ST	Dinsos
	b Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	96,3	96,30		ST	Dinsos
	c Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	100	100	100,00		ST	Dinsos
	d Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100,00		ST	Dinsos
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	50	50,00		SR	Dinsos
	a Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	50	50,00		SR	Dinsos
	b Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial	%	100	50	50,00		SR	Dinsos
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.07	Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	80,95	100,00		ST	Disnaker
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	58 (148 kasus)	73	125.86		ST	Disnaker
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,8	48,9	100,00		ST	DP3A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,011	0,01	90,91		T	DP3A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100,000 penduduk	Rasio	12,84	0	100,00		ST	DP3A

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	perempuan)							
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100,00		ST	DP3A
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,71	73,86	98,86		ST	DP3A
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	66,34	71,8	100,00		ST	DP3A
7	Rasio KDRT	%	0,023	0,01	100,00		ST	DP3A
8	Persentase LPM aktif	%	100	100	100,00		ST	DP3A
2.09	Pangan							
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	255,074	409	100,00		ST	D. Ketahanan Pangan
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3	3,4	86,67		T	D. Ketahanan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,1	91,8	100,00		ST	D. Ketahanan Pangan
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	82	95,45	100,00		ST	D. Ketahanan Pangan
2.10	Pertanahan							
1	Presentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58	88,89	100,00		ST	Distaru
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat,	%	60	100	100,00		ST	Distaru
2.11	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,18	56,84	84,61		T	DLH
a	Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,53	46,00	87,57		T	DLH
b	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	95,8	80,55	84,08		T	DLH
c	Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,7	31,63	55,78		R	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota							
a	Persentase pengurangan timbulan sampah	%	28	27,02	96,50		ST	DLH
b	Persentase penanganan timbulan sampah	%	71	72,10	100,00		ST	DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan POU LH yang	%	85,8	85,45	99,59		ST	DLH

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II					
	diterbitkan								
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
	1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	74	67,66	91,43		ST	Dispendukca pil
	2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,5	98,29	100,00		ST	Dispendukca pil
	3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	%	100	100	100,00		ST	Dispendukca pil
	4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100	100	100,00		ST	Dispendukca pil
	5	Perekaman KTP elektronik	%	99,5	98,51	99,01		ST	Dispendukca pil
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	1	Persentase LPM aktif	%	100	100	100,00		ST	DP3A
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2	1,74	87,00		T	Disdalduk KB
	2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,04	9,21	100,00		ST	Disdalduk KB
	3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,24	70,66	91,48		ST	Disdalduk KB
2.15	Perhubungan								
	1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	16.010. 382	10.067. 895	62,88		R	Dishub
	2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ru as rawan macet	2	1	50,00		SR	Dishub
	3	Kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah	1990	1129	56,73		R	Dishub
2.16	Komunikasi dan Informatika								
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,34	53,39	70.87%		S	Diskominfo
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No,14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif	%	77	77,17	100,00		ST	Diskop UM
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	14	17,25	100,00		ST	Diskop UM
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	55	44,37	80,67		T	Diskop UM
2.18	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	541	346	63,96		R	DPM PTSP
2	Persentase peningkatan investasi	%	7	3,95	56,43		R	DPM PTSP
3	Nilai investasi	Rp (dln juta)	27.362.089	14.128.827	51,64		R	DPM PTSP
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	51	10	19,61		SR	Dispora
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	0,30	31,58		SR	Dispora
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043	0,04	93,02		ST	Dispora
2.20	Statistik							

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab		
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II						
	1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100,00		ST	Diskominfo
	2		Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	50	50,00		SR	Diskominfo
2.21			Persandian							
	1		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	88,84	88,84		T	Diskominfo
	2		Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan cyber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	80	100	100,00		ST	Diskominfo
2.22			Kebudayaan							
	1		Terlestariannya Cagar Budaya	%	85,45	78,93	92,37		ST	Disbudpar
	2		Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	460	401	87,17		T	Disbudpar
	3		Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	578	100,00		ST	Disbudpar
	4		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	12	11	91,67		ST	Disbudpar
	5		Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	36,66	29,31	79,95		T	Disbudpar
2.23			Perpustakaan							
	1		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	48	69,17	100,00		ST	D. Arsip dan Perpustakaan
	2		Pengunjung perpustakaan per tahun	%	30	83,02	100,00		ST	D. Arsip dan Perpustakaan
	3		Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	60	70,78	100,00		ST	D. Arsip dan Perpustakaan
2.24			Kearsipan							
	1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –	%	80	80,76	100,00		ST	D. Arsip dan Perpustakaan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan							
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	59	59,8	100,00		ST	D. Arsip dan Perpustakaan
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	151.000	150.108	99,41		ST	D. Arsip dan Perpustakaan
3	Layanan Urusan Pilihan							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.075,02	3511,87	49,64		SR	Dinas Perikanan
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/thn	40,19	43,75	100,00		ST	Dinas Perikanan
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/Tahun	17,631	8.872,96	50,33		R	Dinas Perikanan
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/tahun	3,113,69	1.530,10	49,14		SR	Dinas Perikanan
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/tahun	3,961,33	1.981,77	50,03		R	Dinas Perikanan
3.26	Pariwisata							
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	6	6,57	100,00		ST	Disbudpar
2	Tingkat hunian akomodasi	%	44,88	58,58	100,00		ST	Disbudpar
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19	15,91	83,74		T	Disbudpar
3.27	Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	6,38	6,72	100,00		ST	D. Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	83,58	100,00		ST	D. Pertanian
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	147	177	100,00		ST	D. Pertanian
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	6	5	83,33		T	D. Pertanian

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab	
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II					
3.30			Perdagangan						
	1	%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	66	36	54,55		R	D. Perdagangan
	2	%	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	86	36,47	42,41		SR	D. Perdagangan
	3	%	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	69	34	49,28		SR	D. Perdagangan
	4	%	Persentase penanganan pengaduan konsumen	90	90	100,00		ST	D. Perdagangan
3.31			Perindustrian						
	1	%	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,5	0,27	54,00		R	D. Perindustria n
	2	%	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	50	50,00	 	SR	D. Perindustria n
	3	%	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	10	3,64	36,40		SR	D. Perindustria n
	4	Sentra	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	1	1	100,00	 	ST	D. Perindustria n
	5	%	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	12,50%	0	0,00		SR	D. Perindustria n
4			UNSUR PENDUKUNG						
4.01			SEKRETARIAT DAERAH						
	1	Nilai indeks	Indeks Reformasi Birokrasi	76	84,14	100,00		ST	Bagian Organisasi (Capaian 2023)
	2	Nilai indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,35	90,72	100,00		ST	Bagian Organisasi (Capaian

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
								2023)
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predika t	>76/BB	71,32	93,84	 	ST	Bagian Kerjasama dan Otda (Capaian 2023)
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,47/ST	3,53	100,00		ST	Bagian Kerjasama dan Otda (Capaian 2023)
4.02		SEKRETARIAT DPRD						
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00	50,00	50,00		SR	Sekretariat DPRD
5		UNSUR PENUNJANG						
5.01		Perencanaan						
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu,	Dokum en	2	2	100,00		ST	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu,	Dokum en	2	0	0,00		SR	Bappeda
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100,00	100,00	100,00		ST	Bappeda
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100,00	100,00	100,00		ST	Bappeda
5.02		Keuangan						
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	46,82	85,80		T	Bapenda
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,02	5,01	0,00		SR	BPKAD (Capaian 2023)
5.03		Kepegawaian						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,5	85,4	100,00		ST	BKPP (Capaian 2023)
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	258,36	395,50	100,00		ST	BKPP

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,98	16,81	80,12		T	BKPP
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	48,03	48,03		SR	BKPP
5.04	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	1,8	43,06		SR	BKPP
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	11,42	13,44		SR	BKPP
5.05	Penelitian dan Pengembangan							
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitimbangan	%	100	50	50,00		SR	Bappeda
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	41,18	64,71	100,00		ST	Bappeda
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	66	65,80	99,70		ST	Bappeda
6	UNSUR PENGAWAS							
6.01	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Indeks Penerapan Managemen Resiko	Indeks	3	2	66,67		S	Inspektorat (Capaian 2023)
2	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,06	3	98,04		ST	Inspektorat (Capaian 2023)
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP	100,00		ST	Inspektorat (Capaian 2023)
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3	100,00		ST	Inspektorat (Capaian 2023)
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan							
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	94,29	71,00	75,30		S	16 Kecamatan
2	Presentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	%	90,86	60,42	66.50		S	16 Kecamatan
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasiskan teknologi	%	93	88,40	95.05		ST	16 Kecamatan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	informasi (SPBE)							
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99	58,32	58.91		R	16 Kecamatan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik							
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,8	95,18	100,00		ST	Badan Kesbangpol (Capaian 2023)
2	Indeks Pembumihuan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74	83,63	100,00		ST	Badan Kesbangpol (Capaian 2023)
C	ASPEK DAYA SAING							
1	Kemampuan Ekonomi Daerah							
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	104,12	146,87	100,00		ST	Bappeda (Capaian 2023)
2	Nilai Ekspor	US\$	3.539.299. 867,06	290.524. 947,77	8.21		SR	Disperdag (mei 2024)
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur							
2.1	Aksesibilitas Daerah							
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,5876	0,88	100,00		ST	Dishub (Capaian 2023)
2.2	Penataan Wilayah							
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,35	44,82	98,83		ST	Distaru
2	Kesesuaian tata ruang	%	100	100	100,00		ST	Distaru
3	Fasilitasi Iklim Berinvestasi							
3.1	Ketentraman dan Ketertiban							
1	Angka Kriminalitas	kejadia n	1.251	719	100,00		ST	Satpol PP
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,9	5.32	100,00		ST	Satpol dan Kecamatan
3.2	Kemudahan Perijinan							
1	Prosedur ijin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perijinan dari semula 52 jenis)	%	95,5	96.43	100,00		ST	DPM PTSP
4	Sumber Daya Manusia							
4.1	Kualitas Tenaga Kerja							
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,15	69,42	98,96		ST	Disnaker (Capaian 2023)
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat	%	78	77,6	99,49		ST	Disnaker

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d. TW II (%)	Status	Kriteria	PD Koordinator/ PD Penanggung Jawab
			Target (Induk)	Realisasi s.d. TW II				
	kompetensi							
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk	%	41,03	41,12	100,00		ST	Disdukcapil

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Dari 217 Indikator Kinerja Daerah yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang, sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2024, terdapat 100 indikator (sebesar 46,08%) telah mencapai predikat kinerja Tercapai ( $X \geq 100\%$  dari target RKPD Tahun 2024), sebanyak 85 indikator (sebesar 39,17%) mempunyai predikat Akan Tercapai ( $100\% > X > 50\%$  dari target tahun 2024), dan sebanyak 32 Indikator (sebesar 14,75%) dalam kategori Perlu Upaya Keras ( $X \leq 50\%$  dari target 2024). Sedangkan, berdasarkan predikat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 139 (64,05%) indikator mendapat kriteria Sangat Tinggi (ST), 21 (9,68%) indikator berkriteria Tinggi (T), 7 (3,23%) indikator berkriteria Sedang (S), 18 (8,29%) indikator berkriteria Rendah (R), dan 32 (14,75%) indikator berkriteria Sangat Rendah (SR).

Terdapat penyesuaian perhitungan pada indikator persentase cadangan pangan masyarakat yang berlaku mulai tahun 2024. Sebelum tahun 2024, perhitungan berdasarkan Kementerian Pertanian dimana perhitungan didasarkan pada jumlah kebutuhan pangan. Sedangkan, mulai tahun 2024, perhitungan berdasarkan regulasi pada Badan Pangan Nasional dimana perhitungan didasarkan pada jumlah target cadangan pangan pemerintah daerah.

Penyesuaian perhitungan juga diterapkan pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) beserta komponennya. Penyesuaian perhitungan tersebut berdasarkan Surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023. Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut IKA-INA yang mengacu pada NSF-WQI (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*). Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu *Particulate Matter 2.5* mikron (PM 2.5). Rumus perhitungan IKL menjadi semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Berdasarkan rumus baru tersebut, konversi nilai IKLH Kota Semarang Tahun 2023 sebesar 64,55; nilai IKA Tahun 2023 sebesar 57,31; nilai IKU Tahun 2023 sebesar 82,23; dan nilai IKL Tahun 2023 sebesar 44,29.

Selain itu, perhitungan realisasi indikator rasio kepatuhan IMB kab/kota terdapat penyesuaian dimana sebelumnya segala jenis perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP seperti perizinan gedung, perizinan reklame dan lain-lain masuk dalam perhitungan. Perhitungan yang baru diberlakukan mulai tahun 2023, dimana mempertimbangkan jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya terhadap jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku sesuai SK Persetujuan Bangunan

Gedung yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Semarang dan rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Distaru Kota Semarang.

Adapun evaluasi dari indikator dengan predikat kinerja dengan status perlu upaya keras atau berkriteria Sangat Rendah dan hal lainnya yang memerlukan perhatian, sehingga pemenuhan target tahun 2024 bisa tercapai, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM); Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM); Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM); dan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan antara lain dari dampak perubahan iklim (elnino) sehingga menyebabkan menurunnya kesehatan masyarakat, preeklamsia pada ibu hamil, berat badan bayi lahir rendah, bayi lahir prematur sehingga beresiko menyebabkan kematian bayi maupun ibu, serta stunting pada anak. Perlunya optimalisasi pelayanan gizi dan penyuluhan kesehatan sebagai bentuk penanganan komprehensif balita stunting dan gizi buruk.
- b. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni); dan Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU. Hal ini disebabkan, kegiatan dilakukan pada triwulan III dan IV. Perlunya dilakukan percepatan kegiatan pemugaran atau perbaikan terhadap rumah tidak layak huni sehingga akan semakin mengurangi jumlah RTLH di Kota Semarang. Selain itu, melakukan percepatan dalam melengkapi PSU di perumahan.
- c. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM). Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemantauan situasi dan kondisi di tingkat kelurahan. Selain itu, masih banyak nya gangguan trantibum yang ada di Semarang, dengan kesimpulan belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Perlunya memaksimalkan kerjasama antar instansi terkait sampai ke tingkat wilayah melalui kegiatan formal dan nonformal untuk mencari memetakan dan mencari solusi permasalahan ketertiban yang merupakan hal klasik di perkotaan besar.
- d. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM); Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM); dan Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM). Hal ini disebabkan belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan layanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi kebencanaan. Perlunya percepatan dan optimalisasi kegiatan layanan kebencanaan pada triwulan III dan IV sehingga meminimalisir terjadinya bencana dan meminimalisir meningkatnya jumlah korban bencana baik korban jiwa maupun harta benda.
- e. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota; Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar; dan Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan sosial. Hal ini disebabkan belum optimalnya penggunaan aplikasi pengolah data pada pelayanan data dan pengaduan sehingga mengakibatkan kurang akuratnya data guna pembuatan pelaporan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Perlunya pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk pemenuhan pelayanan

terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Triwulan III dan IV Tahun 2024.

- f. Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet. Hal ini disebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi di jalan mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas. Perlunya pemasangan perlengkapan jalan dan rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.
- g. Peningkatan prestasi olahraga dan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Hal ini disebabkan Sarana dan Prasarana yang belum maksimal sehingga masih ada beberapa Cabang Olahraga yg harus mencari tempat Latihan guna Peningkatan SDM Atlet. Perlunya optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga secara berkala dan meningkatkan kesejahteraan atlet Kota Semarang.
- h. Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi. Hal ini disebabkan belum tersedianya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah; belum semua perangkat daerah melakukan integrasi data sektoralnya ke Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang, belum optimalnya kapasitas SDM masing-masing OPD terkait tugas dan fungsinya sebagai walidata pendukung dan produsen data statistik sektoral, serta belum optimalnya penyusunan metadata data statistik sektoral masing-masing OPD dan belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Perlunya menyusun landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Daerah, melakukan integrasi data melalui aplikasi yang tersedia atau yang dimiliki oleh produsen data / OPD dengan Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang, optimalisasi kapasitas SDM pengelola data melalui Bimbingan Teknis, serta pendampingan dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik.
- i. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota dan Produksi perikanan tangkap (ton). Hal ini disebabkan perubahan suhu ekstrem antara siang dan malam sehingga menyebabkan banyak kematian pada ikan sehingga hasil tangkapan ikan oleh nelayan menurun sehingga pendapatan nelayan juga menurun. Selain itu, banyak timbul penyakit ikan karena stres pada ikan. Perlunya memberikan himbauan untuk penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dengan menjaga kualitas air media budidaya serta penggunaan obat ikan dengan bijak dan pemberian bantuan alat tangkap untuk nelayan yang bisa mengakomodir seluruh nelayan yang ada di Kota Semarang.
- j. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dan Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi dan permintaan pasar membuat alat-alat ukur digital dari luar berkembang sangat pesat sehingga menggusur penggunaan alat-alat ukur produksi dalam negeri (timbangan mekanik) serta berkurangnya potensi UTTP (meter taksi) yang saat ini tergantikan dengan transaksi berdasarkan aplikasi (*online*). Selain itu belum ada dasar hukum untuk melakukan penjualan langsung barang kebutuhan pokok bersubsidi. Perlunya mendorong produsen alat ukur untuk dapat mengikuti perkembangan pasar serta berkoordinasi dengan Direktorat Metrologi terkait dengan penggunaan meter taksi online sebagai dasar pengenaan tarif. Selain itu dalam rangka pengendalian harga telah disusun aplikasi untuk melakukan pemantauan harga yang

dapat diakses oleh masyarakat secara mudah sehingga informasi tentang harga kebutuhan pokok dapat di informasikan secara *real time*, serta bekerja sama dengan OPD terkait dalam melakukan stabilisasi harga dan penetrasi pasar jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran.

- k. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan; dan Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan sampai dengan triwulan II kegiatan sudah pada tahap sosialisasi pembentukan sentra baru, proses kajian penguatan sentra industri yang berkelanjutan dan proses kajian sektor industri lalu kemudian akan ada penguatan sentra. Pembahasan sentra baru akan teralisasi pada triwulan III atau awal triwulan IV. Perlunya dilakukan percepatan proses penerbitan terhadap IUKI dan IPKI yang telah diajukan di data OSS. Penerbitan izin akan dilakukan di triwulan III dan IV sehingga akan segera dilakukan pemantauan dan pengawasan izin. Selain itu, perlunya dilakukan percepatan pemantauan terhadap IUI yang telah terbit. Izin yang terbit otomatis maupun yang terbit melalui vertek selama kurun waktu hingga triwulan II tahun 2024 yaitu sebanyak 1015 izin dan yang sudah dipantau sebanyak 37 izin.
- l. Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan; fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Hal ini disebabkan kurangnya kesiapan materi diskusi dari perangkat daerah dan adanya perubahan perundang-undangan dari tingkat pusat. Perlunya meningkatkan kuantitas dan kualitas pembahasan dengan melibatkan lebih banyak lagi narasumber setiap kali pembahasan dan lebih mengikuti perkembangan informasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat serta mengkoordinasikan penjadwalan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang sehingga penetapan Raperda sesuai dengan target yang ditetapkan.
- m. Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu. Hal ini disebabkan proses penyusunan RKPD Tahun 2025 masih dalam Rancangan Akhir sedangkan RKPD Perubahan Tahun 2024 dalam tahap Rancangan Awal. Perlunya dilakukan percepatan terhadap proses penyusunan Perkada Dokumen RKPD Tahun 2025 dan RKPD Perubahan Tahun 2024 yang akan ditetapkan pada triwulan III.
- n. Persentase SILPA terhadap APBD. Hal ini disebabkan mendapat sumbangan terbesar untuk SILPA berasal dari DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU, DIF, dan Bantuan Keuangan. Perlunya percepatan penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah pada Triwulan III dan IV.
- o. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; dan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Hal ini disebabkan dinamisnya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus menunggu petunjuk teknis untuk penyelenggaraan kegiatan yang mengakibatkan perubahan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berdampak pada pencapaian program dan kegiatan. Selain itu, lebih memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS yang harus segera

melaksanakan pelatihan dasar dalam kurun waktu maksimal 2 tahun setelah diangkat. Tahun 2022 dan 2023, sebanyak 3.323 orang telah menyelesaikan orientasi PPPK dan tahun 2023 sebanyak 633 orang yang melaksanakan diklat CPNS. Hal lain yang memengaruhi tidak tercapainya indikator tersebut yaitu diberlakukan urutan diklat struktural dari masa jabatan yang paling lama terlebih dahulu sehingga jumlah pejabat yang sudah melaksanakan diklat struktural berkurang setiap tahun karena pejabat tersebut telah memasuki usia pensiun. Perlunya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait aturan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap proses kegiatan yang ada di Pemerintah Kota Semarang serta dilakukan percepatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural di triwulan III dan IV.

- p. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Hal ini disebabkan belum optimalnya penyampaian informasi terkait hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi. Perlunya hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi yang dihasilkan dapat terinformasikan dan diimplementasikan melalui percepatan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pada Triwulan III dan IV sehingga bermanfaat dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang.
- q. Nilai Ekspor. Hal ini disebabkan belum optimalnya kegiatan promosi dan pameran dagang serta kurangnya kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang. Perlunya optimalisasi kegiatan promosi dan pameran dagang baik taraf nasional maupun internasional serta kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang yang produknya masuk dalam produk unggulan dengan metode *cost sharing* kerjasama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI).

### 2.3. Capaian Terhadap Indikator Kinerja Program

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan tidak terlepas dari pencapaian kinerja pada tingkat program dan pengaruh dari eksternal, baik akibat kebijakan pemerintah ditingkat atasnya, peran pembangunan yang berasal dari non pemerintah dan stakeholder pembangunan lainnya. Dan pada evaluasi on going terhadap 190 indikator program diluar program penunjang, sampai dengan triwulan II ini akan dibandingkan terhadap target tahun 2024, dan kemudian untuk memudahkan evaluasinya dilakukan pengelompokan pencapaian kinerjanya dalam tiga kategori, yaitu: "Tercapai" ( $X \geq 100\%$ ) dimaknai bahwa indikator tersebut telah mencapai target kinerja tahun 2024 meski baru pada triwulan II, "Akan Tercapai" ( $100 > X > 50\%$ ) dimaknai bahwa indikator kinerja tersebut diprediksi akan dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun, dan "Perlu Upaya Keras" ( $X \leq 50\%$ ) dimaknai indikator tersebut perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin menghambat pelaksanaannya, kemudian dilakukan percepatan pencapaian kinerja mendasarkan pada rencana tindak lanjut yang disusun. Selain itu berdasarkan kriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 pencapaian kinerja dikelompokkan menjadi lima kriteria, yaitu: "Sangat Tinggi" dengan capaian  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; "Tinggi" dengan capaian  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; "Sedang" dengan capaian  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; "Rendah" dengan capaian  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; serta "Sangat Rendah" dengan capaian  $50\% \geq X$ .

Berikut evaluasi atas pencapaian indikator program berdasarkan pada bidang urusan, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam tengah tahun kedua pada periode pembangunan tahun 2024.

### 2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.01. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dibidang Pendidikan, diantaranya pendampingan BOP/BOS sekolah swasta, beasiswa miskin, serta beasiswa miskin berprestasi mulai jenjang pendidikan SD/MI hingga jenjang perguruan tinggi. Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pendidikan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 URUSAN PENDIDIKAN									
1	Program Pengelolaan pendidikan	APK SD/MI	%	111,72	89,03	79,69		T	Dinas Pendidikan
		APK SMP/MTs	%	115,63	81,73	70,68		S	
		APK PAUD 5-6 tahun	%	86,14	124,20	100,00		ST	
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	Lembaga	10,00	5,00	50,00		SR	
2	Program pengembangan Kurikulum	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pendidikan
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	100,00	100,00		ST	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	89,82	91,36	100,00		ST	Dinas Pendidikan
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	%	100,00	92,51	92,51		ST	Dinas Pendidikan
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin	%	100,00	100,00	100,00		ST	

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024      : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 5 diantaranya telah tercapai, 3 akan tercapai, dan 1 indikator lainnya perlu upaya keras pada sisa triwulan yang ada yaitu jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 6 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 memiliki kriteria tinggi, 1 memiliki kriteria sedang, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah. Namun demikian agar pencapaian SPM bidang pendidikan tetap menjadi prioritas sebagai wujud komitmen Kepala Daerah, baik dari aspek pemenuhan penerima layanan maupun kualitas layanan sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2.3.1.02. Urusan Kesehatan

Percepatan penanggulangan stunting yang terintegrasi di Kota Semarang dilakukan diantaranya melalui: Pelangi Nusantara yang didalamnya terdapat kegiatan Wisata Edukasi Gizi, Duta Kesehatan, Kebun Gizi, Penyusunan dan Pembuatan Menu Balita dan Ibu Hamil. Selain itu untuk pelayanan kesehatan sesuai SPM, sampai dengan triwulan II terdapat layanan kesehatan TB dan HIV yang masih memerlukan perhatian, mengingat mobilitas pasien terduga, kesadaran memeriksakan diri dan penyimpangan seks yang makin menggejala. Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.4.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
pada Urusan Kesehatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN KESEHATAN								
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	%	100,00	60,07	60,07		R	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	%	100,00	96,29	96,29		ST	RSUD KRMT WONGSO NEGORO
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	%	100,00	10,00	10,00		SR	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Kesehatan
3	Program Sediaan	Persentase Fasilitas	%	97,00	36,84	37,98		SR	Dinas Kesehatan

	Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar							
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Kesehatan

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $X \geq 50\%$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, hal ini ditunjukkan dari 6 indikator keberhasilan terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 2 indikator kinerja dengan predikat akan tercapai, dan 2 indikator dengan predikat kinerja perlu upaya keras, yaitu indikator yang terkait dengan pengembangan sarana prasarana rumah sakit dan persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar. Hal ini disebabkan pembangunan sarpras rumah sakit masih dalam proses *ground breaking*. Pengembangan sarpras rumah sakit berupa pembangunan gedung rawat inap 12 lantai dan gedung unit layanan kanker terpadu.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 memiliki kriteria rendah, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.1.03. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sesuai Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 621 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan Fungsinya Sebagai Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan di Wilayah Kota Semarang, ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 839.901 meter. Dari total panjang jalan tersebut yang dalam keadaan mantap adalah sebesar 759,42 km atau sebesar 90,42% (keadaan baik sebesar 381,72 km dan keadaan sedang sebesar 377,70 km) sedangkan sisanya sebesar 9,58% dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat. Kondisi minor ini yang mestinya mendapatkan penanganan selanjutnya.

Disisi lain penanganan rob dan banjir menjadi tugas bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Pada tahun 2023 persentase wilayah yang mengalami banjir dan rob terhadap keseluruhan wilayah Kota Semarang sebesar 3,43%, yang meliputi jalan, permukiman, tambak, dan sawah.

Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum (99,62%) berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan,

Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan, diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi.

Terkait program nasional KOTAKU, mendasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/275/2021 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang terdapat sebesar 431,54 ha pada 45 kelurahan di 13 Kecamatan yang ditargetkan akan terselesaikan hingga tahun 2026. Target penanganan permukiman kumuh pada tahun 2024 sebesar 48% atau seluas 207,14 Ha dari luas seluruh permukiman kumuh sesuai SK. Dan sampai dengan triwulan II tahun 2024 luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani menjadi seluas 256,53 Ha atau sebesar 59,45% luas permukiman kumuh.

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.5.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	%	98,15	97,78	99,62		ST	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	%	55,75	99,62	100,00		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	%	100,00	45,00	45,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	%	92,69	99,04	100,00		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	66,00	65,20	98,79		ST	Dinas Pekerjaan Umum
5	Program Pengembangan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kot a yang ditangani	%	64,00	59,45	92,89		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Program Penataan	Persentase Tertatanya	%	100,00	75,00	75,00		S	Dinas Penataan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung							Ruang
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase reklame berizin	%	100,00	75,00	75,00		S	Dinas Penataan Ruang
		Pemanfaatan Hunian yang Tertata	%	100,00	45,00	45,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	%	74,90	74,60	99,60		ST	Dinas Pekerjaan Umum
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	%	100,00	75,00	75,00		S	Dinas Penataan Ruang
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	%	100,00	75,00	75,00		S	Dinas Penataan Ruang

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $X \geq 50\%$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan II tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari 12 indikator keberhasilan yang ada, 2 indikator telah dapat memenuhi target, 8 indikator dengan predikat akan tercapai pada akhir tahun 2024, dan 2 lainnya perlu upaya keras, yaitu rumah tangga yang terlayani SPAM dan pemanfaatan hunian tertata.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 12 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 6 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 4 memiliki kriteria sedang, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.1.04. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2023 sebesar 44,48%, kondisi ini masih sama sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan telah melampaui target tahun 2024 sebesar 44,36%. Selain itu kinerja pelayanan dasar di Bidang Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, sampai dengan triwulan II tahun 2024 diukur dari persentase rumah layak huni mencapai 98,85% dari total jumlah rumah keseluruhan. Dengan peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum, diharapkan kondisi perumahan di Kota Semarang akan semakin layak dan sehat sebagai hunian.

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.6.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	%	100,00	45,00	45,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah layak huni	%	99,42	98,85	99,43		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	%	100,00	45,00	45,00		SR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	44,36	44,48	100,00		ST	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024       : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan II tergolong kurang baik, hal ini ditunjukkan dari 4 indikator keberhasilan yang ada, 1 indikator telah dapat mencapai target tahunan, 1 indikator akan tercapai, dan 2 lainnya dengan predikat perlu upaya keras yaitu pada fasilitasi kebutuhan perumahan dan perumahan yang terfasilitasi PSU.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.1.05. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dari data tingkat waktu tanggap (*response time rate*/15 menit setelah pengaduan) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 sebesar 88,55%, sehingga masih terdapat gap sebesar 11,45% dari pelayanan yang diberikan yang belum memenuhi SOP. Dan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menurun menjadi sebesar 78,00% dari pelayanan yang diberikan, untuk itu perlu pelibatan stakeholder dan masyarakat dalam hal Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran untuk bersinergi mencapai pelayanan sesuai *response time* 15 menit.

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.7.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	10,00	5,00	50,00		SR	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	%	20,00	20,00	100,00		ST	BPBD
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pemadam Kebakaran
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100,00	1,00	1,00		SR	
		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	100,00	70,00	70,00		S	
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	%	100,00	0,00	0,00		SR	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
		Penyelamatan Non Kebakaran							
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100,00	78,00	78,00		T	

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan II tergolong cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dari 7 indikator keberhasilan yang ada, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dengan status tercapai, 2 indikator yang berstatus akan tercapai dan 3 indikator yang berstatus perlu upaya keras, yaitu indikator Persentase penurunan pelanggaran Perda, Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran; dan Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Hal ini disebabkan tidak ada kegiatan pemadaman yang melibatkan relawan karena relawan yang pindah dan/atau meninggal.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 7 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria sedang, dan 3 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.1.06. Urusan Sosial

Pembangunan pada urusan sosial ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2023 angka kemiskinan Kota Semarang menurut data BPS sebesar 4,23%. Disisi lain mendasarkan Inpres No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, data awal di Kota Semarang terdapat sebanyak 21.863 KK (102.394 individu) yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar pada 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Muktiharjo, Tandang, Tanjungmas, Bandarharjo, Kemijen, Rejosari, dan Muktiharjo Kidul. Dan setelah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi data, jumlah tersebut menurun menjadi sebanyak 518 KK (2.446 Individu), dan ditargetkan menjadi 0 pada tahun 2024 dengan melibatkan lintas sektor dan juga korporasi untuk mendapatkan CSR. Berdasarkan Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Republik Indonesia B-464/33/D-I/KPS.01.00/02/2024, jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Semarang tahun 2023 sebesar 0 jiwa sehingga tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0%.

Dengan terbitnya UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Karena isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, menyebabkan beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level, dan di Kota Semarang telah terlaksana program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya.

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.8.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Sosial

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	URUSAN SOSIAL								
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	89,00	44,50	63,08		R	Dinas Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	%	100,00	20,00	20,00		SR	Dinas Sosial
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	99,87	29,77	29,81		SR	Dinas Sosial
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	%	70,54	89,75	100,00		ST	Dinas Sosial
5	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Sosial

Keterangan:



: Tercapai X  100% Target Th. 2024

: Akan Tercapai, 100% >X> 50% Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras 50% ≥ X Target Th. 2024

ST : 100% ≥ X ≥ 91%; T : 90% ≥ X ≥ 76%; S: 75% ≥ X ≥ 66%; R : 65% ≥ X ≥ 51%; SR : 50% ≥ X

Pencapaian kinerja program pada urusan sosial sampai dengan triwulan II tergolong cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dari 5 indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilan, sampai dengan triwulan II terdapat 1 indikator yang telah mencapai target tahun 2024, terdapat 1 indikator akan dapat mencapai target, dan 3 indikator yang berstatus perlu upaya keras.

Beberapa permasalahan yang berpotensi mengganggu pencapaian kinerja pada urusan sosial diantaranya: belum mencukupinya SDM pekerja sosial profesional yang ada dibanding dengan PMKS terlantar penerima layanan rehabilitasi sosial, selain itu juga sarana dan prasarana Rumah Tampung Among Jiwo yang *overload* (over kapasitas) dalam menampung warga terlantar, serta belum memiliki posko tetap dukungan baik untuk kebencanaan alam maupun sosial.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan sosial sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria rendah, dan 3 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.2. Urusan Dasar Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.01. Urusan Tenaga Kerja

Sasaran utama pembangunan urusan tenaga kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan bermuara pada rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 (rilis terakhir oleh BPS) sebesar 5,99% atau sebesar 55.656 penganggur dari Angkatan kerja sebanyak 929.014 orang. Angka ini lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah (5,13%) maupun nasional (5,32%). Diduga kebutuhan tenaga kerja di Kota Semarang, kurang diminati oleh pencaker Kota Semarang sehingga justru diisi oleh tenaga kerja dari luar wilayah.

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.9.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Tenaga Kerja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	URUSAN DASAR BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR								
7	URUSAN TENAGA KERJA								
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70,00	80,95	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	78,00	77,60	99,49		ST	Dinas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,00	101,10	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5,50	89,07	100,00		ST	Dinas Tenaga Kerja

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan dari 4 indikator keberhasilan yang dijadikan ukuran, terdapat 3 indikator kinerja diantaranya dengan predikat tercapai, sedangkan sebanyak 1 indikator lainnya dengan predikat akan tercapai yaitu indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 4 indikator tersebut memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.2.02. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada tahun 2022 menandakan adanya peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan. Dan capaian rasio KDRT sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 0,01 dan angka ini belum final.

Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kategori tertinggi "Mentor atau Pratama". Selain itu pemerintah juga serius dalam memperhatikan kepentingan/kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum- forum anak yang terbentuk di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Semarang, juga mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak dengan kategori yang meningkat dari Kategori Nindya menjadi Kategori Utama di tahun 2023. Selain itu, Kota Semarang juga memperoleh Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) tahun 2023.

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.10.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	35,29	35,29		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Poin	12,84	10,86	84,58		T	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,01	0,01	100,00		ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100,00	33,33	33,33		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100,00	28,57	28,57		SR	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterangan:



: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan II tergolong cukup rendah, ditunjukkan dari 6 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, 1 indikator telah tercapai, 1 indikator mempunyai predikat akan tercapai pada akhir periode, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi, dan 4 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.2.03. Urusan Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Selain itu juga adanya komitmen & upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan dilokus daerah rentan rawan pangan yang semakin intens, seperti pelatihan olahan pangan dan pelatihan pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hidroponik. Sehingga diharapkan seluruh kelurahan di Semarang secara bertahap menuju kategori minimal cukup tahan pangan. Disisi lain juga semakin digalakkan peningkatan pemahaman pentingnya konsumsi pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman dan Kawasan Rumah Pangan Lestari untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, disamping pemantauan ketersediaan & keamanan pangan.

Inovasi pada penyelenggaraan urusan pangan dalam rangkaantisipasi inflasi dampak kenaikan bahan bakar di Kota Semarang diantaranya dengan melaksanakan pasar pangan murah dan aman melalui program Pak Rahman sebanyak 134 lokasi kegiatan dengan 599 tonase tersalurkan di tahun 2023 yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pangan seperti Bulog, Indoguna, BUMP, *Fresh Mart*, Pengusaha Sayur, UMKM Pangan Lokal. Jumlah lokasi program Pak Rahman hingga triwulan II tahun 2024 sebanyak 75 lokasi kegiatan dengan 327,98 tonase tersalurkan. Program ini bertujuan sebagai upaya mengndalikan inflasi, terutama bahan pokok pangan, mempermudah akses pangan murah, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dan model kolaborasi mengatasi persoalan pangan. Dan upaya ini secara efektif cukup mampu menahan inflasi dari sisi pemutusan rantai pemasokan penawaran barang pangan.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.11.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
9	URUSAN PANGAN								
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Ketahanan Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi	Ketersediaan Energi / Kapita	Kkal/Kapita	3.058,00	3.057,00	99,97		ST	Dinas Ketahanan Pangan
		Presentase	%	100,00	50,00	50,00		SR	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Distribusi							
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	%	100,00	50,00	50,00		SR	
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	3,00	3,40	86,67		T	Dinas Ketahanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	82,00	95,45	100,00		ST	Dinas Ketahanan Pangan

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024  
 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pangan sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 6 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 1 indikator kinerja telah tercapai, 2 indikator akan tercapai, dan 3 lainnya dalam predikat perlu upaya keras, yang pencapaian target kinerja dapat terpenuhi pada akhir triwulan IV sesuai dengan penjadwalan yang ada.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pangan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi, dan 3 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Salah satu wujud penyelenggaraan Urusan Pertanahan, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan program prioritas nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan, dimana target nasional pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan diharapkan sampai pada penerbitan sertifikat elektronik untuk menghindari pemalsuan dari oknum mafia tanah yang meresahkan. PTSL merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Pemerintah Kota Semarang telah bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam Integrasi Pemetaan, sehingga nantinya akan terbentuk basis data pertanahan yang *valid* dan *up to date* dalam

optimalisasi administrasi pertanahan maupun dalam penyusunan kebijakan.

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.12.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	URUSAN PERTANAHAN								
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	%	100.00	55,00	55,00		R	Dinas Penataan Ruang
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100.00	55,00	55,00		R	Dinas Penataan Ruang
3	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100.00	55,00	55,00		R	Dinas Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan Tanah Kosong	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	%	100.00	55,00	55,00		R	Dinas Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	terkelolanya izin membuka tanah	%	100.00	55,00	55,00		R	Dinas Penataan Ruang
6	Program Pernetagunaan Tanah	Terselesaikannya penatagunaan tanah	%	100.00	55,00	55,00		R	Dinas Penataan Ruang

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 6 indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, belum terdapat indikator yang telah mencapai target, terdapat sebanyak 6 indikator kinerja dengan predikat akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pertanahan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 6 indikator tersebut memiliki kriteria rendah.

### 2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah indeks kualitas lingkungan hidup, yang menjadi salah satu indikator tujuan pembangunan strategis Pemerintah Kota Semarang di dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahunnya, guna mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu kota dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan di Kota Semarang. Dan capaian pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan, berturut-turut sebesar 56,84 untuk IKLH, 46,00 untuk IKA, dan 80,55 untuk IKU. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder peduli lingkungan.

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2.13.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Lingkungan Hidup

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	62,00	76,28	100,00		ST	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	89,00	51,38	57,73		R	

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Hektar	30,00	34,12	100,00		ST	
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	%	2,00	22,10	100,00		ST	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Lingkungan Hidup
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	%	58,00	59,53	100,00		ST	Dinas Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	85,60	85,58	99,98		ST	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	100,00	50,00	50,00		SR	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	53,00	58,00	100,00		ST	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	%	12,00	17,28	100,00		ST	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Penanganan	Persentase jumlah	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Lingkungan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengaduan Lingkungan Hidup	pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti							Hidup
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	%	91,50	91,10	99,56		ST	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	28,00	27,02	96,50		ST	
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	%	71,00	72,01	100,00		ST	

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 16 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan, terdapat sebanyak 7 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 4 indikator akan tercapai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sedangkan, 5 indikator lainnya perlu upaya keras.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup diantaranya: Terbatasnya kewenangan kota sehingga perizinan limbah B3 belum memenuhi target capaian yang telah ditetapkan serta banyaknya pelaku usaha yang tergolong dalam kategori usaha kecil / menengah sehingga dalam kepengurusannya tidak perlu melalui pengurusan rincian teknis Limbah B3 melalui dinas terkait.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 16 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 10 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria rendah, dan 5 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP-el, maka capaian kepemilikan KTP-el pada tahun 2023 adalah 99,57% atau 1.250.011 orang, dari jumlah wajib KTP-el sejumlah 1.255.403 orang. Sedangkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 98,51%, sedangkan sebesar 1,49% lainnya adalah penduduk yang belum memiliki KTP-el yaitu penduduk yang melakukan mutasi, wajib KTP belum rekam termasuk wajib KTP-el pemula yang belum rekam data.

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.14.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP-el	%	99,50	98,51	99,01		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	74,00	67,66	91,43		ST	
2	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	97,50	98,29	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	100,00		ST	
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keterangan:



: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 6 indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan 3 indikator kinerjanya mempunyai predikat tercapai, 2 indikator akan tercapai pada akhir tahun 2024. Sedangkan, terdapat 1 indikator perlu upaya keras.

Persentase capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2023 yaitu sebesar 66,45% dengan jumlah kepemilikan KIA sebesar 275.077 jiwa dengan penduduk usia KIA sebesar 413.969 jiwa, meningkat pada triwulan II tahun 2024 menjadi sebesar 67,66%. Terdapat 32,34% belum ber KIA karena terjadi peningkatan jumlah anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya, disisi lain terdapat anak yang memiliki KIA yang sudah berusia diatas 17 tahun, sehingga sudah tidak diperhitungkan dalam kepemilikan KIA. Capaian kepemilikan KIA tersebut akan terus ditingkatkan dengan menerapkan pelayanan online adminduk yaitu Aplikasi SiD'nOK, melaksanakan pelayanan paket terintegrasi dengan penerbitan akta kelahiran sekaligus akan mendapatkan KIA dan Kartu Keluarga (KK) atau yang disebut Paket 3 in 1. Selain itu dilaksanakan pula kerjasama pemanfaatan KIA dengan 9 (sembilan) Mitra KIA yaitu Toko Buku Gramedia, Toko Buku Merbabu, Toko Buku Toha Putra, English First, Halmahera Music, Klub Merby, Jungle Toon Water Park, BRT Trans Semarang dan Club House Graha Wahid. Kerjasama ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan nilai manfaat bagi anak yang memiliki KIA, selain itu untuk menarik minat warga agar membuat KIA bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 5 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Kinerja pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak termasuk di dalamnya swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dapat dilihat kegiatan fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.15.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Program Administrasi Pemerintahan dan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00		ST	DP3A

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100,00	48,48	48,48		SR	DP3A

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan predikat kinerja tercapai dan 1 indikator mempunyai predikata perlu upaya keras, yaitu pada indikator pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 2 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pembangunan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari 3 indikator utama pada tahun 2023, yaitu: Cakupan PUS umur istri <20 th sebesar 0,31%; Cakupan PUS *unmet need* sebesar 8,42%, dan Cakupan peserta KB aktif sebesar 77,72%.

Dan jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, indikator Cakupan PUS umur istri <20 tahun mempunyai realisasi kinerja sebesar 0,31%; Cakupan PUS *unmet need* sebesar 9,21%, dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif sebesar 67,04%.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.16.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 th	%	0,50	0,31	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB))	Cakupan peserta KB Aktif)	%	77,24	70,66	91,48		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	%	11,00	6,15	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		PUS <i>Unmeet need</i>	%	8,04	9,12	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	%	60,22	71,32	100,00		ST	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 5 indikator yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan, 4 diantaranya mempunyai predikat tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, keseluruhannya memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi yang berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan. Indikator jumlah titik/ruas rawan macet yang pada tahun 2023 terdapat 3 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, dan Jl. Siliwangi) karena adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Ketiga ruas jalan dimaksud termasuk ke dalam kewenangan Provinsi dan Nasional sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk melakukan penanganan. Namun pada triwulan II tahun 2024,

titik kemacetan tertinggal pada 1 titik/ruas jalan yaitu Jalan Brigjend Katamso.

Kinerja lain yang berhasil direalisasikan atas pelayanan BRT adalah pengoperasian 9 koridor BRT dan 4 *feeder* sehingga seluruhnya berjumlah 13 trayek. Dalam hal pelayanan parkir tepi jalan umum, pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan penertiban terhadap keberadaan parkir *on street* yang mengganggu kelancaran lalu lintas serta mengoptimalkan potensi sektor perparkiran yang belum tertangani. Indikator Parkir *On the Street* baru mencapai 90,04%, disisi lain peningkatan ruas jalan yang digunakan untuk parkir *on the street* berdampak pada kemacetan arus lalu lintas dilokasi sekitar.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.17.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Perhubungan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
15	URUSAN PERHUBUNGAN								
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	65,51	69,17	100,00	●	ST	Dinas Perhubungan
		Persentase pengelolaan Parkir <i>On the Street</i>	%	90,00	90,04	100,00	●	ST	Dinas Perhubungan
		Jumlah trayek BRT	trayek	14,00	13,00	92,86	▶	ST	Dinas Perhubungan
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	%	35,00	16,25	100,00	●	ST	Dinas Perhubungan
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	rasio	6,87	5,51	80,20	▶	T	Dinas Perhubungan

Keterangan:

● : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024    ▶ : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

▼ : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator kinerja, terdapat 3 indikator dengan predikat tercapai dan 2 indikator dengan status akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perhubungan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 4 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi.

### 2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang untuk tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Terbangunnya fasilitas publik baru *Co-Working Space* di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; *Free Wifi* pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan telah berfungsinya Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Badan Publik; Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan hasil Pemerintah Kota Semarang sebagai Badan Publik Informatif; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi *Smart City* Kota Semarang.

Kinerja pengelolaan *e-Gov* salah satunya dapat ditunjukkan dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2023 capaian Indeks SPBE Kota Semarang sebesar 3,89 (Baik), dengan capaian masing-masing aspek diatas target. Aspek Domain Kebijakan SPBE sebesar 5,00 dengan indikator kebijakan internal tata kelola SPBE sebesar 5,00. Aspek Domain Tata Kelola SPBE sebesar 3,80 dengan indikator perencanaan strategis SPBE sebesar 3,50, teknologi informasi dan komunikasi sebesar 3,50, dan penyelenggaraan SPBE sebesar 5,00. Aspek Domain Manajemen SPBE sebesar 3,73 dengan indikator penerapan manajemen SPBE sebesar 3,25 dan audit TIK sebesar 5,00. Sedangkan Aspek Domain Layanan SPBE sebesar 3,69 dengan indikator layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebesar 3,70 dan layanan publik berbasis elektronik sebesar 3,67.

Keunggulan penerapan SPBE di Kota Semarang terlihat dari adanya kebijakan tata kelola melalui perwalo yang mengatur seluruh kebijakan SPBE dan telah mengamanatkan arah koordinasi secara menyeluruh baik secara internal lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah, dengan K/L/Pemda lainnya, serta antara Tim Koordinasi SPBE Internal dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah, yang diikuti dengan dasar kebijakan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang memuat unturnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan penerapan TIK yang terdokumentasi dengan baik, seperti penerapan pada Layanan Pusat Data dengan adanya SOP Layanan Hosting dan Penempatan Data, Jaringan Intra yang dapat diakses oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang memberikan layanan pemerintahan sesuai topologi yang disampaikan, dan Sistem Penghubung Layanan yang mengatur interoperabilitas berbagai layanan perizinan. Begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Adminstrasi Pemerintahan terlihat adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa melalui penerapan SIPD, dan pengadaan melalui aplikasi LPSE/SPSE sehingga secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara baik. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kota Semarang menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja.

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.18.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan	Indikator Kinerja	Satua	Tahun 2024	Tingkat	Status	Kriteria	Perangkat
---------------	-------------------	-------	------------	---------	--------	----------	-----------

No.	Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Program (Outcome)	n	Target (Induk)	Realisasi s.d TW II	Capaian s.d TW II (%)			Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
16	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	%	100,00	70,00	70,00		S	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya pengelolaan <i>E-Government</i>	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Komunikasi, Infomasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status telah tercapai dan 1 indikator dengan status akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 2 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 1 lainnya memiliki kriteria sedang.

### 2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada triwulan II tahun 2024, kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah berhasil mencapai persentase koperasi sehat sebesar 25,60% pada triwulan II tahun 2024. Kondisi ini kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.19.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan	%	3,00	3,00	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam							
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	50,00	47,55	95,10		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase koperasi sehat	%	32,00	28,40	88,75		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	10,00	41,30	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	%	1,00	0,89	89,00		ST	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	%	27,00	30,26	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	%	3,00	3,14	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Program Pengembangan UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkatkan omsetnya	%	20,00	40,82	100,00		ST	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 3 indikator memiliki predikat akan tercapai.

Namun demikian, seluruh kriteria pencapaian kinerja program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan II yang ditunjukkan dari 8 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, semuanya memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II antara lain sebagai berikut:

Nilai investasi sebesar Rp. 11.330.349 juta atau sebesar 41,41% dari target sebesar Rp 27.362.089 juta dengan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebanyak 250 investor atau 68,39% dari target 541 investor. Sedangkan dari jumlah PMA sebanyak 56 perusahaan dan 194 PMDN.

Untuk menunjang pelayanan publik terkait perijinan, pada tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Semarang sebagaimana Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Implementasi Program Gerakan Indonesia Melayani. Selain itu juga telah terbit Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan berusaha dan non berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai upaya penambahan wewenang penerbitan perijinan di DPMPSTSP Kota Semarang untuk menyesuaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya masih perlunya penyempurnaan dan sosialisasi aplikasi OSS RBA yang perlu diawali dengan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

Kinerja penyelenggaraan pada urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.20.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Penanaman Modal

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	URUSAN PENANAMAN MODAL								
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	Penanam Modal	3.700	2.270	61,35		R	Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	541	346	63,96		R	Penanaman Modal dan PTSP
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Ijin Terbit sesuai SP	%	95,50	96,43	100,00		ST	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	2,00	2,00	100,00		ST	Penanaman Modal dan PTSP
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	%	97,00	97,00	100,00		ST	Penanaman Modal dan PTSP

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan penanaman modal sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 5 indikator sebagai ukuran keberhasilan, 3 indikator kinerja dengan predikat tercapai dan 2 indikator dengan predikat akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan penanaman modal sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 2 diantaranya memiliki kriteria rendah.

### 2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk meningkatkan kinerja dibidang kepemudaan dan keolahragaan dilakukan beberapa upaya, diantaranya kemitraan dunia usaha, Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*), Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.21.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Jumlah	40,00	30,00	75,00		S	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet prestasi	Jumlah	1.212,00	1.212,00	100,00		ST	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	Lapangan	5,00	5,00	100,00		ST	
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	Kegiatan	50,00	25,00	50,00		SR	Dinas Pemuda dan Olahraga

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan II tergolong cukup baik, ditunjukkan dari 4 indikator sebagai ukuran keberhasilan, 2 diantaranya telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang. Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Semarang secara berkala, pembentukan kelompok wirausaha muda di masing-masing kecamatan, peningkatan kesejahteraan atlet, dan mengaktifkan kembali ruang-ruang di Manunggal Jati guna kegiatan organisasi kepemudaan.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kepemudaan dan olahraga sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria sedang, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.2.14. Urusan Statistika

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada Urusan Statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan tersebut menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II, penyelenggaraan urusan Statistik dapat mewujudkan ketersediaan data statistik sektoral sebesar 100%.

Dasar pelaksanaan pengembangan Portal Satu Data Tingkat Kota Semarang dan Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Kota Semarang adalah Peraturan Walikota No.25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.22.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Statistik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	URUSAN STATISTIK								
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Statistik sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja telah mencapai target tahunannya. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena upaya yang telah dilakukan yaitu Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis & Diseminasi Data Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Membangun Metadata Statistik Sektoral, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Pengembangan Infrastruktur, dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan statistik sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan dan memiliki kriteria sangat tinggi.

#### 2.3.2.15. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi, serta *software* yang terpasang pada server agar melindungi data dan informasi pemerintahan dari gangguan eksternal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Persandian, khususnya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan: Kegiatan Launching Semarangkota CSIRT dan Terbentuknya Tim CISRT Tingkat Kota Semarang, Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Data Center Kota Semarang. Telah dilakukan Pelatihan Internal Audit ISO 27001:2013 tanggal 13 Maret 2024 dan Audit Eksternal ISO 27001:2022 Tahun 2024, 25-27 Maret 2024.

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.23.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Persandian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	URUSAN PERSANDIAN								
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan persandian sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 indikator kinerja dengan status tercapai yaitu indikator terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah. Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kota Semarang berbasis elektronik dan non elektronik dengan kegiatan *penetration testing* aplikasi-aplikasi pada perangkat daerah serta melakukan kegiatan sosialisasi keamanan informasi.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan persandian sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan dan memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang menampilkan. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kearifan budaya melalui pelestarian warisan budaya dan kesenian lokal dengan sasaran meningkatkan pelestarian warisan budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.24.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Kebudayaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	URUSAN KEBUDAYAAN								

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	%	25,00	22,64	90,56		T	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	%	25,00	16,03	64,12		R	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Warisan Budaya	%	85,45	78,93	92,37		ST	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator, dan ke 3 indikator tersebut akan tercapai pada akhir periode.

Apresiasi kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya terhadap pengembangan seni budaya tradisional merupakan kegiatan untuk meningkatkan hasil karya dari pelaku seni budaya yang bergabung dalam kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya dengan menampilkan seni budaya tradisi dan ekonomi kreatif. Kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya ini mengapresiasi kesenian lokal hasil karyanya dengan dilakukan pendampingan pembinaan, workshop, pelatihan, perlombaan dan tampil di event pertunjukkan untuk meningkatkan semangat berkeaktifitas dari kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya. Selain itu, pelaku seni budaya yang bergabung pada kelompok/sanggar seni budaya dan komunitas seni budaya berkolaborasi mengapresiasi karya seni budaya untuk meningkatkan kearifan seni budaya lokal. Selain itu juga terdapat Pelestarian Warisan Budaya.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kebudayaan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi, dan 1 lainnya memiliki kriteria rendah.

### 2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Kinerja pada urusan perpustakaan dapat ditunjukkan oleh Nilai Tingkat Gemar Membaca Kota Semarang yakni di angka 69,17%. Adapun angka tersebut masuk dalam kategori Tinggi dengan interval sebagai berikut: 0-20 (Sangat rendah); 20,01-40 (Rendah); 40,01-60 (Sedang); 60,01-80 (Tinggi); 80,01-100 (Sangat Tinggi). Indikator selanjutnya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Semarang tahun 2023 sebesar 70,78. Terdapat tujuh unsur pembangunan Literasi Masyarakat yakni Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi,

Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat, Jumlah Perpustakaan Sesuai Standar, Keterlibatan Masyarakat, dan Anggota Perpustakaan. Dan indikator lainnya rasio Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota di mana jumlah minimal Pustakawan adalah 1 dibanding 75.000 penduduk. Hal ini bertujuan untuk mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Untuk mendukung Indikator tersebut didukung oleh program strategis. Adapun kinerja indikator program dalam penyelenggaraan Urusan Perpustakaan sebagai berikut:

Tabel 2.25.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Perpustakaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	URUSAN PERPUSTAKAAN								
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1,00	0,93	93,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan perpustakaan sampai dengan triwulan II tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 indikator kinerja, masih terdapat satu indikator yang akan tercapai yaitu: Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk baru mencapai 93,00% dari yang ditargetkan. Dan kinerja ini baru akan meningkat jika pada tahun 2024 terdapat penambahan tenaga perpustakaan yang bersertifikasi.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perpustakaan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 2 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 2 nya memiliki kriteria sangat tinggi.

#### 2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Untuk menunjang *e-government* di bidang pengelolaan arsip daerah, indikator keberhasilan yang ingin diwujudkan adalah Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban daerah; Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat; dan Arsip yang terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi. Tentunya pelibatan teknologi informasi

atau digitalisasi arsip mutlak diperlukan dalam pembangunan di bidang kearsipan.

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.26.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Kearsipan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	URUSAN KEARSIPAN								
1	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip musnah	%	100,00	100,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	70,00	92,00	100,00		ST	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024     : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukuran keberhasilan, semuanya mempunyai predikat tercapai. Kota Semarang terus berupaya untuk menjaga sejarah yang ada di sekitar Pemerintah Kota Semarang untuk dipelajari dan diajarkan kepada orang-orang di dalam dan di luar Pemerintah Kota Semarang serta menjaga dan menyelamatkan dokumen penting.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 3 nya memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.3. Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja peningkatan konsumsi ikan per kapita dimana realisasinya di tahun 2022 mencapai 40,25 kg/kapita/th dari target sebesar 40,18 kg/kapita/th meningkat di tahun 2023 yang mencapai 43,75 kg/kapita/th dari target sebesar 40,18 kg/kapita/tahun sedangkan data sampai dengan kondisi

triwulan II tahun 2024 belum dapat dilakukan karena penghitungannya dilakukan setiap akhir periode.

Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal serta belum memiliki TPI yang representatif, sehingga nelayan hanya sedikit yang melalihkan ikan di TPI.

Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.27.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II	URUSAN PILIHAN								
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	3.113,69	1.530,10	49,14		SR	Dinas Perikanan
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	3.961,33	1.981,77	50,03		R	Dinas Perikanan
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	kasus	3,00	0,00	100,00		ST	Dinas Perikanan
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi ikan olahan	ton	17.631,86	8.872,96	50,32		R	Dinas Perikanan
		Angka konsumsi ikan per kapita	Kg/kapita/tahun	40,19	43,75	100,00		ST	Dinas Perikanan

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 indikator 2 diantaranya dalam kategori tercapai, dan masih terdapat 2 indikator yang akan tercapai, dan 1

indikator lainnya perlu upaya keras yaitu pada indikator produksi perikanan tangkap. Hingga triwulan II tahun 2024 tidak ditemukan kasus pelanggaran peraturan perikanan. Hal ini ditunjang dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mentaati peraturan yang berlaku demi menjaga ekosistem alam terutama laut.

Produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya perlu ditingkatkan di triwulan III dan IV dengan optimalisasi penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap, pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan kelautan dan perikanan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 5 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 2 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 2 diantaranya memiliki kriteria rendah, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata dilakukan untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata sebagai produk unggulan daerah melalui gerakan atau berkampanye “Ayo Wisata ke Semarang” dengan mengajak masyarakat untuk datang ke Kota Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata mancanegara dan kunjungan wisata nusantara Kota Semarang melalui penguatan promosi pariwisata, peningkatan pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan industri pariwisata serta pemberdayaan masyarakat kepariwisataan.

Kinerja pelayanan Urusan Kepariwisata pada tahun 2023 secara umum mulai meningkat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan Persentase Kenaikan Kunjungan wisata di tahun 2023 sebesar 21,52% meningkat dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di tahun 2023 masing-masing 6.478.883 orang dan 13.992 orang, meningkat dari tahun 2022 dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara 5.338.233 orang dan mancanegara 4.198 orang. Sumbangan paling tinggi dirasakan pada jumlah wisatawan domestik, meskipun wisatawan mancanegarapun juga mengalami kenaikan.

Untuk meningkatkan sektor pariwisata diperlukan upaya pengembangan pasar melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu *instagram*, *youtube*, *twitter* dan *facebook* dan pemasaran *offline* ke luar negeri; perintisan kampung tematik sebagai daya tarik wisata; pemaketan atraksi seni budaya dalam paket kunjungan wisata; peningkatan tata kelola melalui pelatihan dan kunjungan lapangan; serta peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam menyangga keberadaan daya tarik wisata di wilayahnya.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.28.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pariwisata

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024	Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
----	--	-------------------------------------	--------	------------	-------------------------------	--------	----------	-----------------------------------

	Pembangunan			Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PARIWISATA								
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	100,00	50,00	50,00	▼	SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	%	100,00	50,00	50,00	▼	SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata	%	80,00	36,39	45,49	▼	SR	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Keterangan:



: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong kurang baik. Dari sebanyak 3 indikator, terdapat 3 yang mempunyai predikat perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 3 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, dan ke 3 nya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.3.3. Urusan Pertanian

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian pangan utama (padi dan jagung) mencapai 6,91 ton/ha/tahun yang telah melampaui target sebesar 6,80 ton/ha/tahun. Selain itu jumlah sentra produk unggulan pertanian terealisasi 5 kawasan, yaitu Agro Cepoko, Agro Plalangan, Agro Purwosari, Agro Wates, dan Agro Gunungpati dimana masing-masing agro memiliki tanaman utama (unggulan) disamping komoditas lainnya seperti jambu kristal, durian, sayuran, kelengkeng, dan empon-empon.

Di bidang peternakan kinerja hingga triwulan II tahun 2023 produksi hasil peternakan berhasil mencapai 17.106,50 ton yang mengindikasikan membaiknya kondisi perekonomian dimana permintaan daging meningkat sehingga mendorong peningkatan pemotongan sapi, ayam, maupun babi. Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular pada triwulan II tahun 2024 menunjukkan hal yang baik yaitu berhasil mengalami penurunan sebesar 93,53%.

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.29.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pertanian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	URUSAN PERTANIAN								
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi hasil peternakan	Ton	36.219,00	21.333,10	58,90		R	Dinas Pertanian
		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ton	50.857,23	22.305,76	43,86		SR	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton	6,80	6,72	98,82		ST	Dinas Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5,00	-83,58	100,00		ST	Dinas Pertanian
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	90,00	100,00	100,00		ST	Dinas Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	Kelompok	31,00	29,00	93,55		ST	Dinas Pertanian

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024    : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong cukup baik. Dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, sebanyak 2 indikator mempunyai predikat tercapai, 3 indikator lainnya akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, yaitu jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Hal ini disebabkan adanya serangan hama karena pergantian musim. Selain itu, permasalahan secara umum yang dihadapi diantaranya terkait ketersediaan prasarana pertanian yang masih kurang, serta banyak prasarana yang ada kondisinya memerlukan perbaikan/rehabilitasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian yang masih terus terjadi menyebabkan keterbatasan lahan untuk produksi sehingga produksi tanaman pangan menurun dari tahun ke tahun. Rantai pemasaran produk pertanian

perkotaan belum terbentuk sehingga produksi dari kelompok-kelompok tani perkotaan juga belum dapat dipasarkan dengan optimal.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan pertanian sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 4 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 diantaranya memiliki kriteria rendah, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada Sektor Perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Pada tahun 2023 Nilai Ekspor Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi sebesar US\$ 2.130.728.978 dari tahun 2022 yang sebesar US\$ 1.334.629.083. Hal ini ditunjang dengan semakin sering dilakukannya kegiatan promosi dan pameran dagang baik taraf nasional maupun internasional serta dilaksanakannya kegiatan pelatihan ekspor bagi pelaku usaha UMKM di Kota Semarang yang produknya masuk dalam produk unggulan dengan metode cost sharing kerjasama dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI).

Pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II kinerja yang dicapai adalah berhasil memenuhi target persentase alat UTTP bertera, dari yang ditargetkan sebesar 81,00% terealisasi 36,47%, atau tingkat capaian terhadap target sebesar 45,02% mengingat baru terlaksana pada separuh periode. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai, antara lain karena kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui pengawasan kemetrolgian dan pelayanan tera serta tera ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal.

Kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.30.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Perdagangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	URUSAN PERDAGANGAN								
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	%	100,00	50,00	50,00		SR	Dinas Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	pasar	22,00	18,00	81,82		T	Dinas Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3,99	15,84	100,00		ST	Dinas Perdagangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Barang Penting								
4	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor non migas	US\$	1.615.736.908,00	554.987.916,38	34,35	▼	SR	Dinas Perdagangan
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,00	36,47	45,02	▼	SR	Dinas Perdagangan
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	%	30,00	10,00	33,33	▼	SR	Dinas Perdagangan

Keterangan:

● : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong cukup rendah. Dari 6 indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, 1 indikator mempunyai predikat tercapai, 1 indikator lainnya akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras, yaitu Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu; Nilai ekspor non migas; Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan (UTTP) bertandatera sah yang berlaku; dan Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 memiliki kriteria tinggi, dan 4 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Pembangunan Urusan Industri diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang mendorong para pelaku IKM untuk registrasi di SIINas agar terpantau kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh, tersedianya data industri yang memadai sehingga menghasilkan kebijakan industri yang tepat. Selain itu juga terjadi Pertambahan jumlah sentra IKM dari yang ditargetkan 84% (target 2022: 21

sentra IKM dari total target 25 sentra) tercapai 84% atau berhasil tercapai 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya (Tahun 2021 20 sentra) sebesar 80% (20 sentra IKM).

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.31.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Perindustrian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	URUSAN PERINDUSTRIAN								
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	%	88,00	0,00	0,00		SR	Dinas Perindustrian
		Persentase Pertambahan IKM	%	0,50	0,27	54,00		R	Dinas Perindustrian
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	%	4,00	1,35	33,75		SR	Dinas Perindustrian
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Data Informasi Industri	%	0,50	0,45	90,00		T	Dinas Perindustrian

Keterangan:

-  : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024
-  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024
-  : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong cukup rendah. Dari 4 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 2 indikator dengan predikat akan tercapai, dan 2 indikator yang perlu upaya keras, yaitu persentase pertambahan jumlah sentra IKM dan persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif. Hal tersebut disebabkan tahapan proses pembentukan sentra baru belum selesai. Sampai dengan triwulan II kegiatan sudah pada tahap sosialisasi pembentukan sentra baru, proses kajian penguatan sentra industri yang berkelanjutan dan proses kajian sektor industri lalu kemudian akan ada penguatan sentra. Pembahasan sentra baru akan teralisasi pada triwulan III atau awal triwulan IV.

Kriteria pencapaian kinerja program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 6 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria tinggi, 1 memiliki kriteria rendah, dan 2 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.4 Unsur Pendukung

#### 2.3.4.01. Sekretariat Daerah

Kinerja Unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai fungsi koordinatif Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah diantaranya dapat ditunjukkan dengan penghargaan dan prestasi yang diterima Kota Semarang selama tahun 2023, diantaranya, Predikat BB (Sangat Baik) SAKIP dengan nilai 71,32; Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada segala tema tahun 2023 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi; Peringkat Kelima Indeks Kota Toleran (IKT) 2023 dengan skor 6,230 Setara Institute, Penghargaan Indeks Kota Toleran 2023; Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan score 3,5254 dan Status Kinerja Tinggi, Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2023; Penghargaan Program Ekonomi Terpuji dengan Kategori Program Pengendalian Inflasi; Piagam Penghargaan Nomor M.HH-03.HA.02.01.01 TAHUN 2023 yang diberikan kepada Kota Semarang yang telah Mendapatkan Predikat Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dengan nilai 100 dalam Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 Tahun 2023; Dari hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH, untuk Pengelola JDIH Bagian Hukum Setda Kota Semarang mendapat peringkat ke-23 dari 90 JDIH Pemerintah Kota se-Indonesia; TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Dinas Kesehatan (Pangeran Diponegoro); Penghargaan Perempuan Berpengaruh kategori kategori Influential In Female Leadership diberikan Dream.Co.Id; Apresiasi Tokoh Indonesia Tempo, bidang Pariwisata Berkarakter diberikan Tempo di Jakarta; Penghargaan Kategori Excellent Award for Strategic Initiative Program Pengentasan Stunting diberikan I-News di Jakarta; Penghargaan Sebagai Daerah Peduli Penanganan Stunting dan Layak Anak diserahkan oleh Menteri PPPA saat HUT Kompas TV ke – 12; Penghargaan People of The Year 2023 untuk kategori penanganan stunting diserahkan oleh Menteri PAN – RB saat HUT Metro TV di Grand Studio Metro TV; dan masih banyak lainnya.

Meskipun demikian dalam evaluasi ini dapat disampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas Unsur Pendukung antara lain adalah belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, terlihat dari 100% yang ditargetkan terealisasi hanya 40%.

Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.32.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III	UNSUR PENDUKUNG								
1	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	OPD	43,00	52,00	100,00		ST	Bagian Organisasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kabupaten/Kota	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	%	100,00	50,00	50,00		SR	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Pelayanan Publik	%	123,00	110,21	89,60		T	Bagian Organisasi
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	Kegiatan	9,00	7,00	77,78		T	Bagian Kesra
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	%	60,00	60,00	100,00		ST	Bagian Otda dan Kerjasama
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	%	100,00	50,00	50,00		SR	Bagian Tapem
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	Dokumen	1,00	1,00	100,00		ST	Bagian Administrasi Pemb
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	%	100,00	50,00	50,00		SR	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	%	100,00	50,00	50,00		SR	Bagian Perekonomian dan SDA

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong kurang baik, hal ini terlihat dari sebanyak 9 indikator yang menjadi ukuran, terdapat 3 indikator mempunyai predikat tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 4 indikator perlu upaya keras.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 9 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 3 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 2 memiliki kriteria tinggi, dan 4 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.4.02. Sekretariat DPRD

Fungsi pembentukan Sekretariat DPRD diantaranya untuk memfasilitasi kebutuhan para Anggota DPRD baik secara administrasi maupun keuangan, fasilitas kesehatan dan kebutuhan persidangan untuk meningkatkan produktivitas kinerja Anggota DPRD dalam menciptakan produk-produk hukum bagi Kota Semarang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Anggota DPRD Kota Semarang menjalankan 3 (tiga) fungsi yang harus dilaksanakan dalam menunjang program Pemerintah Daerah. Tiga fungsi yang diemban oleh Anggota DPRD adalah:

##### I. Fungsi Pembentukan Perda

Menjalankan fungsi pembentukan Perda, bertugas menciptakan produk-produk hukum yang akan dijadikan pedoman semua peraturan yang berlaku di Kota Semarang. Produk hukum yang dihasilkan berasal dari usulan Pemerintah Kota Semarang atau berasal dari inisiatif para Anggota DPRD sendiri. Produk hukum akan sangat berarti bila menyentuh kalangan masyarakat luas karena kepentingan masyarakat akan terpenuhi dan terlindungi hak-haknya.

##### II. Fungsi Anggaran

Para Anggota DPRD mempunyai hak juga untuk mengajukan anggaran, biaya yang akan digunakan sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan tugasnya. Dalam membuat produk hukum diperlukan rapat-rapat, kajian luar daerah, konsultasi dengan Pemerintah Pusat, dan lain-lain. Anggaran biaya untuk para Anggota Dewan diusulkan oleh Sekretariat DPRD dan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang.

##### III. Fungsi Pengawasan

Merupakan salah satu fungsi dalam mengawasi pelaksanaan jalannya roda pemerintahan. Pengawasan akan membuat jalannya roda pemerintahan berada pada jalur yang benar dan aman dari permasalahan hukum, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan sehat. Pengawasan yang dilakukan oleh para Anggota DPRD berfungsi memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan menentukan arah dan kebijakan.

Kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.33.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2024	Tingkat Capaian	Status	Kriteria	Perangkat Daerah
-----	--------------------------------	---------------------------	--------	------------	-----------------	--------	----------	------------------

	Program Prioritas Pembangunan	(Outcome)		Target (Induk)	Realisasi s.d TW II	s.d TW II (%)			Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	SEKRETARIAT DPRD								
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	Raperda	17,00	0,00	0,00		SR	Sekretariat DPRD

Keterangan:



: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Sampai dengan triwulan II belum ada raperda yang disetujui DPRD. Akan tetapi sampai dengan triwulan II sudah berproses 16 raperda yang antara lain:

1. Raperda tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tradisional masih menunggu Surat Wali Kota;
2. Raperda tentang Pengelolaan Makam masih menunggu Surat Wali Kota;
3. Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik masih menunggu Surat Wali Kota;
4. Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dalam proses pembahasan akan dilaksanakan berdasarkan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri;
5. Raperda tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 dalam proses pembahasan akan dilaksanakan berdasarkan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri;
6. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dalam proses pembahasan akan dilaksanakan berdasarkan waktu yang ditetapkan dalam Permendagri;
7. Raperda tentang Perizinan dan Non Perizinan masih dalam pembahasan Pansus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD No. 172.1/10 Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023;
8. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih dalam pembahasan Pansus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD No. 172.1/19 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023;
9. Raperda tentang Kearsipan masih dalam pembahasan Pansus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD No. 172.1/19 Tahun 2023 tanggal 16 November 2023;
10. Raperda tentang Penyelenggaraan Pembudayaan Pertanian Perkotaan masih menunggu Surat Wali Kota;
11. Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan masih dalam proses pembahasan Pansus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD No. 172.1/3 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2023;
12. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih menunggu Surat Wali Kota;
13. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang masih menunggu Surat Wali Kota;
14. Raperda tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia masih dalam proses pembahasan Pansus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD No. 172.1/3 Tahun 2024 tanggal Mei 2023;

15. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota masih menunggu Surat Wali Kota;
16. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 masih menunggu surat Wali Kota.

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong sangat rendah dikarenakan 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan mempunyai predikat kinerja perlu upaya keras, yaitu indikator Jumlah Raperda yang disetujui DPRD yang belum ada raperda yang disetujui DPRD dari target 16 raperda (atau sebesar 0,00%). Jadwal pembahasan, kelengkapan berkas dan kesiapan OPD pengusul raperda sangat menentukan kelancaran dalam pembahasan raperda. Selanjutnya, kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Pendukung Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang masih memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.5. Unsur Penunjang

#### 2.3.5.01. Perencanaan

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang perencanaan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja utama yang harus dipenuhi.

Kinerja di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah ditandai dengan kembali memperoleh Penghargaan sebagai Kota Terbaik I Pemenang GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Award Bagi Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5/KEP.DALDUK/D2/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik dalam Grand Desing Pembangunan Kependudukan Award Tahun 2024.

Kinerja penyelenggaraan dalam unsur penunjang perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.34.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
pada Unsur Penunjang Perencanaan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PERENCANAAN								
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	%	100,00	99,83	99,83		ST	Bappeda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00	98,25	98,25		ST	Bappeda
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100,00	97,14	97,14		ST	Bappeda
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00	99,68	99,68		ST	Bappeda

Keterangan:

: Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja RKPD pada Unsur Perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong baik. Hal ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran semuanya berstatus akan tercapai di atas 97%. Selanjutnya, kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Perencanaan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang sudah memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.5.02. Keuangan

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah) pada tahun 2023 sebesar 43,58% menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 52,03%. Hal ini disebabkan realisasi dari pajak daerah karena SPPT disebar pada bulan Maret 2024 sehingga wajib pajak belum semua memperoleh SPPT PBB. Selain itu, event di awal tahun 2024 belum banyak sehingga pendapatan dari hotel dan hiburan belum optimal. Adanya regulasi baru yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menyebabkan para wajib pajak masih menyesuaikan dengan aturan yang terbaru. Kinerja lain terkait SILPA APBD TA 2023 mencapai 5,01% terhadap APBD TA 2023 atau sebesar Rp 288.372.856.863,00 mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 6,02% atau sebesar Rp 319.157.987.567,00. SILPA APBD Kota Semarang pada tahun 2023, dimana sumbangan terbesar berasal dari Rp 149.390.980.645,00 yang terdiri dari DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU, DIF, dan Bantuan Keuangan.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Fungsi Keuangan pada tahun 2023 adalah dinamika regulasi yang cepat dan kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi

akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu juga terkait optimalisasi pencatatan dan pemanfaatan aset milik daerah untuk mendukung pembangunan karena belum terdapat petunjuk teknis yang memadai tentang pelaksanaan sensus barang. Tidak tercapainya penerimaan dari Pajak Reklame disebabkan adanya pembatasan pemasangan reklame di tengah kota dan semakin banyak reklame yang dipasang di daerah pinggiran kota yang nilainya lebih kecil.

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.35.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Penunjang Keuangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	KEUANGAN								
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,02	5,01	0,00		SR	BPKAD
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	%	100,00	51,12	56,65		R	BPKAD
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	90,24	50,00	55,41		R	BPKAD
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	10,00	6,87	68,70		S	BAPENDA

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong cukup rendah, terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan terdapat 3 indikator dengan predikat akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras yaitu persentase SILPA Terhadap APBD.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Keuangan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 indikator memiliki kriteria sedang, 2 indikator memiliki kriteria rendah, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.5.03. Kepegawaian

Kinerja Pada tahun 2022 telah disusun Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengembangan karier yang dilaksanakan sesuai prinsip profesionalisme yaitu dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang Pangkat yang ditetapkan serta syarat objektif lainnya. Dan untuk menyederhanakan pelayanan, sampai dengan saat ini telah tersusun pengembangan aplikasi: e-disiplin, e-cuti, e-kenaikan pangkat, e-fungsional, e-kinerja dan e-TPP.

Kinerja penyelenggaraan pada unsur penunjang kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.36.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Penunjang Kepegawaian

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	KEPEGAWAIAN								
1	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	258,36	79,03	30,59	 	SR	BKPP
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	%	100,00	82,20	82,20		T	BKPP
		Prosentase akurasi data kepegawaian	%	99,00	99,00	100,00		ST	BKPP
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	%	99,00	100,00	100,00		ST	BKPP
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	%	81,50	98,60	100,00	 	ST	BKPP
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,98	48,03	100,00		ST	BKPP
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	66,79	66,79%		S	BKPP

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024



: Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024



: Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong baik. Dari 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, terdapat 4 indikator memiliki predikat kinerja telah tercapai, 2 indikator mempunyai kategori akan tercapai, dan 1 indikator mempunyai kategori perlu upaya keras yakni Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 7 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 4 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi, 1 indikator memiliki kriteria tinggi, 1 memiliki kriteria sedang, dan 1 lainnya memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.5.04. Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja pada unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan dapat ditunjukkan dengan diraihnya pencapaian, yaitu Sertifikasi ISO 9001: 2015 sistem manajemen mutu pada penyelenggaraan Diklat serta Sarana dan Prasarana Pengelola Diklat (berlaku selama 3 tahun).

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.37.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	%	45,00	11,40	25,33		SR	BKPP

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong tidak baik dikarenakan 1 indikator yang menjadi ukuran memiliki status perlu upaya keras yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya. Selanjutnya, Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang memiliki kriteria sangat rendah.

#### 2.3.5.05. Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan di Bidang Penelitian dan Pengembangan diarahkan pada pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Semarang.

Adapun kajian yang disusun pada tahun 2024 sejumlah 6 (enam) judul kajian sebagai berikut:

1. Kajian Potensi Pengembangan Ekosistem IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) di Kota Semarang;
2. Kajian Pengaruh Pola Penggunaan Lahan Permukiman Terhadap Bencana Tanah Longsor;
3. Kajian Penyusunan Aset Pangan di Kota Semarang;
4. Kajian Identifikasi Pekerja Rentan di Kota Semarang dalam Upaya Perlindungan Ketenagakerjaan;
5. Kajian Strategi Inovatif Berkelanjutan untuk Integrasi BPP dan BBI Mijen dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah;
6. Kajian Strategi Pengembangan BBI Sebagai Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar di Kota Semarang.

Keenam kajian tersebut sampai dengan triwulan II sudah dalam proses penyusunan Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara. Kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.38.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan	%	100,00	50,00	50,00		SR	Bappeda

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		n dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah							

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 tergolong baik karena dari 1 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, mempunyai predikat kinerja akan tercapai, yaitu persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perlu adanya optimalisasi dalam publikasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan pada triwulan III dan IV. Selanjutnya, Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 1 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan yang memiliki kriteria sangat rendah.

### 2.3.6. Unsur Pengawas

#### 2.3.6.01. Inspektorat Daerah

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BKPP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik untuk Kota Semarang.

Capaian dalam penyelenggaraan Unsur Pengawas termasuk dalam kategori memuaskan. Hal ini terlihat dalam delapan tahun terakhir, Kota Semarang memperoleh delapan kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Rata-rata penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu juga Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mencapai 3,09 (terdefinisi) yang artinya Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Dinamika Regulasi juga menuntut tugas dan tanggungjawab APIP menjadi lebih berat, yaitu sebagai auditor, reviewer, evaluator, pemantauan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya. Level kapabilitas APIP menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Semakin tinggi levelnya maka semakin baik kapabilitasnya

APIP. Capaian kapabilitas APIP Kota Semarang Tahun 2023 telah sepenuhnya berada pada level 3 (integrated).

Kinerja penyelenggaraan inspektorat daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.39.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Unsur Pengawas

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	leveling	3,00	3,00	100,00		ST	Inspektorat
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,06	3,09	100,00		ST	Inspektorat

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Pengawas sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong sangat baik, ditandai dengan 2 indikator yang menjadi ukuran telah mencapai target. Selanjutnya, untuk kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kepegawaian sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 2 indikator yang memiliki kriteria sangat tinggi.

### 2.3.7. Unsur Kewilayahan

#### 2.3.7.01. Kecamatan

Unsur Penunjang Kewilayahan diselenggarakan oleh 16 Kecamatan se-Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu. Unsur Penunjang Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilannya diantaranya: Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi; Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan Persentase Jumlah Ormas, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

Kinerja penyelenggaraan 16 kecamatan dihitung sebagai agregat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.40.  
Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024  
pada Unsur Kewilayahan Kecamatan

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	16 KECAMATAN								
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	94,00	94,69	100,00		ST	16 Kecamatan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	100,00	45,17	45,17		R	16 Kecamatan
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	25,00	15,74	62,95		R	16 Kecamatan
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	98,00	43,39	44,27		R	16 Kecamatan

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024

 : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Unsur Kewilayahan Kecamatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 tergolong cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 4 Indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, keseluruhan indikator memiliki kategori akan tercapai.

Kriteria pencapaian kinerja program pada Unsur Kewilayahan Kecamatan sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 4 indikator yang dijadikan ukuran keberhasilan, 1 diantaranya memiliki kriteria sangat tinggi dan 3 diantaranya memiliki kriteria rendah.

### 2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

#### 2.3.8.01. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diantaranya: Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional; Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan; Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023 kinerja pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan melalui Indeks Demokrasi sebesar 95,18, Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) sebesar 83,63, Indeks Pengamalan Pancasila sebesar 3,2, Indeks Ormas sebesar 66,10, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 81,73. Kondisi ini masih sama dengan capaian triwulan II tahun 2024 karena pengukurannya dilakukan sekali dalam satu tahun pada akhir periode.

Kinerja penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.41.

Capaian Indikator Kinerja Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 pada Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Indeks	2,20	3,20	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil	%	66,00	98,20	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	58,00	66,10	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	71,00	81,73	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian s.d TW II (%)	Status	Kriteria	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target (Induk)	Realisasi s.d TW II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam	%	83,00	95,35	100,00		ST	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Keterangan:

 : Tercapai  $X \geq 100\%$  Target Th. 2024  : Akan Tercapai,  $100\% > X > 50\%$  Target Th. 2024

 : Perlu Upaya Keras  $50\% \geq X$  Target Th. 2024

ST :  $100\% \geq X \geq 91\%$ ; T :  $90\% \geq X \geq 76\%$ ; S :  $75\% \geq X \geq 66\%$ ; R :  $65\% \geq X \geq 51\%$ ; SR :  $50\% \geq X$

Pencapaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II tergolong sangat baik, hal ini ditunjukkan dari 5 Indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator yang termasuk ke kategori tercapai. Selanjutnya, untuk kriteria pencapaian kinerja program pada Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II ditunjukkan dari 5 indikator yang seluruhnya memiliki kriteria sangat tinggi.

Secara keseluruhan, indikator kinerja program non penunjang dalam mendukung pencapaian Kinerja Utama dan Kinerja Daerah tahun 2024 sebanyak 190 indikator. Sampai dengan triwulan II, pencapaian terhadap target tahun 2024 adalah sebagai berikut, sebanyak 70 indikator atau sebesar 36,84% telah dapat mencapai target atau terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Terdapat 70 indikator atau sebesar 36.84% diantaranya sedang berproses dan akan mencapai target pada akhir periode 2024. Hal ini dimungkinkan karena ini merupakan evaluasi *on going* dengan rentang capaian diantara 50% sampai dengan 100% dari target tahun 2024. Adapun sebanyak 50 indikator (sebesar 26,32%) masih dalam predikat Perlu Upaya Keras, diantaranya disebabkan menyesuaikan jadwal kegiatan, menyesuaikan pentahapan kegiatan utamanya jika dibiayai oleh dana transfer, terkendala dengan proses pengadaan dan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) khususnya pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Berat lainnya, Pengajuan raperda yang belum didukung kesiapan materi dari OPD pengusul Raperda dan adanya perubahan perundang-undangan dari tingkat pusat. Terdapat program yang setelah dilakukan kajian dan dilakukan pembahasan dengan instansi vertikal direkomendasikan bahwa program penetapan tanah ulayat tidak relevan jika dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kota Semarang, sehingga tidak akan dilanjutkan penyelenggaraan program/kegiatan dan subkegiatan terkait.

Selain itu, berdasarkan predikat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dari 190 indikator terdapat 96 (50,53%) indikator berkriteria Sangat Tinggi (ST), 12 (6,32%) indikator berkriteria Tinggi (T), 11 (5,79%) indikator berkriteria Sedang (S), 21 (11,04%) indikator berkriteria Rendah (R), dan 50 (26,32%) indikator lainnya berkriteria Sangat Rendah (SR).

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah pada triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan triwulan I-2023 (YoY). Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy) yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, aktivitas pemilu dan dukungan optimal APBN. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% tersebut tidak lepas dari aktivitas pemilu pada November 2024 yang memberikan dorongan lonjakan konsumsi dari aktivitas lembaga non pemerintah terkait rumah tangga (LNPRT).

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tidak terjadi secara merata di setiap sektor usaha. Sektor yang menguat paling signifikan pada kuartal I 2024 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dengan pertumbuhan 18,88% (yoy). Sektor lain yang pertumbuhannya tergolong tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa perusahaan; penyediaan akomodasi dan makan-minum; serta pertambangan dan penggalian, dengan pertumbuhan di kisaran 9 - 11% (yoy). Sementara, dari 17 lapangan usaha utama Indonesia, hanya ada satu sektor yang melemah yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Faktor alam seperti fenomena El Nino menjadi penyebab utama pelemahan sektor pertanian akibat menurunnya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang menyumbang sebesar 60 persen dari total *output* sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur perekonomiannya, di tingkat nasional tidak menunjukkan perubahan berarti karena masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen pada triwulan I-2024. Sedangkan di tingkat daerah berubah strukturnya, pada triwulan I-2023 didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,45 persen dan pada triwulan I-2024 didominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,50 persen.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi di tingkat nasional maupun daerah diperkirakan kembali berlanjut pada tahun 2024 ditengah tren Ketidakpastian Ekonomi Global dan Gejolak Geopolitik. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT, seiring dengan penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR dengan Tukin 100%. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Namun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberikan implikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang. Seperti program stimulus percepatan pencairan belanja bantuan sosial dan relaksasi pajak penghasilan dapat mendorong konsumsi masyarakat, sementara konsumsi pemerintah dapat meningkat sejalan dengan percepatan transfer dana ke daerah. Selain itu, Laju inflasi masih diperkirakan relatif terkendali di tengah tekanan inflasi global yang tinggi.

Selain difokuskan pada Upaya pengendalian inflasi dan pemenuhan Cadangan pangan Masyarakat, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2024 harus tetap berpedoman pada Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2024 mencapai 5,70 – 6,50 persen. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Kota Semarang yang fokus pada Perwujudan Semarang Semakin Hebat!. Secara ringkas beberapa capaian dan target indikator ekonomi pada Perubahan RKPDP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1  
Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPDP Tahun 2024

No	Indikator	Realisasi			Rerata	Target Kota Semarang	
		2021	2022	2023		RKPDP 2024	Perubahan RKPDP 2024
1	LPE (%)	5,16	5,73	5,79	5,56	5,70 – 6,50	5,70 – 6,50
2	Inflasi (%)	1,49	4,99	2,84	3,10	2,4 ± 1	2,4 ± 1
3	Nilai Investasi PMA dan PMDN (juta rupiah)	22.538.063	24.662.877	27.205.700	24.802.213	27.362.089	27.362.089
4	Kemiskinan (%)	4,56	4,25	4,23	4,35	4,00 – 3,82	4,00 – 3,82
5	TPT (%)	9,54	7,60	5,99	7,71	7,60 – 6,50	7,60 – 6,50

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024

## 3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 3.2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Perlambatan ekonomi dunia dan berbagai risiko serta ketidakpastian global yang berpotensi akan meningkatkan risiko bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara langsung juga berdampak pada pendapatan daerah. Namun, secara umum Pemerintah Kota Semarang tetap optimis dan realistis terhadap target pendapatan daerah pada perubahan RKPDP 2024 ini. Hal ini terlihat dari perkembangan perekonomian di masyarakat yang meningkat, sehingga secara langsung juga berdampak pada pendapatan daerah.

Dibandingkan dengan APBD TA 2024, pendapatan daerah pada perubahan RKPDP Tahun 2024 diperkirakan meningkat dari Rp. 5.231.593.814.823 menjadi Rp. 5.736.012.574.623 atau naik sebesar Rp. 504.418.759.800 (9,64%). Penyumbang terbesar kenaikan tersebut adalah pada pendapatan transfer sebesar Rp. 502.783.093.218 (24,29%).

Meskipun secara keseluruhan terjadi kenaikan pada Pendapatan Daerah, namun jika dibandingkan dengan RKPDP 2024, pada pos PAD di perubahan RKPDP tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 268.257.617.856. Jika dibandingkan dengan APBD Induk 2024, total PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.635.666.582. Jika dirinci, terdapat penurunan retribusi sebesar Rp. 2.805.357.084,- dikarenakan terdapat perpindahan dari retribusi BLUD RSUD ke lain2 PAD yang sah karena menyesuaikan dengan Perda No 10 Tahun 2023. Disamping itu, Pemkot Semarang akan terus melakukan optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi dan meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang.

Tabel 3. 2  
Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2024	APBD INDUK 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2024
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.431.572.142.261	3.161.678.857.823	3.163.314.524.405	(268.257.617.856)	1.635.666.582
Pajak Daerah	2.389.028.620.494	2.389.028.620.494	2.389.028.620.494	-	-
Retribusi Daerah	936.355.102.989	666.461.818.551	666.899.665.632	(269.455.437.357)	437.847.081
a) Retribusi Non BLUD	488.252.551.164	218.359.266.726	221.602.470.891	(266.650.080.273)	3.243.204.165
b) Retribusi BLUD	448.102.551.825	448.102.551.825	445.297.194.741	(2.805.357.084)	(2.805.357.084)
HPKD yang Dipisahkan	79.688.418.778	79.688.418.778	79.688.418.778	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	26.500.000.000	26.500.000.000	27.697.819.501	1.197.819.501	1.197.819.501
a) BLUD	-	-	-	-	-
b) Selain BLUD	26.500.000.000	26.500.000.000	27.697.819.501	1.197.819.501	1.197.819.501
Pendapatan Transfer	1.959.754.745.000	2.069.914.957.000	2.572.698.050.218	612.943.305.218	502.783.093.218
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.377.754.745.000	1.487.914.957.000	1.969.330.706.218	591.575.961.218	481.415.749.218
Dana Perimbangan	1.377.754.745.000	1.456.961.374.000	1.938.377.123.218	560.622.378.218	481.415.749.218
Dana Bagi Hasil	169.264.971.000	179.560.962.000	179.151.581.000	9.886.610.000	(409.381.000)
Dana Alokasi Umum	1.208.489.774.000	1.277.400.412.000	1.277.400.412.000	68.910.638.000	-
Dana Alokasi Khusus	-	-	481.825.130.218	481.825.130.218	481.825.130.218
a) DAK Fisik	-	-	15.492.846.547	15.492.846.547	15.492.846.547
b) DAK Non Fisik	-	-	466.332.283.671	466.332.283.671	466.332.283.671
Dana Insentif Daerah	-	30.953.583.000	30.953.583.000	30.953.583.000	-
Dana Insentif Daerah	-	30.953.583.000	30.953.583.000	30.953.583.000	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	582.000.000.000	582.000.000.000	603.367.344.000	21.367.344.000	21.367.344.000
Pendapatan Bagi Hasil	582.000.000.000	582.000.000.000	582.000.000.000	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	21.367.344.000	21.367.344.000	21.367.344.000
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>5.391.326.887.261</b>	<b>5.231.593.814.823</b>	<b>5.736.012.574.623</b>	<b>344.685.687.362</b>	<b>504.418.759.800</b>

Sumber : Bapenda; BPKAD Kota Semarang; 2024

### 3.2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Komposisi Belanja Daerah tidak lepas dari penyesuaian terhadap pendapatan daerah dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan pemilu, risiko ketidakpastian global akibat geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, serta ancaman El Nino dan perubahan iklim. Penyesuaian Belanja Daerah secara simultan diakomodir APBD TA 2024 melalui pergeseran anggaran ke-3. kemudian hasil akhir pergeseran tersebut menjadi dasar Perubahan RKPD Tahun 2024.

Penyesuaian Belanja Daerah ini diupayakan masih berpedoman pada arahan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan prioritas dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 adalah:

1. Proyeksi Belanja Daerah ditentukan berdasarkan tren APBD Murni 3 tahun terakhir, namun tetap memerhatikan besaran *earmarking* dan kebutuhan yang didasarkan di tahun 2024.
2. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya.
3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut.
4. Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2024 dilakukan terhadap belanja operasional seperti efisiensi terhadap belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan.
5. Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- c) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- d) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- e) Penguatan daya saing usaha;
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- g) Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- h) Pelaksanaan pemilu 2024.

Secara umum jika dibandingkan dengan APBD TA 2024, pada Perubahan RKPD Tahun 2024 komposisi Belanja Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 496.450.256.217 atau naik 9,09%. Dengan uraian belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.715.657.412.718 atau naik sebesar Rp. 530.015.723.482 (12,66%). Belanja Modal sebesar Rp. 1.219.296.214.554 atau naik sebesar Rp. 28.783.662.102 (2,42%), dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 22.109.804.214 atau turun sebesar Rp. 62.349.129.367 (-73,82%).

Jika dibandingkan dengan APBD TA 2024, penyesuaian Belanja Operasi terdapat pada:

1. Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari Rp. 1.799.293.800.988 pada Perubahan RKPD 2024 menjadi sebesar Rp. 1.935.552.704.362 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 136.258.903.374. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan gaji sebesar 8% mulai tahun 2024.
2. Belanja Barang dan Jasa yang pada APBD 2024 dialokasikan Rp. 2.242.762.248.006, pada perubahan RKPD 2024 naik menjadi Rp. 2.533.665.469.696.
3. Belanja Subsidi pada APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp. 3.500.000.000 untuk subsidi pasar dialihkan untuk belanja tidak terduga (BTT), dan terdapat tambahan alokasi belanja subsidi sebesar Rp. 147.490.500 yang berasal dari Dana Insentif Fiskal (DIF) untuk stabilitas ketahanan pangan.
4. Belanja Hibah naik dari Rp. 134.203.895.712 menjadi sebesar Rp. 240.938.903.630. Peningkatan tersebut terutama berasal dari Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dan BOS SD dan SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian Hibah kepada Yayasan, serta pemberian bantuan keuangan partai politik.
4. Belanja Bantuan Sosial turun dari Rp. 5.881.744.530 menjadi Rp. 5.352.844.530. Penurunan belanja Bantuan Sosial tersebut dikarenakan masih terdapat sisa anggaran hibah pada Disdik sebesar Rp. 528.900.000 yang berasal dari sisa pemberian bantuan sosial beasiswa bagi siswa miskin dan beasiswa bagi siswa miskin berprestasi yang sudah tersalurkan ke semua penerima bansos.

Untuk Belanja Modal, jika dibandingkan dengan APBD TA 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp. 28.783.662.102 pada perubahan RKPD 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah mengalami penurunan dari Rp. 122.576.913.626 menjadi sebesar Rp. 62.782.873.626;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dari Rp. 219.367.539.349 menjadi sebesar Rp. 278.758.968.461;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dari Rp. 365.060.747.645 menjadi sebesar Rp. 340.279.147.958;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami kenaikan dari Rp. 481.544.087.026 menjadi sebesar Rp. 523.784.445.932;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan dari Rp. 823.392.542 menjadi sebesar Rp. 12.514.566.295;
6. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami kenaikan dari Rp. 1.139.872.264 menjadi sebesar Rp. 1.176.212.282.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga, pada perubahan RKPD tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp. 62.349.129.367 (-73,82%) dari semula dianggarkan sebesar Rp. 84.458.933.581 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp. 22.109.804.214. Belanja Tidak Terduga pada perubahan RKPD tahun 2024 dianggarkan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang bersifat darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Secara lengkap, rincian perbandingan belanja pada RKPD 2024, APBD TA 2024 dan Perubahan RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3  
Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2024	APBD INDUK 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2024
<b>BELANJA DAERAH</b>					
Belanja Operasi	4.109.926.403.811	4.185.641.689.236	4.715.657.412.718	605.731.008.907	530.015.723.482
Belanja Pegawai	1.786.136.328.651	1.799.293.800.988	1.935.552.704.362	149.416.375.711	136.258.903.374
Belanja Barang dan Jasa	2.183.704.434.918	2.242.762.248.006	2.533.665.469.696	349.961.034.778	290.903.221.690
Belanja Bunga	-	-			
Belanja Subsidi	-	3.500.000.000	147.490.500	147.490.500	(3.352.509.500)
Belanja Hibah	134.203.895.712	134.203.895.712	240.938.903.630	106.735.007.918	106.735.007.918
Belanja Bantuan Sosial	5.881.744.530	5.881.744.530	5.352.844.530	(528.900.000)	(528.900.000)
Belanja Modal	1.169.238.570.360	1.190.512.552.452	1.219.296.214.554	50.057.644.194	28.783.662.102
Belanja Modal Tanah	115.711.335.340	122.576.913.626	62.782.873.626	(52.928.461.714)	(59.794.040.000)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	213.591.525.351	219.367.539.349	278.758.968.461	65.167.443.110	59.391.429.112
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	344.703.671.388	365.060.747.645	340.279.147.958	(4.424.523.430)	(24.781.599.687)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	493.344.040.215	481.544.087.026	523.784.445.932	30.440.405.717	42.240.358.906
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	713.444.745	823.392.542	12.514.566.295	11.801.121.550	11.691.173.753
Belanja Modal Aset Lainnya	1.174.553.321	1.139.872.264	1.176.212.282	1.658.961	36.340.018
Belanja Tidak Terduga	101.962.989.098	84.458.933.581	22.109.804.214	(79.853.184.884)	(62.349.129.367)
Belanja Tidak Terduga	101.962.989.098	84.458.933.581	22.109.804.214	(79.853.184.884)	(62.349.129.367)
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>5.381.127.963.269</b>	<b>5.460.613.175.269</b>	<b>5.957.063.431.486</b>	<b>575.935.468.217</b>	<b>496.450.256.217</b>

Sumber : Bappeda Kota Semarang; 2024

Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja tersebut, maka secara ringkas alokasinya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4  
Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2024	APBD INDUK 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2024
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.431.572.142.261	3.161.678.857.823	3.163.314.524.405	(268.257.617.856)	1.635.666.582
Pendapatan Transfer	1.959.754.745.000	2.069.914.957.000	2.572.698.050.218	612.943.305.218	502.783.093.218
Lain2 Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>5.391.326.887.261</b>	<b>5.231.593.814.823</b>	<b>5.736.012.574.623</b>	<b>344.685.687.362</b>	<b>504.418.759.800</b>
<b>BELANJADAERAH</b>					
Belanja Operasi	4.109.926.403.811	4.185.641.689.236	4.715.657.412.718	605.731.008.907	530.015.723.482
Belanja Modal	1.169.238.570.360	1.190.512.552.452	1.219.296.214.554	50.057.644.194	28.783.662.102
Belanja Tidak Terduga	101.962.989.098	84.458.933.581	22.109.804.214	(79.853.184.884)	(62.349.129.367)
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>5.381.127.963.269</b>	<b>5.460.613.175.269</b>	<b>5.957.063.431.486</b>	<b>575.935.468.217</b>	<b>496.450.256.217</b>
Surplus / (Defisit) Belanja Daerah	10.198.923.992	(229.019.360.446)	(221.050.856.863)	(231.249.780.855)	7.968.503.583

Sumber : Bappeda Kota Semarang; 2024

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Perubahan RKPD 2024 diperkirakan akan terdapat defisit sebesar Rp. 221.050.856.863 karena rencana pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah. Untuk menutup defisit tersebut, Pemerintah Kota Semarang menggunakan instrumen pembiayaan daerah agar struktur pendapatan dan belanja daerah menjadi ideal dan seimbang.

### 3.2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kota Semarang pada perubahan RKPD Tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tersebut tercatat sebesar Rp 288.372.856.863. Jika dibandingkan dengan RKPD induk, angka tersebut berselisih sebesar Rp. 226.249.780.855 karena pada RKPD induk terpasang Rp. 62.123.076.008. Sedangkan jika dibandingkan dengan APBD TA 2024, SiLPA pada perubahan RKPD 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.968.503.583.

Sejalan dengan sisi Penerimaan, Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan RKPD 2024 jika dibandingkan dengan RKPD Induk 2024 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 5.000.000.000 akibat rasionalisasi penyertaan modal pada PT. BPS, PT Taman Satwa, serta penambahan pada penyertaan modal PDAM. Secara lengkap, rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2024	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2024
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	62.123.076.008	296.341.360.446	288.372.856.863	226.249.780.855	(7.968.503.583)
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>62.123.076.008</b>	<b>296.341.360.446</b>	<b>288.372.856.863</b>	<b>226.249.780.855</b>	<b>(7.968.503.583)</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal Daerah	68.322.000.000	63.322.000.000	63.322.000.000	(5.000.000.000)	-
Penyertaan Modal PDAM	7.322.000.000	37.322.000.000	37.322.000.000	30.000.000.000	-
Penyertaan Modal Bank Pasar	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal Perusda BPR / BKK	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Bank Jateng	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	-	-
Penyertaan Modal PT. BPS (holding company)	10.000.000.000	-	-	(10.000.000.000)	-
Penyertaan Modal PT. Taman Satwa	25.000.000.000	-	-	(25.000.000.000)	-

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024 (Rp)			SELISIH	
	RKPD 2024	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD 2024	PERUBAHAN DENGAN RKPD TAHUN 2024	PERUBAHAN DENGAN APBD INDUK 2024
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>72.322.000.000</b>	<b>67.322.000.000</b>	<b>67.322.000.000</b>	<b>(5.000.000.000)</b>	<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(10.198.923.992)</b>	<b>229.019.360.446</b>	<b>221.050.856.863</b>	<b>231.249.780.855</b>	<b>(7.968.503.583)</b>

Sumber : BPKAD; Bagian Perekonomian dan SDA Kota Semarang; 2024

Berdasarkan uraian Pembiayaan Daerah di atas, maka Pemerintah Kota Semarang mengalami surplus pembiayaan sebesar Rp. 221.050.856.863 pada perubahan RKPD Tahun 2024. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah pada perubahan RKPD 2024 sebesar Rp. 221.050.856.863, sehingga kondisi pada perubahan RKPD 2024 adalah anggaran berimbang.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Semarang, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 beserta perubahannya harus sesuai dengan agenda pembangunan pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, terutama pelaksanaannya pada tahun ketiga. RKPD Kota Semarang tahun 2024 beserta perubahannya juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 beserta program strategis nasional yang ditetapkan, serta program kebijakan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Selain memperhatikan visi dan misi pembangunan Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, isu strategis, dan prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional, penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kesesuaian dengan dokumen perencanaan, urgensi penanganan isu, dan kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Visi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai kota metropolitan dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial
- Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
- Misi 3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
- Misi 4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
- Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Semarang sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024 beserta indikator dan targetnya. Perlu diketahui bahwa meskipun terdapat penyesuaian terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, namun tidak dilakukan penyesuaian terhadap target indikator tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini karena penyesuaian belanja dilakukan terhadap belanja operasional yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target pembangunan. Efisiensi dilakukan pada belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, belanja perjalanan dinas, serta belanja-belanja yang tidak terlalu mendesak yang diubah untuk memenuhi prioritas lain, seperti untuk penanganan banjir, pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC), serta penyediaan sarana prasarana layanan masyarakat. Tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan targetnya di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET RKPD 2024	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2024	
<b>MISI 1: MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial</b>				
1.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,40 – 86,00 poin	84,40 – 86,00 poin
		Tingkat Kearifan Budaya Lokal	61,05 %	61,05 %
	Sasaran: 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,60 poin	15,60 poin
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,61 tahun	10,61 tahun
		Angka Harapan Hidup	77,54 tahun	77,54 tahun
	2. Meningkatkan kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	61,05 %	61,05 %
	2.	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,50 – 7,60 %
Angka Kemiskinan			3,82 – 4,00 %	3,82 – 4,00 %
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	94,29 %	94,29 %
4. Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,15 %	70,15 %
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	78,00 %	78,00 %
5. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	15,20 - 15,50 %	15,20 - 15,50 %	

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2024	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2024
	6. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	99,87 %	99,87 %
MISI 2: MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI LOKAL YANG BERDAYA SAING DAN STIMULASI PEMBANGUNAN INDUSTRI, BERLANDASKAN RISET DAN INOVASI BERDASAR PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA				
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,70 – 6,50 %	5,70 – 6,50 %
	Sasaran:			
	7. Meningkatkan produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	3.539.299.867,06 US\$	3.539.299.867,06 US\$
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00 %	6,00 %
	8. Meningkatkan nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7 % (Rp. 27.362.089 Juta)	7 % (Rp. 27.362.089 Juta)
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	104,12 Juta Rupiah	104,12 Juta Rupiah
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,84 %	28,84 %
		Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	28,72 %	28,72 %
MISI 3: MENJAMIN KEMERDEKAAN MASYARAKAT MENJALANKAN IBADAH, PEMENUHAN HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA HAK ASASI MANUSIA BAGI MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN				
4.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar, kesetaraan gender, dan kondusivitas wilayah bagi masyarakat secara berkeadilan	Indeks Demokrasi	72,80	72,80
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80	95,80
		Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	9,90 %	9,90 %
	Sasaran:			
	9. Meningkatkan internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	74,00	74,00
	10. Meningkatkan akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,20	75,20

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2024	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2024
	gender			
	11. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	1.251 kejadian	1.251 kejadian
<b>MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK Mendukung KEMAJUAN Kota</b>				
5.	Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif, dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,18 %	67,18 %
		Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	80,62	80,62
	12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,53	52,53
		Indeks Kualitas Udara	95,80	95,80
		Penurunan Emisi CO2	168.864,53 Ton CO2e	168.864,53 Ton CO2e
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	71 %	71 %
		Persentase ruang terbuka hijau	45,35 %	45,35 %
	13. Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu	73 %	73 %
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	79 %	79 %
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,19 %	3,19 %
	14. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	98,00 %	98,00 %
		Persentase rumah layak huni	99,42 %	99,42 %
	15. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	87 %	87 %
	16. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	109	109
	17. Mewujudkan sistem transportasi yang	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5876	0,5876

MISI / TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN		INDIKATOR	TARGET RKPD 2024	PENYESUAIAN TARGET RKPD 2024
	terintegrasi dan berkelanjutan	Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet	2	2
MISI 5: MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN SECARA DINAMIS DAN MENYUSUN PRODUK HUKUM YANG SESUAI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA				
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggung jawab	Indeks Reformasi Birokrasi	76,00	76,00
	Sasaran: 18. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Opini BPK	>76/BB WTP	>76/BB WTP
	19. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	83,50	83,50
		Indeks SPBE	4,3	4,3
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,47/ST	>3,47/ST
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,35	88,35

Sementara itu, ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Semarang. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 beserta perubahannya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4. 2  
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 202	Target P-RKPD 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	84,40 – 86,00	84,40 – 86,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	61,05	61,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,50 – 7,60	6,50 – 7,60
4	Angka Kemiskinan	%	3,82 – 4,00	3,82 – 4,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RKPD 202	Target P-RKPD 2024
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70 – 6,50	5,70 – 6,50
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	104,12	104,12
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (27.362.089)	7 (27.362.089)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6,00	6,00
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,80	72,80
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,80	95,80
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,90	9,90
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,18	67,18
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	80,62	80,62
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,19	3,19
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	76,00	76,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88,35	88,35
17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP

Tabel 4. 3

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
A.	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (Secara administrasi kependudukan)	%	0,35	0,35
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70 – 6,50	5,70 – 6,50
3	Laju inflasi	%	2,4 ±1	2,4 ±1
4	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,84	28,84
5	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,72	28,72
	Fokus Kesejahteraan Sosial			
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai indeks	84,40 – 86,00	84,40 – 86,00
a.	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp. /tahun	16.000	16.000
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	77,54	77,54

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,61	10,61
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,60	15,60
7	Angka Kemiskinan	%	3,84 – 4,04	3,84 – 4,04
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,50 – 7,60	6,50 – 7,60
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,97	99,97
	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga			
10	Tingkat kearifan budaya lokal	%	61,05	61,05
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)			
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	65,50	65,50
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	65,70	65,70
6	Angka Partisipasi Kasar			
	a. PAUD (3-6 tahun)	%	81,75	81,75
	b. SD/MI	%	100	100
	c. SLTP/MTs	%	100	100
7	Angka Partisipasi Murni:			
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80
8	Angka Putus Sekolah:			
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,03	0,03
9	Angka Kelulusan:			
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100
10	Angka Melanjutkan (AM):			
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100
11	Fasilitas Pendidikan:			
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96,5	96,5

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99,3	99,3
12	Rasio Guru/Murid per kelas Rata-rata			
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			
	a. Jenjang PAUD	%	98,8	98,8
	b. Jenjang SD/MI	%	100	100
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100	100
I.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,38	0,38
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	93,70	93,70
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (SPM)	%	100	100
4	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar (SPM)	%	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (SPM)	%	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar (SPM)	%	100	100
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar (SPM)	%	100	100
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia sesuai standar (SPM)	%	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar (SPM)	%	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar (SPM)	%	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar (SPM)	%	100	100
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar (SPM)	%	100	100
14	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar (SPM)	%	100	100
15	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	(per 100.000 kelahiran hidup)	71,32	71,32
16	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,06	6,06

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
17	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	6,88	6,88
18	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	%	78	78
19	Nilai Kinerja BLUD Sehat	%	A+	A+
I.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	%	96,78	96,78
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota	%	99,41	99,41
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	84,20	84,20
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari. (SPM) (1 SR melayani 8 jiwa)	%	100	100
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (SPM)	%	92,86	92,86
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	94,00	94,00
7	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	64,6	97
8	Persentase luas sawah beririgasi	%	43	43
9	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	%	36,34	36,34
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	36	36
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	28	28
I.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100 (30 Unit)	100 (30 Unit)
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100 (84 Unit)	100 (84 Unit)
3	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	64 (64% x 431,54 Ha = 276,192 Ha)	64 (64% x 431,54 Ha = 276,192 Ha)
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	Unit	1.000	1.000
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100 (10perumhn)	100 (10perumhn)

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
6	Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	/1000 penduduk	19,28	19,28
I.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (SPM)	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	68	68
3	Indeks Resiko Bencana	%	109	109
4	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100
5	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100
6	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100
7	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	%	100	100
8	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	88,57	88,57
I.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
	b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
	d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100
	a. Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100
	b. Jumlah Korban Bencana sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	%	100	100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPDP 2024	Target P-RKPDP 2024
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	80,95
2	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	%	58 (145 kasus)	58 (145 kasus)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,80	48,9
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,011	0,011
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	12,84	12,84
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	74,71	74,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	66,34	66,34
7	Rasio KDRT	Rasio	0,023	0,023
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Persentase cadangan pangan masyarakat	%	255,074	255,074
2	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	3	3
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,1	89,1
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	82	82
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	58	89
2	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	60	60
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67,18	67,18
	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air	poin	52,53	52,53
	b. Peningkatan Indeks Kualitas Udara	poin	95,80	95,80
	c. Peningkatan Indeks Kualitas lahan	poin	56,70	56,70
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Persentase pengurangan timbulan sampah b. Persentase penanganan timbulan sampah	% %	28 71	28 71
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	85,80	85,80
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	74,00	74,00
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,50	97,50
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPDP 2024	Target P-RKPDP 2024
	perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan			
4	Pemanfaatan data kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	%	100	100
5	Perekaman KTP elektronik	%	99,50	99,50
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase LPM aktif	%	100	100
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga (TFR)	Rasio	2,00	2,00
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,04	8,04
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77,24	77,24
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Arus penumpang angkutan umum	Jumlah	16.010.382	16.010.382
2	Pengurangan jumlah titik atau ruas rawan macet	titik/ruas rawan macet	2	2
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	jumlah	1990	1990
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	75,34	75,34
4	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	%	100	100
5	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	%	100	100
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Persentase koperasi aktif	%	77	77
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	14	14
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	55	55

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPDP 2024	Target P-RKPDP 2024
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	541	541
2	Persentase peningkatan investasi	%	7	7
3	Nilai investasi	Rp (dlm juta)	27.362.089	27.362.089
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Peningkatan prestasi olahraga	Medali Emas	51	51
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,95	0,95
3	Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,043	0,043
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
2	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100	100
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100
2	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	80	80
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	85,45	85,45
2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	460	460
3	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Unit	461	461
4	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Unit	12	12
5	Persentase Apresiasi terhadap Kesenian Lokal	%	36,66	36,66
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	48	48
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	30	30
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	60	60
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	80	80
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	%	59	59

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
	aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	151.000	151.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: Perikanan Dalam Angka)	Ton	7.075,02	7.075,02
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/thn	40,19	40,19
3	Produksi Ikan Olahan	Ton/Tahun	17.631	17.631
4	Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton/tahun	3.113,69	3.113,69
5	Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton/tahun	3.961,33	3.961,33
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/ kota	%	6 (4.116.057)	6 (4.116.057)
2	Tingkat hunian akomodasi	%	44,88	44,88
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	19	19
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha/tahun	6,38	6,38
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5	5
3	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan)	Kelurahan	147	147
4	Sentra produk unggulan pertanian (kawasan - komoditas)	Kawasan	6	6
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	66	66
2	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	86,0	86,0
3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	69	69
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	90	90
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	0,50	0,50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100%	100%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	%	10%	10%
4	Sentra produk unggulan (kawasan – Logam)	Sentra	1	1
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	12,50%	12,50%
4	UNSUR PENDUKUNG			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	76,00	76,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	88,35	88,35
3	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai / Predikat	>76/BB	>76/BB
4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	>3,47/ST	>3,47/ST
4.02	SEKRETARIAT DPRD			
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100
5	UNSUR PENUNJANG			
5.01.	PERENCANAAN			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu.	Dokumen	2	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100	100
4	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan	%	100	100
5.02	KEUANGAN			
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57	54,57
2	Persentase Silpa terhadap APBD	%	1,02	1,02
5.03	KEPEGAWAIAN			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	83,50	83,50
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	258,36	258,36
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20,98	20,98
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RKPDP 2024	Target P-RKPDP 2024
	dan tenaga kesehatan)			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,18	4,18
2	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	85	85
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	41,18	41,18
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai Indeks	66	66
6	UNSUR PENGAWAS			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			
1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	3,00	3,00
2	Tingkat Maturitas SPIP (leveling)	Leveling	3,06	3,06
3	Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	Opini	WTP	WTP
4	Kapabilitas APIP	Leveling	3	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN			
1	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	%	94,29	94,29
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan di tingkat kewilayahan	%	90,86	90,86
3	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	%	93	93
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	99	99
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Indeks Demokrasi	Indeks	72,80	72,80
2	Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	Indeks	74,00	74,00
C.	ASPEK DAYA SAING			
1.	Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	PDRB per kapita berlaku	juta Rp	104,12	104,12
2	Nilai Ekspor	US\$	3.539.299.8 67,06	3.539.299.8 67,06
2.	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur			
2.1	Aksesibilitas Daerah			
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0,5876	0,5876
2.2	Penataan Wilayah			
1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	45,35	45,35
2.	Kesesuaian tata ruang	%	100	100
3.	Fasilitas Iklim Berinvestasi			
3.1	Ketentraman dan Ketertiban			
1	Angka Kriminalitas	kejadian	1251	1251
2	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	9,90	9,90
3.2	Kemudahan Perizinan			
1	Prosedur izin terbit sesuai SP (sejak 2020: 174 jenis perizinan dari semula 52 jenis)	%	95,50	95,50
4.	Sumber Daya Manusia			
4.1	Kualitas Tenaga Kerja			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,15	70,15
2	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	78	78
4.2	Rasio Ketergantungan Penduduk (Dt. Disdukcapil)	%	41,03	41,03

## 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

### 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi  
Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
  2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
  3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
  4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
  5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
  6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
  7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
1. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

#### 4.2.3. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Semarang

Dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2024. Masukan dari DPRD juga didapatkan dari hasil reses yang dilakukan, yang dirangkum pada uraian di bawah ini:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
  - a) Pengembangan UKM yang sesuai era digital;
  - b) Pengembangan Lapak atau Gerai UKM di setiap Kelurahan;
  - c) Mendorong adanya bantuan usaha untuk UMKM;

- d) Memberikan stimulus dan ruang berusaha kepada pelaku UMKM dan pelaku usaha mikro;
  - e) Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi kreatif di Kota Semarang dengan memberikan fasilitas serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif;
  - f) Perlu bimbingan perizinan UKM dan akses mendapat Kredit Usaha Rakyat;
  - g) Peningkatan pengelolaan pasar tradisional yang ada di wilayah pinggiran Kota Semarang;
  - h) Memberikan kemudahan dalam perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai daya tarik para investor perdagangan dan pembangunan pusat perbelanjaan dan infrastruktur MICE.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
- a) Pembinaan kepada kelompok remaja produktif di bidang usaha;
  - b) Penyediaan program pendampingan usaha bagi lulusan SMA/ SMK atau yang sudah kuliah;
  - c) Lebih memperbanyak bantuan untuk warga lansia khususnya untuk lansia tidak mampu;
  - d) Mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program gratis pembuatan dokumen kependudukan, gratis layanan *homecare* bagi warga lanjut usia yang mobilitasnya terbatas hingga gratis pemakaman dan santunan kematian;
  - e) Pelaksanaan penjangkauan, penghalauan dan pendataan bagi warga miskin yang berhak mendapat bansos dari pemerintah agar lebih terbuka dan mendalam;
  - f) Pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran;
  - g) Memberikan pelatihan keterampilan kepada ibu-ibu rumah tangga;
  - h) Pemberian pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan lainnya yang menunjang keterampilan masyarakat usia produktif.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif
- a) Pemerataan pemberian beasiswa bagi siswa/siswi berprestasi dan siswa/siswi miskin pada jenjang SD dan SMP;
  - b) Memperbanyak program bantuan pendidikan, program-program yang dapat menambah semangat belajar anak usia sekolah;
  - c) Memperbanyak beasiswa untuk masuk perguruan tinggi;
  - d) Penambahan program pelatihan operator EMIS (*Education Management Information System*) bagi para guru Madrasah Diniyah;
  - e) Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f) Fokus dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS, program guru penggerak, dan juga transformasi tata kelola guru.
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota
- a) Perbaikan jalan yang rusak, baik dengan aspal, paving maupun cor beton;
  - b) Perlu pembangunan drainase dan penataan saluran air;
  - c) Pembangunan talud di sungai kecil maupun besar;

- d) Perlu pemeriksaan rutin pada setiap saluran air, penggantian gorong-gorong yang telah rusak, dan pengerukan endapan sampah atau tanah;
  - e) Pembangunan infrastruktur di wilayah permukiman yang padat penduduk, seperti peningkatan jalan, saluran, dan perbaikan jembatan;
  - f) Mengoptimalkan pengawasan dan perawatan rumah pompa di Kota Semarang;
  - g) Perlu pembangunan saluran irigasi untuk pertanian;
  - h) Melakukan percepatan dan pemerataan PJU di daerah-daerah pinggiran;
  - i) Peningkatan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH);
  - j) Peningkatan penghijauan di seluruh Kota Semarang;
  - k) Perlu bantuan pembangunan maupun rehabilitasi bangunan balai RW maupun balau RT yang telah rusak dan belum ada;
  - l) Memperhatikan ruang public terbuka hijau dan tempat bermain di setiap kelurahan di Kota Semarang;
  - m) Perlu menambah halte untuk Bus Feeder Trans Semarang di beberapa kompleks perumahan, maupun di gang-gang sempit kampung yang padat penduduk;
  - n) Perlu memperbanyak jalur Bus Trans Semarang maupun Feeder yang melewati sekolah;
  - o) Perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang manajemen lampu lalu lintas agar kemacetan di Kota Semarang bisa diatasi dengan baik;
  - p) Perlu menambah CCTV di setiap RT dan tempat publik.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota
- a) Perlu terus menggalakkan edukasi tentang mitigasi bencana. Karena Kota Semarang masuk daerah rawan bencana alam yaitu banjir, longsor, dan angin topan;
  - b) Hendaknya pemerintah membuat aturan yang lebih ketat terhadap dampak lingkungan untuk mengantisipasi dampak banjir dan longsor yang diakibatkan alih fungsi lahan serta dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas lagi;
  - c) Realisasi anggaran dari seluruh kegiatan untuk dipastikan sudah berjalan;
  - d) Pemkot Semarang untuk membuat program kerja yang luar biasa dalam menangani pandemi Covid-19 pasca dicabutnya PPKM ini secara masif, terukur, dan jelas anggarannya;
  - e) Pemkot Semarang untuk memberikan perhatian lebih untuk masalah yang timbul di daerah pinggiran yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial, budaya dan sebagainya sebagai penopang aktivitas di tengah kota;
  - f) Pemkot Semarang juga diharapkan memfokuskan pemulihan ekonomi warga dan Kota Semarang secara umum agar pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini bisa positif;
  - g) Perlu perhatian lebih kepada sekolah dasar yang kekurangan murid. Perlu dipikirkan sistem zonasi yang telah diterapkan, apakah perlu dievaluasi atau tidak;
  - h) Mendorong aparat terkait, polisi, dan jajaran mengadakan patroli agar mengurangi kejahatan dan masyarakat merasa nyaman di jalanan, hal itu mengingat kejadian kriminalitas di jalanan terutama di malam hari;

- i) Perlu untuk memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) tepat sasaran dan semakin banyak didapatkan oleh penduduk yang berhak;
- j) Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas);
- k) Perlu pengawasan terus-menerus pada setiap kantor atau unit layanan masyarakat di Pemerintah Kota Semarang;
- l) Berharap agar aplikasi ruang warga dapat diakses di laptop supaya pengisian data warga dan lainnya lebih mudah;
- m) Pemerintah Kota Semarang menyebarluaskan informasi melalui media cetak dan elektronik agar supaya masyarakat Kota Semarang dapat mengetahui informasi tentang berita apapun dari Pemerintah Kota Semarang;
- n) Pemerintah Kota Semarang diminta untuk mengencangkan sosialisasi terkait kemudahan mengurus dokumen kependudukan terutama di daerah pinggiran. Agar warga masyarakat yang tinggal di perkotaan pada umumnya dan yang tinggal di pinggiran khususnya dapat mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Semarang;
- o) Pelayanan publik di setiap kelurahan, kecamatan, dan pemkot Semarang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat yang memerlukan pelayanan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik dan harapannya bisa terpuaskan;
- p) Agar Pemkot Kota Semarang dapat memperbaiki pelayanan publik/ masyarakat agar lebih baik, di sisi lain juga mempermudah akses yang dibutuhkan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan cepat dari Pemerintah.

#### 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2024

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2024 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, capaian di tahun 2023 serta isu-isu strategis di tahun 2024.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah “Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:
  - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
  - b. Peningkatan nilai investasi;
  - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
  - d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
  - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
  - f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
  - b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
  - c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
  - d. Gerakan menanam;
  - e. Merealisasikan BTT;
  - f. Dukungan transportasi dari APBD;
  - g. Rapat teknis TPID;
  - h. Pemantauan harga dan stok;
  - i. Menjaga pasokan;
  - j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
  - k. Bantuan sosial.
2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:
    - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
    - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
    - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
    - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
    - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
    - f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;

- 11)Pemberdayaan UMKM;
  - 12)Pelayanan keluarga berencana;
  - 13)Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
  - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
  - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
  - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
  - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas-3, Penanganan Stunting:

- 1) Sensitif
    - Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
    - Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
    - Penanganan Kawasan Kumuh;
    - Pemberdayaan Ekonomi.
  - 2) Spesifik
    - Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
    - PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
    - PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.
4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
  - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
  - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
  - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
  - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
  - f. Penguatan ketahanan bencana.
- Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:
- 1) Tanggul Tambaklorok;
  - 2) Sungai Plumbon;
  - 3) Sungai Penggaron.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
  - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
  - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas-5:

- 1) *Smart City*;

- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2024 rata-rata lebih baik seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4  
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,  
Pemprov. Jateng dan Kota Semarang Tahun 2024

WILAYAH	LPE	IPM	KEMISKINAN	TPT
Kota Semarang	5,70 – 6,50%	84,40 – 86,00	4,00 – 3,82%	7,60 – 6,50%
Prov. Jateng	4,70 – 5,50%	73,43	9,06 – 8,96%	5,44 – 4,94%
Nasional	5,30 – 5,70%	73,99 – 74,02	6,70 – 7,50 %	5,00 – 5,70 %

Tabel 4. 5

## Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024			
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	15,60 Tahun	P3	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus: a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi; b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu dan <i>accessible</i> ; c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.	Prioritas Nasional 3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing  Prioritas Nasional 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan  Prioritas Provinsi 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.
		Rata-Rata Lama Sekolah	10,61 Tahun			
		Angka Harapan Hidup	77,54 Tahun			
2	Meningkatnya kearifan budaya lokal	Persentase Tingkat kearifan budaya lokal	61,05%			
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat	94,29%			
4	Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,15%			
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	78,00%			
5	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	15,20 - 15,50%	P2	1. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus: a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin; b. Peningkatan pendapatan masyarakat	Prioritas Nasional 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan  Prioritas Provinsi 3. Peningkatan
6	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan	Persentase Penanganan	99,87%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
	sosial	PPKS			<p>misikin;</p> <p>c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;</p> <p>d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;</p> <p>e. Pengembangan kesatuan system <i>demand and supply set</i> tenaga kerja; dan</p> <p>f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.</p>	pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.
7	Meningkatnya produk unggulan daerah	Nilai Ekspor	US\$ 3.539.299.867,06	P1	<p>1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:</p> <p>a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi, dan industri kecil menengah;</p> <p>b. Peningkatan nilai investasi;</p> <p>c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;</p> <p>d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa;</p> <p>e. Pengembangan ekonomi hijau (<i>green economy</i>); dan</p> <p>f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.</p>	<p>Prioritas Nasional 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan</p> <p>Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.</p>
		Persentase peningkatan kunjungan wisata	6,00%			
8	Meningkatnya nilai tambah ekonomi	Persentase peningkatan nilai investasi	7% (27.362.089 juta rupiah)			
		PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	104,12 juta rupiah			
		Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	28,84%			
		Kontribusi kategori Industri	28,72%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
		Pengolahan terhadap PDRB				
9	Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembedayaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	74,00	P3	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;</li> <li>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu dan <i>accessible</i>;</li> <li>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;</li> <li>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan</li> <li>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.</li> </ul>	Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing  Prioritas Provinsi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.
10	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,20	P3	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;</li> <li>b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu dan <i>accessible</i>;</li> <li>c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;</li> <li>d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk; dan</li> <li>e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.</li> </ul>	Prioritas Nasional 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing  Prioritas Provinsi 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.
11	Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas	1.290 1.251 kejadian	P2	1. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
	masyarakat				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;</li> <li>b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;</li> <li>c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;</li> <li>d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;</li> <li>e. Pengembangan kesatuan system <i>demand and supply set</i> tenaga kerja; dan</li> <li>f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.</li> </ul>	transformasi pelayanan publik  Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	52,53	P4	1. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;</li> <li>b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;</li> <li>c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;</li> <li>d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;</li> <li>e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu; dan</li> <li>f. Penguatan ketahanan bencana.</li> </ul>	Prioritas Nasional 5. Memperkuat Infrastruktur mendukung pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar  Prioritas Nasional 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim  Prioritas Provinsi 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.  Prioritas Provinsi 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan
		Indeks Kualitas Udara	95,80			
		Penurunan Emisi CO2	168.864,53 Ton CO2e			
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani	71%			
		Persentase ruang terbuka hijau	45,35%			
13	Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air	73%			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT	
	prasarana perkotaan	secara terpadu				daya tampung.	
		Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi	79%				
		Persentase kawasan banjir dan rob	3,19%				
14	Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas	Persentase lingkungan permukiman sehat	98,00%				
		Persentase rumah layak huni	99,42%				
15	Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	87%				
16	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	109				
17	Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,5876				
		Pengurangan jumlah titik/ruas	2 titik/ruas				

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2024				PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI YANG TERKAIT
		rawan macet				
18	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	>76/BB	P5	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus: <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;</li> <li>Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;</li> <li>Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;</li> <li>Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;</li> <li>Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;</li> <li>Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.</li> </ol>	Prioritas Nasional 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik  Prioritas Provinsi 4. Perbaiki tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
		Opini BPK	WTP			
19	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	83,50			
		Indeks SPBE	4,3			
		Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	>3,47/ST			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,35			

Tabel 4. 6

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2024

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Daerah Kota Semarang	
	Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha	PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PD.1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan	PD.1

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Daerah Kota Semarang	
				didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas.		
Kemiskinan	PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.2	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem
Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PN.3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PD.2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata.	PD.3	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif
	PN.4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				
Kesenjangan wilayah; Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian Sumber Daya; Kedaulatan pangan dan energi	PN.5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	PD.3	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung.	PD.4	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota.
	PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Tata kelola pemerintahan	PN.7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PD.4	Perbaiki tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.	PD.5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

#### 4.3 KONTRIBUSI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2019

Pemerintah Kota Semarang mendukung terlaksananya Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Kota Semarang masuk dalam percepatan Kawasan Kedungsepur. Program kegiatan yang direncanakan dalam mendukung percepatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 7  
Perencanaan Pembangunan Mendukung Perpres No. 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi	Sumber Dana	Progres
1	Pembangunan Technopark	75 Milyar	APBN	- KAJIAN (2018) - MASTERPLAN (2019) - ROADMAP (2020) - DED (2020) - AMDAL DAN ANDALALIN (2021) - LAHAN ASET PEMKOT
2	Pembangunan Jembatan Sronдол - Sekaran	200 Milyar	APBN	- FS (2007) - DED (2008) - UKL UPL (2016) - LARAP (2007)
3	Pembangunan Fly Over Jalan Setiabudi	200 Milyar	APBN	- FS (2010) - DED (2017)
4	Pembangunan Fly Over Madukoro	200 Milyar	APBN	- DED (2017) - UKL UPL (2020) - ANDALALIN (2020) - LARAP (2020) - LAHAN (2021)
5	Normalisasi Sungai Bringin	100 Milyar	APBN	- MASTERPLAN (2007) - DED (2017) - LAHAN KURANG 6 BIDANG (2019 - 2020)
6	Pembangunan Rusun Pekerja	25 Milyar	APBN	- PROPOSAL, DED (2018 DARI PUSAT) - LAHAN EKS BENGKOK
7	Pembangunan Underground Simpang Lima	850 Milyar	KPBU	- FS (2017) - MASTERPLAN (2018) - DED (2020) - AMDAL (2020) - LARAP (2021)
8	Pembangunan BRT Dedicated Lane	600 Milyar	KPBU	- STUDI PENDAHULUAN (2017) - FS DIBANTU PT.SMI (2019-2020) - Kementerian Perhubungan RI telah mengirim surat ke Bappenas terkait Usulan <i>Green Book</i> 2023 Sektor Transportasi dengan kegiatan (National Mass Transit Project Implementation) Metropolitan Semarang - Kelengkapan Readiness Criteria Dokumen Updating Dokumen Feassibility Study telah selesai disusun oleh PT. Mitra Pembangunan Jaya dan telah diupload sebagai data dukung kegiatan
9	Pengembangan LRT Perkotaan	14,760 Milyar	KPBU	- FS (2017) - KAJIAN TOD (2018) - STUDI PENDAHULUAN KPBU (2018) - OBC (2019)

BAB V  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Dengan memperhatikan realisasi kinerja dan keuangan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, serta adanya kebijakan terkait dengan dana transfer tahun 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian pada kerangka pendanaan tahun 2024 meliputi:

- a. Pendapatan daerah dalam RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 5.391.326.887.261, pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 5.231.593.814.823, dan pada perubahan RKPD tahun 2024 disesuaikan menjadi sebesar Rp. 5.736.012.574.623. Terjadi kenaikan sebesar Rp. 344.685.687.362 terhadap RKPD Tahun 2024;
- b. Proyeksi belanja daerah dalam RKPD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.381.127.963.269, pada APBD tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 5.460.613.175.269 dan pada rencana perubahan RKPD tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 5.957.063.431.486. Terjadi peningkatan sebesar Rp. 575.935.468.217 terhadap RKPD tahun 2024;
- c. Proyeksi pembiayaan netto daerah dalam RKPD tahun 2024 adalah sebesar Rp. -10.198.923.992, pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 229.019.360.446, dan pada perubahan RKPD tahun 2024 turun menjadi sebesar Rp. 221.050.856.863. Terjadi peningkatan sebesar Rp. 231.249.780.855 terhadap RKPD tahun 2024.

Proyeksi kerangka pendanaan pada perubahan RKPD tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel V.1  
Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024

URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.431.572.142.261	3.161.678.857.823	3.163.314.524.405
1 Pajak Daerah	2.389.028.620.494	2.389.028.620.494	2.389.028.620.494
2 Retribusi Daerah	936.355.102.989	666.461.818.551	666.899.874.209
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	79.688.418.778	79.688.418.778	79.688.418.778
4 Lain - lain PAD yang Sah	26.500.000.000	26.500.000.000	27.697.610.924
PENDAPATAN TRANSFER	1.959.754.745.000	2.069.914.957.000	2.572.698.050.218
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.377.754.745.000	1.487.914.957.000	1.969.330.706.218
a Dana Perimbangan	1.377.754.745.000	1.456.961.374.000	1.938.377.123.218
b Dana Insentif Daerah	-	30.953.583.000	30.953.583.000
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	582.000.000.000	582.000.000.000	603.367.344.000
a Pendapatan Bagi Hasil	582.000.000.000	582.000.000.000	582.000.000.000
b Bantuan Keuangan	-	-	21.367.344.000
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	5.391.326.887.261	5.231.593.814.823	5.736.012.574.623
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI	4.109.926.403.811	4.185.641.689.236	4.700.062.950.397
1 Belanja Pegawai	1.786.136.328.651	1.799.293.800.988	1.936.970.759.407
2 Belanja Barang dan Jasa	2.183.704.434.918	2.242.762.248.006	2.518.000.442.830
3 Belanja Bunga	-	-	-
4 Belanja Subsidi	-	3.500.000.000	-
5 Belanja Hibah	134.203.895.712	134.203.895.712	239.738.903.630
6 Belanja Bantuan Sosial	5.881.744.530	5.881.744.530	5.352.844.530
BELANJA MODAL	1.169.238.570.360	1.190.512.552.452	1.201.783.713.075
BELANJA TIDAK TERDUGA	101.962.989.098	84.458.933.581	55.216.768.014
JUMLAH BELANJA	5.381.127.963.269	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486
SURPLUS/DEFISIT	10.198.923.992	(229.019.360.446)	(221.050.856.863)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	62.123.076.008	296.341.360.446	288.372.856.863
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
1 Pembentukan Dana Cadangan			
2 Penyertaan Modal Daerah	68.322.000.000	63.322.000.000	63.322.000.000
3 Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	(10.198.923.992)	229.019.360.446	(221.050.856.863)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

## 5.2. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan di tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai target pembangunan Kota Semarang. Program-program pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Semarang Tahun 2024 disusun berdasarkan nomenklatur dan kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung, 5 (lima) unsur penunjang, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

### 5.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 5.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pembangunan unit sekolah baru satuan pendidikan dasar, penambahan ruang kelas belajar mengajar pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana belajar mengajar, peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) satuan pendidikan daerah baik negeri/swasta dan peningkatan lembaga kursus dan pelatihan rujukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) jumlah lembaga kursus dan pelatihan rujukan sebanyak 10 lembaga; (2) APK PAUD 5-6 tahun sebesar 86,14%; (3) APK SMP/MTs sebesar 115,63%; dan (4) APK SD/MI sebesar 111,72%.

##### b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada peningkatan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF sebesar 100%; dan (2) Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sebesar 100%.

##### c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemerataan kauntitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV sebesar 89,82%.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada upaya pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang berijin sebesar 100%; dan (2) Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin sebesar 100%.

5.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan penyediaan layanan kesehatan rujukan dan pengelolaan pelayanan kesehatan puskesmas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai standar sebesar 100%; (2) pemenuhan peralatan kesehatan rujukan Rumah Sakit sebesar 100%; dan (3) pengembangan sarana prasarana Rumah Sakit sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pengawasan perijinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar sebesar 97%.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebesar 100%.

#### 5.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  
Program ini diarahkan pada rehabilitasi dan pembangunan embung, pembangunan dan pemeliharaan polder/kolam retensi, operasi, dan pemeliharaan pompa banjir, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pembangunan sumur air tanah untuk air baku.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob sebesar 98,15%; (2) persentase rumah tangga terlayani air minum layak sebesar 55,75%.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Program ini diarahkan pada pembangunan jaringan Sistem Perpipaan Air Mimin (SPAM) di Kawasan Perdesaan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga terlayani SPAM sebesar 100%.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Program ini diarahkan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah, operasi, dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah domestik dan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengelololaan Limbah Terpadu (IPLT).  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 92,69%.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Program ini diarahkan pada revitalisasi saluran drainase di kawasan Perkotaan (Kawasan Kota Lama), penyediaan sarana sistem drainase Perkotaan dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebesar 66%.
- e. Program Penataan Bangunan Gedung  
Program ini diarahkan pada upaya pengendalian bangunan sesuai dengan fungsi bangunan, gembangunan gedung fasilitas publik serta pemeliharaan gedung cagar budaya.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tertatanya bangunan gedung sebesar 100%.
- f. Program Pengembangan Permukiman  
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan kawasan permukiman.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kawasan permukiman kumuh

dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani sebesar 64%.

g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penataan reklame, dan Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana rumah susun.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu (1) persentase reklame yang berizin sebesar 100%; dan (2) persentase pemanfaatan hunian yang tertata sebesar 100%.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada Pembangunan Semarang *Outer Ring Road* dan Semarang *Middle Ring Road* serta operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 74,90%.

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pelatihan tenaga terampil konstruksi, fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan sebesar 100%.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun sebesar 100%.

5.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di lokasi rawan bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan sebesar 100%.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase rumah layak huni sebesar 99,42%.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), pengelolaan sarana, dan prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyediaan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase perumahan yang terfasilitasi PSU sebesar 100%; dan (2) persentase RTH sebesar 44,36%.

#### 5.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamongpraaja dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penurunan pelanggaran Perda sebesar 10%.

##### b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada prasarana pendukung kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sebesar 20%.

##### c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, serta peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pelayanan pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia sebesar 100%; (2) persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 100%; (3) persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran sebesar 100%; (4) persentase terselenggaranya kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar 100%; dan (5) persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sebesar 100%.

#### 5.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan peningkatan penanganan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan kemampuan tenaga kesejahteraan sosial, dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentasi cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi sebesar 89,00%.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pekerja migran bermasalah sosial yang ditangani sebesar 100%.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada penyediaan permakanaan, sandang dan alat bantu, pemberian pelayanan reunifikasi, pemberian akses layanan Pendidikan dan kesehatan dasar, dan bimbingan fisik, mental spiritual dan social bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani sebesar 99,87%.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial sebesar 70,54%.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada upaya Peningkatan perlindungan sosial bagi Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana alam dan sosial, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani sebesar 100%.

5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

5.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan tenaga kerja baik secara makro maupun mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase program/kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sebesar 70%.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada Peningkatan Pendidikan&pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klistar kompetensi, penyediaan sarana pelatihan kerja, pembinaan Lembaga pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 78%.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, peningkatan pelayanan disabilitas ketenagakerjaan dan peningkatan pelatihan bagi wirausaha baru, *Job Fair*/Bursa Kerja dan peningkatan pelayanan informasi Pasar Kerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 68%.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 5,50%.

5.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, dan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar 100%.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 12,84 poin.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan GK dan Hak anak, dan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak dalam suatu kelembagaan data.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak sebesar 100%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada peningkatan jejaring kemitraan lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pemenuhan hak anak sebesar 100%.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase anak korban kekerasan yang ditangani sebesar 0,01%.

### 5.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan wilayah layanan kemandirian pangan sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan, peningkatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, dan pelaksanaan

pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) ketersediaan energi/kapita sebesar 3058 Kkal/kapita/tahun; (2) persentase cakupan distribusi pangan sebesar 100%; dan (3) persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang sebesar 100%.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada ketersediaan peta ketahanan dan kerentanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu presentase daerah rentan rawan pangan sebesar 3%.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan keamanan pangan segar dan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebesar 82,00%.

5.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada penyelesaian permasalahan sengketa tanah garapan di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselesaikannya sengketa tanah garapan di Kota Semarang sebesar 100%.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada upaya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sebesar 100%.

c. Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, dan penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 100%.

d. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian pemanfaatan tanah kosong.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong sebesar 100%.

5.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terlaksananya penguatan, perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebesar 100%.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada peningkatan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, peningkatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebesar 100%; (2) persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebesar 62%; (3) persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 89%; (4) cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sebesar 30 Ha; dan (5) persentase perubahan emisi CO<sub>2</sub>/emisi gas rumah kaca sebesar 2%.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan pengelolaan taman keanekaragamahayati (Kehati) di Kota Semarang sebesar 100%.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini peningkatan kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpangan sementara limbah B3.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3 sebesar 58%.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 85,60%; dan (2) persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 100%.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebesar 53%.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Program ini diarahkan pada pemberian apresiasi masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan sebesar 12%.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  
Program ini diarahkan pada peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPPLH).  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebesar 100%.
- i. Program Pengelolaan Persampahan  
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, dan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA sebesar 91,50%; (2) persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 28%; dan (3) persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 71%.

#### 5.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, penyelenggaraan pendaftaran penduduk, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase perekaman KTP-Elektronik sebesar 99,50%; dan (2) persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA sebesar 74%.

##### b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil, penyelenggaraan pencatatan sipil dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 97,50%.

##### c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 100%; dan (2) persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 100%.

##### d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi kependudukan untuk kebutuhan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pengelolaan profil kependudukan daerah sebesar 100%.

#### 5.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kelurahan yang menerapkan sistem informasi sebesar 100%.

##### b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu cakupan pemberdayaan lembaga masyarakat sebesar 100%.

#### 5.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Peningkatan kuantitas penduduk melalui penguatan kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur Pendidikan formal/non formal dan penyediaan dan pengembangan materi Pendidikan kependudukan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) umur istri < 20 Tahun sebesar 0,50%.

##### b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada peningkatan advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan angka kelahiran total (TFR) sebesar 2%.

##### c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase cakupan anggota bina keluarga aktif sebesar 60,22%.

#### 5.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada Penyediaan perlengkapan jalan, peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C, Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyediaan angkutan umum orang dan/atau barang, dan Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan fasilitas parkir.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota sebesar 65,51%; (2) rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk

sebesar 6,87 (dalam rasio); (3) jumlah trayek BRT sebanyak 14 trayek; (4) persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum sebesar 35%; dan (5) persentase pengelolaan Parkir on The Street sebesar 90%.

#### 5.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan media komunikasi publik, peningkatan pelayanan informasi publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat sebesar 100%.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelayanan publik dan pemerintahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggaranya pengelolaan *E-Government* sebesar 100%.

#### 5.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, dan peningkatan fasilitasi pengajuan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam sebesar 3%.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kepatuhan koperasi pada peraturan perundang-undangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi sebesar 50%.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Koperasi sehat sebesar 32%.

d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebesar 10%; dan (2) persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi pelatihan sebesar 1%.

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase koperasi yang meningkat omsetnya sebesar 27%.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan peran serta para pemangku kepentingan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan sebesar 3%.

g. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembanggan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya sebesar 20%.

#### 5.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan dalam perizinan berinvestasi, dan penyediaan data informasi potensi peluang investasi di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah penanam modal yang mendapat fasilitasi investasi sebanyak 3.700 penanam modal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan promosi investasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA) sebanyak 541 investor.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase izin terbit sesuai SP sebesar 95,50%.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran rasio daya serap tenaga kerja dengan nilai 2,00.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada peningkatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal sebesar 97%.

5.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumberdaya kepemudaan yang berdaya saing, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 40 organisasi kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan olahraga dan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, pengembangan olahraga berprestasi dan olahraga rekreasi, dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) jumlah atlet prestasi sebanyak 1212 atlet; dan (2) jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun sebanyak 5 lapangan;

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah pembinaan pembentukan karakter bagi anggota pramuka Kota Semarang sebanyak 50 kegiatan.

5.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terwujudnya penyelenggaraan statistik sektoral sebesar 100%.

#### 5.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada peningkatan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terselenggaranya keamanan informasi Pemerintahan Daerah sebesar 100%.

#### 5.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan apresiasi terhadap kegiatan budaya dan pelaku seni budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase apresiasi kelompok/sanggar terhadap kegiatan seni budaya sebesar 25%.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kelompok/sanggar dan peningkatan tata kelola lembaga seni budaya tradisional.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase apresiasi kelompok/sanggar terhadap pengembangan seni budaya tradisional sebesar 25%.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pelestarian dan pengelolaan kekayaan cagar budaya sebesar 85,45%.

#### 5.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan, pengembangan layanan perpustakaan elektronik, penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, dan gerakan budaya gemar membaca.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk sebesar 1,00.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan pelestarian naskah kuni milik daerah; dan pengembangan koleksi budaya etnis.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan sebesar 100%.

#### 5.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip  
Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan statis, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 100%.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip  
Program ini diarahkan pada perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, dan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase jumlah arsip musnah sebesar 100%.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip  
Program ini diarahkan peningkatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sebesar 70%.

#### 5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

##### 5.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  
Program ini diarahkan pada peningkatan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil, dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 3.113,69 ton.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan dan peningkatan prasarana pembudidaya ikan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3.961,33 ton.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan usaha perikanan tangkap.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan sebanyak 3 kasus.
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolah dan pemasaran skala mikro dan kecil, dan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produksi ikan olahan sebanyak 17.631,86 ton.

#### 5.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  
Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan daya tarik wisata, dan pengelolaan destinasi pariwisata.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar 100%.
- b. Program Pemasaran Pariwisata  
Program ini diarahkan pada penguatan promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media, fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata dan peningkatan kerjasama kemirataan pariwisata.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase daya tarik wisata yang dipasarkan sebesar 100%.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase SDM Pariwisata sebesar 80%.

#### 5.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian  
Program ini diarahkan pada penyediaan sarana pertanian, peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman, dan peningkatan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) produksi hasil peternakan sebesar 36.219,00 ton; dan (2) jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 50.857,23 ton.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian  
Program ini diarahkan pada pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah produktivitas pertanian per ha per tahun sebesar 6,8 ton/ha.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, dan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar -5%.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian terkait serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan sebesar 90%.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian, dan penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluh pertanian.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama sebesar 31 kelompok tani.

#### 5.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pengurusan izin pedagang pasar, PKL, tanda daftar gudang dan Surat Tanda Pendaftaran Wiralaba (STPW).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif sebanyak 22 pasar.

c. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase koefisien variasi harga antar waktu sebesar 3,99%.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah nilai ekspor non migas sebesar US\$ 1.615.736.908,00.

e. Program Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan dan pembinaan metrologi legal.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 81%.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada peningkatan promosi dan pemasaran penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi sebesar 30%.

5.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada pembangunan sumberdaya dan sarana prasarana industri, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase pertambahan jumlah Sentra IKM sebesar 88%; (2) persentase pertambahan IKM sebesar 0,50%.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif sebesar 4%.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi industri.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase tersedianya data informasi industri sebesar 0,5%.

5.2.4. Unsur Pendukung

5.2.4.1. Sekretariat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, peningkatan fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan, peningkatan komunikasi dan publikasi kegiatan KDH, dan peningkatan kerjasama daerah dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Semarang.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah sebesar 100%; (2) Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan

sebanyak 9 kegiatan; (3) Persentase Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah sebesar 60%; (4) Persentase Indeks Pelayanan Publik sebesar 123%.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD, peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) Persentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah sebesar 100%; (2) Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD sebanyak 1 dokumen; (3) Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar 100%.

5.2.4.2. Sekretariat DPRD

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas tugas dan fungsi DPRD.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu jumlah Raperda yang disetujui DPRD sebanyak 17 dokumen.

5.2.5. Unsur Penunjang

5.2.5.1. Perencanaan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan peningkatan pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase capaian kinerja perencanaan tataran Kota sebesar 100%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebesar 100%; (2) persentase capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian

sumber daya alam sebesar 100%; (3) persentase capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan sebesar 100%.

#### 5.2.5.2. Keuangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan penganggaran penyusunan APBD, Peningkatan penatausahaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD, dan peningkatan kualitas pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) persentase SILPA Terhadap APBD sebesar 1,20%; dan (2) persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer sebesar 100%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan penatausahaan barang milik daerah, dan peningkatan pelaporan barang milik daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase legalitas aset sebesar 90,24%.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 10%.

#### 5.2.5.3. Kepegawaian

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian daerah, peningkatan tertib administrasi kepegawaian, dan Peningkatan dan penegakan disiplin pegawai.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu (1) rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 258,36%; (2) persentase keterisian jabatan JPT pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi sebesar 100%; (3) persentase akurasi data kepegawaian sebesar 99%; (4) persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin sebesar 99%; (5) persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik sebesar 81,50%; (6) rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 20,98%; dan (7) rasio jabatan fungsional bersertifikat

kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 100%.

#### 5.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Program ini diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis ASN, dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional) seminar, kursus, dan sejenisnya sebesar 45%.

#### 5.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Program ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan pengembangan inovasi dan teknologi.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase inovasi dan hasil kelitbang yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

#### 5.2.6. Unsur Pengawas

##### 5.2.6.1. Inspektorat Daerah

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan  
Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan internal dan peningkatan penyelesaian kasus-kasus pengaduan masyarakat.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu nilai maturitas SPIP pada nilai 3,06.

#### 5.2.7. Unsur Kewilayahan

##### 5.2.7.1. Kecamatan

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Program ini diarahkan pada peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan berbasis teknologi informasi.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) sebesar 93,00%.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah kelurahan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan rata-rata sebesar 99,00%.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum sebesar 20,00%.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional rata-rata sebesar 95,00%.

## 5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

### 5.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran indeks pengamalan pancasila sebesar 2,20.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik  
Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai-partai politik, pemilihan umum/pemilihan KDH serta pemantauan situasi politik di daerah.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran angka indeks kebebasan sipil sebesar 66.

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
 Program ini peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran indeks kinerja ormas sebesar 58,00.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya  
 Program ini diarahkan peningkatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu besaran indeks kerukunan umat beragama sebesar 71,00.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
 Program ini diarahkan pada peningkatan pemantapan kewasdaan dini, kesejasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, dan penanganan konflik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu persentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan IPOLEKSOSBUDHANKAM sebesar 83%.

Untuk mencapai target indikator program-program pada setiap urusan pemerintahan, unsur penunjang, unsur pendukung, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum, setiap Perangkat Daerah melaksanakan Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat mendukung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator:

- 1) Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan sebesar 100%;
- 2) persentase peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN sebesar 100%;
- 3) persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sebesar 100%; dan
- 4) persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD sebesar 100%.

### 5.3. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024

Pemerintah Pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah di tahun 2024 ini ditempuh dengan ditetapkannya 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya mendukung 7 (tujuh) Prioritas Pemerintah Pusat atau Prioritas Nasional, dukungan ini ditujukan agar Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang selaras atau konsisten dengan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dirangkum sebagaimana tercantum dalam Tabel V.2.

Tabel V.2  
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Semarang  
terhadap Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	50	256.509.788.701	DINAS TENAGA KERJA
				DINAS PERTANIAN
				DINAS PERINDUSTRIAN
				DINAS PERIKANAN
				DINAS PERDAGANGAN
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				DINAS KETAHANAN PANGAN
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	20	191.926.539.797	SATPOL PP
				DINAS SOSIAL
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	16	2.407.098.727.740	DINAS PENDIDIKAN
				DINAS KESEHATAN
				RSUD KRMT WONGSONEGORO
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	7	73.865.947.973	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	15	714.854.038.785	DINAS PEKERJAAN UMUM
				DINAS PENATAAN RUANG
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	26	726.771.262.375	DINAS PERHUBUNGAN
				DINAS PEKERJAAN UMUM
				DINAS PENATAAN RUANG
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL				
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam	119	1.586.037.126.115	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Prioritas Nasional	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
	dan transformasi pelayanan publik			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
				SEKRETARIAT DAERAH
				SEKRETARIAT DPRD
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				BADAN PENDAPATAN DAERAH
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				INSPEKTORAT
				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				KECAMATAN SEMARANG UTARA
				KECAMATAN SEMARANG BARAT
				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				KECAMATAN GUNUNG PATI
				KECAMATAN TUGU
				KECAMATAN MIJEN
				KECAMATAN GENUK
				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				KECAMATAN TEMBALANG
				KECAMATAN CANDISARI
				KECAMATAN BANYUMANIK
				KECAMATAN NGALIYAN
				KECAMATAN GAYAMSARI
				KECAMATAN PEDURUNGAN
	Jumlah	253	5.957.063.431.486	

#### 5.4. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024

Pemerintah Provinsi menyatakan bahwa upaya pemerataan Pembangunan yang dilakukan Provinsi di tahun 2024 ini ditempuh dengan ditetapkannya 4 (empat) Prioritas Daerah. Pemerintah Kota Semarang sepenuhnya mendukung 4 (empat) Prioritas Pemerintah Provinsi, dukungan ini ditujukan agar Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang selaras atau konsisten dengan Pembangunan yang dilakukan

Pemerintah Provinsi juga berkesinambungan dengan Prioritas Nasional. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 terhadap Prioritas Provinsi tahun 2024 dirangkum sebagaimana tercantum dalam Tabel V.3.

Tabel V.3  
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah Pemerintah Kota Semarang  
terhadap Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
1.	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	53	267.903.407.994	DINAS TENAGA KERJA
				DINAS PERTANIAN
				DINAS PERINDUSTRIAN
				DINAS PERIKANAN
				DINAS PERDAGANGAN
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				DINAS KETAHANAN PANGAN
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata	40	2.661.497.596.217	SATPOL PP
				RSUD KRMT WONGSONEGORO
				DINAS SOSIAL
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				DINAS PENDIDIKAN
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				DINAS KESEHATAN
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan	41	1.441.625.301.160	DINAS SOSIAL
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				DINAS PERHUBUNGAN
				DINAS PENATAAN RUANG

No	Prioritas Provinsi	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
	daya dukung dan daya tampung			DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				DINAS PEKERJAAN UMUM
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
4.	Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	119	1.586.037.126.115	SEKRETARIAT DPRD
				SEKRETARIAT DAERAH
				KECAMATAN TUGU
				KECAMATAN TEMBALANG
				KECAMATAN SEMARANG UTARA
				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				KECAMATAN SEMARANG BARAT
				KECAMATAN PEDURUNGAN
				KECAMATAN NGALIYAN
				KECAMATAN MIJEN
				KECAMATAN GUNUNG PATI
				KECAMATAN GENUK
				KECAMATAN GAYAMSARI
				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				KECAMATAN CANDISARI
				KECAMATAN BANYUMANIK
				INSPEKTORAT
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Prioritas Provinsi	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				BADAN PENDAPATAN DAERAH
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Jumlah	253	5.957.063.431.486	

#### 5.5. Dukungan Program Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan daerah, berkesinambungan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi sebagai bentuk konsistensi terhadap permasalahan/isu strategis yang ada di Kota Semarang. Dalam penerapannya, kebijakan Pembangunan daerah menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial yang memerhatikan pengaruh terhadap daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha, kemiskinan, kualitas hidup dan sumber daya manusia, kesenjangan wilayah, keberlanjutan pangan, energi, serta tata kelola pemerintahan.

Pembangunan yang dilakukan, juga dikontribusikan utuh secara kolaboratif oleh semua perangkat daerah, kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang tersebut, terangkum di dalam Tabel V.4.

Tabel V.4  
Rekapitulasi Dukungan Program Daerah terhadap Kebijakan-Kebijakan atau Prioritas Daerah Kota Semarang

No	Prioritas Daerah	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
1.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	53	267.903.407.994	DINAS TENAGA KERJA
				DINAS PERTANIAN
				DINAS PERINDUSTRIAN
				DINAS PERIKANAN
				DINAS PERDAGANGAN
				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

No	Prioritas Daerah	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
				PINTU
				DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				DINAS KETAHANAN PANGAN
				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem	20	191.926.539.797	SATPOL PP
				DINAS SOSIAL
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif	20	2.469.571.056.420	RSUD KRMT WONGSONEGORO
				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				DINAS PENDIDIKAN
				DINAS KESEHATAN
				DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota	41	1.441.625.301.160	DINAS SOSIAL
				DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				DINAS PERHUBUNGAN
				DINAS PENATAAN RUANG
				DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				DINAS PEKERJAAN UMUM
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota	119	1.586.037.126.115	SEKRETARIAT DPRD
				SEKRETARIAT DAERAH
				KECAMATAN TUGU
				KECAMATAN TEMBALANG
				KECAMATAN SEMARANG UTARA
				KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				KECAMATAN SEMARANG SELATAN

No	Prioritas Daerah	Jumlah Program	Pagu	Perangkat Daerah
				KECAMATAN SEMARANG BARAT
				KECAMATAN PEDURUNGAN
				KECAMATAN NGALIYAN
				KECAMATAN MIJEN
				KECAMATAN GUNUNG PATI
				KECAMATAN GENUK
				KECAMATAN GAYAMSARI
				KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
				KECAMATAN CANDISARI
				KECAMATAN BANYUMANIK
				INSPEKTORAT
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
				BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				BADAN PENDAPATAN DAERAH
				BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Jumlah	253	5.957.063.431.486	

**TABEL V.5**  
**REKAPITULASI PAGU PER BIDANG URUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

NO.	BIDANG URUSAN	JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	817.569.467.649	827.582.078.210	1.219.086.575.864	DISDIK
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.028.577.228.602	1.032.334.786.202	1.147.776.290.038	DINKES dan RSUD KRMT WONGSONEGORO
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	587.014.048.908	605.469.106.490	571.824.864.303	DPU, DISTARU, dan DISPERKIM
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	316.168.328.564	321.392.452.506	2.011.156.110	DISPERKIM
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	72.585.019.009	80.965.807.009	364.533.912.537	SATPOL PP, DAMKAR, dan BPBD
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	34.393.388.438	34.736.103.638	87.147.018.319	DINSOS
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	18.636.644.343	19.068.644.343	32.393.241.203	DISNAKER
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.994.211.744	23.490.999.744	17.426.385.847	DPPPA
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	16.633.805.374	18.313.519.874	21.867.583.411	DISHANPAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.254.314.516	2.057.292.572	2.495.897.285	DISTARU
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	116.477.859.006	117.026.516.606	18.463.443.205	DLH
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21.215.594.269	21.215.594.269	126.313.494.587	DISPENDUKCAPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.858.985.515	1.918.985.515	22.495.887.019	DPPPA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.652.936.318	25.152.936.318	40.235.861.838	DISDALDUK KB
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	307.979.701.993	307.979.701.993	324.336.601.989	DISHUB
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	58.849.386.628	58.849.386.628	62.352.656.556	DISKOMINFO
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	25.509.465.294	25.709.465.294	626.003.608	DINKOP UM
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	19.579.371.173	24.484.728.773	770.921.670	DPMPSTP
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	57.555.817.256	58.205.817.256	24.169.289.780	DISPORA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	626.003.608	626.003.608	26.273.689.422	DISKOMINFO
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	690.921.670	690.921.670	62.472.328.680	DISKOMINFO

NO.	BIDANG URUSAN	JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.083.729.058	12.083.729.058	11.393.619.293	DISBUDPAR
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.115.912.598	16.415.912.598	37.702.267.394	ARPUSDA
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	957.583.435	1.057.583.435	16.843.564.687	ARPUSDA
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.326.649.576	12.606.011.176	901.291.805	DISPERIKAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	38.132.237.874	38.203.595.474	12.528.527.156	DISBUDPAR
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	33.590.911.872	38.295.720.818	39.274.038.927	DISPERTAN
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	53.678.501.038	65.398.501.038	59.683.990.424	DISDAG
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	16.144.548.213	17.344.548.213	20.988.156.546	DISPERIN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	205.902.531.465	217.375.282.557	220.762.508.673	SETDA
4.02	SEKRETARIAT DPRD	130.605.074.955	134.626.999.755	135.206.559.595	SETWAN
5.01	PERENCANAAN	29.379.982.079	26.601.864.991	25.606.137.963	BAPPEDA
5.02	KEUANGAN	338.145.041.109	310.640.985.592	233.650.191.543	BPKAD dan BAPENDA
5.03	KEPEGAWAIAN	27.193.280.467	27.195.452.467	24.786.780.358	BKPP
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.489.994.670	6.489.994.670	6.286.861.330	BKPP
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.500.000.000	11.962.150.326	9.615.074.508	BRIDA
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	27.561.067.642	27.561.067.642	27.048.125.782	INSPEKTORAT
7.01	KECAMATAN	783.160.319.861	787.702.114.261	796.588.663.733	KECAMATAN SEMARANG SELATAN, SEMARANG UTARA, SEMARANG BARAT, SEMARANG TIMUR, SEMARANG TENGAH, GUNUNG PATI, TUGU, MIJEN, GENUK, GAJAHMUNGKUR, TEMBALANG, CANDISARI, BANYUMANIK, NGALIYAN, GAYAMSARI, dan PEDURUNGAN (16 KECAMATAN)
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	97.338.097.480	101.780.812.680	103.123.968.498	KESBANGPOL
	JUMLAH	5.381.127.963.269	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486	

**TABEL V.6**  
**PAGU INDIKATIF RENCANA PROGRAM PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
DINAS PENDIDIKAN						817.569.467.649	827.582.078.210	1.219.086.575.864
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%	656.333.073.069	657.054.999.150	832.547.588.231
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.14 %	86.14 %	86.14 %	81.002.180.000	96.131.255.080	316.159.277.780
		APK SD/MI	111.72 %	111.72 %	111.72 %			
		APK SMP/MTs	115.63 %	115.63 %	115.63 %			
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	585.000.000	585.000.000	585.000.000
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%			
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82 %	89.82 %	89.82 %	79.149.214.580	73.310.823.980	69.474.709.853
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	320.000.000
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%			
DINAS KESEHATAN						459.470.520.593	463.228.078.193	553.753.446.009
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	350.177.835.489	350.696.693.089	354.309.723.379
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	108.683.965.654	111.922.665.654	190.807.477.655
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	250.000.000	250.000.000	4.678.853.100
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	97.00 Persen	97.00 Persen	185.000.000	185.000.000	612.708.054
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	173.719.450	173.719.450	3.344.683.821
RSUD KRMT WONGSONEGORO						569.106.708.009	569.106.708.009	594.022.844.029
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	100 persen	100 persen	399.106.708.009	399.106.708.009	422.194.748.075
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	100 persen	100 persen			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	100 persen	100 persen	170.000.000.000	170.000.000.000	171.828.095.954
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	100 persen	100 persen			
DINAS PEKERJAAN UMUM						455.739.943.809	465.568.879.695	452.026.359.077
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	162.174.385.496	169.903.321.382	106.920.035.673
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		perkantoran SKPD						
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15 Persen	98.15 Persen	98.15 Persen	46.043.232.671	46.043.232.671	45.202.477.876
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00 Persen	66.00 Persen	66.00 Persen	130.012.967.014	130.512.967.014	126.206.911.850
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90 Persen	74.90 Persen	74.90 Persen	117.509.358.628	119.109.358.628	173.696.933.678
DINAS PENATAAN RUANG						125.786.259.729	132.215.359.481	108.211.606.407
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	20.559.177.802	21.907.326.503	23.191.843.180
		Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	93.833.260.289	99.138.898.475	74.234.412.896
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	820.022.760	736.355.400	670.595.866
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.146.590.000	1.347.685.408	1.185.862.940
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	7.172.894.362	7.027.801.123	6.917.735.415
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	806.338.680	707.827.708	690.642.406
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	877.975.836	877.975.836	851.342.836

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	120.000.000	120.000.000	117.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terkelolanya izin membuka tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	300.000.000	201.489.028	156.170.868
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesaikannya penatagunaan tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	120.000.000	120.000.000	166.000.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						323.910.488.450	331.134.612.392	378.131.967.466
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75 Persen	55.75 Persen	72,30 Persen	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	92,69%	92,69%	3.949.197.688	3.949.197.688	3.354.872.690
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64.00 persen	64.00 persen	64.00 persen	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	100%	100%	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	100%	100%	47.857.737.470	48.281.861.412	48.422.716.428
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	100%	100%			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%	100%	100%			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%	100%	100%			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	100%	100%	5.262.830.450	5.362.830.450	5.843.304.982
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	99,42%	99,42%	13.663.207.352	15.663.207.352	16.178.366.015

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	249.384.553.292	252.084.553.292	294.089.525.112
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.36 Persen	44.36 Persen	44.36 Persen			
SATPOL PP						29.363.999.677	36.629.357.277	35.734.746.205
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	19.384.910.067	19.781.267.667	19.748.003.572
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN SKPD	100%	100%	100%			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan linmas	16%	16%	16%	9.979.089.610	16.848.089.610	15.986.742.633
		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen			
DINAS PEMADAM KEBAKARAN						29.566.739.032	30.382.169.432	37.077.019.385
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.176.776.590	18.451.597.206	18.235.759.760
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.389.962.442	11.930.572.226	18.841.259.625
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		Pemadam Kebakaran						
		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						13.654.280.300	13.954.280.300	14.335.252.729
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.059.022.642	9.159.022.642	9.293.288.603
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 %	20.00 %	20.00 %	4.595.257.658	4.795.257.658	5.041.964.126
		Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	20.00 persen	20.00 persen			
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	100 persen			
DINAS SOSIAL						34.393.388.438	34.736.103.638	32.393.241.203
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Dokumen kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	10.491.229.734	10.633.944.934	10.175.654.209

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	89.00 Persen	89.00 Persen	89.00 Persen	7.168.771.074	7.168.771.074	6.938.146.301
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	40.955.130	40.955.130	35.216.132
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87 Persen	99.87 Persen	99.87 Persen	8.531.393.330	8.631.393.330	8.647.043.480
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	70.54 Persen	70.54 Persen	70.54 Persen	7.009.078.990	7.009.078.990	5.404.181.561
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.151.960.180	1.251.960.180	1.192.999.520
DINAS TENAGA KERJA						18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.291.730.613	14.423.730.613	13.622.631.686
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana	70.00 Persen	70.00 Persen	70.00 Persen	142.722.500	142.722.500	134.047.250

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		tenaga kerja						
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00 Persen	78.00 Persen	78.00 Persen	2.975.461.798	3.075.461.798	2.310.307.298
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00 Persen	68.00 Persen	68.00 Persen	669.033.288	869.033.288	823.717.338
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50 Persen	5.50 Persen	5.50 Persen	557.696.144	557.696.144	535.682.275
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						24.853.197.259	25.409.985.259	24.363.480.696
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	14.324.076.794	14.352.169.630	13.291.031.183
		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%			
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.488.449.604	1.528.449.604	1.423.250.884
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	0.011 %	0.011 %	2.547.556.594	2.861.551.594	2.649.814.502
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12.84 point	12.84 point	12.84 point			
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	2.561.500.000	2.581.500.000	2.506.698.720
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	278.511.810	335.219.990	246.319.980
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.794.116.942	1.832.108.926	1.577.108.926
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani			0.01 Persen	-	-	173.359.216

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	545.129.154	545.129.154	699.977.134
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.313.856.361	1.373.856.361	1.795.920.151
DINAS KETAHANAN PANGAN						16.633.805.374	18.313.519.874	18.463.443.205
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.783.223.571	9.982.848.171	9.178.837.983
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	144.204.400	144.204.400	137.548.300
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.216.557.190	5.312.647.090	6.520.970.394
		Presentase Cakupan Distribusi	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100.00 %	100.00 %	100.00 %			
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3 Persen	3 Persen	3 Persen	379.648.149	507.648.149	474.537.209
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,00 Persen	82,00 Persen	82,00 Persen	2.110.172.064	2.366.172.064	2.151.549.319
DINAS LINGKUNGAN						116.477.859.006	117.026.516.606	126.313.494.587

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
HIDUP								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	41.542.867.032	41.614.224.632	47.628.753.694
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	566.159.024	566.159.024	524.670.792
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	30.00 Ha	30.00 Ha	30.00 Ha	5.140.013.861	5.140.013.861	4.997.461.095
		Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	2.00 Persen	2.00 Persen			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89.00 Persen	89.00 Persen	89.00 Persen			
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	62.00 Persen	62.00 Persen	62.00 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.161.729.186	1.161.729.186	1.136.804.149
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58.00 Persen	58.00 Persen	58.00 Persen	378.480.513	378.480.513	357.477.977

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	723.917.835	723.917.835	661.561.250
		Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.60 Persen	85.60 Persen	85.60 Persen			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53.00 Persen	53.00 Persen	53.00 Persen	1.888.966.089	1.888.966.089	1.782.483.952
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.00 Persen	12.00 Persen	12.00 Persen	291.129.200	291.129.200	279.629.974
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	128.807.617	128.807.617	119.599.546
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71.00 Persen	71.00 Persen	71.00 Persen	64.655.788.649	65.133.088.649	68.825.052.158
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	28.00 Persen	28.00 Persen	28.00 Persen			
		Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.50 Persen	91.50 Persen	91.50 Persen			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						21.215.594.269	21.215.594.269	22.495.887.019
	PROGRAM	Pengelolaan administrasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.828.925.720	18.828.925.720	20.068.156.849

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	kepegawaian SKPD						
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.50 Persen	99.50 Persen	99.50 Persen	1.384.500.753	1.384.500.753	1.410.052.505
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00 Persen	74.00 Persen	74.00 Persen			
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.50 Persen	97.50 Persen	97.50 Persen	443.893.836	443.893.836	453.625.743
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	468.364.800	468.364.800	433.144.582
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	89.909.160	89.909.160	130.907.340
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						20.652.936.318	25.152.936.318	40.235.861.838
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.993.623.118	10.202.040.580	10.476.473.946
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	0.50 Persen	0.50 Persen	921.774.750	1.122.603.073	1.458.391.663
	PROGRAM PEMBINAAN	Cakupan peserta KB Aktif	77.24 %	77.24 %	77.24 %	8.552.144.771	12.578.989.866	18.671.893.430

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	KELUARGA BERENCANA (KB)							
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.00 %	11.00 %	11.00 %			
		PUS Unmeet need	8.04 Persen	8.04 Persen	8.04 Persen			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22 Persen	60.22 Persen	60.22 Persen	1.185.393.679	1.249.302.799	9.629.102.799
DINAS PERHUBUNGAN						307.979.701.993	307.979.701.993	324.336.601.989
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	66.388.602.519	66.347.296.699	67.966.012.055
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	14.00 trayek	14.00 trayek	14.00 trayek	241.591.099.474	241.632.405.294	256.370.589.934
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	65.51 Persen	65.51 Persen	65.51 Persen			
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	35 Persen	35 Persen	35 Persen			
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	90 Persen	90 Persen	90 Persen			
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.87 Rasio	6.87 Rasio	6.87 Rasio			
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						60.166.311.906	60.166.311.906	63.749.581.834
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.912.838.296	18.912.838.296	19.320.583.999
		Persentase Peningkatan	100 persen	100 persen	100 persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		Kemampuan ASN (Diskominfo)						
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.611.328.662	9.611.328.662	9.761.328.662
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	30.325.219.670	30.325.219.670	33.270.743.895
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	626.003.608	626.003.608	626.003.608
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	690.921.670	690.921.670	770.921.670
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						25.509.465.294	25.709.465.294	24.169.289.780
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	12.285.617.086	12.185.617.086	11.791.519.646
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	3.00 Persen	3.00 Persen	160.941.690	160.941.690	160.941.690
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	666.228.580	521.133.000	475.289.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	32.00 Persen	32.00 Persen	32.00 Persen	250.816.800	395.912.380	304.231.220

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen	560.300.000	710.300.000	657.194.500
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	1.00 Persen	1.00 Persen			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27 Persen	27 Persen	27 Persen	2.636.334.793	2.686.334.793	2.507.615.933
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00 Persen	3.00 Persen	3.00 Persen	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	20.00 Persen	20.00 Persen	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						19.579.371.173	24.484.728.773	26.273.689.422
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.225.614.506	14.696.972.106	12.668.232.286
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi	3700.00 Penanam Modal	3700.00 Penanam Modal	3700.00 Penanam Modal	918.119.127	918.119.127	1.891.119.196
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541.00 Investor	541.00 Investor	541.00 Investor	1.187.015.175	1.187.015.175	1.317.556.175
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	95.50 Persen	95.50 Persen	2.430.004.902	6.614.004.902	8.921.346.302
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	2 Nilai	2 Nilai	100.000.000	250.000.000	656.818.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PENANAMAN MODAL							
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97.00 Persen	97.00 Persen	97.00 Persen	718.617.463	818.617.463	818.617.463
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						57.555.817.256	58.205.817.256	62.472.328.680
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 persen	100 persen	100 persen	13.271.918.746	13.271.918.746	15.663.202.715
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 persen	100 persen	100 persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 persen	100 persen	100 persen			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	40.00 Organisasi	40.00 Organisasi	40.00 Organisasi	3.068.762.000	3.268.762.000	3.253.512.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1212.00 jumlah	1212.00 jumlah	1212.00 jumlah	38.815.136.510	39.265.136.510	41.155.613.965
		Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	5 Lapangan	5 Lapangan			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						50.215.966.932	50.287.324.532	49.095.886.687
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25.00 Persen	25.00 Persen	25.00 Persen	9.190.629.034	9.190.629.034	8.943.204.869
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25.00 Persen	25.00 Persen	25.00 Persen	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	85.45 Persen	85.45 Persen	85.45 Persen	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960
	PROGRAM	Persentase Kinerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.575.249.000	18.646.606.600	17.969.925.840

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar						
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.180.259.400	14.180.259.400	14.280.259.400
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	80.00 Persen	80.00 Persen	80.00 Persen	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH						17.073.496.033	17.473.496.033	17.744.856.492
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	13.492.177.408	13.752.632.078	14.660.925.364
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1 Rasio	1 Rasio	2.391.952.830	2.431.498.160	1.954.956.963
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	231.782.360	231.782.360	227.682.360
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	519.019.197	519.019.197	489.310.533

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik						
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	390.045.572	390.045.572	364.759.986
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	70 Persen	70 Persen	70 Persen	48.518.666	148.518.666	47.221.286
DINAS PERIKANAN						12.326.649.576	12.606.011.176	12.528.527.156
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	30.00 Orang	30.00 Orang	7.235.678.248	7.216.039.848	6.941.637.248
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3113.69 ton	3113.69 ton	3113.69 ton	1.151.000.000	1.350.000.000	1.467.600.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3961.33 ton	3961.33 ton	3961.33 ton	2.573.752.000	2.573.752.000	2.652.934.380
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi ikan olahan	17631.86 ton	17631.86 ton	17631.86 ton	1.016.219.328	1.116.219.328	1.116.355.528
		2. Angka konsumsi ikan per kapita	40.19 Kg/kapita/tahun	40.19 Kg/kapita/tahun	40.19 Kg/kapita/tahun			
DINAS PERTANIAN						33.590.911.872	38.295.720.818	39.274.038.927
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	21.634.118.268	22.487.092.750	21.774.242.521
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50857.23 ton	50857.23 ton	50857.23 ton	5.872.993.578	9.913.216.348	11.439.679.336
		Produksi hasil peternakan	36219.00 ton	36219.00 ton	36219.00 ton			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	4.440.812.257	4.106.927.525	4.165.145.445
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 Persen	-5.00 Persen	-5.00 Persen	400.000.000	429.221.428	427.876.428
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90.00 Persen	90.00 Persen	90.00 Persen	158.500.000	187.721.428	154.065.212
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31.00 kelompok	31.00 kelompok	31.00 kelompok	1.084.487.769	1.171.541.339	1.313.029.985
DINAS PERDAGANGAN						53.678.501.038	65.398.501.038	59.683.990.424
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	34.969.046.376	36.488.802.694	34.138.035.886
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	186.156.000	147.230.000	147.230.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22 pasar	22 pasar	22 pasar	15.129.797.000	21.406.060.682	21.745.929.196
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99 Persen	3.99 Persen	3.99 Persen	338.078.500	3.937.864.500	325.260.864
	PROGRAM	Nilai ekspor non migas	1615736908.00	1615736908.00	1615736908.00	913.210.000	989.285.000	1.018.741.976

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PENGEMBANGAN EKSPOR		US\$	US\$	US\$			
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81 Persen	81 Persen	81 Persen	1.003.378.162	1.129.563.162	1.094.082.802
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30 Persen	30 Persen	30 Persen	1.138.835.000	1.299.695.000	1.214.709.700
DINAS PERINDUSTRIAN						16.144.548.213	17.344.548.213	20.988.156.546
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.818.184.428	9.818.184.428	9.631.976.028
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	0.50 Persen	0.50 Persen	5.730.098.511	6.535.298.511	8.755.666.344
		Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	88.00 Persen	88.00 Persen	88.00 Persen			
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	4.00 Persen	4.00 Persen	258.000.000	490.000.000	1.899.448.900
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	0.50 Persen	0.50 Persen	338.265.274	501.065.274	701.065.274
SEKRETARIAT DAERAH						205.902.531.465	217.375.282.557	220.762.508.673
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	143.287.510.532	146.792.861.624	142.875.529.052
		OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43 OPD	43 OPD	43 OPD			
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100%	100%	100%			
		Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%			
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%			
		Perencanaan dan	100%	100%	100%			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		Pelaporan Kinerja SKPD						
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%			
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%			
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%			
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	54.118.978.893	61.036.378.893	67.545.366.209
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	60.00 Persen	60.00 Persen	60.00 Persen			
		Indek Pelayanan Publik	123.00 Persen	123.00 Persen	123.00 Persen			
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	8.496.042.040	9.546.042.040	10.341.613.412
		Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
SEKRETARIAT DPRD						130.605.074.955	134.626.999.755	135.206.559.595
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	69.674.229.266	73.696.154.066	74.870.692.792
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja	100 Persen	100 Persen	100 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		SKPD						
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17.00 dokumen	17.00 dokumen	17.00 dokumen	60.930.845.689	60.930.845.689	60.335.866.803
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						33.879.982.079	26.601.864.991	25.606.137.963
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.831.182.079	11.909.064.991	11.382.037.963
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	4.450.000.000	4.522.000.000	4.253.300.000
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	10.098.800.000	10.170.800.000	9.970.800.000
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00 Persen			4.500.000.000		
BADAN PENGELOLAAN						235.283.816.864	207.779.761.347	137.598.149.017

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	121.772.316.538	111.768.316.538	106.006.260.582
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1.02 Persen	1.02 Persen	1.02 Persen	109.943.877.102	92.443.821.585	28.324.137.992
		Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100%	100%			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	90.24 Persen	90.24 Persen	90.24 Persen	3.567.623.224	3.567.623.224	3.267.750.443
BADAN PENDAPATAN DAERAH						102.861.224.245	102.861.224.245	96.052.042.526
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	75.949.504.140	75.574.504.140	70.356.039.291
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	10 Persen	10 Persen	26.911.720.105	27.286.720.105	25.696.003.235
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						33.683.275.137	33.685.447.137	31.073.641.688
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	18.326.575.631	18.328.747.631	16.736.572.855

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50 Persen	81.50 Persen	81.50 Persen	8.866.704.836	8.866.704.836	8.050.207.503
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen			
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen			
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20.98 Persen	20.98 Persen	20.98 Persen			
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258.36 Persen	258.36 Persen	258.36 Persen			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	45 Persen	45 Persen	45 Persen	6.489.994.670	6.489.994.670	6.286.861.330
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							11.962.150.326	9.615.074.508
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Brida		100.00 %	100.00 %	-	7.462.150.326	4.798.592.019
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Brida		100.00 %	100.00 %			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Brida		100.00 %	100.00 %			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Brida		100.00 %	100.00 %			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		100.00 %	100.00 %	-	4.500.000.000	4.816.482.489
INSPEKTORAT						27.561.067.642	27.561.067.642	27.048.125.782
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	19.044.688.174	19.044.688.174	19.351.097.758
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.797.522.358	3.797.522.358	3.560.560.806
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.06 Nilai	3.06 Nilai	3.06 Nilai	4.718.857.110	4.718.857.110	4.136.467.218
KECAMATAN SEMARANG SELATAN						39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.319.529.216	14.266.944.116	14.603.110.434
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	110.000.000	105.000.000	105.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	101.800.000	101.800.000	101.800.000
KECAMATAN SEMARANG UTARA						46.854.246.693	47.158.961.893	47.890.769.658
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.390.191.093	13.347.456.293	14.201.520.931
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.299.030.600	3.736.972.000	3.640.208.127
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	29.906.400.000	29.886.508.600	29.873.234.200
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	155.000.000	106.975.000	96.506.400
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	103.625.000	81.050.000	79.300.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
KECAMATAN SEMARANG BARAT						62.176.378.028	62.535.735.628	63.644.493.254
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	19.992.654.352	19.877.331.752	20.974.825.871
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	4.245.657.406	4.825.337.606	4.836.601.113
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	37.849.776.170	37.744.776.170	37.744.776.170
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	14.041.500	14.041.500	14.041.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	74.248.600	74.248.600	74.248.600
KECAMATAN SEMARANG TIMUR						42.960.604.175	43.283.319.375	43.179.097.428
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	15.175.543.481	15.035.565.952	15.127.925.516
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase kepuasan masyarakat dalam	93.00 Persen	93.00 Persen	93.00 Persen	3.166.742.614	3.627.735.343	3.456.912.962

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen	24.475.968.080	24.477.668.080	24.451.208.950
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00 Persen	20.00 Persen	20.00 Persen	38.150.000	38.150.000	38.150.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95.00 Persen	95.00 Persen	95.00 Persen	104.200.000	104.200.000	104.900.000
KECAMATAN SEMARANG TENGAH						51.037.006.039	51.307.006.039	52.593.266.244
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	20.034.463.837	20.034.463.837	21.395.601.337
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.689.542.202	3.924.518.617	3.863.966.322
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	27.197.000.000	27.232.023.585	27.217.698.585
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14 Persen	14 Persen	14 Persen	33.600.000	33.600.000	33.600.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah	40 Persen	40 Persen	40 Persen	82.400.000	82.400.000	82.400.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
KECAMATAN GUNUNG PATI						58.804.687.370	59.164.044.970	59.780.885.846
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	23.739.685.114	23.552.168.615	24.567.767.193
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	4.321.397.256	4.874.816.795	4.515.301.982
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	30.586.330.000	30.579.784.560	30.558.766.671
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	38.025.000	38.025.000	38.025.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	119.250.000	119.250.000	101.025.000
KECAMATAN TUGU						32.370.394.980	32.567.752.580	32.971.968.356
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.842.262.980	11.781.055.737	12.346.852.001
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.154.210.000	2.280.210.000	2.177.009.712
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.210.681.600	18.343.246.443	18.284.866.243
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	20 Persen	20 Persen	20 Persen	75.540.000	75.540.000	75.540.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu	95 Persen	95 Persen	95 Persen	87.700.400	87.700.400	87.700.400
KECAMATAN MIJEN						58.338.860.881	58.733.576.081	59.182.465.649
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	22.347.815.281	22.179.379.081	22.857.119.985
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.773.745.600	4.214.169.728	3.998.318.392
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	32.075.800.000	32.137.163.636	32.137.163.636
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	49.500.000	110.863.636	110.863.636
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan	95 Persen	95 Persen	95 Persen	92.000.000	92.000.000	79.000.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PEMERINTAHAN UMUM	dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
KECAMATAN GENUK						58.393.568.071	58.698.925.671	58.566.166.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	21.160.717.052	20.895.780.068	21.267.692.103
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.259.461.720	3.829.756.304	3.544.107.128
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	33.761.200.869	33.761.200.869	33.542.598.339
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	109.662.510	109.662.510	109.242.510
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	102.525.920	102.525.920	102.525.920
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR						33.815.043.611	34.101.758.811	34.371.340.291
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.639.308.611	13.641.517.839	13.885.412.985
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		perkantoran SKPD						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	95 Persen	95 Persen	2.875.855.000	3.092.134.622	3.128.745.956
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	17.135.960.000	17.143.386.350	17.134.861.350
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	83.150.000	143.950.000	141.550.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Persen	90 Persen	90 Persen	80.770.000	80.770.000	80.770.000
KECAMATAN TEMBALANG						65.831.788.734	66.119.146.334	66.112.960.552
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	19.939.835.067	19.756.926.480	20.094.636.127
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	4.124.103.667	4.677.603.667	4.447.163.238
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	41.577.800.000	41.494.566.187	41.390.276.187
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	60.000.000	60.000.000	50.835.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan	75 Persen	75 Persen	75 Persen	130.050.000	130.050.000	130.050.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PEMERINTAHAN UMUM	dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
KECAMATAN CANDISARI						32.172.395.692	32.369.753.292	32.884.974.638
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	10.864.115.794	10.597.973.394	11.220.806.880
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.681.453.414	3.144.953.414	3.131.343.724
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.483.988.920	18.483.988.920	18.409.136.470
		Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	53.268.650	53.268.650	42.268.650
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	89.568.914	89.568.914	81.418.914
KECAMATAN BANYUMANIK						52.367.810.941	52.637.168.541	53.272.013.060
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	43.00 OPD	43.00 OPD	43.00 OPD	18.269.516.930	18.003.374.530	18.774.762.061

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	DAERAH KABUPATEN/KOTA							
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.978.844.011	3.283.244.011	3.239.282.953
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	30.928.850.000	31.080.850.000	31.030.768.046
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	50.400.000	50.400.000	36.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	140.200.000	219.300.000	191.200.000
KECAMATAN NGALIYAN						54.011.025.887	54.191.025.887	55.085.218.409
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.818.144.480	17.912.108.645	18.993.907.254
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase tersedianya	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		sarana dan prasarana perkantoran SKPD						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328	3.451.373.648	3.376.456.356
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	32.025.262.879	32.664.547.394	32.551.858.599
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	81.896.200	81.896.200	81.896.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	81.100.000	81.100.000	81.100.000
KECAMATAN GAYAMSARI						32.917.700.142	33.186.415.342	33.705.292.065
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.842.642.928	11.770.235.138	12.465.383.521
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.255.608.214	2.485.088.344	2.368.755.506
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.727.449.000	18.839.091.860	18.776.603.038

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	18.200.000	18.200.000	20.750.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	73.800.000	73.800.000	73.800.000
KECAMATAN PEDURUNGAN						61.420.879.401	61.636.879.401	63.119.985.773
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.940.208.588	18.819.852.633	20.238.309.349
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.355.070.813	3.842.478.448	3.981.786.214
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan-Pedurungan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	39.050.150.000	38.915.348.320	38.840.690.210
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan	20 Persen	20 Persen	20 Persen	50.000.000	33.750.000	33.750.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	40 Persen	40 Persen	40 Persen	25.450.000	25.450.000	25.450.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA				PAGU INDIKATIF		
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						97.338.097.480	101.780.812.680	103.123.968.498
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	6.813.370.840	6.956.086.040	6.998.307.580
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen			
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.20 Indeks	2.20 Indeks	2.20 Indeks	3.697.335.640	4.971.351.640	5.311.134.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	66.00 angka indeks	66.00 angka indeks	66.00 angka indeks	77.712.117.000	78.238.375.000	78.313.860.918
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen	70.00 Persen	70.00 Persen			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	58.00 indeks	58.00 indeks	58.00 indeks	2.670.653.000	2.670.653.000	2.735.403.000

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KINERJA			PAGU INDIKATIF			
		INDIKATOR	RKPD	APBD	P RKPD	RKPD	APBD	P RKPD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.00 indeks	71.00 indeks	71.00 indeks	2.882.847.000	4.056.863.000	4.800.984.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83.00 Persen	83.00 Persen	83.00 Persen	3.561.774.000	4.887.484.000	4.964.279.000
JUMLAH						5.381.127.963.269	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486

TABEL V.7  
Matrik Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
1	DINAS PENDIDIKAN							817.569.467.649	827.582.078.210	1.219.086.575.864		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							817.569.467.649	827.582.078.210	1.219.086.575.864		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%	656.333.073.069	657.054.999.150	832.547.588.231		DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	120.000.000	120.000.000	120.000.000		DINAS PENDIDIKAN
				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	39.000.000	39.000.000	39.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	29.000.000	29.000.000	29.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	634.723.517.464	635.299.939.935	805.249.918.353		DINAS PENDIDIKAN
				Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6429 Orang/bulan	6429 Orang/bulan	6429 Orang/bulan	629.719.651.000	629.811.236.031	799.104.314.449		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.973.866.464	5.458.703.904	6.115.603.904		DINAS PENDIDIKAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	398.835.860		DINAS PENDIDIKAN
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	398.835.860		DINAS PENDIDIKAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	2.315.317.605	2.330.317.605	2.564.046.481		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	139.749.605	139.749.605	139.749.605		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Bangunan Kantor yang Disediakan								
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000	225.000.000	225.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	225.000.000	225.000.000	225.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	225.000.000	225.000.000	225.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125.568.000	125.568.000	85.568.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.050.000.000	1.065.000.000	1.150.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000	325.000.000	513.728.876		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	325.000.000	388.188.090	438.142.732		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	325.000.000	388.188.090	438.142.732		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	16.798.000.000	16.936.415.520	21.536.563.526		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15.964.000.000	16.102.415.520	20.646.993.887		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	14.000.000	30.594.500		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	820.000.000	820.000.000	858.975.139		DINAS PENDIDIKAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	2.001.238.000	1.930.138.000	2.240.081.279		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	214.400.000	214.400.000	214.400.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	125 Unit	125 Unit	896.838.000	825.738.000	755.738.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	425.000.000	425.000.000	804.943.279		DINAS PENDIDIKAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	385.000.000	385.000.000	385.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 Unit	80.000.000	80.000.000	80.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD 5-6 tahun	86.14 %	86.14 %	86.14 %	81.002.180.000	96.131.255.080	316.159.277.780		DINAS PENDIDIKAN
				APK SD/MI	111.72 %	111.72 %	111.72 %					
				APK SMP/MTs	115.63 %	115.63 %	115.63 %					
				Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	48.929.680.000	48.929.680.000	160.934.926.700		DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			1 Unit			302.418.300	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang			185.667.470	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	350.000.000	350.000.000	350.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	606.500.000	606.500.000	1.843.918.300		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	200.000.000	200.000.000	285.806.100		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang			75.806.100	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.700.000.000	18.700.000.000	6.075.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	16 Paket	525.000.000	525.000.000	2.385.529.070		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13415 Peserta Didik	13415 Peserta Didik	13415 Peserta Didik	14.560.500.000	14.560.500.000	13.718.700.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	16 Paket	16 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	950.000.000	950.000.000	950.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1600 Orang	1600 Orang	1600 Orang	1.022.800.000	1.022.800.000	1.022.800.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	900.000.000	900.000.000	750.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			508 Satuan Pendidikan			116.908.120.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	502 Orang	502 Orang	502 Orang	225.000.000	225.000.000	265.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5555 Paket	5555 Paket	5555 Paket	520.000.000	520.000.000	520.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24 Ruang	24 Ruang	24 Ruang	2.485.000.000	2.485.000.000	4.716.067.360		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.850.000.000	1.850.000.000	2.701.612.200		DINAS PENDIDIKAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	502 Satuan Pendidikan	800.000.000	800.000.000	800.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Ruang	144 Ruang	144 Ruang	5.134.880.000	5.134.880.000	6.978.481.800		DINAS PENDIDIKAN
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	24.051.900.000	37.819.975.080	110.165.721.080		DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun			1 Unit			300.000.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang			312.066.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	60.000.000	60.000.000	60.000.000		DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			5 Ruang			530.126.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			1 Unit			330.545.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	97 Ruang	97 Ruang	97 Ruang	140.000.000	1.140.000.000	1.420.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	100.000.000	100.000.000	0		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.190.000.000	1.190.000.000	2.843.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	4.050.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	7 Paket	270.000.000	7.631.700.000	420.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5333 Peserta Didik	5333 Peserta Didik	5333 Peserta Didik	12.786.900.000	12.786.900.000	12.105.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.000.000	100.000.000	227.700.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2240 Peserta Didik	2240 Peserta Didik	2240 Peserta Didik	750.000.000	891.000.000	901.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	900 Orang	900 Orang	900 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	190 Satuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			194 Satuan Pendidikan			71.760.400.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	190 Orang	190 Orang	190 Orang	175.000.000	267.000.000	317.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	1.200.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	34 Ruang	34 Ruang	5.680.000.000	10.753.375.080	12.488.884.080		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	28 Paket	28 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	6.430.600.000	7.791.600.000	36.580.490.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000	270.140.000		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	6 Unit	6 Unit	75.000.000	75.000.000	275.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	358.500.000	358.500.000	594.100.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	345.000.000	345.000.000	120.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	210.000.000	210.000.000	210.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1795 Peserta Didik	1795 Peserta Didik	1795 Peserta Didik	2.880.600.000	3.029.600.000	3.034.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	200.000.000	200.000.000	281.250.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39569 Peserta Didik	39569 Peserta Didik	39569 Peserta Didik	585.000.000	885.000.000	935.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kompetensi dan Kualifikasi								
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	300.000.000	300.000.000	300.000.000		DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			1450 Satuan Pendidikan			28.070.850.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.075.000.000	1.975.000.000	2.176.200.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket	11 Paket	11 Paket	101.500.000	113.500.000	113.950.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	1.590.000.000	1.590.000.000	8.478.140.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	700.000.000	700.000.000	700.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	40.000.000	40.000.000	40.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.500.000	38.500.000	38.500.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi								
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	40 Satuan Pendidik	40 Satuan Pendidik	40 Satuan Pendidik	150.000.000	150.000.000	150.000.000		DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			41 Satuan Pendidik			6.993.040.000	Dana Transfer	DINAS PENDIDIKAN
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	61.500.000	61.500.000	61.500.000		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	0		DINAS PENDIDIKAN
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	3450 Peserta Didik	175.000.000	175.000.000	175.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	245.100.000		DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	585.000.000	585.000.000	585.000.000		DINAS PENDIDIKAN
				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan	100%	100%	100%					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Lokal Pendidikan Dasar								
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	200.000.000	200.000.000	200.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	0		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	63606 Buku	63606 Buku	63606 Buku	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000	50.000.000	150.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	0		DINAS PENDIDIKAN
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	385.000.000	385.000.000	385.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	60.000.000	60.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan	10550 Buku	10550 Buku	10550 Buku	150.000.000	150.000.000	150.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia								
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	175.000.000	175.000.000	175.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.82 %	89.82 %	89.82 %	79.149.214.580	73.310.823.980	69.474.709.853		DINAS PENDIDIKAN
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	79.149.214.580	73.310.823.980	69.474.709.853		DINAS PENDIDIKAN
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	74.565.214.580	68.426.823.980	64.590.709.853		DINAS PENDIDIKAN
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	4.584.000.000	4.884.000.000	4.884.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	100%	100%	500.000.000	500.000.000	320.000.000		DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%					
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	150.000.000	150.000.000	70.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	20.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	350.000.000	350.000.000	250.000.000		DINAS PENDIDIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		DINAS PENDIDIKAN
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0		DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN							459.470.520.593	463.228.078.193	553.753.446.009		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							459.470.520.593	463.228.078.193	553.753.446.009		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	350.177.835.489	350.696.693.089	354.309.723.379		DINAS KESEHATAN
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	102.602.150	102.602.150	102.602.150		DINAS KESEHATAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	47.718.592	47.718.592	47.718.592		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.536.000	7.536.000	7.536.000		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.976.000	8.976.000	8.976.000		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.504.000	5.504.000	5.504.000		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.992.000	2.992.000	2.992.000		DINAS KESEHATAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	29.875.558	29.875.558	29.875.558		DINAS KESEHATAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	257.529.250.400	257.600.608.000	242.149.562.400		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1750 Orang/bulan	1750 Orang/bulan	1750 Orang/bulan	256.769.384.000	256.840.741.600	241.584.296.000		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	748.720.000	748.720.000	554.120.000		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.678.000	3.678.000	3.678.000		DINAS KESEHATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.678.000	3.678.000	3.678.000		DINAS KESEHATAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.790.400	3.790.400	3.790.400		DINAS KESEHATAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100 persentase	100 persentase	100 persentase	3.933.776.979	3.983.776.979	3.383.091.497		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	52.209.800	52.209.800	52.209.800		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	23 Paket	23 Paket	23 Paket	31.476.130	81.476.130	81.964.530		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Tangga yang Disediakan								
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	128.505.150	128.505.150	179.665.390		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000	3.840.000	3.840.000		DINAS KESEHATAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.179.210.293	1.179.210.293	938.422.693		DINAS KESEHATAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.538.535.606	2.538.535.606	2.126.989.084		DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persentase	100 persentase	100 persentase	2.420.688.703	2.420.688.703	6.853.148.199		DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.420.688.703	2.420.688.703	6.853.148.199		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persentase	100 persentase	100 persentase	3.454.372.320	3.454.372.320	2.953.312.880		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	0		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.452.368.000	1.452.368.000	1.062.200.000		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.001.004.320	2.001.004.320	1.891.112.880		DINAS KESEHATAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 persentase	100 persentase	100 persentase	4.303.600.353	4.303.600.353	4.070.785.933		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	192.915.000	192.915.000	192.915.000		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	134 Unit	134 Unit	2.078.820.000	2.078.820.000	1.878.627.000		DINAS KESEHATAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	15 Unit	543.094.630	543.094.630	530.050.130		DINAS KESEHATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	28 Unit	28 Unit	1.423.212.203	1.423.212.203	1.423.212.203		DINAS KESEHATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	65.558.520	65.558.520	45.981.600		DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	88 persentase	88 persentase	88 persentase	78.433.544.584	78.433.544.584	94.797.220.320		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.600.298.200	3.600.298.200	4.462.685.329		PUSKESMAS BANGETAYU
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.695.151.900	2.695.151.900	3.072.599.740		PUSKESMAS BANDARHARJO
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.471.976.700	1.471.976.700	1.799.567.271		PUSKESMAS BUGANGAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.930.358.600	1.930.358.600	2.179.937.509		PUSKESMAS BULULOR
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.820.369.000	1.820.369.000	2.231.100.157		PUSKESMAS CANDILAMA
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.045.673.200	3.045.673.200	3.683.745.008		PUSKESMAS GAYAMSARI
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.956.644.800	1.956.644.800	2.086.186.200		PUSKESMAS GENUK
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.890.166.700	2.890.166.700	3.583.002.724		PUSKESMAS GUNUNGPATI
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.286.117.000	2.286.117.000	2.720.704.306		PUSKESMAS HALMAHERA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.094.500	1.400.094.500	1.566.989.502		PUSKESMAS KAGOK
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.294.442.200	1.294.442.200	1.480.329.231		PUSKESMAS KARANG AYU
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.332.331.384	1.332.331.384	1.500.000.173		PUSKESMAS KARANG ANYAR
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.324.525.600	2.324.525.600	2.884.300.271		PUSKESMAS KARANGDORO
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.026.620.900	4.026.620.900	5.044.456.437		PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.513.382.300	1.513.382.300	1.813.796.867		PUSKESMAS KARANGMANGALANG
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.478.885.500	1.478.885.500	1.731.802.090		PUSKESMAS KROBOKAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.730.196.400	1.730.196.400	2.024.427.460		PUSKESMAS LEBDOSARI
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.527.561.600	1.527.561.600	1.800.643.067		PUSKESMAS LAMPERTENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.392.036.500	1.392.036.500	1.623.006.106		PUSKESMAS MANGKANG
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.680.160.000	1.680.160.000	2.116.859.783		PUSKESMAS MANYARAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.555.162.700	2.555.162.700	2.873.720.494		PUSKESMAS MIJEN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.343.995.000	1.343.995.000	1.519.430.174		PUSKESMAS MIROTO
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	2.992.035.800	2.992.035.800	3.677.610.287		PUSKESMAS NGALIYAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.215.747.200	1.215.747.200	1.370.381.993		PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.762.509.700	1.762.509.700	2.153.524.497		PUSKESMAS NGESREP
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.340.515.800	2.340.515.800	2.877.441.895		PUSKESMAS PANDANARAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.999.634.300	1.765.027.000	2.311.625.029		PUSKESMAS PADANGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	8 Unit Kerja	8 Unit Kerja	1.929.173.400	1.929.173.400	2.223.707.048		PUSKESMAS PENGANDAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.841.164.000	1.841.164.000	1.991.340.633		PUSKESMAS PONCOL
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.470.941.300	1.470.941.300	1.743.962.955		PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.533.709.000	2.533.709.000	3.115.501.353		PUSKESMAS ROWOSARI
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.765.027.000	1.999.634.300	2.347.299.030		PUSKESMAS SRONDOL
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.597.200.000	1.597.200.000	2.959.555.184		UPTD Laboratorium Kesehatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	3.700.886.800	3.700.886.800	4.416.757.269		PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.845.979.400	1.845.979.400	2.327.313.536		PUSKESMAS SEKARAN
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.461.910.000	1.461.910.000	1.697.913.853		PUSKESMAS TAMBAKAJI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.360.346.200	1.360.346.200	1.713.413.084		PUSKESMAS PURWOYO SO
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	3.320.614.000	3.320.614.000	4.070.582.775		PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	108.683.965.654	111.922.665.654	190.807.477.655		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persentase	100 persentase	100 persentase	27.383.278.172	27.774.168.541	36.957.258.144		DINAS KESEHATAN
		Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	9.709.723.154	9.709.723.154	13.872.836.644		DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.103.500.000	8.103.500.000	11.888.300.000		DINAS KESEHATAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	268.450.000	740.950.000	740.950.000		DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.620.994.352	4.680.994.352	4.821.728.563		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kesehatan yang Disediakan								
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			562 Unit			398.419.000	Dana Transfer	DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.199.100.000	2.199.100.000	2.742.100.000		DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1.481.510.666	2.339.901.035	2.492.923.937		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 persentase	100 persentase	100 persentase	71.209.822.894	74.057.632.525	144.104.479.631		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24001 Orang	24001 Orang	24001 Orang	167.847.039	930.547.039	900.159.987		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			27.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			21.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			39.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			39.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			21.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			27.302.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			12.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			32.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			34.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			25.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			12.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			31.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			11.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			17.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			56.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			18.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			24.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			15.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			46.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			31.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			52.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			37.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			36.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			24.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			23.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			19.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			10.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			23.021.900	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			46.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPAATI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			36.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			14.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANGLANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			40.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			18.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			39.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			13.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			20.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			24001 Orang			30.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22802 Orang	22802 Orang	22802 Orang	46.350.000	46.350.000	22.750.000		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			9.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			15.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			12.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			12.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			11.925.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			9.475.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			10.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			20.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			14.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			8.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			14.475.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			11.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan			22802 Orang			13.925.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kesehatan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			35.244.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			18.825.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			4.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			19.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			61.710.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			58.925.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			7.340.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			7.610.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			20.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			24.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			15.735.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			45.265.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			15.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			10.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan			22802 Orang			10.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kesehatan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			14.825.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			12.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			11.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			15.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			16.950.800	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			10.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			12.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			24.288.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			22802 Orang			18.075.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22778 Orang	22778 Orang	22778 Orang	25.338.220	12.338.220	707.899.420		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91122 Orang	91122 Orang	91122 Orang	30.400.000	11.500.000	253.564.000		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			91122 Orang			0	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227182 Orang	227182 Orang	227182 Orang	107.407.500	143.407.500	54.006.180		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			227182 Orang			35.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			41.175.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH	
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			50.025.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			64.275.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			37.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			46.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			19.677.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			62.454.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			43.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan			478 Orang			33.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kesehatan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			49.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			43.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			20.175.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			15.075.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			57.075.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			35.775.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			29.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar			478 Orang			32.775.000	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			pada Usia Pendidikan Dasar	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			44.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			49.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			52.275.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			40.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			46.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			45.541.800	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			15.274.500	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH	
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			39.225.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			32.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			17.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			90.525.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPAATI
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			52.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			32.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANGLANG
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			25.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan			478 Orang			31.224.900	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kesehatan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			31.903.800	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			27.525.000	Dana Transfer	PUSKESMAMANGKANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			33.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			478 Orang			44.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1116174 Orang	1116174 Orang	1116174 Orang	132.000.000	150.000.000	99.500.000		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	151659 Orang	151659 Orang	151659 Orang	1.142.200.000	1.242.200.000	970.474.000		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	321721 Orang	321721 Orang	321721 Orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41468 Orang	41468 Orang	41468 Orang	50.000.000	50.000.000	3.272.563.100		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4222 Orang	4222 Orang	4222 Orang	52.500.000	52.500.000	52.500.000		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34619 Orang	34619 Orang	34619 Orang	262.106.997	298.093.269	9.837.193.269		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			5.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			6.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			42.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			9.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang			34619 Orang			4.950.000	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Orang Terduga Tuberkulosis	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								HALMAHERA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			15.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			15.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			13.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			17.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			11.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			9.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			17.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			13.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			9.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGENEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			29.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			6.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			8.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			3.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			7.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan			34619 Orang			3.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelayanan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			13.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			39.108.900	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			13.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			5.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			2.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			4.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita			34619 Orang			4.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			6.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPA TI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			12.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			3.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMA LANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			9.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJ I
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			2.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			21.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			7.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKAN G

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			6.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			34619 Orang			1.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	39268 Orang	39268 Orang	39268 Orang	408.158.731	494.145.003	962.145.003		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			3.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			4.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan			39268 Orang			3.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelayanan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			7.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			375.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			3.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.875.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			2.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			2.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH	
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			2.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan			39268 Orang			2.775.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelayanan Sesuai Standar								
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			2.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			4.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita			39268 Orang			4.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			2.025.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPA TI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMA LANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJ I
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKAN G

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			39268 Orang			2.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	52.141.981	52.141.981	44.151.145		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	8.529.482.895	10.328.882.895	9.269.512.455		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			141.377.100	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			75.324.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			538.152.900	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			129.027.900	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			215.661.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			52.424.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			269.033.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			150.969.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			130.655.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			81.023.800	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			164.942.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			142.238.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			151.846.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			107.151.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			347.385.200	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			150.050.800	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			127.175.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			257.014.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			157.970.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			529.769.800	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			488.199.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			296.915.800	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			456.478.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			202.563.900	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			103.187.800	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			195.912.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			227.262.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			130.487.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			192.877.800	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			239.865.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			137.579.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			304.608.900	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			217.184.800	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			229.757.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			111.296.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			204.793.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			10 Dokumen			203.149.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	50.000.000	48.318.180		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	275.028.019	275.028.019	1.450.827.415		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			16.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			15.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			18.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			13.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			2.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			21.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			7.950.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			13.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			10.275.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			8.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			38.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			10.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.575.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			11.475.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			9.825.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			24.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			13.875.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			7.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNG MUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			6.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			21.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			4.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			10.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			6.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			5.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPA TI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			26.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			24.519.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMA LANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			6.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJ I
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			5.025.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			19.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			13.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKAN G
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			3.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			15 Dokumen			9.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	112.500.000	112.500.000	570.787.080		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000	37.000.000	33.875.000		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	250.000.000	270.000.000	432.150.000		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			83.702.800	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			54.555.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			51.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			122.389.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			93.223.400	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			31.225.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			56.475.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			57.399.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			67.875.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			47.165.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			37.903.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			119.095.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			61.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			75.631.900	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			50.375.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			87.441.800	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			79.891.800	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			57.023.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan			60 Dokumen			45.075.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Surveilans Kesehatan								
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			75.220.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			91.325.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			207.705.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			61.925.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGMUNDU
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			87.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			60.340.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			69.192.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			30.238.800	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			61.418.800	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			157.084.800	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			115.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			65.825.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMALANG
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			24.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			92.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			103.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			55.866.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			45.962.700	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			60 Dokumen			81.075.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	60.000.000	60.000.000	106.218.080		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	84 Dokumen	84 Dokumen	84 Dokumen	643.876.934	679.527.749	7.592.990.207		DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			118.725.200	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			90.684.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			70.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			44.025.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			65.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			89.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			90.825.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			68.925.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			67.746.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			66.525.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			95.025.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			48.525.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			70.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			65.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			73.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			92.775.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			66.675.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			73.575.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			49.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			75.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			125.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			41.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			119.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUNDU
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			54.375.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			42.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			54.975.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			121.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			69.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			108.375.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPA TI
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			40.425.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			82.833.800	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMA LANG
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			118.875.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJ I
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			57.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			80.148.600	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			85.325.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKAN G
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			103.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			84 Dokumen			103.425.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69 Dokumen	69 Dokumen	69 Dokumen	42.000.000.000	42.000.000.000	67.000.761.280		DINAS KESEHATAN
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			8 Paket			1.600.000	Dana Transfer	DINAS KESEHATAN
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	137.500.000	137.500.000	110.000.000		DINAS KESEHATAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			127.658.500	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			111.857.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			182.856.100	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			132.769.300	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			126.856.600	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			105.979.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			127.027.200	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			130.190.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			115.612.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			106.577.200	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			114.381.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			116.681.100	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			108.789.200	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			107.452.100	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			164.767.800	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			114.550.700	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			118.256.200	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			150.143.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			140.737.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			181.103.200	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			196.114.200	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			167.426.300	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			194.851.200	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGMUNDU
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			134.354.200	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			111.643.700	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			126.141.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			114.193.300	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			108.650.300	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			161.275.400	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			160.225.200	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			108.556.200	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			133.901.100	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			119.169.700	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			145.132.200	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIAN
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			110.433.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			119.960.500	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			37 Dokumen			136.826.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.275.000.000	13.275.000.000	9.460.549.379		DINAS KESEHATAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.290.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.935.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.790.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.870.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.425.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.715.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.535.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.470.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.705.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.315.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.775.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.855.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			6.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			6.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			6.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUNDU
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.225.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.675.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.315.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			6.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			6.325.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.680.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.380.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.615.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.650.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			4.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			12 Dokumen			5.360.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000	1.481.753.801		UPTD Instalasi Farmasi
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000		UPTD Laboratorium Kesehatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000		PUSKESMAS PLAMONGAN SARI
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	25 Unit	25 Unit	25 Unit	253.240.000	253.240.000	253.240.000		DINAS KESEHATAN
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.750.000	26.750.000	19.275.000		DINAS KESEHATAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								BANDARHARJO
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			75.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			75.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			1.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)								
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			75.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			1.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pemberian Obat Massal)	dan Pemberian Obat Massal)								
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYOSO
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan			1 Laporan			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	111.721.071	111.721.071	69.371.071		DINAS KESEHATAN
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	218.663.150	218.663.150	198.863.150		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6748 Orang	6748 Orang	6748 Orang	100.120.357	86.106.629	73.370.329		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			5.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			16.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan			6748 Orang			7.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				kesehatan sesuai standar								
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			15.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			3.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			5.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			15.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			9.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			12.825.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPER TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH	
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			19.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG AYU
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			5.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			9.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			4.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			10.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			15.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan			6748 Orang			2.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pelayanan kesehatan sesuai standar								
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			6.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			6.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			7.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			7.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			4.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			18.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			3.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			5.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			2.550.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			3.375.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan			6748 Orang			4.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pelayanan kesehatan sesuai standar								
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			12.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			3.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMALANG
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			19.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			15.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			2.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			6.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6748 Orang			2.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang	580 Orang	580 Orang	93.890.000	93.890.000	67.340.000		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			1.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			1.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan			580 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pelayanan kesehatan sesuai standar								
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			1.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan			580 Orang			900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pelayanan kesehatan sesuai standar								
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			3.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			5.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			1.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan			580 Orang			750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pelayanan kesehatan sesuai standar								
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			75.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			1.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			580 Orang			5.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	40 Orang	40 Orang	8.600.000	8.600.000	75.545.000		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			16.415.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			5.750.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			32.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			21.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			10.100.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			10.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			27.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			21.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			9.075.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			38.950.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			18.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			6.675.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			21.575.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			29.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			21.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			3.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			2.275.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			26.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			4.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			21.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			8.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			12.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			26.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGUMUNDU
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			21.399.100	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			33.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			25.025.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			38.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			26.775.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			10.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			4.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			15.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			4.575.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			6.325.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			1.675.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			12.325.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			23.125.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			13 Dokumen			15.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			497.849.900	Dana Transfer	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			130.040.400	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			107.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			97.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			98.950.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			78.600.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			82.277.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan			3 Dokumen			99.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				upaya kesehatan ibu dan anak								KARANGDORO
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			85.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			78.150.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			79.725.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			87.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			69.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			69.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			44.200.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			94.375.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			72.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			100.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			68.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			90.175.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			104.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			139.475.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			95.250.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			132.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KEDUNGMUNDU
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			103.275.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			59.950.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			66.525.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			62.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			87.350.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			117.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			131.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			84.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMANG LANG
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			93.300.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			63.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			137.850.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			92.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			57.900.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			3 Dokumen			116.625.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase faskes (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang telah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan sesuai standar	100 persentase	100 persentase	100 persentase	1.597.562.480	1.597.562.480	1.536.184.970		DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	1.597.562.480	1.597.562.480	1.536.149.870		DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS PONCOL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sistem Informasi Kesehatan								
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS MIROTO
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS BULULOR
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS HALMAHERA
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS BUGANGAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS KARANGDORO
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS PANDANARAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS KARANGAYU
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS MANYARAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS KROBOKAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S GAYAMSARI
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S CANDILAMA
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S KAGOK
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S PENGANDAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S GENUK
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S BANGETAYU
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S TLOGOSARI WETAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S TLOGOSARI KULON
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S KEDUNGMANDU
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S ROWOSARI
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMA S NGESREP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS SRONDOL
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS PADANGSARI
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS GUNUNGPATI
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS MIJEN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS KARANGMANG LANG
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS NGALIYAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS MANGKANG
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			100 Dokumen			0	Efisiensi	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan			100 Dokumen			35.100	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sistem Informasi Kesehatan								
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 persentase	100 persentase	100 persentase	8.493.302.108	8.493.302.108	8.209.554.910		DINAS KESEHATAN
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 Unit	100 Unit	100 Unit	19.900.000	19.900.000	19.900.000		DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	260 Unit	260 Unit	260 Unit	1.337.058.120	1.337.058.120	1.053.310.922		DINAS KESEHATAN
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	7.136.343.988	7.136.343.988	7.136.343.988		DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	250.000.000	250.000.000	4.678.853.100		DINAS KESEHATAN
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	100 persentase	100 persentase	100 persentase	160.332.228	160.332.228	472.147.328		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22.381.000	22.381.000	18.305.000		DINAS KESEHATAN
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.405.228	67.405.228	67.405.228		DINAS KESEHATAN
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	70.546.000	70.546.000	386.437.100		DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 persentase	100 persentase	100 persentase	89.667.772	89.667.772	4.206.705.772		DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	89.667.772	89.667.772	4.206.705.772		DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	97.00 Persen	97.00 Persen	97.00 Persen	185.000.000	185.000.000	612.708.054		DINAS KESEHATAN
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha	100 persentase	100 persentase	100 persentase	59.889.590	51.220.610	129.580.610		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				mikro obat tradisional (UMOT)								
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	59.889.590	51.220.610	129.580.610		DINAS KESEHATAN
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 persentase	100 persentase	100 persentase	59.775.425	67.355.925	273.192.490		DINAS KESEHATAN
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	59.775.425	67.355.925	273.192.490		DINAS KESEHATAN
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada	Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk	100 persentase	100 persentase	100 persentase	65.334.985	66.423.465	209.934.954		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	makanan dan minuman industri rumah tangga								
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	65.334.985	66.423.465	209.934.954		DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	173.719.450	173.719.450	3.344.683.821		DINAS KESEHATAN
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 persentase	100 persentase	100 persentase	103.719.450	103.719.450	111.240.121		DINAS KESEHATAN
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54 Dokumen	54 Dokumen	54 Dokumen	103.719.450	103.719.450	111.240.121		DINAS KESEHATAN
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 persentase	100 persentase	100 persentase	70.000.000	70.000.000	3.233.443.700		DINAS KESEHATAN
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	70.000.000	70.000.000	168.834.000		DINAS KESEHATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			36.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PONCOL
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			58.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MIROTO
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			86.458.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANDARHARJO
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			78.416.800	Dana Transfer	PUSKESMAS BULULOR
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			75.494.000	Dana Transfer	PUSKESMAS HALMAHERA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			79.797.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BUGANGAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			51.481.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGDORO
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			104.800.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PANDANARAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			58.400.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LAMPERTENGAH
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			77.000.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGAYU
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya			10 Dokumen			59.700.000	Dana Transfer	PUSKESMAS LEBDOSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)								
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			63.163.900	Dana Transfer	PUSKESMAS MANYARAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			77.209.900	Dana Transfer	PUSKESMAS KROBOKAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			88.450.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			112.033.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GAYAMSARI
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			45.318.700	Dana Transfer	PUSKESMAS CANDILAMA
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya			10 Dokumen			91.675.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KAGOK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			155.190.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PENGANDAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			166.436.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GENUK
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			125.053.000	Dana Transfer	PUSKESMAS BANGETAYU
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			84.547.800	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			44.510.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
			Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan			10 Dokumen			135.964.900	Dana Transfer	PUSKESMAS

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								KEDUNG MUNDU
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			103.399.000	Dana Transfer	PUSKESMAS ROWOSARI
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			112.710.000	Dana Transfer	PUSKESMAS NGESREP
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			132.136.000	Dana Transfer	PUSKESMAS SRONDOL
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			36.816.900	Dana Transfer	PUSKESMAS PADANGSARI
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			82.500.000	Dana Transfer	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			47.050.000	Dana Transfer	PUSKESMAS GUNUNGPA TI
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			134.487.800	Dana Transfer	PUSKESMAS MIJEN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			46.260.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANGMA LANG
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			50.121.000	Dana Transfer	PUSKESMAS TAMBAKAJI
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			96.204.800	Dana Transfer	PUSKESMAS PURWOYO SO
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya			10 Dokumen			53.325.400	Dana Transfer	PUSKESMAS NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)								
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			82.875.000	Dana Transfer	PUSKESMAS MANGKANG
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			71.855.000	Dana Transfer	PUSKESMAS KARANG ANYAR
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			10 Dokumen			59.268.900	Dana Transfer	PUSKESMAS SEKARAN
3	RSUD KRMT WONGSONEGORO							569.106.708.009	569.106.708.009	594.022.844.029		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							569.106.708.009	569.106.708.009	594.022.844.029		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD	100 persen	100 persen	100 persen	399.106.708.009	399.106.708.009	422.194.748.075		RSUD KRMT WONGSONEGORO
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 persen	100 persen	100 persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen dan laporan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	50.000.000	50.000.000	49.696.246		RSUD KRMT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan								WONGSON EGORO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000	29.000.000	28.696.246		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.000.000	21.000.000	21.000.000		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	100 Persen	67.121.700.767	67.121.700.767	68.598.537.767		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	557 Orang/bulan	557 Orang/bulan	557 Orang/bulan	67.074.282.000	67.074.282.000	68.551.119.000		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	47.418.767	47.418.767	47.418.767		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100 persen	100 persen	100 persen	331.935.007.242	331.935.007.242	353.546.514.062		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	331.935.007.242	331.935.007.242	353.546.514.062		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit	100 persen	100 persen	100 persen	170.000.000.000	170.000.000.000	171.828.095.954		RSUD KRMT WONGSON EGORO
				Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Pemenuhan Peralatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	170.000.000.000	170.000.000.000	171.828.095.954		RSUD KRMT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan rujukan Rumah Sakit								WONGSON EGORO
				Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100.000.000.000	100.000.000.00	100.000.000.000		RSUD KRMT WONGSON EGORO
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	105 Unit	105 Unit	105 Unit	70.000.000.000	70.000.000.000	71.828.095.954		RSUD KRMT WONGSON EGORO
4	DINAS PEKERJAAN UMUM							455.739.943.809	465.568.879.695	452.026.359.077		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							455.739.943.809	465.568.879.695	452.026.359.077		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	162.174.385.496	169.903.321.382	106.920.035.673		DINAS PEKERJAAN UMUM
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	81.395.627	81.395.627	81.395.627		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	33.129.164	33.129.164	33.129.164		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.200.000	3.200.000	3.200.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	3.200.000	3.200.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7.050.000	7.050.000	7.050.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.525.000	4.525.000	4.525.000		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25.291.463	25.291.463	25.291.463		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	18.303.995.000	18.375.352.600	18.156.200.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	17.757.955.000	17.829.312.600	17.621.140.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	533.040.000	533.040.000	522.060.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	11.100.000	11.100.000	11.100.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000	6.600.000	6.600.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.800.198.725	2.800.198.725	4.441.398.723		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	200.000.000	200.000.000	220.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	1.000.623.725	1.000.623.725	2.297.558.038		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kantor yang Disediakan								
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	75.000.000	75.000.000	75.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	150.000.000	150.000.000	249.206.919		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	130.000.000	130.000.000	226.408.766		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	479.075.000	479.075.000	591.075.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	760.500.000	760.500.000	777.150.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	6.259.756.456	6.259.756.456	425.517.479		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	109.756.456	109.756.456	125.517.479		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.150.000.000	6.150.000.000	300.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	12.276.933.020	12.776.933.020	14.050.248.617		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	9.999.000	9.999.000	11.099.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.370.953.020	6.370.953.020	7.643.168.617		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.895.981.000	6.395.981.000	6.395.981.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	122.431.006.668	129.588.584.954	69.744.175.227		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	80 Unit	2.500.000.000	2.500.000.000	2.542.413.300		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	75.000.000	75.000.000	50.904.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	200 Unit	207.985.560	207.985.560	270.255.880		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.220.356.800	1.220.356.800	1.795.359.453		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5 Ha	5 Ha	5 Ha	118.427.664.308	125.585.242.594	65.085.242.594		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	98.15 Persen	98.15 Persen	98.15 Persen	46.043.23 2.671	46.043. 232.67 1	45.202.47 7.876		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96.78 persen	96.78 persen	96.78 persen	42.633.23 2.671	42.633. 232.67 1	41.835.76 7.294		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.000.000 .000	8.000.0 00.000	8.000.000. 000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	2.406.732 .671	2.406.7 32.671	2.406.732. 671		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.500.000 .000	8.500.0 00.000	8.500.000. 000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	1.520.800 .000	1.520.8 00.000	1.481.844. 039		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	43 Unit	43 Unit	43 Unit	17.750.00 0.000	17.750. 000.00 0	17.247.12 5.904		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	900.000.0 00	900.00 0.000	750.891.6 80		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM	0.5 KM	0.5 KM	3.000.000 .000	3.000.0 00.000	3.000.000. 000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	555.700.0 00	555.70 0.000	449.173.0 00		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Bangunan Penampung Air Lainnya	Bangunan Penampung Air Lainnya	Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun								
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	84.20 persen	84.20 persen	84.20 persen	3.410.000.000	3.410.000.000	3.366.710.582		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM	1 KM	3.300.000.000	3.300.000.000	3.263.066.082		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	110.000.000	103.644.500		DINAS PEKERJAAN UMUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	66.00 Persen	66.00 Persen	66.00 Persen	130.012.967.014	130.512.967.014	126.206.911.850		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	99.41 Persen	99.41 Persen	99.41 Persen	130.012.967.014	130.512.967.014	126.206.911.850		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	58.891.840.000	59.391.840.000	34.278.856.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	232 Unit	232 Unit	232 Unit	29.925.010.827	29.925.010.827	36.817.385.533		UPTD Peralatan dan Perbengkelan

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	917.800.000	917.800.000	1.098.158.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	5000 Sistem Drainase Perkotaan	5000 Sistem Drainase Perkotaan	5000 Sistem Drainase Perkotaan	20.355.000.000	20.355.000.000	27.041.530.505		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	19.923.316.187	19.923.316.187	26.970.981.812		UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74.90 Persen	74.90 Persen	74.90 Persen	117.509.358.628	119.109.358.628	173.696.933.678		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87.98 persen	87.98 persen	87.98 persen	117.509.358.628	119.109.358.628	173.696.933.678		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pengelolaan Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	455.000.000	455.000.000	454.352.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	2.060.640.000	2.160.640.000	2.379.862.500		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	1 KM	1 KM	7.491.600.000	7.491.600.000	7.491.600.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.5 KM	0.5 KM	0.5 KM	3.450.000.000	3.450.000.000	6.746.673.000		DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	44.561.389.518	46.061.389.518	83.061.389.518		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	8.551.235.876	8.551.235.876	10.576.235.876		UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	4 KM	4 KM	4 KM	2.947.600.905	2.947.600.905	2.776.492.343		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan	20 Jembatan	974.800.000	974.800.000	1.239.819.590		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	4.967.600.000	4.967.600.000	9.967.600.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	1 Jembatan	1 Jembatan	800.000.000	800.000.000	800.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	100 KM	100 KM	100 KM	1.259.400.000	1.259.400.000	1.256.700.000		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4 KM	4 KM	4 KM	21.791.706.490	21.791.706.490	24.604.920.046		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	5 KM	5 KM	5 KM	6.895.812.013	6.895.812.013	10.505.165.166		DINAS PEKERJAAN UMUM
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	3.000.000.000	3.000.000.000	2.933.782.512		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	3.000.000.000	3.000.000.000	2.955.293.074		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	2.802.573.826	2.802.573.826	3.588.359.166		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	3 KM	3 KM	3 KM	2.500.000.000	2.500.000.000	2.358.688.887		UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
5	DINAS PENATAAN RUANG							125.786.259.729	132.215.359.481	108.211.606.407		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							123.531.945.213	130.158.066.909	106.200.450.297		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	20.559.177.802	21.907.326.503	23.191.843.180		DINAS PENATAAN RUANG
				Persentase Peningkatan kualitas SDM	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	126.700.000	126.700.000	220.585.676		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	37.500.000	37.500.000	39.522.000		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.850.000	7.850.000	7.850.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.250.000	9.250.000	9.250.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.850.000	7.850.000	7.850.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.250.000	9.250.000	9.250.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.500.000	12.500.000	12.500.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	42.500.000	42.500.000	134.363.676		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	13.922.872.798	14.951.972.550	16.415.618.028		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	12.479.530.000	13.508.629.752	14.946.800.152		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.419.567.600	1.419.567.600	1.448.863.896		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.925.066	7.925.066	4.103.848		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.925.066	7.925.066	7.925.066		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.925.066	7.925.066	7.925.066		DINAS PENATAAN RUANG
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	482.485.595	482.485.595	583.065.295		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	14.225.760	14.225.760	14.225.760		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	468.259.835	468.259.835	568.839.535		DINAS PENATAAN RUANG
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	4.176.710.267	4.275.784.194	3.852.158.657		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	114.413.805	114.413.805	114.949.103		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	505.002.098	505.002.098	597.755.071		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	137.010.108	137.010.108	139.322.988		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	350.000.000	350.000.000	202.147.206		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	8.958.410	8.958.410	8.958.410		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	1.291.000.000	1.391.000.000	1.232.056.240		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1.520.325.846	1.519.399.773	1.306.969.639		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	897.647.132	897.647.132	947.678.492		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	1200 Laporan	1200 Laporan	9.496.000	9.496.000	9.496.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	269.239.200	269.239.200	269.239.200		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	618.911.932	618.911.932	668.943.292		DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	952.762.010	1.172.737.032	1.172.737.032		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	53 Unit	652.719.960	652.719.960	652.719.960		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	260.132.000	480.107.022	480.107.022		DINAS PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	93.833.260.289	99.138.898.475	74.234.412.896		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%	100%	93.833.260.289	99.138.898.475	74.234.412.896		DINAS PENATAAN RUANG
		Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	140 Bangunan Gedung Cagar Budaya	500.000.000	500.000.000	565.338.365		DINAS PENATAAN RUANG
		Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	15 Orang	15 Orang	15 Orang	25.000.000	25.000.000	20.875.000		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	24 Bangunan Gedung	24 Bangunan Gedung	24 Bangunan Gedung	14.752.225.000	19.352.225.000	22.482.090.402		DINAS PENATAAN RUANG
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	77 Bangunan Gedung	77 Bangunan Gedung	77 Bangunan Gedung	4.000.000.000	5.000.000.000	5.891.922.332		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	25.000.000	25.000.000	25.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	70.627.035.289	70.332.673.475	41.486.940.549		DINAS PENATAAN RUANG
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2426 Unit	2426 Unit	2426 Unit	100.000.000	100.000.000	86.644.156		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	3.504.000.000	3.504.000.000	3.375.602.092		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	820.022.760	736.355.400	670.595.866		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	820.022.760	736.355.400	670.595.866		DINAS PENATAAN RUANG
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	820.022.760	736.355.400	670.595.866		DINAS PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.146.590.000	1.347.685.408	1.185.862.940		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	100%	100%	100%	1.146.590.000	1.347.685.408	1.185.862.940		DINAS PENATAAN RUANG
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	540 Orang	540 Orang	540 Orang	148.845.000	148.845.000	99.182.882		DINAS PENATAAN RUANG
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan	420 Lembaga	420 Lembaga	420 Lembaga	199.175.000	199.175.000	179.128.006		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi	Ditingkatkan Kapasitasnya								
		Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	399.120.000	600.215.408	596.389.480		DINAS PENATAAN RUANG
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	150 Orang	150 Orang	399.450.000	399.450.000	311.162.572		DINAS PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	7.172.894.362	7.027.801.123	6.917.735.415		DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100%	100%	100%	3.933.836.166	3.933.836.166	3.828.418.166		DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.729.244.698	2.729.244.698	2.729.244.698		DINAS PENATAAN RUANG
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	504.591.468	504.591.468	504.591.468		DINAS PENATAAN RUANG
		Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	394.582.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	1 Orang	1 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		pedoman Bidang Penataan ruang	pedoman Bidang Penataan ruang									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	1.598.130.655	1.670.130.655	1.570.666.807		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	98.130.655	98.130.655	95.880.655		DINAS PENATAAN RUANG
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000	1.572.000.000	1.474.786.152		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	702.927.396	485.834.157	580.650.297		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	107.376.319	107.376.319	202.192.459		DINAS PENATAAN RUANG
		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	595.551.077	378.457.838	378.457.838		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100%	100%	100%	938.000.145	938.000.145	938.000.145		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	568.000.145	568.000.145	568.000.145		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelaksanaan Penataan Ruang								
		Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000	260.000.000	260.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	110.000.000	110.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							2.254.314.516	2.057.292.572	2.011.156.110		
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	806.338.680	707.827.708	690.642.406		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%	100%	100%	806.338.680	707.827.708	690.642.406		DINAS PENATAAN RUANG
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	400.000.000	400.000.000	486.145.838		DINAS PENATAAN RUANG
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Berita Acara	50 Berita Acara	50 Berita Acara	406.338.680	307.827.708	204.496.568		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	30.000.000	30.000.000	30.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	30.000.000	30.000.000	30.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	877.975.836	877.975.836	851.342.836		DINAS PENATAAN RUANG
		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	100%	100%	877.975.836	877.975.836	851.342.836		DINAS PENATAAN RUANG
		Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	632.975.836	632.975.836	613.342.836		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
		Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	205.000.000	205.000.000	205.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	17.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	16.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselesainya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	120.000.000	120.000.000	117.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesainya permasalahan tanah kosong	100%	100%	100%	20.000.000	20.000.000	17.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	17.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	100 persen	100 persen	100 persen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000		DINAS PENATAAN RUANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.								
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terkelolanya izin membuka tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	300.000.000	201.489.028	156.170.868		DINAS PENATAAN RUANG
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100%	100%	100%	300.000.000	201.489.028	156.170.868		DINAS PENATAAN RUANG
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	201.489.028	156.170.868		DINAS PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terselesainya penatagunaan tanah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	120.000.000	120.000.000	166.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100%	100%	100%	120.000.000	120.000.000	166.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	166.000.000		DINAS PENATAAN RUANG
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							323.910.488.450	331.134.612.392	378.131.967.466		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							208.571.162.686	9.742.159.886	13.598.054.929		
		PROGRAM PENGELOLAAN	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75 Persen	55.75 Persen	55.75 Persen	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200		DINAS PERUMAHAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		SUMBER DAYA AIR (SDA)	SUMBER DAYA AIR (SDA)									KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembangunan Unit Air Baku	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.325.000.000	3.325.000.000	2.734.030.200		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	50 SR	50 SR	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	50 Liter/Detik	50.000.000	50.000.000	3.258.251.480		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	92,69%	92,69%	3.949.197.688	3.949.197.688	3.354.872.690		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	3.949.197.688	3.949.197.688	3.354.872.690		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M <sup>3</sup> /Hari	2 M <sup>3</sup> /Hari	2 M <sup>3</sup> /Hari	3.432.672.688	3.432.672.688	2.845.472.690		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M <sup>3</sup> /Hari	75 M <sup>3</sup> /Hari	75 M <sup>3</sup> /Hari	516.525.000	516.525.000	509.400.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64.00 persen	64.00 persen	64.00 persen	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	1.891.443.655		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	100%	100%	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	100%	100%	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.367.962.198	2.367.962.198	2.359.456.904		DINAS PERUMAHAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								KAWASAN PERMUKIMAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							115.339.325.764	321.392.452.506	364.533.912.537		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	100%	100%	47.857.737.470	48.281.861.412	48.422.716.428		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%	100%	100%					
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%	100%	100%					
				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%	100%	100%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	111.516.800	111.516.800	110.227.320		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.837.600	30.837.600	30.190.480		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.535.900	6.535.900	6.535.900		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.660.900	7.660.900	7.660.900		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19.185.900	19.185.900	19.185.900		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.660.900	7.660.900	7.660.900		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.317.800	7.317.800	7.317.800		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	32.317.800	32.317.800	31.675.440		DINAS PERUMAHAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												KAWASAN PERMUKIMAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	21.529.855.400	21.753.979.342	19.582.554.222		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	21.091.564.000	21.162.921.600	18.915.277.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	415.560.000	568.326.342	647.086.342		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	7.500.000	6.275.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.139.400	5.139.400	4.358.600		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	6.051.600	6.051.600	5.650.560		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				an/Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	4.040.400	4.040.400	3.906.720		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	614.219.469	814.219.469	831.859.642		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	326.637.869	326.637.869	452.511.869		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000	8.100.000	7.050.773		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	217.154.400	417.154.400	319.585.800		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	62.327.200	62.327.200	52.711.200		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	2.862.952.887	2.862.952.887	2.873.533.815		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	42.928.000	42.928.000	42.928.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	1.973.770.270	1.973.770.270	2.091.283.626		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	207.249.698	207.249.698	59.993.213		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	70.942.276	70.942.276	56.327.261		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	87.576.602	87.576.602	87.576.602		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	59.130.600	59.130.600	47.304.480		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	124.334.041	124.334.041	195.761.233		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	22.021.400	22.021.400	17.359.400		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERMUKIMAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	275.000.000	275.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	6.262.289.735	6.262.289.735	8.101.094.873		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	852.540.000	852.540.000	310.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.173.337.606	5.173.337.606	7.547.072.606		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	236.412.129	236.412.129	244.022.267		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	3.276.294.340	3.276.294.340	3.496.394.744		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.000.000	13.000.000	13.000.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	772.056.000	772.056.000	940.956.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.491.238.340	2.491.238.340	2.542.438.744		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	13.200.608.839	13.200.608.839	13.427.051.812		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 Unit	270 Unit	270 Unit	1.828.348.355	1.828.348.355	1.828.348.355		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	110 Unit	110 Unit	7.620.020.765	7.620.020.765	8.260.218.938		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 Unit	614 Unit	614 Unit	121.078.800	121.078.800	30.269.700		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	2.803.190.137		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	300 Unit	300 Unit	300 Unit	631.160.919	631.160.919	505.024.682		DINAS PERUMAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								N DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitas Kebutuhan Perumahan	100%	100%	100%	5.262.830.450	5.362.830.450	5.843.304.982		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	400.000.000	500.000.000	499.700.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	400.000.000	500.000.000	499.700.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	4.045.000.000	4.045.000.000	4.539.401.707		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.045.000.000	4.045.000.000	4.539.401.707		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	817.830.450	817.830.450	804.203.275		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	817.830.450	817.830.450	804.203.275		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum								PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	99,42%	99,42%	13.663.207.352	15.663.207.352	16.178.366.015		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100 persen	100 persen	100 persen	310.000.000	310.000.000	309.400.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	310.000.000	310.000.000	309.400.000		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	100%	100%	13.353.207.352	15.353.207.352	15.868.966.015		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 Unit Rumah	730 Unit Rumah	730 Unit Rumah	13.353.207.352	15.353.207.352	15.868.966.015		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	48.555.550.492	252.084.553.292	294.089.525.112		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Persentase Ruang Terbuka Hijau	44.36 Persen	44.36 Persen	44.36 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%	100%	100%	249.384.553.292	252.084.553.292	294.089.525.112		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100%	100%	100%					
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	21.070.036.431	29.740.036.431	48.945.156.892		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	25.673.000.000	25.873.000.000	30.766.462.852		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	147.380.000.000	138.910.000.000	139.807.190.672		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 Lokasi	177 Lokasi	177 Lokasi	53.449.002.800	52.649.002.800	72.330.072.716		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.812.514.061	4.912.514.061	2.240.641.980		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
7	SATPOL PP							29.363.99 9.677	36.629. 357.27 7	35.734.74 6.205		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							29.363.99 9.677	36.629. 357.27 7	35.734.74 6.205		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	19.384.91 0.067	19.781. 267.66 7	19.748.00 3.572		SATPOL PP
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN SKPD	100%	100%	100%					
				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	128.668.7 00	128.66 8.700	112.711.9 46		SATPOL PP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.328.80 0	32.328. 800	31.578.73 9		SATPOL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.849.020	4.849.0 20	3.049.020		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.240.840	5.240.840	4.048.190		SATPOL PP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.849.020	4.849.020	3.925.800		SATPOL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.240.840	5.240.840	4.129.940		SATPOL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	48.039.760	48.039.760	38.514.760		SATPOL PP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	28.120.420	28.120.420	27.465.497		SATPOL PP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	100%	15.929.087.160	16.000.444.760	15.114.168.160		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	15.682.311.000	15.753.668.600	14.869.377.000		SATPOL PP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	233.880.000	233.880.000	233.620.000		SATPOL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.512.400	2.512.400	2.512.400		SATPOL PP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.071.360	9.071.360	7.346.360		SATPOL PP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.312.400	1.312.400	1.312.400		SATPOL PP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	238.916.280	563.916.280	1.043.148.581		SATPOL PP
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	4 Unit	4 Unit	46.382.480	46.382.480	46.382.480		SATPOL PP
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	36.000.000	361.000.000	360.974.800		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	450 Orang	450 Orang	150.000.000	150.000.000	631.261.301		SATPOL PP
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	6.533.800	6.533.800	4.530.000		SATPOL PP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD	100%	100%	100%	496.181.676	496.181.676	446.919.827		SATPOL PP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	10.732.129	10.732.129	10.732.129		SATPOL PP
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	34.557.540	34.557.540	34.557.540		SATPOL PP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	60 Paket	21.894.640	21.894.640	18.941.180		SATPOL PP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	31.682.820	31.682.820	26.924.020		SATPOL PP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	62.025.000	62.025.000	62.025.000		SATPOL PP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	211.286.048	211.286.048	170.053.800		SATPOL PP
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	124.003.499	124.003.499	123.686.158		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	578.689.822	578.689.822	889.421.822		SATPOL PP
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	529.360.004	529.360.004	840.092.004		SATPOL PP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	49.329.818	49.329.818	49.329.818		SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	617.941.080	617.941.080	623.765.650		SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	235.141.080	235.141.080	268.615.650		SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	382.800.000	382.800.000	355.150.000		SATPOL PP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	1.395.425.349	1.395.425.349	1.517.867.586		SATPOL PP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	971.235.000	971.235.000	971.235.000		SATPOL PP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	95.231.617	95.231.617	95.231.617		SATPOL PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	175.000.000	175.000.000	300.255.237		SATPOL PP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	118.003.732	118.003.732	115.190.732		SATPOL PP
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemberdayaan linmas	16%	16%	16%	9.979.089.610	16.848.089.610	15.986.742.633		SATPOL PP
				Persentase penurunan pelanggaran Perda	10.00 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen					
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	16%	16%	16%	9.429.901.791	16.298.901.791	15.393.954.848		SATPOL PP
				Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%					
		Koordinasi Penyelenggaraan	Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.573.409.198	1.573.409.198	1.083.577.710		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.242.246.940	14.111.246.940	13.777.715.965		SATPOL PP
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	252 Orang	252 Orang	252 Orang	92.350.000	92.350.000	82.510.142		SATPOL PP
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	189.206.870	189.206.870	177.356.870		SATPOL PP
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.755.690	46.755.690	48.444.128		SATPOL PP
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah	80 laporan	80 laporan	80 laporan	80.274.100	80.274.100	64.316.488		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	76 Laporan	76 Laporan	76 Laporan	197.525.166	197.525.166	158.815.718		SATPOL PP
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.133.827	8.133.827	1.217.827		SATPOL PP
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	ersentase perda dan perkada yang ditegakkan	68%	68%	68%	489.431.889	489.431.889	533.856.255		SATPOL PP
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	47.854.755	47.854.755	42.063.804		SATPOL PP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	257.823.944	257.823.944	344.511.049		SATPOL PP
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	183.753.190	183.753.190	147.281.402		SATPOL PP
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	12 KASUS	12 KASUS	12 KASUS	59.755.930	59.755.930	58.931.530		SATPOL PP
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.755.930	59.755.930	58.931.530		SATPOL PP
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN							29.566.739.032	30.382.169.432	37.077.019.385		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							29.566.739.032	30.382.169.432	37.077.019.385		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.176.776.590	18.451.597.206	18.235.759.760		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	72.664.700	72.664.700	72.664.700		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	30.690.800	30.690.800	30.690.800		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.228.700	4.228.700	4.228.700		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.813.700	4.813.700	4.813.700		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.946.900	2.946.900	2.946.900		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.396.900	3.396.900	3.396.900		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.197.200	1.197.200	1.197.200		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	25.390.500	25.390.500	25.390.500		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	14.329.910.610	14.645.341.010	13.196.671.610		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	14.042.671.000	14.358.101.400	12.895.562.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	277.979.000	277.979.000	291.849.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	949.680	949.680	949.680		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.067.690	2.067.690	2.067.690		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.236.400	1.236.400	1.236.400		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.459.840	1.459.840	1.459.840		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	2.685.600		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	861.400	861.400	861.400		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	3.886.540	3.886.540	3.886.540		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	761.720	761.720	761.720		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.044.320	1.044.320	1.044.320		DINAS PEMADAM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								KEBAKARAN
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.080.500	2.080.500	2.080.500		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	2.345.790	2.345.790	2.345.790		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	441.720	441.720	441.720		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	563.440	563.440	563.440		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.340.630	1.340.630	1.340.630		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	291.617.784	291.617.784	570.031.898		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	281.774.764	281.774.764	422.988.100		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.843.020	9.843.020	147.043.798		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas	100%	100%	100%	573.334.202	523.371.770	576.136.485		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pemadam Kebakaran								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.616.075	20.616.075	20.616.075		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	310.617.641	260.655.209	315.147.617		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.525.920	1.525.920	1.525.920		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	89.628.465	89.628.465	96.102.509		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	17.553.041	17.553.041	13.316.304		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	42.735.000	42.735.000	14.430.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	88.902.000	88.902.000	113.242.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.060	1.756.060	1.756.060		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada	100 persen	100 persen	100 persen	960.700.047	1.084.707.925	859.923.457		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dinas Pemadam Kebakaran								
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen					
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	12.791.918	12.791.918	12.791.918		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	8.865.792	8.865.792	8.865.792		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.075.142	5.075.142	5.075.142		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	799.648.003	899.824.002	666.557.802		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	38 Unit	134.319.192	158.151.071	166.632.803		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	533.171.840	533.171.840	600.327.860		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	366.776.400	366.776.400	433.932.420		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	166.395.440	166.395.440	166.395.440		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kantor yang Disediakan								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	1.409.145.077	1.294.489.847	2.353.771.420		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	42 Unit	1.074.073.379	959.418.149	948.368.610		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.454.400	1.454.400	1.454.400		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	31.690.748	31.690.748	28.663.478		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	188.027.740	188.027.740	1.266.660.565		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	101 Unit	101 Unit	101 Unit	73.988.760	73.988.760	68.714.317		DINAS PEMADAM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.389.96 2.442	11.930. 572.22 6	18.841.25 9.625		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyelamatan Non Kebakaran								
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100 persen	100 persen	100 persen	9.705.284.522	9.631.511.742	16.715.223.439		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen					
				Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen					
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	140.000.000	140.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemadaman dan Pengendalian	Pemadaman dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	8.191.216.930	8.191.216.930	8.491.403.045		DINAS PEMADAM

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								KEBAKARAN
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	8.285.000	8.285.000	6.105.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.200.000	4.200.000	0		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.671.610	18.671.610	18.671.610		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi	12 Desa/Kelurahan	12 Desa/Kelurahan	12 Desa/Kelurahan	81.379.635	81.379.635	79.939.635		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	100 Unit	100 Unit	100 Unit	1.267.700.000	1.153.927.220	7.951.361.162		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	33.831.347	33.831.347	27.742.987		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100 persen	100 persen	100 persen	797.380.718	1.476.437.510	1.326.288.304		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran								
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	787.380.718	1.466.437.510	1.316.288.304		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100 persen	100 persen	100 persen	25.865.195	25.865.195	15.721.944		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	25.865.195	25.865.195	15.721.944		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen	686.732.570	622.058.342	616.547.560		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	40.084.500	40.084.500	34.573.718		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada	48 Desa/Kelurahan	48 Desa/Kelurahan	48 Desa/Kelurahan	297.059.390	264.839.390	264.839.390		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya								
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	349.588.680	317.134.452	317.134.452		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100 persen	100 persen	100 persen	174.699.437	174.699.437	167.478.378		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
				Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	73.225.517	73.225.517	66.500.000		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.473.920	1.473.920	1.473.920		DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar								
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100.000.000	100.000.000	99.504.458		DINAS PEMADAM KEBAKARAN
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							13.654.280.300	13.954.280.300	14.335.252.729		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13.654.280.300	13.954.280.300	14.335.252.729		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.059.022.642	9.159.022.642	9.293.288.603		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase perencanaan dan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pelaporan kinerja SKPD								
				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	51.800.000	151.800.000	151.800.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.450.000	150.450.000	150.450.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000	450.000	450.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000	450.000	450.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	450.000	450.000	450.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	6.980.892.000	6.980.892.000	6.446.595.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	6.772.752.000	6.772.752.000	6.238.455.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	207.240.000	207.240.000	207.240.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	450.000	450.000	450.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000	450.000	450.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	403.892.755	403.892.755	448.183.955		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.927.150	19.927.150	19.927.150		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	40.192.723	40.192.723	85.512.147		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	43.713.531	43.713.531	43.698.561		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	12 Paket	12 Paket	12 Paket	28.643.678	28.643.678	24.879.446		BADAN PENANGGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kantor yang Disediakan								LANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	1000 Paket	1000 Paket	1000 Paket	24.562.760	24.562.760	24.562.760		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	13.200.000	13.200.000	10.920.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	149.577.000	149.577.000	154.607.978		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	84.075.913	84.075.913	84.075.913		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	691.358.000	691.358.000	726.372.970		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	1000 Laporan	1000 Laporan	3.927.000	3.927.000	3.927.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	237.575.000	237.575.000	272.589.970		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	449.856.000	449.856.000	449.856.000		BADAN PENANGGULANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kantor yang Disediakan								BENCANA DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	931.079.887	931.079.887	1.520.336.678		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	309.290.400	309.290.400	309.290.400		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	415.461.789	415.461.789	450.306.909		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	56.197.756	56.197.756	56.197.756		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	150.129.942	150.129.942	704.541.613		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 %	20.00 %	20.00 %	4.595.257.658	4.795.257.658	5.041.964.126		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	20.00 persen	20.00 persen	20.00 persen					
				Persentase warga negara yang memperoleh	100 persen	100 persen	100 persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	500 orang	500 orang	242.069.600	242.069.600	247.949.315		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44.963.600	44.963.600	44.963.600		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	500 Orang	500 Orang	500 Orang	197.106.000	197.106.000	202.985.715		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana ( RPB ) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	827.846.108	1.087.846.108	1.121.433.398		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	5 jenis					
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	42.665.790	202.665.790	149.165.790		BADAN PENANGGULANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								BENCANA DAERAH
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	241.292.970	241.292.970	241.292.970		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	439.845.538	539.845.538	577.820.538		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	52.041.810	52.041.810	101.154.100		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	3 laporan	3 laporan	3 laporan	52.000.000	52.000.000	52.000.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.525.341.950	1.725.341.950	1.936.419.553		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	250 Orang	250 Orang	1.353.008.740	1.553.008.740	1.777.086.343		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	250 Orang	250 Orang	250 Orang	172.333.210	172.333.210	159.333.210		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasma dan Monev kebencanaan	200 orang	200 orang	200 orang	2.000.000.000	1.740.000.000	1.736.161.860		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang didelegalkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	2.000.000.000	1.740.000.000	1.736.161.860		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10	DINAS SOSIAL							34.393.388.438	34.736.103.638	32.393.241.203		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							34.393.388.438	34.736.103.638	32.393.241.203		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	10.491.229.734	10.633.944.934	10.175.654.209		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100%	59.777.945	59.777.945	59.777.945		DINAS SOSIAL
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29.357.600	29.357.600	29.357.600		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	445.600	445.600	445.600		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.064.800	2.064.800	2.064.800		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.824.800	1.824.800	1.824.800		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.110.445	2.110.445	2.110.445		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.824.800	1.824.800	1.824.800		DINAS SOSIAL
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	22.149.900	22.149.900	22.149.900		DINAS SOSIAL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100%	100%	8.853.215.262	8.995.930.462	8.362.845.862		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	8.534.493.000	8.677.208.200	8.044.235.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	312.480.000	312.480.000	312.480.000		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	984.800	984.800	984.800		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.295.771	1.295.771	1.184.371		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2.665.920	2.665.920	2.665.920		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.295.771	1.295.7 71	1.295.771		DINAS SOSIAL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	100%	100%	567.256.6 61	567.25 6.661	574.850.6 17		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	5.900.000	5.900.0 00	5.900.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	66.587.02 4	66.587. 024	65.887.02 4		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 Paket	53 Paket	53 Paket	5.067.472	5.067.4 72	5.067.472		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	448 Paket	448 Paket	448 Paket	33.656.50 0	33.656. 500	27.817.66 0		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7106 Paket	7106 Paket	7106 Paket	32.400.00 0	32.400. 000	32.400.00 0		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.760.000	5.760.0 00	5.040.000		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	74 Laporan	74 Laporan	74 Laporan	154.350.000	154.350.000	73.425.000		DINAS SOSIAL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	147.100.000	147.100.000	207.160.000		DINAS SOSIAL
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	116.435.665	116.435.665	152.153.461		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100%	100%	100%	141.860.980	141.860.980	131.750.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	141.860.980	141.860.980	131.750.000		DINAS SOSIAL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100%	100%	100%	800.782.214	800.782.214	800.782.214		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	38 Unit	510.371.000	510.371.000	510.371.000		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	201 Unit	201 Unit	201 Unit	15.161.270	15.161.270	15.161.270		DINAS SOSIAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	120.450.000	120.450.000	120.450.000		DINAS SOSIAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.921.249	32.921.249	32.921.249		DINAS SOSIAL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	136 Unit	136 Unit	136 Unit	85.923.695	85.923.695	85.923.695		DINAS SOSIAL
		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100%	100%	100%	68.336.672	68.336.672	245.647.571		DINAS SOSIAL
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68.336.672	68.336.672	245.647.571		DINAS SOSIAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	89.00 Persen	89.00 Persen	89.00 Persen	7.168.771.074	7.168.771.074	6.938.146.301		DINAS SOSIAL
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	149.769.259	149.769.259	130.974.170		DINAS SOSIAL
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	149.769.259	149.769.259	130.974.170		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pengumpulan Uang atau Barang								
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	89.00 %	89.00 %	89.00 %	7.019.001.815	7.019.001.815	6.807.172.131		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	260 Orang	5.341.423.679	5.341.423.679	5.228.363.145		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	342.378.714	342.378.714	325.219.856		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Keluarga	4 Keluarga	4 Keluarga	116.062.254	116.062.254	101.318.964		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	340.213.065	340.213.065	326.982.100		DINAS SOSIAL
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	12 Sertifikat	12 Sertifikat	12 Sertifikat	878.924.103	878.924.103	825.288.066		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota								
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	40.955.130	40.955.130	35.216.132		DINAS SOSIAL
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	40.955.130	40.955.130	35.216.132		DINAS SOSIAL
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	40.955.130	40.955.130	35.216.132		DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99.87 Persen	99.87 Persen	99.87 Persen	8.531.393.330	8.631.393.330	8.647.043.480		DINAS SOSIAL
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100%	100%	100%	2.172.913.680	2.172.913.680	2.211.063.830		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dasarnya di luar panti								
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	988.200.000	988.200.000	988.200.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	54.223.450	54.223.450	54.223.450		DINAS SOSIAL
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	42.050.000	42.050.000	42.050.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	719.570.190	719.570.190	735.220.340		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	90 Orang	90 Orang	90 Orang	55.023.000	55.023.000	77.523.000		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyanggah Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	11.036.000	11.036.000	11.036.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	85 Orang	85 Orang	3.618.960	3.618.960	3.618.960		DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 Orang	125 Orang	115.717.080	115.717.080	115.717.080		DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	67.975.000	67.975.000	67.975.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	30 Orang	57.750.000	57.750.000	57.750.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	57.750.000	57.750.000	57.750.000		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	6.358.479.650	6.458.479.650	6.435.979.650		DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	300 Orang	381.790.800	381.790.800	381.790.800		DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	40.681.810	40.681.810	40.681.810		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	4000 Orang	4000 Orang	4000 Orang	4.772.399.810	4.772.399.810	4.772.399.810		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	48 Orang	48 Orang	19.008.000	19.008.000	19.008.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	65 Orang	65 Orang	65 Orang	194.254.530	194.254.530	194.254.530		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	249.732.240	249.732.240	249.732.240		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	46.900.000	46.900.000	46.900.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	80.605.000	80.605.000	80.605.000		DINAS SOSIAL
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	5 Orang	5 Orang	5 Orang	51.477.460	51.477.460	51.477.460		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	41.391.600	41.391.600	41.391.600		DINAS SOSIAL
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	125 Orang	125 Orang	26.300.000	26.300.000	26.300.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	26.300.000	26.300.000	26.300.000		DINAS SOSIAL
		Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25 Orang	26.300.000	26.300.000	26.300.000		DINAS SOSIAL
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	401.338.400	501.338.400	478.838.400		DINAS SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	70.54 Persen	70.54 Persen	70.54 Persen	7.009.078.990	7.009.078.990	5.404.181.561		DINAS SOSIAL
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial	100%	100%	100%	201.296.690	201.296.690	201.296.690		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				kepada anak-anak terlantar								
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	129.769.400	129.769.400	129.769.400		DINAS SOSIAL
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	27.366.760	27.366.760	27.366.760		DINAS SOSIAL
		Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	44.160.530	44.160.530	44.160.530		DINAS SOSIAL
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14.65 %	14.65 %	14.65 %	6.807.782.300	6.807.782.300	5.202.884.871		DINAS SOSIAL
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	150000 Orang	150000 Orang	150000 Orang	519.417.249	519.417.249	458.574.249		DINAS SOSIAL
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500 Keluarga	1500 Keluarga	1500 Keluarga	482.215.951	482.215.951	454.279.721		DINAS SOSIAL
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50000 Keluarga	50000 Keluarga	50000 Keluarga	5.169.649.100	5.169.649.100	3.653.530.901		DINAS SOSIAL
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	636.500.000	636.500.000	636.500.000		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota								
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.151.960.180	1.251.960.180	1.192.999.520		DINAS SOSIAL
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	100%	100%	623.115.180	723.115.180	723.114.880		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	380 Orang	380 Orang	278.400.000	278.400.000	278.400.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang	375 Orang	375 Orang	70.280.000	70.280.000	70.280.000		DINAS SOSIAL
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	5 Unit	30.250.000	30.250.000	30.250.000		DINAS SOSIAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	75 Orang	63.290.400	63.290.400	63.290.400		DINAS SOSIAL
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	180.894.780	280.894.780	280.894.780		DINAS SOSIAL
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	528.845.000	528.845.000	469.884.640		DINAS SOSIAL
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	3 Kampung	3 Kampung	326.185.000	326.185.000	301.228.952		DINAS SOSIAL
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	202.660.000	202.660.000	168.655.688		DINAS SOSIAL
11	DINAS TENAGA KERJA							18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							18.636.644.343	19.068.644.343	17.426.385.847		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.291.730.613	14.423.730.613	13.622.631.686		DINAS TENAGA KERJA
				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	57.742.028	57.742.028	57.742.028		DINAS TENAGA KERJA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29.595.404	29.595.404	29.595.404		DINAS TENAGA KERJA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.018	1.425.018	1.425.018		DINAS TENAGA KERJA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.366.854	1.366.854	1.366.854		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.425.018	1.425.018	1.425.018		DINAS TENAGA KERJA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.142.190	1.142.190	1.142.190		DINAS TENAGA KERJA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	745.254	745.254	745.254		DINAS TENAGA KERJA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	22.042.290	22.042.290	22.042.290		DINAS TENAGA KERJA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	12.194.401.000	12.326.401.000	11.577.579.000		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	11.984.621.000	12.116.621.000	11.367.799.000		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	209.780.000	209.780.000	209.780.000		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	278.674.032	278.674.032	285.110.049		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	19.993.701	19.993.701	19.993.701		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	22.692.149	22.692.149	22.692.149		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	19.946.089	19.946.089	19.946.089		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	20.020.361	20.020.361	22.080.299		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	17.175.947	17.175.947	21.552.026		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	5.008.953	5.008.953	5.008.953		DINAS TENAGA KERJA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	5.494.500	5.494.500	5.494.500		DINAS TENAGA KERJA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	109.456.000	109.456.000	109.456.000		DINAS TENAGA KERJA
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4.989.672	4.989.672	4.989.672		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	53.896.660	53.896.660	53.896.660		DINAS TENAGA KERJA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	31.926.419	31.926.419	0		DINAS TENAGA KERJA
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	23 Unit	31.926.419	31.926.419	0		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	1.283.788.956	1.283.788.956	1.257.002.431		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	366.601.356	366.601.356	338.358.636		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	917.187.600	917.187.600	918.643.795		DINAS TENAGA KERJA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja	100 persen	100 persen	100 persen	445.198.178	445.198.178	445.198.178		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 Unit	24 Unit	24 Unit	280.099.620	280.099.620	280.099.620		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit	63 Unit	50.130.308	50.130.308	50.130.308		DINAS TENAGA KERJA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	75.058.200	75.058.200	75.058.200		DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	70.00 Persen	70.00 Persen	70.00 Persen	142.722.500	142.722.500	134.047.250		DINAS TENAGA KERJA
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	142.722.500	142.722.500	134.047.250		DINAS TENAGA KERJA
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	142.722.500	142.722.500	134.047.250		DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78.00 Persen	78.00 Persen	78.00 Persen	2.975.461.798	3.075.461.798	2.310.307.298		DINAS TENAGA KERJA
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	52 persen	52 persen	52 persen	2.836.501.298	2.936.501.298	2.096.487.938		DINAS TENAGA KERJA
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	672 Orang	672 Orang	672 Orang	2.822.699.400	2.922.699.400	2.082.686.040		DINAS TENAGA KERJA
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	23 Unit	23 Unit	23 Unit	13.801.898	13.801.898	13.801.898		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sarana Pelatihan Kerja								
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	22 persen	22 persen	22 persen	80.000.000	80.000.000	163.790.360		DINAS TENAGA KERJA
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	80.000.000	80.000.000	163.790.360		DINAS TENAGA KERJA
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100 persen	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000	7.668.500		DINAS TENAGA KERJA
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	15 Perizinan	15 Perizinan	10.000.000	10.000.000	7.668.500		DINAS TENAGA KERJA
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	152739000 Rupiah	152739000 Rupiah	152739000 Rupiah	48.960.500	48.960.500	42.360.500		DINAS TENAGA KERJA
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	48.960.500	48.960.500	42.360.500		DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	68.00 Persen	68.00 Persen	68.00 Persen	669.033.288	869.033.288	823.717.338		DINAS TENAGA KERJA
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 orang	2000 orang	2000 orang	302.053.172	402.053.172	371.671.132		DINAS TENAGA KERJA
		Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	108.620.872	108.620.872	101.737.872		DINAS TENAGA KERJA
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	23.115.000	23.115.000	19.365.000		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	9.571.000	9.571.000	9.121.000		DINAS TENAGA KERJA
		Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	12 Orang	12 Orang	12 Orang	160.746.300	260.746.300	241.447.260		DINAS TENAGA KERJA
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja	1000 orang	1000 orang	1000 orang	253.967.244	353.967.244	342.783.334		DINAS TENAGA KERJA
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	123.967.244	223.967.244	212.783.334		DINAS TENAGA KERJA
		Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	750 Orang	750 Orang	750 Orang	130.000.000	130.000.000	130.000.000		DINAS TENAGA KERJA
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan Pekerja Migran Indonesia (pra dan purna penempatan)	40 orang	40 orang	40 orang	113.012.872	113.012.872	109.262.872		DINAS TENAGA KERJA
		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang	40 Orang	40 Orang	21.335.000	21.335.000	18.710.000		DINAS TENAGA KERJA
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	91.677.872	91.677.872	90.552.872		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.50 Persen	5.50 Persen	5.50 Persen	557.696.144	557.696.144	535.682.275		DINAS TENAGA KERJA
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	788 perusahaan	788 perusahaan	788 perusahaan	292.058.109	292.058.109	287.264.324		DINAS TENAGA KERJA
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan	45 Perusahaan	45 Perusahaan	39.007.297	39.007.297	37.573.512		DINAS TENAGA KERJA
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	253.050.812	253.050.812	249.690.812		DINAS TENAGA KERJA
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB)	58 persen	58 persen	58 persen	265.638.035	265.638.035	248.417.951		DINAS TENAGA KERJA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 Perkara	160 Perkara	160 Perkara	75.260.112	75.260.112	67.927.718		DINAS TENAGA KERJA
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	100 Perkara	100 Perkara	16.606.723	16.606.723	9.341.927		DINAS TENAGA KERJA
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	39.421.200	39.421.200	40.588.806		DINAS TENAGA KERJA
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	134.350.000	134.350.000	130.559.500		DINAS TENAGA KERJA
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							24.853.197.259	25.409.985.259	24.363.480.696		
	URUSAN PEMERINTAHAN							22.994.211.744	23.490.999.744	21.867.583.411		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	14.324.076.794	14.352.169.630	13.291.031.183		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%					
				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	160.197.400	66.202.400	67.438.600		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	125.691.000	31.696.000	32.033.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.586.000	2.586.000	2.586.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												NGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.036.000	3.036.000	3.036.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.379.200	1.379.200	1.379.200		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.012.000	1.012.000	1.012.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	3.596.800	3.596.800	4.496.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.896.400	22.896.400	22.896.400		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	9.918.108.345	10.274.896.345	9.408.991.345		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	9.671.520.000	10.028.308.000	9.162.403.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	242.578.745	242.578.745	242.578.745		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.124.000	1.124.000	1.124.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000	750.000	750.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	1.573.600	1.573.600	1.573.600		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								NGAN ANAK
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	562.000	562.000	562.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	382.600.000	430.877.416	365.210.046		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.600.000	180.877.416	230.955.596		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	480 Orang	480 Orang	250.000.000	250.000.000	134.254.450		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	1.134.598.847	1.132.653.027	957.165.639		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.355.300	5.355.300	5.355.300		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	57.905.370	52.384.560	22.744.560		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	29.997.620	29.997.620	29.997.620		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	64.466.452	64.466.452	59.365.502		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	20.175.425	25.375.425	25.375.425		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												NGAN ANAK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	523.546.200	522.468.040	481.340.922		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	385.152.480	384.605.630	284.986.310		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	1.341.628.410	1.059.191.840	1.151.408.449		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	933.780.000	418.460.000	508.598.739		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	281.861.380	398.683.990	377.877.930		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	112.361.790	184.129.330	200.907.700		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												N DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	13.625.240	57.918.520	64.024.080		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	582.109.140	584.758.230	539.621.812		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	177.384.000	180.033.090	159.024.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	404.725.140	404.725.140	380.597.812		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	804.834.652	803.590.372	801.195.292		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								YAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	442.264.410	401.088.510	373.466.160		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	43.390.566	43.390.566	43.390.566		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	243.102.165	299.562.705	329.835.425		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	36.167.461	19.638.541	14.593.091		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.488.449.604	1.528.449.604	1.423.250.884		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	96 Program/ Kegiatan	96 Program/ Kegiatan	96 Program/ Kegiatan	216.903.9 68	216.90 3.968	172.297.2 48		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	33.766.45 0	33.766. 450	33.766.45 0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	54.244.53 0	54.244. 530	32.197.81 0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	70.029.65 8	70.029. 658	70.029.65 8		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan	46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	58.863.33 0	58.863. 330	36.303.33 0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								PERLINDUNGAN ANAK
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	444.347.212	464.347.212	464.347.212		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	63.278.642	83.278.642	83.278.642		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	381.068.570	381.068.570	381.068.570		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	827.198.424	847.198.424	786.606.424		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	mendapat pelatihan								N DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	527.198.578	527.198.578	527.198.578		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	200 Orang	200 Orang	160.539.028	160.539.028	159.789.028		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	139.460.818	139.460.818	99.618.818		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.011 %	0.011 %	0.011 %	2.547.556.594	2.547.556.594	2.649.814.502		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000)	12.84 point	12.84 point	12.84 point					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				penduduk perempuan)								
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	549.999.882	709.999.882	768.376.512		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	411.254.782	471.254.782	530.371.412		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah	60 Perangkat Daerah	138.745.100	238.745.100	238.005.100		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	1.266.853.184	1.360.848.184	1.345.591.625		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1.266.853.184	1.360.848.184	1.207.071.625		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan								PERLINDUNGAN ANAK
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			80 Layanan			138.520.000	Dana Transfer	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	26 Lembaga	26 Lembaga	730.703.528	790.703.528	535.846.365		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	253.882.570	313.882.570	223.704.590		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	297 Orang	297 Orang	130.105.119	130.105.119	57.480.475		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat	5 Orang	5 Orang	5 Orang	176.828.359	176.828.359	88.673.820		DINAS PEMBERDAYAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik								PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	169.887.480	169.887.480	165.987.480		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	2.561.500.000	2.581.500.000	2.506.698.720		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.062.612.120	2.082.612.120	2.013.291.580		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	355.000.000	355.000.000	331.482.260		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	81.500.000	101.500.000	55.697.200		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.626.112.120	1.626.112.120	1.626.112.120		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	470.551.180	470.551.180	470.551.180		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	73.217.800	73.217.800	73.217.800		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	373.887.880	373.887.880	373.887.880		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.445.500	23.445.500	23.445.500		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100%	100%	28.336.700	28.336.700	22.855.960		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	28.336.700	28.336.700	22.855.960		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	278.511.810	335.219.990	246.319.980		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	278.511.810	335.219.990	246.319.980		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota									NGAN ANAK
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99.118.300	99.118.300	84.439.140		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	179.393.510	236.101.690	161.880.840		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.794.116.942	1.832.108.926	1.577.108.926		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	9 Jejaring	9 Jejaring	395.000.000	449.802.500	390.185.096		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	65.000.000	65.000.000	43.100.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pemerintah, Media dan Dunia Usaha								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	330.000.000	384.802.500	347.085.096		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	1.399.116.942	1.382.306.426	1.186.923.830		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	841.156.942	770.790.426	715.324.590		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	170.000.000	153.580.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	207.960.000	221.516.000	164.806.530		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000	220.000.000	153.212.710		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani			0.01 Persen			173.359.216		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pecegahan kekerasan terhadap anak			2 Kegiatan			54.250.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			100 Orang			54.250.000	Dana Transfer	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus			7 Lembaga			96.960.000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			60 Orang			96.960.000	Dana Transfer	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												N DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus			100%			22.149.216		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			60 Orang			22.149.216	Dana Transfer	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.858.985.515	1.918.985.515	2.495.897.285		
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	545.129.154	545.129.154	699.977.134		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	545.129.154	545.129.154	699.977.134		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.463.700	27.463.700	85.402.700		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	517.665.454	517.665.454	614.574.434		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.313.856.361	1.373.856.361	1.795.920.151		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	1.313.856.361	1.373.856.361	1.795.920.151		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	348.427.510	388.427.510	345.985.560		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								PERLINDUNGAN ANAK
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100.667.580	100.667.580	100.667.580		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	104.068.520	124.068.520	100.390.520		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	760.692.751	760.692.751	1.248.876.491		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	DINAS KETAHANAN PANGAN							16.633.805.374	18.313.519.874	18.463.443.205		
	URUSAN PEMERINTAHAN							16.633.805.374	18.313.519.874	18.463.443.205		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
	<b>BIDANG PANGAN</b>											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.783.223.571	9.982.848.171	9.178.837.983		DINAS KETAHANAN PANGAN
				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur-Ketapang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	63.272.806	63.272.806	63.272.806		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29.896.800	29.896.800	29.896.800		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.900	2.796.900	2.796.900		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.900	2.796.900	2.796.900		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.245.300	1.245.300	1.245.300		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.245.300	1.245.300	1.245.300		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	25.291.606	25.291.606	25.291.606		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.071.251.200	7.071.251.200	6.400.853.200		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6.819.197.000	6.819.197.000	6.144.171.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	248.910.000	248.910.000	254.100.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673.400	673.400	673.400		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	2.022.200	2.022.200	1.460.200		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	448.600		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-Ketapang	100%	100%	100%	1.003.503.588	1.203.128.188	990.614.691		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.164.604	9.164.604	9.164.604		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	126.241.938	126.241.938	88.914.947		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	55.579.611	55.579.611	54.136.611		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	62.676.118	62.676.118	62.276.118		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.573.346	38.573.346	38.446.143		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000	5.700.000	5.700.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.972.400	100.972.400	100.972.400		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	380.960.000	580.584.600	388.152.000		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.635.571	223.635.571	242.851.868		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang	100%	100%	100%	919.857.764	919.857.764	942.061.210		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	187.290.000	187.290.000	187.290.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	732.567.764	732.567.764	754.771.210		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang	100%	100%	100%	725.338.213	725.338.213	782.036.076		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	404.100.000	404.100.000	438.980.000		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	25 Unit	61.396.319	61.396.319	61.396.319		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	219.891.894	219.891.894	241.709.757		DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	144.204.400	144.204.400	137.548.300		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	144.204.400	144.204.400	137.548.300		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	119.204.400	119.204.400	112.548.300		DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi / Kapita	3058 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	3058 Kkal / Kapita / Tahun	4.216.557.190	5.312.647.090	6.520.970.394		DINAS KETAHANAN PANGAN
				Presentase Cakupan Distribusi	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
				Terlaksananya Kegiatan	100.00 %	100.00 %	100.00 %					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang								
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	100%	100%	1.624.498.023	2.245.442.622	2.134.784.883		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	180.120.000	308.120.000	285.293.290		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	518.403.827	518.403.827	509.582.736		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.028.119	50.028.119	35.201.589		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	44 Unit	44 Unit	44 Unit	509.297.641	1.002.242.240	975.529.192		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemantauan Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	35.440.000	35.440.000	29.832.300		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.150.170	25.150.170	19.860.250		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	128.493.310	128.493.310	114.739.790		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	153.914.956	153.914.956	144.994.956		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.650.000	23.650.000	19.750.780		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Cadangan Pangan	100%	100%	100%	1.304.629.167	1.304.629.167	1.316.129.167		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	97.5 Ton	97.5 Ton	97.5 Ton	1.170.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	10 Ton	10 Ton	134.629.167	134.629.167	146.129.167		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	88%	88%	88%	1.287.430.000	1.762.575.301	3.070.056.344		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	528.516.000	758.230.000	2.181.677.833		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	412.120.000	412.120.000	376.153.210		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	346.794.000	592.225.301	512.225.301		DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Panga	3 Persen	3 Persen	3 Persen	379.648.149	507.648.149	474.537.209		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 Buku	2 Buku	2 Buku	123.943.310	123.943.310	116.157.470		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	123.943.310	123.943.310	116.157.470		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	255.704.839	383.704.839	358.379.739		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	255.704.839	383.704.839	358.379.739		DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	82,00 Persen	82,00 Persen	82,00 Persen	2.110.172.064	2.366.172.064	2.151.549.319		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	100%	100%	2.110.172.064	2.366.172.064	2.151.549.319		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	447.000.000	575.000.000	538.339.037		DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	265.000.087	393.000.087	335.700.087		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.148.171.977	1.148.171.977	1.040.199.837		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Dokuman	5 Dokuman	5 Dokuman	250.000.000	250.000.000	237.310.358		DINAS KETAHANAN PANGAN
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							116.477.859.006	117.026.516.606	126.313.494.587		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							116.477.859.006	117.026.516.606	126.313.494.587		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	41.542.867.032	41.614.224.632	47.628.753.694		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	68.413.070	68.413.070	68.413.070		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31.720.634	31.720.634	31.720.634		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.678.100	2.678.100	2.678.100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.543.100	2.543.100	2.543.100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.378.100	2.378.100	2.378.100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.543.100	2.543.100	2.543.100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	26.550.036	26.550.036	26.550.036		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	17.143.623.270	17.214.980.870	15.699.953.566		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.386.946.000	15.458.303.600	13.934.380.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	408.578.970	408.578.970	408.578.970		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.341.390.100	1.341.390.100	1.350.286.396		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.661.000	2.661.000	2.661.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.548.600	2.548.600	2.548.600		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.498.600	1.498.600	1.498.600		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	2.037.984.143	2.037.984.143	2.067.541.673		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.650.000	45.650.000	65.649.090		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	22 Paket	534.895.147	534.895.147	595.967.725		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	111.330.919	111.330.919	116.001.275		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	59.254.700	59.254.700	59.266.756		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.281.938	2.281.938	2.281.938		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000	135.000.000	102.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	413.712.990	413.712.990	330.936.990		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	735.858.449	735.858.449	795.437.899		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.023.217.308	1.023.217.308	956.454.477		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	820.177.308	820.177.308	750.170.508		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	203.040.000	203.040.000	206.283.969		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	21.269.629.241	21.269.629.241	28.836.390.908		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	160.471.000	160.471.000	160.061.132		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	310 Unit	310 Unit	310 Unit	20.209.584.460	20.209.584.460	27.741.540.226		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.291.507	1.291.507	1.291.507		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	200 Unit	250.000.000	250.000.000	270.090.899		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	648.282.274	648.282.274	663.407.144		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	566.159.024	566.159.024	524.670.792		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	366.159.024	366.159.024	348.774.443		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	210.877.000	210.877.000	201.615.383		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	155.282.024	155.282.024	147.159.060		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	200.000.000	175.896.349		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	175.896.349		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Cakupan penghijauan wilayah rawan	30.00 Ha	30.00 Ha	30.00 Ha	5.140.013.861	5.140.013.861	4.997.461.095		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	longsor dan sumber mata air								
				Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	2.00 Persen	2.00 Persen	2.00 Persen					
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	89.00 Persen	89.00 Persen	89.00 Persen					
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	62.00 Persen	62.00 Persen	62.00 Persen					
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Emisi CO2	8274362.08 Kt CO2e	8274362.08 Kt CO2e	8274362.08 Kt CO2e	4.357.461.175	4.357.461.175	4.217.785.353		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan					
				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran &	75 persen	75 persen	75 persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				mutu kelas air sungai								
				Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1.367.711.482	1.367.711.482	1.313.774.808		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.935.698.007	1.935.698.007	1.871.225.579		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.054.051.686	1.054.051.686	1.032.784.966		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	314.332.835	314.332.835	314.332.835		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	314.332.835	314.332.835	314.332.835		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan								
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	70 Ha	70 Ha	70 Ha	468.219.851	468.219.851	465.342.907		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pelaksanaan rehabilitasi	Pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	468.219.851	468.219.851	465.342.907		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.161.729.186	1.161.729.186	1.136.804.149		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	1.161.729.186	1.161.729.186	1.136.804.149		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	686.525.627	686.525.627	662.665.080		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	187.726.716	187.726.716	186.662.226		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2 Unit	287.476.843	287.476.843	287.476.843		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	58.00 Persen	58.00 Persen	58.00 Persen	378.480.513	378.480.513	357.477.977		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		BERACUN (LIMBAH B3)	BERACUN (LIMBAH B3)									
		Penyimpanan sementara Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50.00 Perusahaan	50.00 Perusahaan	50.00 Perusahaan	289.259.497	289.259.497	271.792.685		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	204.235.097	204.235.097	195.713.304		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	85.024.400	85.024.400	76.079.381		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	89.221.016	89.221.016	85.685.292		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	89.221.016	89.221.016	85.685.292		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya								
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	723.917.835	723.917.835	661.561.250		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	85.60 Persen	85.60 Persen	85.60 Persen					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	723.917.835	723.917.835	661.561.250		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	430.060.000	430.060.000	383.395.070		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	293.857.835	293.857.835	278.166.180		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	53.00 Persen	53.00 Persen	53.00 Persen	1.888.966.089	1.888.966.089	1.782.483.952		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	1.888.966.089	1.888.966.089	1.782.483.952		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	444.063.000	444.063.000	421.744.364		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	200 Lembaga	200 Lembaga	200 Lembaga	1.444.903.089	1.444.903.089	1.360.739.588		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	12.00 Persen	12.00 Persen	12.00 Persen	291.129.200	291.129.200	279.629.974		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2.00 Jenis	2.00 Jenis	2.00 Jenis	291.129.200	291.129.200	279.629.974		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	60 Entitas	60 Entitas	291.129.200	291.129.200	279.629.974		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	128.807.617	128.807.617	119.599.546		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				yang ditindaklanjuti								
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60.00 Kasus	60.00 Kasus	60.00 Kasus	128.807.617	128.807.617	119.599.546		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	50 Pengaduan	50 Pengaduan	50 Pengaduan	102.407.787	102.407.787	93.199.716		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.399.830	26.399.830	26.399.830		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	71.00 Persen	71.00 Persen	71.00 Persen	64.655.788.649	65.133.088.649	68.825.052.158		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	28.00 Persen	28.00 Persen	28.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sampah Rumah Tangga								
				Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91.50 Persen	91.50 Persen	91.50 Persen					
		Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	64.655.78 8.649	65.133. 088.64 9	68.825.05 2.158		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 Kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	603.498.4 00	1.003.4 98.400	1.003.498. 400		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.603.641 .788	4.603.6 41.788	4.602.455. 568		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	4.835.463 .362	4.912.7 63.362	8.914.580. 649		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir								
		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	98.800.000	98.800.000	97.316.340		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	363 Ton	363 Ton	363 Ton	51.967.046.713	51.967.046.713	51.860.215.937		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.009.988.386	1.009.988.386	889.576.100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1.537.350.000	1.537.350.000	1.457.409.164		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							21.215.594.269	21.215.594.269	22.495.887.019		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI							21.215.594.269	21.215.594.269	22.495.887.019		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
	SI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.828.925.720	18.828.925.720	20.068.156.849		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	58.055.100	58.055.100	30.121.621		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	21.421.800	21.421.800	21.421.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.442.300	1.442.300	1.442.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.442.300	1.442.300	1.442.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29.421.800	29.421.800	1.488.321		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	12.028.193.580	12.028.193.580	11.482.401.580		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	78 Orang/bulan	11.810.318.000	11.810.318.000	11.264.526.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	213.263.880	213.263.880	213.263.880		DINAS KEPENDUDUKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.442.300	1.442.300	1.442.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.847.100	1.847.100	1.847.100		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.322.300	1.322.300	1.322.300		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	15.300.000	15.300.000	35.550.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	15.300.000	15.300.000	35.550.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.808.603.764	1.808.603.764	3.812.952.219		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	1 Paket	1 Paket	58.613.560	58.613.560	29.068.660		DINAS KEPENDUDUKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	58.791.910	58.791.910	54.672.070		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	152.326.600	152.326.600	143.985.900		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	451.032.315	451.032.315	2.276.486.399		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	151.159.153	151.159.153	184.503.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.500.000	16.500.000	8.250.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	341.541.200	341.541.200	477.109.200		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	123.920.000	123.920.000	62.360.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	454.719.026	454.719.026	576.516.990		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Elektronik pada SKPD								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	351.051.730	351.051.730	394.517.630		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	100 Unit	116.303.450	116.303.450	159.769.350		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	234.748.280	234.748.280	234.748.280		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	3.255.525.656	3.255.525.656	3.140.270.019		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.002.380.000	1.002.380.000	963.865.208		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.253.145.656	2.253.145.656	2.176.404.811		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.312.195.890	1.312.195.890	1.172.343.780		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	35 Unit	458.678.000	425.279.000	280.019.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120 Unit	120 Unit	120 Unit	19.634.400	19.634.400	9.817.200		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	450 Unit	450 Unit	369.365.650	369.365.650	387.265.350		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	18 Unit	18 Unit	352.566.000	352.566.000	352.566.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	111.951.840	145.350.840	142.676.230		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.50 Persen	99.50 Persen	99.50 Persen	1.384.500.753	1.384.500.753	1.410.052.505		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	74.00 Persen	74.00 Persen	74.00 Persen					
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	430000 Dokumen	430000 Dokumen	430000 Dokumen	1.066.781.960	1.066.781.960	1.092.333.712		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.072.800	7.072.800	7.072.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	789.179.360	789.179.360	815.131.112		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	322000 Dokumen	322000 Dokumen	322000 Dokumen	270.529.800	270.529.800	270.129.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	50.630.000	50.630.000	50.630.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	50.630.000	50.630.000	50.630.000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen	100 Persen	100 Persen	259.065.993	259.065.993	259.065.993		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.072.800	12.072.800	12.072.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	246.993.193	246.993.193	246.993.193		DINAS KEPENDUDUKAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				pendaftaran penduduk								PENCATATAN SIPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	8.022.800	8.022.800	8.022.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.022.800	8.022.800	8.022.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.50 Persen	97.50 Persen	97.50 Persen	443.893.836	443.893.836	453.625.743		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45450 Dokumen	45450 Dokumen	45450 Dokumen	349.213.196	349.213.196	358.945.103		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	45450 Dokumen	45450 Dokumen	45450 Dokumen	47.792.800	47.792.800	47.792.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	276.447.596	276.447.596	286.179.503		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	24.972.800	24.972.800	24.972.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	86.357.840	86.357.840	86.357.840		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	16.862.240	16.862.240	16.862.240		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	69.495.600	69.495.600	69.495.600		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	8.322.800	8.322.800	8.322.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.322.800	8.322.800	8.322.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	468.364.800	468.364.800	433.144.582		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Pengumpulan Data Kependudukan dan	Pengumpulan Data Kependudukan dan	Cakupan Pengumpulan Data	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	319.391.200	319.391.200	274.431.810		DINAS KEPENDUDUKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								UKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	299.645.600	299.645.600	249.836.210		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19.745.600	19.745.600	24.595.600		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	125.950.800	125.950.800	120.839.972		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.772.800	11.772.800	39.956.972		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.147.800	6.147.800	6.147.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	13.647.800	13.647.800	13.647.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	94.382.400	94.382.400	61.087.400		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	23.022.800	23.022.800	37.872.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.022.800	23.022.800	37.872.800		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	89.909.160	89.909.160	130.907.340		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	89.909.160	89.909.160	130.907.340		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	89.909.160	89.909.160	130.907.340		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							20.652.936.318	25.152.936.318	40.235.861.838		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							20.652.936.318	25.152.936.318	40.235.861.838		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.993.623.118	10.202.040.580	10.476.473.946		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD ((dukkb))	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	73.428.300	73.428.300	56.820.400		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	32.703.200	32.703.200	29.943.600		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.683.100	2.683.100	1.206.800		DINAS PENGENDALIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.479.800	2.479.800	1.214.400		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.683.100	2.683.100	1.206.800		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.479.800	2.479.800	1.214.400		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	30.399.300	30.399.300	22.034.400		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100%	100%	100%	6.796.460.900	6.796.460.900	7.103.451.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	6.534.064.000	6.534.064.000	6.848.249.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	924.100	924.100	0		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.419.000	1.419.000	562.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	259.680.000	259.680.000	254.640.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	373.800	373.800	0		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	678.867.204	694.984.808	729.702.375		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	19.024.746	19.024.746	23.046.764		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.412.933	17.412.933	19.752.933		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	61.884.791	61.884.791	58.884.791		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	154.341.660	154.341.660	130.176.250		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	34.915.975	34.915.975	34.915.975		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												BERENCANA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.150.000	30.150.000	31.656.540		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	240.136.270	221.918.194	276.732.613		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	121.000.829	155.336.509	154.536.509		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	161.026.852	135.173.154	107.083.902		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	161.026.852	135.173.154	107.083.902		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	504.809.226	723.780.942	791.531.982		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												K DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	131.135.742	131.135.742	198.635.742		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	373.673.484	592.645.200	592.896.240		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	1.779.030.636	1.778.212.476	1.687.884.287		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	92 Unit	92 Unit	92 Unit	649.836.000	649.836.000	649.836.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	82 Unit	82 Unit	93.958.230	93.140.070	99.897.720		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	999.281.406	999.281.406	902.195.567		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 Persen	0.50 Persen	0.50 Persen	921.774.750	1.122.603.073	1.458.391.663		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	577.344.310	577.344.310	468.027.600		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	56.194.400	85.921.700	85.921.700		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	173.495.800	200.768.500	168.822.700		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendidikan Formal dan Nonformal	Pendidikan Formal dan Nonformal	Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal								K DAN KELUARGA BERENCANA
		Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	295.024.20	238.024.220	213.283.200		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.629.890	52.629.890	0		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	344.430.440	545.258.763	990.364.063		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.574.940	306.403.263	405.728.563		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.800.000	47.800.000	222.700.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	183.435.500	183.435.500	361.935.500		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.620.000	7.620.000	0		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.24 %	77.24 %	77.24 %	8.552.144.771	12.578.989.866	18.671.893.430		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11.00 %	11.00 %	11.00 %					
				PUS Unmeet need	8.04 Persen	8.04 Persen	8.04 Persen					
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.24 %	77.24 %	77.24 %	1.266.592.980	5.678.172.890	6.459.702.590		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			2 Laporan			80.000.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			10 Laporan			300.000.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			10 Laporan			240.000.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.140.175.750	1.051.755.660	1.013.285.360		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	126.417.230	4.626.417.230	4.826.417.230		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								KELUARGA BERENCANA
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.24 %	77.24 %	77.24 %	1.330.838.950	1.320.838.950	1.851.838.950		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	177 Orang	177 Orang	177 Orang	1.292.863.950	1.282.863.950	1.813.863.950		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.975.000	37.975.000	37.975.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan PUS Unmeet need	8.04 %	8.04 %	8.04 %	3.819.993.531	3.359.258.716	7.675.412.280		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota									K DAN KELUARGA BERENCANA
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			10 Laporan			35.000.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			6 Dokumen			3.750.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6500 Orang	6500 Orang	6500 Orang	96.500.000	96.500.000	3.883.183.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19.150.000	19.150.000	19.150.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	35 Unit	35 Unit	35 Unit	2.394.702.379	1.843.109.964	2.612.534.462		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												BERENCANA
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	442.987.400	447.145.000	370.000.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 Orang	20 Orang	20 Orang	107.300.000	196.000.000	196.000.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	635.003.752	635.003.752	435.694.818		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	80 Orang	80 Orang	80 Orang	124.350.000	122.350.000	123.850.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta KB Aktif	77.24 %	77.24 %	77.24 %	2.134.719.310	2.220.719.310	2.684.939.610		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									BERENCANA
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	177 Kampung	177 Kampung	177 Kampung	2.134.719.310	2.220.719.310	2.681.189.610		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22 Persen	60.22 Persen	60.22 Persen	1.185.393.679	1.249.302.799	9.629.102.799		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22 %	60.22 %	60.22 %	855.011.051	921.920.171	1.345.628.411		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			16 Laporan / Dokumen			153.600.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	441.691.945	509.601.065	510.594.145		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								KELUARGA BERENCANA
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	30 Unit	30 Unit	30 Unit	12.280.000	12.280.000	309.233.660		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1037 Orang	1037 Orang	1037 Orang	324.989.106	323.989.106	296.150.606		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	76.050.000	76.050.000	76.050.000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)								
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.22 %	60.22 %	60.22 %	330.382.628	327.382.628	8.283.474.388		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	330.382.628	327.382.628	257.274.388		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			10 Laporan			3.822.000.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			10 Laporan			4.204.200.000	Dana Transfer	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
17	DINAS PERHUBUNGAN							307.979.701.993	307.979.701.993	324.336.601.989		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							307.979.701.993	307.979.701.993	324.336.601.989		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	66.388.602.519	66.347.296.699	67.966.012.055		DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	96.444.100	96.444.100	84.444.100		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	43.246.400	43.246.400	38.746.400		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.537.900	5.537.900	4.037.900		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.757.400	5.757.400	4.257.400		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.537.900	5.537.900	4.037.900		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.757.400	5.757.400	4.257.400		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.723.800	4.723.800	4.723.800		DINAS PERHUBUNGAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.883.300	25.883.300	24.383.300		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	14.495.468.400	14.495.468.400	13.063.463.400		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	13.926.733.000	13.926.733.000	12.512.053.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	534.989.000	534.989.000	534.989.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.248.800	11.248.800	5.473.800		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11.248.800	11.248.800	5.473.800		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.248.800	11.248.800	5.473.800		DINAS PERHUBUNGAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	328.287.630	328.287.630	328.287.630		DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	75.802.500	75.802.500	75.802.500		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	300 Paket	300 Paket	252.485.130	252.485.130	252.485.130		DINAS PERHUBUNGAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	2.169.651.539	2.169.651.539	2.138.940.705		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	101.853.790	101.853.790	101.853.790		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	480.815.104	480.815.104	525.216.614		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	82.993.514	82.993.514	82.993.514		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	138.330.689	138.330.689	137.776.577		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	175.405.159	175.405.159	176.704.607		DINAS PERHUBUNGAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	122.400.000	122.400.000	85.582.320		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	664.366.100	664.366.100	625.326.100		DINAS PERHUBUNGAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	403.487.183	403.487.183	403.487.183		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	1.051.324.620	1.051.324.620	1.083.282.347		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	614.590.800	614.590.800	614.590.800		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	72.600.000	72.600.000	22.533.000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Alasan tdk dilaksanakan: Spek sepeda motor listrik yg ada di pasaran belum ada yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Jarak tempuh bateray masih rendah sedangkan yg dibutuhkan adalah sepeda motor listrik dengan jarak tempuh tinggi karena akan digunakan untuk patroli lalu lintas dengan	DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
											mobilitas yang tinggi), digunakan untuk efisiensi	
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	218.452.529	218.452.529	251.711.515		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.833.000	100.833.000	100.833.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	44.848.291	44.848.291	93.614.032		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	5.669.193.312	5.669.193.312	5.856.514.044		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	48.000.000	48.000.000	48.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.283.278.800	1.283.278.800	1.415.683.200		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.337.914.512	4.337.914.512	4.392.830.844		DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	100 persen	100 persen	4.844.232.918	4.802.927.098	4.637.870.289		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	119 Unit	119 Unit	119 Unit	3.573.860.400	3.573.860.400	3.238.678.590		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	139.520.000	139.520.000	139.520.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	534.644.420	534.644.420	660.369.421		DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	107.538.500	66.232.680	66.232.680		DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	448.719.598	448.719.598	493.119.598		DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	100 persen	100 persen	37.734.000.000	37.734.000.000	40.773.209.540		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	37.734.000.000	37.734.000.000	40.773.209.540		DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jml trayek BRT	14.00 trayek	14.00 trayek	14.00 trayek	241.591.099.474	241.632.405.294	256.370.589.934		DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	65.51 Persen	65.51 Persen	65.51 Persen					
				Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	35 Persen	35 Persen	35 Persen					
				Persentase pengelolaan Parkir On the Street	90 Persen	90 Persen	90 Persen					
				Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	6.87 Rasio	6.87 Rasio	6.87 Rasio					
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRL	100 persen	100 persen	100 persen	1.792.848.990	1.693.576.270	1.693.576.270		DINAS PERHUBUNGAN
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.792.848.990	1.693.576.270	1.693.576.270		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	100 persen	100 persen	7.595.249.032	7.717.933.000	13.717.933.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	2.539.953.802	2.529.875.490	8.529.875.490		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.821.874.093	1.954.636.373	1.954.636.373		DINAS PERHUBUNGAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2.597.460.978	2.597.460.978	2.597.460.978		DINAS PERHUBUNGAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	635.960.159	635.960.159	635.960.159		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3 unit	3 unit	3 unit	1.569.842.148	1.582.442.148	1.582.442.148		DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	25 Orang	521.355.383	587.345.383	587.345.383		DINAS PERHUBUNGAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.048.486.765	995.096.765	995.096.765		DINAS PERHUBUNGAN
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.164.411.258	2.193.650.520	2.193.650.520		DINAS PERHUBUNGAN
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	635.445.718	534.241.135	534.241.135		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.528.965.540	1.659.409.385	1.659.409.385		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.434.750.085	2.434.750.085	2.434.750.085		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.146.389.536	1.146.389.536	1.146.389.536		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	88.525.494	88.525.494	88.525.494		DINAS PERHUBUNGAN
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	1.199.835.055	1.199.835.055	1.199.835.055		DINAS PERHUBUNGAN
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.660.663.381	4.730.469.201	4.693.069.201		DINAS PERHUBUNGAN
				Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100 persen	100 persen	100 persen					
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.553.251.852	3.638.015.672	3.600.615.672		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Jalan Kabupaten/Kota								
		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.002.010.345	1.002.010.345	1.002.010.345		DINAS PERHUBUNGAN
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	105.401.184	90.443.184	90.443.184		DINAS PERHUBUNGAN
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1 tahun	1 tahun	1 tahun	62.250.000	57.750.000	57.750.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	18.000.000	13.500.000	13.500.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	44.250.000	44.250.000	44.250.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	674.473.680	674.473.680	674.473.680		DINAS PERHUBUNGAN
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	674.473.680	674.473.680	674.473.680		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	Pelayanan angkutan	100 persen	100 persen	100 persen	220.181.701.220	220.003.580.810	228.779.165.450		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				pendukung pelayanan BRT	100 persen	100 persen	100 persen					
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	181.701.220	111.730.810	111.730.810		DINAS PERHUBUNGAN
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	215 Unit	215 Unit	215 Unit	220.000.000.000	219.891.850.000	228.667.434.640		DINAS PERHUBUNGAN
		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	202.649.830	202.649.830	202.649.830		DINAS PERHUBUNGAN
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	202.649.830	202.649.830	202.649.830		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	54.700.940	54.700.940	54.700.940		DINAS PERHUBUNGAN
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.675.940	49.675.940	49.675.940		DINAS PERHUBUNGAN
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.025.000	5.025.000	5.025.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	113.892.910	212.482.810	212.482.810		DINAS PERHUBUNGAN
		Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	43.246.500	43.246.500	43.246.500		DINAS PERHUBUNGAN
		Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.646.410	169.236.310	169.236.310		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	83.666.000	73.946.000	73.946.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	1 Unit	1 Unit	1 Unit	14.796.000	14.796.000	14.796.000		DINAS PERHUBUNGAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	68.870.000	59.150.000	59.150.000		DINAS PERHUBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							60.166.311.906	60.166.311.906	63.749.581.834		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							58.849.386.628	58.849.386.628	62.352.656.556		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.912.838.296	18.912.838.296	19.320.583.999		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo)	100 persen	100 persen	100 persen					
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo)	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	78.341.075	78.341.075	78.341.075		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	32.363.522	32.363.522	32.363.522		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.018.199	5.018.199	5.018.199		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.727.379	4.727.379	4.727.379		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.018.199	5.018.199	5.018.199		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.727.379	4.727.379	4.727.379		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	26.486.397	26.486.397	26.486.397		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	14.800.948.299	14.800.948.299	14.632.689.299		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	14.382.415.000	14.382.415.000	14.214.156.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	405.600.000	405.600.000	405.600.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.600.839	4.600.839	4.600.839		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	4.478.140	4.478.140	4.478.140		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.854.320	3.854.320	3.854.320		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	415.967.598	415.967.598	384.476.498		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	160 Orang	160 Orang	415.967.598	415.967.598	384.476.498		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	1.160.122.228	1.160.122.228	1.196.824.141		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	190.909.040	190.909.040	190.909.040		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	132.691.960	132.691.960	200.402.048		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	36.496.447	36.496.447	36.496.447		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.788.704	54.788.704	55.852.207		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.966.724	14.966.724	14.966.724		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	9.978.530	9.978.530	0	Dinolkan karena tidak digunakan utk membeli bahan bacaan. Bahan bacaan sudah bisa lewat online	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	150.138.653	150.138.653	148.422.099		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	221.095.314	221.095.314	200.718.720		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	349.056.856	349.056.856	349.056.856		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan	100 persen	100 persen	100 persen	1.153.415.929	1.153.415.929	1.637.169.819		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												DAN PERSANDIAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	961.725.000	961.725.000	1.419.950.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	165.089.823	165.089.823	112.553.079		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	26.601.106	26.601.106	104.666.740		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	451.045.992	451.045.992	468.085.992		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.600.000	6.600.000	13.640.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	444.445.992	444.445.992	454.445.992		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	852.997.175	852.997.175	922.997.175		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	458.855.256	458.855.256	458.855.256		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	122.273.929	122.273.929	122.273.929		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	181.957.940	181.957.940	251.957.940		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi ke masyarakat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.611.328.662	9.611.328.662	9.761.328.662		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 persen	100 persen	100 persen	9.611.328.662	9.611.328.662	9.761.328.662		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	179.590.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.513.218.100	1.513.218.100	1.513.218.100		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5.835.521.650	5.835.521.650	5.985.521.650		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.141.202.983	1.141.202.983	1.141.202.983		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	600 Orang	600 Orang	600 Orang	471.600.000	471.600.000	478.302.870		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	449.785.929	449.785.929	463.493.059		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	30.325.219.670	30.325.219.670	33.270.743.895		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 persen	100 persen	100 persen	26.583.724.598	26.583.724.598	25.950.680.717		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	577 Domain	577 Domain	1.283.367.671	1.283.367.671	1.333.367.671		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.773.727.028	1.773.727.028	1.773.727.028		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	10 Unit	23.526.629.899	23.526.629.899	22.843.586.018		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	3.741.495.072	3.741.495.072	7.320.063.178		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	2.011.561.710	2.011.561.710	1.951.561.710		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000	800.000.000	780.000.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	738.311.522	738.311.522	4.396.879.628		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	191.621.840	191.621.840	191.621.840		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							626.003.608	626.003.608	626.003.608		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	626.003.608	626.003.608	626.003.608		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 persen	100 persen	100 persen	626.003.608	626.003.608	626.003.608		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000	120.000.000	120.000.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	80.000.000	80.000.000	80.000.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	82.000.000	82.000.000	82.000.000		DINAS KOMUNIKASI,

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	50 Orang	50 Orang	50 Orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 Unit	5 Unit	5 Unit	163.000.000	163.000.000	163.000.000		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	76.003.608	76.003.608	76.003.608		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							690.921.670	690.921.670	770.921.670		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	690.921.670	690.921.670	770.921.670		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PERSANDIAN
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 persen	100 persen	100 persen	690.921.670	690.921.670	770.921.670		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	690.921.670	690.921.670	770.921.670		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							25.509.465.294	25.709.465.294	24.169.289.780		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							25.509.465.294	25.709.465.294	24.169.289.780		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	12.285.617.086	12.185.617.086	11.791.519.646		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan	100 persen	100 persen	100 persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				prasarana perkantoran SKPD								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	64.493.300	64.493.300	64.493.300		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.738.600	29.738.600	29.738.600		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.658.900	3.658.900	3.658.900		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.900	4.258.900	4.258.900		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.934.900	1.934.900	1.934.900		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	2.234.900		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	22.667.100	22.667.100	22.667.100		DINAS KOPERASI DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												USAHA MIKRO
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	10.433.634.600	10.433.634.600	9.973.739.600		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	10.181.984.000	10.181.984.000	9.722.089.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	250.080.000	250.080.000	250.080.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673.400	673.400	673.400		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	897.200	897.200	897.200		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	968.553.209	868.553.209	971.558.446		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	170.902.655	170.902.655	170.543.255		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	26.263.210	26.263.210	126.131.020		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	48.222.030	48.222.030	48.222.030		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	31.393.742	31.393.742	31.825.569		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.920.000	1.920.000	1.920.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	564.965.860	464.965.860	468.030.860		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	74.885.712	74.885.712	74.885.712		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya	100 persen	100 persen	100 persen	44.890.037	44.890.037	20.276.760		DINAS KOPERASI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	peralatan dan perlengkapan kantor								DAN USAHA MIKRO
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	23.647.700	23.647.700	20.276.760		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	21.242.337	21.242.337	0	Dinolkan karena pengadaan baterai drone masih bisa ditunda sehingga didrop, dan dialihkan ke pembelian gorden untuk gedung PLUT-KUMKM di sub keg Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	318.660.000	318.660.000	318.660.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.660.000	318.660.000	318.660.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	455.385.940	455.385.940	442.791.540		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		DINAS KOPERASI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								DAN USAHA MIKRO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	370.250.840	370.250.840	370.250.840		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.236.240	1.236.240	0	Dinolkan sebab Dinkop baru melaksanakan Rehab tahun 2023 di sub pengadaan mebel, maka mebel eksisting dinilai masih bagus dan belum memerlukan belanja.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	43.948.860	43.948.860	32.590.700		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00 Persen	3.00 Persen	3.00 Persen	160.941.690	160.941.690	160.941.690		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penerbitan Izin Usaha Simpan	Penerbitan Izin Usaha Simpan	Jumlah Koperasi yang mengajukan	15 koperasi	15 koperasi	15 koperasi	82.558.990	82.558.990	82.558.990		DINAS KOPERASI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	ijin usaha simpan pinjam								DAN USAHA MIKRO
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	82.558.990	82.558.990	82.558.990		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	78.382.700	78.382.700	78.382.700		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	78.382.700	78.382.700	78.382.700		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00 Persen	50.00 Persen	50.00 Persen	666.228.580	521.133.000	475.289.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	666.228.580	521.133.000	475.289.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	666.228.580	521.133.000	475.289.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	32.00 Persen	32.00 Persen	32.00 Persen	250.816.800	395.912.380	304.231.220		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68 persen	68 persen	68 persen	250.816.800	395.912.380	304.231.220		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	250.816.800	395.912.380	304.231.220		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen	560.300.000	710.300.000	657.194.500		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00 Persen	1.00 Persen	1.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75 persen	75 persen	75 persen	560.300.000	710.300.000	657.194.500		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 Orang	200 Orang	200 Orang	560.300.000	710.300.000	657.194.500		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27 Persen	27 Persen	27 Persen	2.636.334.793	2.686.334.793	2.507.615.933		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50 persen	50 persen	50 persen	2.636.334.793	2.686.334.793	2.507.615.933		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	2.636.334.793	2.686.334.793	2.507.615.933		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Jumlah Pelaku usaha	3.00 Persen	3.00 Persen	3.00 Persen	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906		DINAS KOPERASI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan								DAN USAHA MIKRO
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 orang	600 orang	600 orang	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	230.000.000	230.000.000	228.341.940		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	1.483.683.800	1.583.683.800	1.424.782.650		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 Orang	200 Orang	200 Orang	468.025.000	468.025.000	415.340.000		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	1.310.000.000	1.353.917.828	1.240.686.316		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00 Persen	20.00 Persen	20.00 Persen	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 orang	100 orang	100 orang	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							19.579.371.173	24.484.728.773	26.273.689.422		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							19.579.371.173	24.484.728.773	26.273.689.422		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.225.614.506	14.696.972.106	12.668.232.286		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	64.172.900	64.172.900	64.172.900		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.345.200	30.345.200	30.345.200		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Perubahan RKA-SKPD								SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	2.234.900		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.830.100	1.830.100	1.830.100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24.272.400	24.272.400	24.272.400		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	7.990.407.000	8.061.764.600	7.200.870.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	7.707.530.000	7.778.887.600	6.904.913.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	277.800.000	277.800.000	290.880.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.821.600	1.821.600	1.821.600		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	1.425.300	1.425.300	1.425.300		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	241.775.400	241.775.400	190.886.320		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 Unit	200 Unit	200 Unit	65.920.000	65.920.000	65.920.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	175.855.400	175.855.400	124.966.320		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	3.083.429.320	3.483.429.320	2.673.096.695		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.246.133.167	1.646.133.167	891.633.242		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												N TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	116.602.655	116.602.655	118.438.427		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.487.472	45.487.472	45.487.472		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.610.400	48.610.400	48.610.400		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	829.900.000	829.900.000	860.842.078		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	796.695.626	796.695.626	708.085.076		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Elektronik pada SKPD								TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	1.960.228.976	1.960.228.976	1.710.645.081		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	865.264.976	865.264.976	615.681.081		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.094.964.000	1.094.964.000	1.094.964.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	885.600.910	885.600.910	828.561.290		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												SATU PINTU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	443.600.000	443.600.000	439.650.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	150 Unit	12.107.880	12.107.880	968.630		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	190 Unit	190 Unit	389.943.030	389.943.030	347.992.660		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3700.00 Penanam Modal	3700.00 Penanam Modal	3700.00 Penanam Modal	918.119.127	918.119.127	1.891.119.196		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor	5 Buah	5 Buah	5 Buah	568.119.127	568.119.127	1.041.119.196		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												SATU PINTU
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	371.004.027	371.004.027	346.004.027		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	197.115.100	197.115.100	695.115.169		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	350.000.000	850.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	150.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	700.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												SATU PINTU
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	541.00 Investor	541.00 Investor	541.00 Investor	1.187.015.175	1.187.015.175	1.317.556.175		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1.187.015.175	1.187.015.175	1.317.556.175		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.097.015.175	1.097.015.175	1.227.556.175		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95.50 Persen	95.50 Persen	95.50 Persen	2.430.004.902	6.614.004.902	8.921.346.302		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												SATU PINTU
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP	100%	100%	100%	2.430.004.902	6.614.004.902	8.921.346.302		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	611.707.265	611.707.265	1.376.989.245		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	2400 Pelaku Usaha	828.316.070	5.012.316.070	6.028.183.290		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	787.931.941	787.931.941	1.314.124.141		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi,	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	750 Kegiatan Usaha	202.049.626	202.049.626	202.049.626		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		berusaha berbasis risiko	berusaha berbasis risiko	dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha								N TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 Nilai	2 Nilai	2 Nilai	100.000.000	250.000.000	656.818.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	7%	7%	7%	100.000.000	250.000.000	656.818.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			11 Kegiatan Usaha			61.022.000	Dana Transfer	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan			309 Pelaku Usaha			223.751.000	Dana Transfer	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
		Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	19 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	19 Kegiatan Usaha	100.000.000	250.000.000	372.045.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	97.00 Persen	97.00 Persen	97.00 Persen	718.617.463	818.617.463	818.617.463		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	718.617.463	818.617.463	818.617.463		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	718.617.463	818.617.463	818.617.463		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							57.555.817.256	58.205.817.256	62.472.328.680		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							57.555.817.256	58.205.817.256	62.472.328.680		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100 persen	100 persen	100 persen	13.271.918.746	13.271.918.746	15.663.202.715		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 persen	100 persen	100 persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100 persen	100 persen	100 persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	101.000.000	101.000.000	41.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	10.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	5.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	3.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	7.000.000	5.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	5.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35.000.000	35.000.000	10.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	8.438.549.000	8.438.549.000	9.050.576.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8.038.309.000	8.038.309.000	8.662.136.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	366.240.000	366.240.000	366.240.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000	4.000.000	2.200.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000	6.000.000	4.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	6.000.000	4.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	4.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	6.000.000	4.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	4.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	90.000.000	90.000.000	90.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	100 persen	100 persen	150.000.000	150.000.000	0		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000	150.000.000	0		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.491.839.113	1.491.839.113	1.453.071.814		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	315.974.313	315.974.313	365.432.694		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	10 Paket	10 Paket	10 Paket	60.000.000	60.000.000	45.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Tangga yang Disediakan								OLAH RAGA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	60.000.000	60.000.000	47.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	55.000.000	55.000.000	43.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.940.000	8.940.000	8.940.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	45.500.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	706.924.800	706.924.800	531.924.800		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	341.274.320		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	9.00 Jenis	9.00 Jenis	9.00 Jenis	137.421.168	137.421.168	204.086.694		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	89.003.928	89.003.928	155.669.454		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	48.417.240	48.417.240	48.417.240		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	903.403.266	903.403.266	862.973.266		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	320.430.000	320.430.000	280.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92.930.687	92.930.687	92.930.687		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	490.042.579	490.042.579	490.042.579		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1.959.706.199	1.959.706.199	3.961.494.941		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.255.000	36.255.000	36.255.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	22 Unit	404.660.720	404.660.720	404.660.720		DINAS KEPEMUDAAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								OLAH RAGA
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	7.272.000	7.272.000	7.272.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	1.511.518.479	1.511.518.479	3.513.307.221		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	40.00 Organisasi	40.00 Organisasi	40.00 Organisasi	3.068.762.000	3.268.762.000	3.253.512.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	1.526.762.000	1.526.762.000	1.426.512.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang	300 Orang	300 Orang	716.397.000	716.397.000	658.647.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	230.365.000	230.365.000	228.565.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kapasitas Daya Saingnya								
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	580.000.000	580.000.000	539.300.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	1500.00 Orang	1500.00 Orang	1500.00 Orang	1.542.000.000	1.742.000.000	1.827.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	831.000.000	931.000.000	1.186.372.040		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	711.000.000	811.000.000	640.627.960		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet prestasi	1212.00 jumlah	1212.00 jumlah	1212.00 jumlah	38.815.136.510	39.265.136.510	41.155.613.965		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
				Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	5 Lapangan	5 Lapangan	5 Lapangan					
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	6.00 jumlah	6.00 jumlah	6.00 jumlah	5.494.712.980	5.494.712.980	5.352.284.735		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									OLAH RAGA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	702.725.235	702.725.235	600.297.679		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	4.791.987.745	4.791.987.745	4.751.987.056		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / Event Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	6.00 kegiatan	3.449.800.000	3.449.800.000	3.756.050.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.514.900.000	1.514.900.000	1.759.900.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	500.000.000	671.250.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1.434.900.000	1.434.900.000	1.324.900.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	1312.00 Orang	1312.00 Orang	1312.00 Orang	3.515.044.090	3.965.044.090	5.750.247.270		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	7 Pelatda	7 Pelatda	7 Pelatda	2.250.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.165.044.090	1.615.044.090	2.996.577.270		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	503.670.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan organisasi olahraga	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	56 Organisasi	56 Organisasi	56 Organisasi	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan	5.00 Lapangan	2.355.579.440	2.355.579.440	2.297.031.960		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	200.000.000	141.452.520		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Festival dan Olahraga Rekreasi								
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.081.487.130	1.081.487.130	1.081.487.130		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.074.092.310	1.074.092.310	1.074.092.310		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	50.00 Kegiatan	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000		DINAS KEPEMUD AAN DAN OLAH RAGA
22	DINAS KEBUDAYAA N DAN PARIWISATA							50.215.966.932	50.287.324.532	49.095.886.687		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAA N							12.083.729.058	12.083.729.058	11.393.619.293		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25.00 Persen	25.00 Persen	25.00 Persen	9.190.629.034	9.190.629.034	8.943.204.869		DINAS KEBUDAYA AN DAN PARIWISAT A

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	25 persen	25 persen	25 persen	1.463.500.000	1.463.500.000	1.643.500.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	10 Objek	1.463.500.000	1.463.500.000	1.643.500.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	25 persen	25 persen	25 persen	5.690.629.034	5.690.629.034	5.083.204.869		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	7 Objek	5.690.629.034	5.690.629.034	5.083.204.869		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	25 persen	25 persen	25 persen	2.036.500.000	2.036.500.000	2.216.500.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2600 Orang	2600 Orang	2600 Orang	2.036.500.000	2.036.500.000	2.216.500.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	25.00 Persen	25.00 Persen	25.00 Persen	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap	25 persen	25 persen	25 persen	1.224.479.064	1.224.479.064	1.141.793.464		DINAS KEBUDAYAAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Sanggar/Kelompok Seni Budaya								PARIWISATA
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 Sertifikat	629 Sertifikat	629 Sertifikat	824.479.064	824.479.064	824.479.064		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Lembaga	124 Lembaga	124 Lembaga	400.000.000	400.000.000	317.314.400		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	85.45 Persen	85.45 Persen	85.45 Persen	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	85.45 Persen	85.45 Persen	85.45 Persen	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelindungan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 Objek	461 Objek	461 Objek	1.668.620.960	1.668.620.960	1.308.620.960		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							38.132.237.874	38.203.595.474	37.702.267.394		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.575.249.000	18.646.606.600	17.969.925.840		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
				Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	52.518.400	52.518.400	52.518.400		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	29.357.600	29.357.600	29.357.600		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	283.800	283.800	283.800		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	413.300	413.300	413.300		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	283.800	283.800	283.800		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	413.300	413.300	413.300		DINAS KEBUDAYAAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								PARIWISATA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	21.766.600	21.766.600	21.766.600		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100 persen	100 persen	100 persen	11.998.002.056	12.069.359.656	11.432.499.012		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.599.895.000	11.671.252.600	11.000.250.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	397.435.656	397.435.656	431.577.612		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	223.800	223.800	223.800		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	223.800	223.800	223.800		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	223.800	223.800	223.800		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	328.600.000	328.600.000	283.727.240		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 Orang	600 Orang	600 Orang	250.000.000	250.000.000	264.877.240		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	74 Orang	74 Orang	78.600.000	78.600.000	18.850.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar	100 persen	100 persen	100 persen	1.498.676.486	1.498.676.486	1.371.127.878		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	168.879.500	168.879.500	168.879.500		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	66.542.520	66.542.520	71.586.770		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	47 Paket	47 Paket	115.906.524	115.906.524	115.906.524		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	44.493.192	44.493.192	41.201.290		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	550.000.000	550.000.000	410.402.234		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	152.854.750	152.854.750	163.151.560		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar	100 persen	100 persen	100 persen	2.006.265.810	2.006.265.810	2.046.669.210		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 Unit	94 Unit	94 Unit	2.006.265.810	2.006.265.810	2.046.669.210		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	100 persen	100 persen	100 persen	1.832.125.386	1.832.125.386	1.924.323.238		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.050.090.000	1.050.090.000	1.120.090.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	782.035.386	782.035.386	804.233.238		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100 persen	100 persen	100 persen	859.060.862	859.060.862	859.060.862		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	31 Unit	315.569.720	315.569.720	315.569.720		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	334.395.442	334.395.442	334.395.442		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	209.095.700	209.095.700	209.095.700		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.180.259.400	14.180.259.400	14.280.259.400		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1370783 orang	1370783 orang	1370783 orang	6.915.500.000	6.915.500.000	6.915.500.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.915.500.000	6.915.500.000	6.915.500.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota								
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100 persen	100 persen	100 persen	7.098.920.660	7.098.920.660	7.198.920.660		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 Lokasi	79 Lokasi	79 Lokasi	654.266.260	654.266.260	654.266.260		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.359.000.000	6.359.000.000	6.459.000.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	85.654.400	85.654.400	85.654.400		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	90 persen	90 persen	90 persen	165.838.740	165.838.740	165.838.740		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	165.838.740	165.838.740	165.838.740		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100 persen	100 persen	100 persen	4.089.417.250	4.089.417.250	4.164.769.930		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	897.633.500	897.633.500	897.633.500		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.841.783.750	1.841.783.750	1.717.136.430		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Promosi	16 Promosi	16 Promosi	1.350.000.000	1.350.000.000	1.550.000.000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	80.00 Persen	80.00 Persen	80.00 Persen	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80 persen	80 persen	80 persen	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	1.287.312.224	1.287.312.224	1.287.312.224		DINAS KEBUDAYAAN DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif								PARIWISATA
23	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH							17.073.496.033	17.473.496.033	17.744.856.492		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							16.115.912.598	16.415.912.598	16.843.564.687		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	13.492.177.408	13.752.632.078	14.660.925.364		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dok	8 Dok	8 Dok	68.847.700	68.847.700	68.847.700		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	34.364.000	34.364.000	34.364.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												KAAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.613.800	1.613.800	1.613.800		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.849.400	7.849.400	7.849.400		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.020.500	25.020.500	25.020.500		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.301.426.600	11.301.426.600	11.834.853.600		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	11.016.028.000	11.016.028.000	11.549.455.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	282.375.000	282.375.000	282.375.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.340.800	1.340.800	1.340.800		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.682.800	1.682.800	1.682.800		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	293.450,054	427.474,077	519.048,422		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	16.784,298	16.784,298	13.713,820		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	9.380,980	9.380,980	7.309,760		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	13.691,740	13.691,740	13.691,740		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.305,460	10.305,460	8.342,960		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10.320,000	10.320,000	10.320,000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Undangan yang Disediakan								
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.700.000	15.700.000	15.700.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.661.000	129.661.000	223.488.240		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	87.606.576	221.630.599	226.481.902		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	165.944.304	292.374.951	162.380.276		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	165.944.304	292.374.951	162.380.276		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	870.705.480	870.705.480	877.948.398		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	254.491.200	254.491.200	254.491.200		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	616.214.280	616.214.280	623.457.198		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kantor yang Disediakan								KAAN DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	791.803.270	791.803.270	1.197.846.968		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	485.703.000	485.703.000	485.703.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	81.803.670	81.803.670	386.181.580		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	188.341.600	188.341.600	290.007.388		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	1 Rasio	1 Rasio	2.391.952.830	2.431.498.160	1.954.956.963		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.055.249.610	1.375.364.539	1.043.271.252		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	317.207.180	417.207.180	317.207.180		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perpustakaan Elektronik	Perpustakaan Elektronik	dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)								KAAN DAERAH
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	18.198.210	20.000.000	19.850.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	115.314.600	115.314.600	115.314.600		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	104.170.180	104.170.180	104.170.180		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	30.930.400	130.930.400	30.930.400		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	46.299.440	46.299.440	46.299.440		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	25.166.340	25.166.340	21.525.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan Bahan Pustaka	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	214.684.970	332.998.109	255.855.662		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	119.849.790	119.849.790	96.799.790		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	63.428.500	63.428.500	35.319.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.336.703.220	1.056.133.621	911.685.711		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				rangka meningkatkan minat membaca masyarakat								KAAN DAERAH
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	15 Lokus	15 Lokus	122.560.580	222.954.490	122.804.490		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	194.095.630	313.132.121	293.578.661		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	926.773.720	426.773.720	426.773.720		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	15.081.710	15.081.710	17.609.900		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	78.191.580	78.191.580	50.918.940		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	231.782.360	231.782.360	227.682.360		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	72.248.200	64.401.700	60.301.700		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	2 Orang	2 Orang	35.315.500	27.469.000	24.459.000		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	36.932.700	36.932.700	35.842.700		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	159.534.160	167.380.660	167.380.660		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	152.855.670	160.702.170	160.702.170		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	6.678.490	6.678.490	6.678.490		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							957.583.435	1.057.583.435	901.291.805		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	519.019.197	519.019.197	489.310.533		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	165.807.361	165.807.361	141.992.547		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	27.010.651	27.010.651	27.010.651		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	5000 Berkas	5000 Berkas	42.149.104	42.149.104	30.306.290		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	96.647.606	96.647.606	84.675.606		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	136.078.603	136.078.603	133.934.753		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	46.505.850	46.505.850	46.505.850		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	89.572.753	89.572.753	87.428.903		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	217.133.2 33	217.13 3.233	213.383.2 33		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	100 Pengguna	38.846.00 0	38.846. 000	38.846.00 0		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	178.287.2 33	178.28 7.233	174.537.2 33		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip musnah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	390.045.5 72	390.04 5.572	364.759.9 86		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	67.133.69 0	67.133. 690	57.732.64 6		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	5000 Arsip	5000 Arsip	40.220.88 4	40.220. 884	30.819.84 0		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2500 Berkas	2500 Berkas	26.912.806	26.912.806	26.912.806		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100 Persen	100 Persen	100 Persen	33.346.153	33.346.153	33.346.153		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	13.608.613	13.608.613	13.608.613		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.737.540	19.737.540	19.737.540		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	80 Persen	80 Persen	80 Persen	84.195.970	84.195.970	69.917.970		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7 Daftar	7 Daftar	19.831.900	19.831.900	19.831.900		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar	7 Arsip	7 Arsip	7 Arsip	19.956.280	19.956.280	13.906.280		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota								KAAN DAERAH
		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	23.300.890	23.300.890	15.072.890		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	21.106.900	21.106.900	21.106.900		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	80 Persen	80 Persen	80 Persen	138.853.259	138.853.259	138.853.259		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	49.746.360	49.746.360	49.746.360		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	376 Arsip	376 Arsip	89.106.899	89.106.899	89.106.899		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota	Persentase arsip hilang yang	80 Persen	80 Persen	80 Persen	66.516.500	66.516.500	64.909.958		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		yang Dinyatakan Hilang	yang Dinyatakan Hilang	ditemukan kembali berdasarkan NSPK								KAAN DAERAH
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	34.160.910	34.160.910	34.160.910		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	15.767.350	15.767.350	14.730.808		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	16.588.240	16.588.240	16.018.240		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	70 Persen	70 Persen	70 Persen	48.518.666	148.518.666	47.221.286		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	70 Persen	70 Persen	70 Persen	48.518.666	148.518.666	47.221.286		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	38.031.766	38.031.766	38.031.766		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	10.486.900	110.486.900	9.189.520		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
24	DINAS PERIKANAN							12.326.64 9.576	12.606. 011.17 6	12.528.52 7.156		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							12.326.64 9.576	12.606. 011.17 6	12.528.52 7.156		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan	30.00 Orang	30.00 Orang	30.00 Orang	7.235.678 .248	7.216.0 39.848	6.941.637. 248		DINAS PERIKANAN
				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perikanan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	54.000.00 0	54.000. 000	52.800.00 0		DINAS PERIKANAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	30.500.00 0	30.500. 000	29.900.00 0		DINAS PERIKANAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.00 0	500.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000		DINAS PERIKANAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000		DINAS PERIKANAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000		DINAS PERIKANAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	21.500.000	21.500.000	20.900.000		DINAS PERIKANAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	5.682.203.000	5.761.564.600	5.489.262.000		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	5.465.453.000	5.544.814.600	5.272.512.000		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	216.000.000	216.000.000	216.000.000		DINAS PERIKANAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000	250.000	250.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000	250.000	250.000		DINAS PERIKANAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	250.000	250.000		DINAS PERIKANAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	34.629.600	34.629.600	34.629.600		DINAS PERIKANAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	17.214.800	17.214.800	17.214.800		DINAS PERIKANAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	17.414.800	17.414.800	17.414.800		DINAS PERIKANAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	491.876.000	336.235.600	334.435.600		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	35.000.000	35.000.000	34.550.000		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	49.550.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kantor yang Disediakan								
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	49.550.000		DINAS PERIKANAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000		DINAS PERIKANAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	245.876.000	90.235.600	90.235.600		DINAS PERIKANAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	71.000.000	71.000.000	70.550.000		DINAS PERIKANAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3.00 Jenis	3.00 Jenis	3.00 Jenis	34.000.000	34.000.000	33.550.000		DINAS PERIKANAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	34.000.000	34.000.000	33.550.000		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	425.175.828	572.816.228	574.616.228		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	85.540.000	183.296.400	183.296.400		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	139.635.828	189.519.828	191.319.828		DINAS PERIKANAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Perikanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	513.793.820	422.793.820	422.343.820		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	295.883.820	295.883.820	295.883.820		DINAS PERIKANAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000	25.000.000	25.000.000		DINAS PERIKANAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	122.910.000	56.910.000	56.460.000		DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	3113.69 ton	3113.69 ton	3113.69 ton	1.151.000.000	1.350.000.000	1.467.600.000		DINAS PERIKANAN
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,	Rekomendasi BBM untuk Nelayan	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	264.000.000	316.000.000	329.200.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									
				Validasi Data Nelayan	1000 Nelayan	1000 Nelayan	1000 Nelayan					
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	260 Unit	260 Unit	260 Unit	264.000.000	316.000.000	329.200.000		DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240.00 Orang	240.00 Orang	240.00 Orang	500.000.000	632.000.000	732.000.000		DINAS PERIKANAN
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	200 Orang	500.000.000	632.000.000	732.000.000		DINAS PERIKANAN
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	50 Orang	50 Orang	50 Orang	387.000.000	402.000.000	406.400.000		DINAS PERIKANAN
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	387.000.000	402.000.000	406.400.000		DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3961.33 ton	3961.33 ton	3961.33 ton	2.573.752.000	2.573.752.000	2.652.934.380		DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan Budidaya Ikan Dalam Ember	300 Orang	300 Orang	300 Orang	853.400.000	770.180.000	713.683.610		DINAS PERIKANAN
				Pelatihan Kolam Terpal	300 Orang	300 Orang	300 Orang					
				Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200.00 Orang	200.00 Orang	200.00 Orang					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pembuatan Pakan Ikan	40 Orang	40 Orang	40 Orang					
				Sosialisasi Hama dan Penyakit Ikan	40 Orang	40 Orang	40 Orang					
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	853.400.000	770.180.000	713.683.610		DINAS PERIKANAN
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya induk ikan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	1.720.352.000	1.803.572.000	1.939.250.770		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	986.352.000	1.069.572.000	1.105.250.770		DINAS PERIKANAN
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	20 Orang	20 Orang	734.000.000	734.000.000	834.000.000		DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	350.000.000	350.000.000	350.000.000		DINAS PERIKANAN
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Pelatihan POKMASWAS	40.00 Orang	40.00 Orang	40.00 Orang	350.000.000	350.000.000	350.000.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dalam Kabupaten/Kota	Dalam Kabupaten/Kota									
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000		DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1. Produksi ikan olahan	17631.86 ton	17631.86 ton	17631.86 ton	1.016.219.328	1.116.219.328	1.116.355.528		DINAS PERIKANAN
				2. Angka konsumsi ikan per kapita	40.19 Kg/kapita /tahun	40.19 Kg/kapita /tahun	40.19 Kg/kapita /tahun					
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	80.00 Orang	80.00 Orang	80.00 Orang	273.219.328	270.219.328	270.355.528		DINAS PERIKANAN
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	273.219.328	270.219.328	270.355.528		DINAS PERIKANAN
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100.00 Orang	100.00 Orang	100.00 Orang	468.000.000	468.000.000	468.000.000		DINAS PERIKANAN
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	468.000.000	468.000.000	468.000.000		DINAS PERIKANAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko								
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40.00 Orang	40.00 Orang	40.00 Orang	275.000.00	378.000.00	378.000.00		DINAS PERIKANAN
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17000 Ton	17000 Ton	17000 Ton	275.000.00	378.000.00	378.000.00		DINAS PERIKANAN
25	DINAS PERTANIAN							33.590.911.872	38.295.720.818	39.274.038.927		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							33.590.911.872	38.295.720.818	39.274.038.927		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	21.634.118.268	22.487.092.750	21.774.242.521		DINAS PERTANIAN
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pertanian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya Sarana dan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	59.000.000	59.000.000	59.052.293		DINAS PERTANIAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	34.000.000	34.000.000	34.000.000		DINAS PERTANIAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.052.293		DINAS PERTANIAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Dinas Pertanian	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	15.330.089.000	15.401.446.600	14.643.335.200		DINAS PERTANIAN
				Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian	100%	100%	100%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	91 Orang/bulan	15.103.369.000	15.174.726.600	14.416.670.000		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	221.720.000	221.720.000	221.720.000		DINAS PERTANIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.497.600		DINAS PERTANIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.947.600		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000		DINAS PERTANIAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	790.102.151	865.202.679	852.440.159		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	60.000.000	60.000.000	60.000.000		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	244.500.000	244.500.000	244.500.000		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	30.000.000	30.000.000	30.545.921		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.660.000	9.660.000	9.660.000		DINAS PERTANIAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000		DINAS PERTANIAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	181.000.000	207.616.882	194.308.441		DINAS PERTANIAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	224.942.151	273.425.797	273.425.797		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Berbasis Elektronik pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	105.636.876	660.636.876	660.636.876		DINAS PERTANIAN
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 Unit	21 Unit	21 Unit	33.336.952	33.336.952	33.336.952		DINAS PERTANIAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	72.299.924	627.299.924	627.299.924		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	1.623.497.680	1.623.497.680	1.682.238.156		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.223.497.680	1.223.497.680	1.282.238.156		DINAS PERTANIAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset Dinas Pertanian	100%	100%	100%	3.725.792.561	3.877.308.915	3.876.539.837		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	66 Unit	66 Unit	66 Unit	549.097.726	549.097.726	549.097.726		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	210 Unit	210 Unit	251.744.835	251.744.835	251.744.835		DINAS PERTANIAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	2.885.000.000	3.036.516.354	3.035.747.276		DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50857.23 ton	50857.23 ton	50857.23 ton	5.872.993.578	9.913.216.348	11.439.679.336		DINAS PERTANIAN
				Produksi hasil peternakan	36219.00 ton	36219.00 ton	36219.00 ton					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	2.871.773.577	6.409.392.625	8.036.851.155		DINAS PERTANIAN
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	555.527.200	1.773.705.414	3.426.404.984		DINAS PERTANIAN
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	64 Laporan	64 Laporan	64 Laporan	2.316.246.377	4.635.687.211	4.610.446.171		DINAS PERTANIAN
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	68.75 %	68.75 %	68.75 %	2.595.298.801	2.643.130.943	2.577.142.995		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.595.298.801	2.643.130.943	2.577.142.995		DINAS PERTANIAN
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan tambahan	50%	50%	50%	160.000.000	180.610.714	180.610.714		DINAS PERTANIAN
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	160.000.000	180.610.714	180.610.714		DINAS PERTANIAN
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	130 ekor	130 ekor	130 ekor	245.921.200	680.082.066	645.074.472		DINAS PERTANIAN
		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	130 Ekor	130 Ekor	130 Ekor	245.921.200	680.082.066	645.074.472		DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	6.8 ton/ha	4.440.812.257	4.106.927.525	4.165.145.445		DINAS PERTANIAN
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	19 unit	19 unit	19 unit	4.440.812.257	4.106.927.525	4.165.145.445		DINAS PERTANIAN
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	140.000.000	140.000.000	140.000.000		DINAS PERTANIAN
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	15 Unit	15 Unit	15 Unit	3.741.813.322	3.536.522.539	3.634.740.459		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana Pertanian Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara								
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	558.998.935	430.404.986	390.404.986		DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 Persen	-5.00 Persen	-5.00 Persen	400.000.000	429.221.428	427.876.428		DINAS PERTANIAN
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	25 kelurahan	25 kelurahan	25 kelurahan	295.000.000	324.221.428	324.221.428		DINAS PERTANIAN
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	295.000.000	324.221.428	324.221.428		DINAS PERTANIAN
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	98%	98%	98%	105.000.000	105.000.000	103.655.000		DINAS PERTANIAN
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	105.000.000	105.000.000	103.655.000		DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	90.00 Persen	90.00 Persen	90.00 Persen	158.500.000	187.721.428	154.065.212		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	158.500.000	187.721.428	154.065.212		DINAS PERTANIAN
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	100 Ha	96.500.000	125.721.428	92.065.212		DINAS PERTANIAN
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	400 Ha	400 Ha	400 Ha	62.000.000	62.000.000	62.000.000		DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	31.00 kelompok	31.00 kelompok	31.00 kelompok	1.084.487.769	1.171.541.339	1.313.029.985		DINAS PERTANIAN
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	50%	50%	50%	1.084.487.769	1.171.541.339	1.313.029.985		DINAS PERTANIAN
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	395.114.000	403.114.000	401.239.000		DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang	25 Unit	25 Unit	25 Unit	631.451.569	710.505.139	853.717.789		DINAS PERTANIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ditingkatkan Kapasitasnya								
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	5 Unit	5 Unit	57.922.200	57.922.200	58.073.196		DINAS PERTANIAN
26	DINAS PERDAGANGAN							53.678.501.038	65.398.501.038	59.683.990.424		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							53.678.501.038	65.398.501.038	59.683.990.424		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	34.969.046.376	36.488.802.694	34.138.035.886		DINAS PERDAGANGAN
				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	63.976.800	63.976.800	59.858.100		DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	31.993.600	31.993.600	31.993.600		DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.491.600	5.491.600	5.491.600		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen DPA-SKPD								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	26.491.600	26.491.600	22.372.900		DINAS PERDAGANGAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100 persen	100 persen	100 persen	23.763.484.200	23.763.484.200	22.366.708.800		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	214 Orang/bulan	214 Orang/bulan	214 Orang/bulan	23.348.748.000	23.348.748.000	21.980.898.000		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	409.680.000	409.680.000	382.440.000		DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.685.400	1.685.400	0	Kebutuhan anggaran sub kegiatan dapat diakomodir oleh anggaran dari sub kegiatan lainnya	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.685.400	1.685.400	1.685.400		DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.685.400	1.685.400	1.685.400		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100 persen	100 persen	100 persen	1.247.251.694	1.447.251.694	1.647.251.694		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	107.251.694	107.251.694	107.251.694		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	200.000.000	200.000.000	200.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	350.000.000	550.000.000	750.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	150.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000	350.000.000	400.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	243.243.682	563.000.000	900.447.806		DINAS PERDAGANGAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	243.243.682	563.000.000	900.447.806		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	8.471.400.000	8.471.400.000	7.029.554.106		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.371.400.000	7.371.400.000	5.960.077.106		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000	1.100.000.000	1.069.477.000		DINAS PERDAGANGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100 persen	100 persen	100 persen	1.179.690.000	2.179.690.000	2.134.215.380		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	580.960.000	580.960.000	529.610.000		DINAS PERDAGANGAN
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	13 Unit	320.000.000	320.000.000	325.875.380		DINAS PERDAGANGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	258.730.000	1.258.730.000	1.258.730.000		DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	186.156.000	147.230.000	147.230.000		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100 persen	100 persen	100 persen	186.156.000	147.230.000	147.230.000		DINAS PERDAGANGAN
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 Dokumen	1800 Dokumen	1800 Dokumen	186.156.000	147.230.000	147.230.000		DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	22 pasar	22 pasar	22 pasar	15.129.797.000	21.406.060.682	21.745.929.196		DINAS PERDAGANGAN
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	24 pasar	24 pasar	24 pasar	8.908.106.000	14.895.284.682	14.870.489.646		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	1.803.906.000	4.924.734.061	4.899.939.025		DINAS PERDAGANGAN
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	7.104.200.000	9.970.550.621	9.970.550.621		DINAS PERDAGANGAN
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	52 pasar	52 pasar	52 pasar	6.221.691.000	6.510.776.000	6.875.439.550		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.829.636.000	3.951.356.000	4.122.654.760		DINAS PERDAGANGAN
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.392.055.000	2.559.420.000	2.752.784.790		DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3.99 Persen	3.99 Persen	3.99 Persen	338.078.500	3.937.864.500	325.260.864		DINAS PERDAGANGAN
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100 persen	100 persen	100 persen	338.078.500	3.937.864.500	325.260.864		DINAS PERDAGANGAN
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	338.078.500	3.937.864.500	325.260.864		DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1615736908.00 US\$	1615736908.00 US\$	1615736908.00 US\$	913.210.000	989.285.000	1.018.741.976		DINAS PERDAGANGAN
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	30 persen	30 persen	30 persen	913.210.000	989.285.000	1.018.741.976		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	450.000.000	450.000.000	450.000.000		DINAS PERDAGANGAN
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	10 Produk	10 Produk	10 Produk	463.210.000	539.285.000	568.741.976		DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	81 Persen	81 Persen	81 Persen	1.003.378.162	1.129.563.162	1.094.082.802		DINAS PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	81 persen	81 persen	81 persen	1.003.378.162	1.129.563.162	1.094.082.802		DINAS PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1800 Unit	1800 Unit	1800 Unit	523.082.000	573.082.000	544.926.640		DINAS PERDAGANGAN
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1 Orang	1 Orang	1 Orang	480.296.162	556.481.162	549.156.162		DINAS PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	30 Persen	30 Persen	30 Persen	1.138.835.000	1.299.695.000	1.214.709.700		DINAS PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	100 orang	1.138.835.000	1.299.695.000	1.214.709.700		DINAS PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	580.000.000	580.000.000	556.546.700		DINAS PERDAGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM	558.835.000	719.695.000	658.163.000		DINAS PERDAGANGAN
27	DINAS PERINDUSTRIAN							16.144.548.213	17.344.548.213	20.988.156.546		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							16.144.548.213	17.344.548.213	20.988.156.546		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	9.818.184.428	9.818.184.428	9.631.976.028		DINAS PERINDUSTRIAN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan _ Dinas Perindustrian	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	66.651.370	66.651.370	66.651.370		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31.356.200	31.356.200	31.356.200		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.797.400	1.797.400	1.797.400		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.900	2.796.900	2.796.900		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.363.680	2.363.680	2.363.680		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.845.590	2.845.590	2.845.590		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	25.491.600	25.491.600	25.491.600		DINAS PERINDUSTRIAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.637.274.488	6.637.274.488	6.450.884.488		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.393.277.000	6.393.277.000	6.206.887.000		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Gaji dan Tunjangan ASN								
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	233.400.000	233.400.000	233.400.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.722.128	7.722.128	7.722.128		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	695.200	695.200	695.200		DINAS PERINDUSTRIAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	110.000.000	110.000.000	110.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	70 Orang	110.000.000	110.000.000	110.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	733.745.461	733.745.461	829.987.777		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	27.000.000	27.000.000	27.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	23 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68 Paket	68 Paket	68 Paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	55.000.000	55.000.000	55.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	182.545.461	182.545.461	278.787.777		DINAS PERINDUSTRIAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	254.200.000	254.200.000	254.200.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	168.862.709	168.862.709	118.408.169		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	7.400.000	7.400.000	7.400.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	60.553.630	60.553.630	60.553.630		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.909.079	100.909.079	50.454.539		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perindustrian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.759.630.400	1.759.630.400	1.664.024.224		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	507.200.000	507.200.000	410.200.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	54.000.000	54.000.000	54.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.198.430.400	1.198.430.400	1.199.824.224		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	342.020.000	342.020.000	392.020.000		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	19 Unit	286.820.000	286.820.000	286.820.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	71 Unit	71 Unit	71 Unit	5.200.000	5.200.000	5.200.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	60.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000	50.000	50.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan IKM	0.50 Persen	0.50 Persen	0.50 Persen	5.730.098.511	6.535.298.511	8.755.666.344		DINAS PERINDUSTRIAN
				Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM	88.00 Persen	88.00 Persen	88.00 Persen					
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	5.730.098.511	6.535.298.511	8.755.666.344		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM					
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	518.230.000	686.230.000	686.230.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	2.093.987.889	2.117.587.889	1.817.587.889		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	387.500.000	557.500.000	557.500.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.304.000.000	2.742.800.000	5.163.167.833		DINAS PERINDUSTRIAN
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	326.380.622	331.180.622	431.180.622		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4.00 Persen	4.00 Persen	4.00 Persen	258.000.0 00	490.00 0.000	1.899.448. 900		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	15 IKM	15 IKM	258.000.0 00	490.00 0.000	1.899.448. 900		DINAS PERINDUSTRIAN
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.00 0	18.000. 000	1.427.448. 900		DINAS PERINDUSTRIAN
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	240.000.0 00	472.00 0.000	472.000.0 00		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 Persen	0.50 Persen	0.50 Persen	338.265.274	501.065.274	701.065.274		DINAS PERINDUSTRIAN
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	4 Persen	4 Persen	338.265.274	501.065.274	701.065.274		DINAS PERINDUSTRIAN
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	221.337.274	221.337.274	421.337.274		DINAS PERINDUSTRIAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	98.928.000	261.728.000	261.728.000		DINAS PERINDUSTRIAN
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	18.000.000	18.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN
28	SEKRETARIAT DAERAH							205.902.531.465	217.375.282.557	220.762.508.673		
	SEKRETARIAT DAERAH							205.902.531.465	217.375.282.557	220.762.508.673		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	143.287.510.532	146.792.861.624	142.875.529.052		SEKRETARIAT DAERAH
				OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	43 OPD	43 OPD	43 OPD					
				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100%	100%	100%					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%					
				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100%	100%	100%					
				Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	58.026.250	58.026.250	58.026.250		SEKRETARIAT DAERAH
				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	43.689.850	43.689.850	43.689.850		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.658.900	3.658.900	3.658.900		BAGIAN KEUANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.900	4.258.900	4.258.900		BAGIAN KEUANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.969.300	2.969.300	2.969.300		BAGIAN KEUANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.449.300	3.449.300	3.449.300		BAGIAN KEUANGAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100%	100%	100%	37.944.761.400	38.096.056.975	34.725.129.777		SEKRETARIAT DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	240 Orang/bulan	37.051.610.000	37.202.905.575	33.829.838.377		BAGIAN KEUANGAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	889.680.000	889.680.000	891.820.000		BAGIAN KEUANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	785.800		BAGIAN KEUANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.685.600	2.685.600	2.685.600		BAGIAN KEUANGAN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.655.545.298	1.655.545.298	1.248.958.389		SEKRETARIAT DAERAH
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	83.545.298	83.545.298	83.258.389		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.572.000.000	1.572.000.000	1.165.700.000		BAGIAN KEUANGAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	193.016.194	347.071.712	491.761.406		SEKRETARIAT DAERAH
				Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	149.276.324	303.331.842	297.688.290		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	43.739.870	43.739.870	194.073.116		BAGIAN KEUANGAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	32.410.946.043	32.552.695.440	25.673.586.673		SEKRETARIAT DAERAH
				Tersedianya sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				perkantoran perangkat daerah								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	900.151.541	900.151.541	858.142.061		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	705.466.151	705.466.151	696.133.833		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	748.404.859	748.404.859	734.854.859		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.526.550.000	9.526.550.000	9.526.550.000		BAGIAN TATA USAHA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	19.309.585.551	19.309.585.551	12.151.091.112		BAGIAN TATA USAHA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.220.787.941	1.362.537.338	1.706.814.808		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.471.232.890	2.009.084.933	5.817.684.681		SEKRETARIAT DAERAH
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	347.707.000	347.707.000	3.563.207.129		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	66 Unit	66 Unit	211.332.487	600.929.012	619.180.812		BAGIAN RUMAH TANGGA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	59 Unit	59 Unit	912.193.403	1.060.448.921	1.571.947.553		BAGIAN RUMAH TANGGA
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit			63.349.187	Dana Transfer	BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.219.841.133	13.219.841.133	12.723.196.976		SEKRETARIAT DAERAH
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	163.215.000	163.215.000	163.215.000		BAGIAN TATA USAHA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	9.403.219.632	9.403.219.632	9.030.219.632		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.755.100.000	1.755.100.000	1.648.218.821		BAGIAN TATA USAHA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.130.999.501	1.130.999.501	1.070.208.523		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	767.307.000	767.307.000	811.335.000		BAGIAN TATA USAHA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	23.682.274.716	24.502.673.275	28.007.259.828		SEKRETARIAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	167.432.400	167.432.400	167.432.400		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 Unit	221 Unit	221 Unit	3.312.732.708	3.312.732.708	3.312.732.708		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 Unit	1500 Unit	1500 Unit	121.078.800	121.078.800	181.618.200		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	14 Unit	16.167.000.000	16.987.398.559	19.847.606.841		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	740 Unit	740 Unit	740 Unit	2.834.363.768	2.834.363.768	3.448.514.837		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	910 Unit	910 Unit	910 Unit	1.079.667.040	1.079.667.040	1.049.354.842		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Operasional KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.908.613.800	4.908.613.800	5.197.437.354		SEKRETARIAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	239.313.000	239.313.000	94.374.554		BAGIAN KEUANGAN
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	850.336.800	850.336.800	850.336.800		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.818.964.000	3.818.964.000	4.252.726.000		BAGIAN TATA USAHA
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.638.600.000	2.638.600.000	2.638.600.000		SEKRETARIAT DAERAH
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	63.600.000	63.600.000	63.600.000		BAGIAN RUMAH TANGGA
		Penataan Organisasi	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.35 Indeks	88.35 Indeks	88.35 Indeks	3.566.717.036	3.766.717.036	3.523.190.099		SEKRETARIAT DAERAH
				Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	50 Persen	50 Persen	50 Persen					
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	283.773.876	283.773.876	325.443.876		BAGIAN ORGANISASI
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.409.928.150	2.509.928.150	2.282.599.318		BAGIAN ORGANISASI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelayanan Publik dan Tata Laksana								
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	446.093.810	546.093.810	504.919.224		BAGIAN ORGANISASI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	426.921.200	426.921.200	410.227.681		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	21.537.935.772	23.037.935.772	22.770.697.619		SEKRETARIAT DAERAH
		Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.502.518.575	1.502.518.575	1.432.518.575		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12.715.340.674	14.215.340.674	14.115.340.674		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.320.076.523	7.320.076.523	7.222.838.370		BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	9.00 kegiatan	54.118.978.893	61.036.378.893	67.545.366.209		SEKRETARIAT DAERAH
				Fasilitasi, Kerjasama serta	60.00 Persen	60.00 Persen	60.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah								
				Indek Pelayanan Publik	123.00 Persen	123.00 Persen	123.00 Persen					
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Administrasi Tata Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Semarang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.675.832.280	5.175.832.280	5.004.603.471		SEKRETARIAT DAERAH
				Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Umum di Wilayah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Tertib Administrasi Pemerintahan di Wilayah	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	478.049.266	478.049.266	406.240.016		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	631.049.466	631.049.466	554.197.840		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.476.733.548	3.976.733.548	3.994.673.548		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	90.000.000	90.000.000	49.492.067		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	38.837.965.862	41.183.365.862	50.394.505.574		SEKRETARIAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	32.151.50 0.000	32.151. 500.00 0	39.269.86 2.092		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	6.022.087 .162	8.367.4 87.162	10.552.98 7.162		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	664.378.7 00	664.37 8.700	571.656.3 20		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercapainya Penyusunan Produk Hukum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.850.440 .068	6.922.4 40.068	6.601.095. 525		SEKRETARIAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Peduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah								
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 Dokumen	565 Dokumen	565 Dokumen	392.496.387	464.496.387	559.245.344		BAGIAN HUKUM
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	55 Kasus	55 Kasus	2.167.170.411	2.167.170.411	1.788.132.411		BAGIAN HUKUM
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	2.290.773.270	4.290.773.270	4.253.717.770		BAGIAN HUKUM
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.754.740.683	7.754.740.683	5.545.161.639		SEKRETARIAT DAERAH
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	1.842.760.146	1.842.760.146	1.706.153.623		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.911.980.537	5.911.980.537	3.839.008.016		BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	8.496.042.040	9.546.042.040	10.341.613.412		SEKRETARIAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
				Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
				Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen					
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.745.320.418	5.295.320.418	6.195.572.098		SEKRETARIAT DAERAH
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	576.191.197	656.191.197	1.056.191.197		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	641.100.838	931.100.838	931.226.678		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												DAYA ALAM
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.528.028.383	3.708.028.383	4.208.154.223		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	909.428.150	909.428.150	852.676.610		SEKRETARIAT DAERAH
				Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	163.862.860	163.862.860	236.129.860		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	584.232.740	584.232.740	492.638.360		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	161.332.550	161.332.550	123.908.390		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.349.943.772	2.849.943.772	2.865.321.292		SEKRETARIAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.399.684.940	1.499.684.940	1.514.684.940		BAGIAN PENGADAA N BARANG/J ASA
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	450.388.832	600.388.832	600.766.352		BAGIAN PENGADAA N BARANG/J ASA
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	220 Orang	220 Orang	499.870.000	749.870.000	749.870.000		BAGIAN PENGADAA N BARANG/J ASA
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	koordinasi, pemantauandan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai	100 persen	100 persen	100 persen	491.349.700	491.349.700	428.043.412		SEKRETARI AT DAERAH
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	491.349.700	491.349.700	428.043.412		BAGIAN PEREKONO MIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
29	SEKRETARIA T DPRD							130.605.074.955	134.626.999.755	135.206.559.595		
	SEKRETARIA T DPRD							130.605.074.955	134.626.999.755	135.206.559.595		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	69.674.229.266	73.696.154.066	74.870.692.792		SEKRETARI AT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	82.424.800	82.424.800	82.424.800		SEKRETARIAT DPRD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	39.063.200	39.063.200	39.063.200		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.800	3.033.800	3.033.800		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.800	3.033.800	3.033.800		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.316.600	8.316.600	8.316.600		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.033.800	3.033.800	3.033.800		SEKRETARIAT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.033.800	3.033.800	3.033.800		SEKRETARIAT DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.909.800	22.909.800	22.909.800		SEKRETARIAT DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan	100%	100%	100%	7.559.354.210	7.773.427.010	7.620.670.210		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	7.193.879.000	7.407.951.800	7.255.195.000		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	363.095.610	363.095.610	363.095.610		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.055.000	1.055.000	1.055.000		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.324.600	1.324.600	1.324.600		SEKRETARIAT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terlindungi	11 buah	11 buah	11 buah	70.000.000	70.000.000	70.000.000		SEKRETARIAT DPRD
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000	70.000.000	70.000.000		SEKRETARIAT DPRD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50 orang	50 orang	50 orang	702.000.000	702.000.000	723.000.000		SEKRETARIAT DPRD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	47 Orang	47 Orang	702.000.000	702.000.000	723.000.000		SEKRETARIAT DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	5.461.509.145	5.461.509.145	6.044.361.171		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	75.000.000	75.000.000	110.000.000		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	397.327.845	397.327.845	407.327.845		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	473.413.980	473.413.980	473.413.980		SEKRETARIAT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	373.222.280	373.222.280	427.664.450		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	310.814.800	310.814.800	241.792.596		SEKRETARIAT DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.640.092.240	2.640.092.240	2.953.592.240		SEKRETARIAT DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.191.638.000	1.191.638.000	1.430.570.060		SEKRETARIAT DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	3.908.346.270	3.908.346.270	4.479.776.412		SEKRETARIAT DPRD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	2.899.836.689	2.899.836.689	3.293.655.428		SEKRETARIAT DPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	55 Unit	620.800.902	620.800.902	732.076.596		SEKRETARIAT DPRD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	387.708.679	387.708.679	454.044.388		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.646.856.105	2.646.856.105	2.634.555.949		SEKRETARIAT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				sarana dan prasarana aparatur								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.477.693	22.477.693	22.477.693		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	167.162.256	167.162.256	167.162.256		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.457.216.156	2.457.216.156	2.444.916.000		SEKRETARIAT DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	2.206.407.760	2.206.407.760	2.268.911.110		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	52 Unit	1.063.500.000	1.063.500.000	1.063.500.000		SEKRETARIAT DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 Unit	248 Unit	248 Unit	340.014.560	340.014.560	333.577.247		SEKRETARIAT DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	561.044.000	561.044.000	561.044.000		SEKRETARIAT DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100 Unit	100 Unit	100 Unit	241.849.200	241.849.200	310.789.863		SEKRETARIAT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dipelihara/Direhabilitasi								
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD	100%	100%	100%	45.148.830.976	48.956.682.976	49.058.493.140		SEKRETARIAT DPRD
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	44.072.107.000	47.879.959.000	47.879.959.000		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1.076.723.976	1.076.723.976	1.178.534.140		SEKRETARIAT DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan pelayanan administrasi DPRD	100%	100%	100%	1.888.500.000	1.888.500.000	1.888.500.000		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1.888.500.000	1.888.500.000	1.888.500.000		SEKRETARIAT DPRD
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	17.00 dokumen	17.00 dokumen	17.00 dokumen	60.930.845.689	60.930.845.689	60.335.866.803		SEKRETARIAT DPRD
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	18 Perda	18 Perda	18 Perda	13.136.600.600	13.136.600.600	12.362.909.600		SEKRETARIAT DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	13.136.600.600	13.136.600.600	12.362.909.600		SEKRETARIAT DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase peningkatan kapasitas DPRD	100%	100%	100%	15.324.918.118	15.324.918.118	14.954.230.412		SEKRETARIAT DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	10 Orang	10 Orang	11.773.097.600	11.773.097.600	11.065.856.610		SEKRETARIAT DPRD
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.675.575.300	2.675.575.300	2.875.632.584		SEKRETARIAT DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	876.245.218	876.245.218	1.012.741.218		SEKRETARIAT DPRD

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumentasi DPRD								
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersempainya aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	7.401.957.648	7.401.957.648	5.201.587.411		SEKRETARIAT DPRD
		Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	7.401.957.648	7.401.957.648	5.201.587.411		SEKRETARIAT DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	100%	100%	100%	25.067.369.323	25.067.369.323	27.817.139.380		SEKRETARIAT DPRD
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.002.793.955	22.002.793.955	24.886.459.955		SEKRETARIAT DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.064.575.368	3.064.575.368	2.930.679.425		SEKRETARIAT DPRD
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							33.879.982.079	26.601.864.991	25.606.137.963		
	PERENCANAAN							29.379.982.079	26.601.864.991	25.606.137.963		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	14.831.182.079	11.909.064.991	11.382.037.963		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan prasarana perkantoran SKPD								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	131.100.000	66.720.000	66.720.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	59.300.000	29.650.000	29.650.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	3.500.000	3.500.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.200.000	4.100.000	4.100.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000	3.120.000	3.120.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000	3.750.000	3.750.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	45.200.000	22.600.000	22.600.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	11.215.597.000	9.777.146.362	9.358.878.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	10.869.677.000	9.480.286.362	9.069.938.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	343.800.000	295.800.000	287.880.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.000	300.000	300.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	920.000	460.000	460.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				an/Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	300.000	300.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	172.000.000	99.650.000	99.650.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	66 Orang	66 Orang	172.000.000	99.650.000	99.650.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.294.725.079	1.209.918.629	1.106.353.603		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	148.170.000	59.500.000	93.500.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100.000.000	50.750.000	33.200.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	18 Paket	90.000.000	53.113.550	30.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	49.555.079	29.555.079	16.789.963		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	85.000.000	50.000.000	26.700.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	819.000.000	543.000.000	498.163.640		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.003.000.000	424.000.000	408.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	301.310.000	187.576.000	119.636.360		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.360.000	6.180.000	4.500.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	288.950.000	181.396.000	115.136.360		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100 Persen	100 Persen	100 Persen	716.450.000	568.054.000	630.800.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000	40.000.000	40.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	401.450.000	293.054.000	355.800.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	235.000.000	235.000.000	235.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	4.450.000.000	4.522.000.000	4.253.300.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.200.000.000	3.272.000.000	2.555.300.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	300.000.000	300.000.000	99.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000	100.000.000	47.300.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	650.000.000	650.000.000	300.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	200.000.000	200.000.000	29.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.950.000.000	2.022.000.000	2.080.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	215.000.000	215.000.000	176.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	110.000.000	80.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penyusunan Profil Pembangunan	Penyusunan Profil Pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan	1 Buku	1 Buku	1 Buku	105.000.000	105.000.000	96.000.000		BADAN PERENCANAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	Daerah yang Diterbitkan								PEMBANGUNAN DAERAH
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.035.000.000	1.035.000.000	1.522.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	685.000.000	685.000.000	1.007.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	350.000.000	350.000.000	515.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	10.098.800.000	10.170.800.000	9.970.800.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.320.000.000	2.320.000.000	2.220.000.000		BADAN PERENCANAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia	Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	400.000.000	344.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	800.000.000	800.000.000	756.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pembangunan Manusia								
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.528.800.000	2.528.800.000	2.428.800.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	900.000.000	900.000.000	865.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	500.000.000	465.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.100.000.000	1.100.000.000	1.070.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.800.000	28.800.000	28.800.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah Bidang SDA	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.250.000.000	5.322.000.000	5.322.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.450.000.000	2.450.000.000	2.380.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	550.000.000	550.000.000	525.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.520.000.000	1.592.000.000	1.758.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	730.000.000	730.000.000	659.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								UNAN DAERAH
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							4.500.000.000				
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100.00 Persen			4.500.000.000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen			300.000.000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNAN DAERAH
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Laporan			300.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen			800.000.000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	10 Dokumen			800.000.000			Dipindahkan ke	BADAN PERENCANAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Bidang Aspek- Aspek Sosial		dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial							Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	AAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100 Persen			1.900.000.000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	10 Dokumen			950.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	10 Dokumen			950.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100 Persen			1.500.000.000				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen			800.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan	2 Laporan			200.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Daerah yang Bersifat Inovatif		Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif							Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	UNAN DAERAH
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan			400.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan			100.000.000			Dipindahkan ke Perangkat Daerah Baru (Badan Riset dan Inovasi Daerah)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							235.283.816.864	207.779.761.347	137.598.149.017		
	KEUANGAN							235.283.816.864	207.779.761.347	137.598.149.017		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	121.772.316.538	111.768.316.538	106.006.260.582		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan prasarana perkantoran SKPD								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	80.474.196	80.474.196	70.202.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	56.433.796	56.433.796	53.094.800		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.520.900	4.520.900	3.658.900		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	4.258.900		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.382.900	5.382.900	5.382.900		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	2.234.900		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.594.800	3.594.800	1.571.600		BADAN PENGELOLAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100 persen	100 persen	100 persen	12.780.22 1.200	12.780. 221.20 0	12.038.69 6.200		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	12.314.92 4.000	12.314. 924.00 0	11.619.82 9.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	464.400.0 00	464.40 0.000	417.970.0 00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	448.60 0	448.600		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.60 0	448.600		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100 persen	100 persen	100 persen	100.451.5 60	262.59 6.080	142.723.1 90		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												DAN ASET DAERAH
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100.451.560	262.596.080	142.723.190		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100 persen	100 persen	100 persen	2.569.312.261	2.552.622.261	2.384.137.336		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.052.847	11.052.847	11.052.847		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	928.994.766	928.994.766	737.529.390		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	42.656.813	42.656.813	46.757.264		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	94.996.867	94.996.867	94.996.867		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	23.414.517	23.414.517	23.414.517		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.986.211	2.986.211	2.986.211		BADAN PENGELOLAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan								AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.253.880	66.253.880	46.253.880		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	659.402.800	657.220.800	687.220.800		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.985.000	14.985.000	23.865.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	724.568.560	710.060.560	710.060.560		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD	100 persen	100 persen	100 persen	463.565.955	463.565.955	645.965.946		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	230 Unit	230 Unit	463.565.955	463.565.955	645.965.946		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD	100 persen	100 persen	100 persen	104.775.694.647	93.994.231.614	88.659.344.225		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200.000	200.000	40.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	104.126.102.647	93.344.639.614	88.069.311.865		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	649.392.000	649.392.000	589.992.360		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100 persen	100 persen	100 persen	1.002.596.719	1.634.605.232	2.065.191.685		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	39.910.050	39.910.050	39.910.050		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	37 Unit	405.034.560	405.034.560	1.337.230.561		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	4.035.960	4.035.960	1.614.384		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	16 Unit	42.359.099	42.359.099	42.359.099		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	416.697.359	1.048.705.872	549.517.900		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	94.559.691	94.559.691	94.559.691		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SILPA Terhadap APBD	1.02 Persen	1.02 Persen	1.02 Persen	109.943.877.102	92.443.821.585	28.324.137.992		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100%	100%					
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100 persen	100 persen	100 persen	3.617.292.344	3.617.292.344	3.404.886.112		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	192.176.774	192.176.774	131.672.774		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	173.882.641	173.882.641	154.157.941		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PPAS yang Disusun								KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	57.124.455	57.124.455	8.959.927		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	61.150.803	61.150.803	7.077.521		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	26.601.834	26.601.834	30.101.834		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	3.475.207	3.475.207	0	Dikarenakan tidak ada ceremonial dalam acara penyerahan DPA perubahan APBD TA 2024 dan sifat koordinatornya tidak terlalu banyak dan dapat dilakukan secara singkat, maka untuk anggaran sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
											Verifikasi Perubahan DPA-SKPD di nol kan	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	617.203.129	617.203.129	592.410.129		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	476.188.789	476.188.789	443.188.789		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.563.008.487	1.563.008.487	1.659.996.167		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	61.573.880	61.573.880	7.193.650		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	82.796.382	82.796.382	82.796.382		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.314.436	50.314.436	50.314.436		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pembinaan Perencanaan Penganggaran	Pembinaan Perencanaan Penganggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	251.795.527	251.795.527	237.016.562		BADAN PENGELOLAAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen	100 persen	100 persen	1.994.754.000	1.994.754.000	1.225.079.666		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	754 Dokumen	754 Dokumen	754 Dokumen	394.328.000	394.328.000	293.115.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	408 Dokumen	408 Dokumen	408 Dokumen	313.897.000	313.897.000	168.058.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	124.762.000	124.762.000	0	Dikarenakan koordinasi penyertaan modal dan deviden BUMD dilakukan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang, sedangkan Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Semarang hanya melakukan pencairan serta melakukan pencatatan atas deviden	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
											penyertaan modal tersebut, maka anggaran kegiatan tersebut di nol kan	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	215.897.000	215.897.000	161.949.300		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48641 Dokumen	48641 Dokumen	48641 Dokumen	155.612.000	155.612.000	108.928.400		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	183.836.000	183.836.000	72.533.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	160.296.000	160.296.000	6.177.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	144.254.000	144.254.000	83.577.800		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	1200 Orang	1200 Orang	301.872.000	301.872.000	330.741.166		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100 persen	100 persen	100 persen	2.348.070.000	2.352.070.000	1.584.368.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaporan Keuangan Daerah									DAN ASET DAERAH
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	612 Laporan	612 Laporan	612 Laporan	46.300.000	46.300.000	24.133.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	171.900.000	171.900.000	49.417.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.750.000	318.750.000	193.092.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	404.500.000	404.500.000	319.299.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	338.300.000	338.300.000	246.402.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/Kota								
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24.800.000	24.800.000	0	Dikarenakan kegiatan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK ada di Inspektorat sehingga anggaran tersebut dinolkan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	116.150.000	116.150.000	115.541.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	84.500.000	84.500.000	55.632.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	268.270.000	268.270.000	141.512.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	251.650.000	251.650.000	156.364.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi,	250 Orang	250 Orang	250 Orang	142.100.000	142.100.000	125.316.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota								DAN ASET DAERAH
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	39 Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	180.850.000	184.850.000	157.660.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100 persen	100 persen	100 persen	101.983.760.758	84.479.705.241	22.109.804.214		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.771.660	20.771.660	0	Dikarenakan perkiraan SiLPA lebih besar dari SiLPA Audited sehingga terjadi defisit anggaran dan tidak ada anggaran / belum ada rencana Belanja Bantuan Keuangan sehingga kegiatan ini ditunda sementara untuk menutup Belanja Kegiatan yang menjadi prioritas untuk	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
											pemenuhan target indikator kinerja RPJMD 2021 – 2026 yang harus diselesaikan maksimal Tahun 2025	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	101.962.989.098	84.458.933.581	22.109.804.214		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Legalitas Aset	90.24 Persen	90.24 Persen	90.24 Persen	3.567.623.224	3.567.623.224	3.267.750.443		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100 persen	100 persen	100 persen	3.567.623.224	3.567.623.224	3.267.750.443		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	208.181.623	208.181.623	158.776.743		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.791.462	55.791.462	51.345.460		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	120.121.919	120.121.919	120.121.919		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	394.000.000	394.000.000	394.000.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	268.366.712	268.366.712	322.217.592		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.332.909.269	1.332.909.269	932.435.578		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	661.239.889	661.239.889	700.291.709		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75.946.030	75.946.030	95.811.290		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	350.880.808	350.880.808	384.564.638		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100.185.512	100.185.512	108.185.514		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH							102.861.224.245	102.861.224.245	96.052.042.526		
	KEUANGAN							102.861.224.245	102.861.224.245	96.052.042.526		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	75.949.504.140	75.574.504.140	70.356.039.291		BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Bapenda	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	105.529.500	105.529.500	97.379.100		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	48.526.124	48.526.124	43.928.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.163.400	6.163.400	5.382.900		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.163.400	6.163.400	6.282.900		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.628.200	6.628.200	6.628.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.417.300	6.417.300	6.417.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	31.631.076	31.631.076	28.739.600		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	64.504.780.120	64.504.780.120	58.843.508.120		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	116 Orang/bulan	116 Orang/bulan	63.404.247.000	63.404.247.000	57.742.975.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 Dokumen	76 Dokumen	76 Dokumen	1.099.794.520	1.099.794.520	1.099.794.520		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	246.200	246.200	246.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	246.200	246.200	246.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	246.200	246.200	246.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	214.095.410	339.095.410	354.095.410		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	179.659.510	304.659.510	319.659.510		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	34.435.900	34.435.900	34.435.900		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	100 Persen	710.968.435	710.968.435	637.494.016		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	243.788.435	243.788.435	257.114.016		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	46 Orang	46 Orang	467.180.000	467.180.000	380.380.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi umum	100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	2.400.563.687	2.400.563.687	2.212.108.860		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	74.136.240	74.136.240	74.136.240		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	45 Paket	100.749.370	100.749.370	100.749.370		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	90 Paket	90 Paket	160.324.477	160.324.477	150.705.009		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	25 Paket	265.653.000	265.653.000	281.600.428		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000	12.500.000	12.500.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	62.500.000	62.500.000	62.500.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	774.210.750	774.210.750	774.210.750		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	136.368.495	136.368.495	136.368.495		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	814.121.355	814.121.355	619.338.568		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Berbasis Elektronik pada SKPD								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.813.796.610	2.205.265.440	2.113.347.557		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	608.531.170	146.083.082	146.083.082		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	754.671.923	760.582.235	765.627.244		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.445.549.367	1.293.555.973	1.196.593.081		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.044.150	5.044.150	5.044.150		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.944.032.568	2.944.032.568	2.911.153.208		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	120.000.000	60.000.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	676.685.440	676.685.440	676.685.440		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 Laporan	168 Laporan	168 Laporan	61.619.385	61.619.385	61.619.385		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.085.727.743	2.085.727.743	2.112.848.383		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.255.737.810	2.364.268.980	3.186.953.020		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 Unit	131 Unit	131 Unit	1.025.298.000	1.025.298.000	1.025.298.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	150 Unit	16.628.155	16.628.155	16.628.155		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 Unit	520 Unit	520 Unit	624.658.772	624.658.772	624.658.772		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	42 Unit	28.567.260	28.567.260	43.642.460		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	524.630.623	633.161.793	1.440.770.633		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	10 Persen	10 Persen	26.911.720.105	27.286.720.105	25.696.003.235		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10 Persen	10 Persen	10 Persen	26.911.720.105	27.286.720.105	25.696.003.235		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	709.775.494	709.775.494	353.965.735		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.254.139.532	1.254.139.532	1.122.834.685		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	5.662.398.182	5.787.398.182	5.787.436.842		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.252.631.082	3.252.631.082	3.214.486.861		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 Obyek Pajak	86000 Obyek Pajak	86000 Obyek Pajak	157.588.880	157.588.880	157.588.880		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.144.590.334	5.269.590.334	5.080.446.722		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3.343.159.255	3.343.159.255	2.868.048.746		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penelitian dan Verifikasi Data	Penelitian dan Verifikasi Data	Jumlah Data Pelaporan Pajak	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	537.935.816	537.935.816	501.826.374		BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaporan Pajak Daerah	Pelaporan Pajak Daerah	Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi								AN DAERAH
		Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.857.940.620	5.982.940.620	5.632.666.920		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	167.673.460	167.673.460	92.814.020		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	443.605.260	443.605.260	503.605.260		BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	380.282.190	380.282.190	380.282.190		BADAN PENDAPATAN DAERAH
33	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							33.683.275.137	33.685.447.137	31.073.641.688		
	KEPEGAWAIAN							27.193.280.467	27.195.452.467	24.786.780.358		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100 Persen	100 Persen	100 Persen	18.326.575.631	18.328.747.631	16.736.572.855		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKPP	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	71.954.800	71.954.800	71.954.800		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.412.600	30.412.600	30.412.600		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.230.500	3.230.500	3.230.500		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.866.100	4.866.100	4.866.100		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.919.100	3.919.100	3.919.100		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.270.900	5.270.900	5.270.900		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Perubahan DPA-SKPD								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	24.255.600	24.255.600	24.255.600		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	12.944.016.000	12.946.183.600	11.752.604.600		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.614.317.000	12.616.489.000	11.422.910.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	327.000.000	327.000.000	327.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	673.400	673.400	673.400		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	785.800	785.800	785.800		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.235.400	1.235.400	1.235.400		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	161.441.900	161.441.900	149.786.900		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang	115 Orang	115 Orang	161.441.900	161.441.900	149.786.900		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.405.098.791	1.405.098.791	1.221.129.069		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	59.604.769	59.604.769	59.604.769		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	183.485.709	183.485.709	199.923.699		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	124.627.748	124.627.748	79.456.365		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	98.110.236	98.110.236	98.495.907		BADAN KEPEGAWAIAN,

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan Penggandaan yang Disediakan								PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	995.404	995.404	995.404		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	134.500.000	134.500.000	80.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	464.686.600	464.686.600	363.564.600		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	339.088.325	339.088.325	339.088.325		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	224.333.144	224.333.144	213.569.518		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	224.333.144	224.333.144	213.569.518		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.164.656.619	2.164.656.619	2.116.280.216		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Daerah yang berjalan baik								N DAN PELATIHAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	579.195.750	579.195.750	579.195.750		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	348.347.527	348.347.527	356.393.772		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.237.113.342	1.237.113.342	1.180.690.694		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.355.078.777	1.355.078.777	1.211.247.752		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.344.500	44.344.500	44.344.500		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	562.834.580	562.834.580	436.660.880		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit	72.647.280	72.647.280	54.989.955		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												N DAN PELATIHAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	675.252.417	675.252.417	675.252.417		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.50 Persen	81.50 Persen	81.50 Persen	8.866.704.836	8.866.704.836	8.050.207.503		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen					
				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen					
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20.98 Persen	20.98 Persen	20.98 Persen					
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	258.36 Persen	258.36 Persen	258.36 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2.505.245.184	2.505.245.184	2.354.099.431		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	57.418.049	57.418.049	46.417.290		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.612.812.306	1.612.812.306	1.682.812.306		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	753 Dokumen	753 Dokumen	753 Dokumen	422.955.046	422.955.046	376.257.179		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	197.105.563	197.105.563	152.901.296		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	9000 Dokumen	9000 Dokumen	9000 Dokumen	214.954.220	214.954.220	95.711.360		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Mutasi dan Promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.181.906.700	2.181.906.700	2.000.821.520		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	350 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	556.698.900	556.698.900	504.142.800		BADAN KEPEGAWA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah								IAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1300 Dokumen	1300 Dokumen	1300 Dokumen	363.160.800	363.160.800	352.760.800		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	1.262.047.000	1.262.047.000	1.143.917.920		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.522.219.565	2.522.219.565	2.270.119.565		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	500 Orang	500 Orang	909.531.097	909.531.097	909.531.097		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	1.272.817.170	1.272.817.170	1.049.817.170		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	300 Orang	300 Orang	300 Orang	234.991.598	234.991.598	209.091.598		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Fasilitasi Pengembangan Karir	Fasilitasi Pengembangan Karir	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	104.879.700	104.879.700	101.679.700		BADAN KEPEGAWAIAN,

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dalam Jabatan Fungsional	dalam Jabatan Fungsional	Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir								PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.657.333.387	1.657.333.387	1.425.166.987		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.156.100	300.156.100	187.247.100		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	943.538.347	943.538.347	952.333.067		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	900 Orang	900 Orang	900 Orang	299.747.580	299.747.580	184.745.460		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	98.751.680	98.751.680	85.701.680		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	15.139.680	15.139.680	15.139.680		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							6.489.994.670	6.489.994.670	6.286.861.330		
		PROGRAM PENGEMBANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat	45 Persen	45 Persen	45 Persen	6.489.994.670	6.489.994.670	6.286.861.330		BADAN KEPEGAWAIAN,

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		SUMBER DAYA MANUSIA	SUMBER DAYA MANUSIA	(struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya								PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.989.994.670	1.989.994.670	1.823.163.414		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	91.000.000	91.000.000	91.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	308.494.670	308.494.670	250.390.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pemerintahan Umum yang Disusun								
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	306 Orang	306 Orang	306 Orang	1.400.000.000	1.400.000.000	1.306.603.414		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	190.500.000	190.500.000	175.170.000		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.500.000.000	4.500.000.000	4.463.697.916		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4.500.000.000	4.500.000.000	4.463.697.916		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
34	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH								11.962.150.326	9.615.074.508		
	PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN								11.962.150.326	9.615.074.508		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Brida		100.00 Persen	100.00 Persen		7.462.150.326	4.798.592.019		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Brida		100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN Brida		100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Brida		100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Brida yang dihasilkan		12 Dokumen	12 Dokumen		64.380.000	64.380.000		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen		29.650.000	29.650.000	Penambahan Perangkat	BADAN RISET DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Perencanaan Perangkat Daerah								Daerah Baru	INOVASI DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		3.500.000	3.500.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		4.100.000	4.100.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		2.080.000	2.080.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		2.450.000	2.450.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan		22.600.000	22.600.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Brista		4 Dokumen	4 Dokumen		5.978.483.876	2.906.338.000		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
				Persentase Administrasi Keuangan Brista		100 Persen	100 Persen					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan		5.799.223.876	2.727.078.000	Penambahan Perangkat	BADAN RISET DAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Gaji dan Tunjangan ASN							Daerah Baru	INOVASI DAERAH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4 Dokumen	4 Dokumen		178.200.000	178.200.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan		300.000	300.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan		460.000	460.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen		300.000	300.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Brida yang Berjalan Baik		3 Kegiatan	3 Kegiatan		72.350.000	44.400.000		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	20 Orang		72.350.000	44.400.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum		100 Persen	100 Persen		1.084.806.450	1.129.884.460		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket		88.670.000	88.670.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7 Paket	7 Paket		49.250.000	49.250.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		15 Paket	15 Paket		36.886.450	36.886.450	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	5 Paket		20.000.000	20.000.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	4 Laporan		35.000.000	32.950.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	4 Laporan		276.000.000	274.806.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		579.000.000	627.322.010	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor		100 Persen	100 Persen		113.734.000	75.068.990		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan		6.180.000	6.180.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan		107.554.000	68.888.990	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Brida		100 Persen	100 Persen		148.396.000	578.520.569		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit		40.000.000	40.000.000	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	7 Unit		108.396.000	118.569.738	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit			419.950.831	Penambahan Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		100.00 Persen	100.00 Persen		4.500.000.000	4.816.482.489		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan		100 Persen	100 Persen		300.000.000	853.920.000		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pengkajian Peraturan								
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		4 Laporan	4 Laporan		300.000.000	853.920.000	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan		100 Persen	100 Persen		800.000.000	377.878.903		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		6 Dokumen	6 Dokumen		800.000.000	377.878.903	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		100 Persen	100 Persen		1.900.000.000	962.641.364		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		10 Dokumen	10 Dokumen		950.000.000	589.353.882	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
											Daerah Baru	
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		5 Dokumen	5 Dokumen		950.000.000	373.287.482	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi		100 Persen	100 Persen		1.500.000.000	2.622.042.222		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		5 Dokumen	5 Dokumen		800.000.000	1.672.042.222	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		2 Laporan	2 Laporan		200.000.000	200.000.000	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan		1 Laporan	1 Laporan		400.000.000	400.000.000	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan							Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 Laporan	1 Laporan		100.00 0.000	350.000.0 00	Penyesuaian Program dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ke Perangkat Daerah Baru	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
35	INSPEKTOR AT							27.561.06 7.642	27.561. 067.64 2	27.048.12 5.782		
	INSPEKTOR AT DAERAH							27.561.06 7.642	27.561. 067.64 2	27.048.12 5.782		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	19.044.68 8.174	19.044. 688.17 4	19.351.09 7.758		INSPEKTOR AT
				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	78.651.54 6	78.651. 546	78.651.54 6		INSPEKTOR AT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				yang Dihilangkan (Inspektorat)								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	42.318.050	42.318.050	42.318.050		INSPEKTOR AT
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.682.099	3.682.099	3.682.099		INSPEKTOR AT
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.877.299	3.877.299	3.877.299		INSPEKTOR AT
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.337.299	3.337.299	3.337.299		INSPEKTOR AT
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.877.299	3.877.299	3.877.299		INSPEKTOR AT
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.559.500	21.559.500	21.559.500		INSPEKTOR AT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat)	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	13.013.345.512	13.013.345.512	13.830.333.512		INSPEKTOR AT
				Persentase administrasi	100%	100%	100%					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				keuangan SKPD 100% (Inspektorat)								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	12.707.540.000	12.707.540.000	13.524.528.000		INSPEKTORAT
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	298.860.000	298.860.000	298.860.000		INSPEKTORAT
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.857.600	4.857.600	4.857.600		INSPEKTORAT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.530.912	1.530.912	1.530.912		INSPEKTORAT
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	557.000	557.000	557.000		INSPEKTORAT
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat)	100%	100%	100%	1.952.326.000	1.952.326.000	2.083.752.618		INSPEKTORAT
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang	66 Orang	66 Orang	1.179.746.000	1.179.746.000	1.179.746.000		INSPEKTORAT
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	772.580.000	772.580.000	904.006.618		INSPEKTORAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat)	100%	100%	100%	2.488.948.945	2.488.948.945	1.830.542.976		INSPEKTORAT
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	166.870.441	166.870.441	71.062.123		INSPEKTORAT
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	97.575.473	97.575.473	91.416.460		INSPEKTORAT
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	145.269.465	145.269.465	96.900.327		INSPEKTORAT
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.977.018	4.977.018	4.977.018		INSPEKTORAT
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	151.950.000	151.950.000	71.675.000		INSPEKTORAT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	876.839.000	876.839.000	754.419.000		INSPEKTORAT
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	264.156.238	264.156.238	250.656.238		INSPEKTORAT
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	781.311.310	781.311.310	489.436.810		INSPEKTORAT
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya	100%	100%	100%	827.763.321	827.763.321	855.733.356		INSPEKTORAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat)								
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	169.819.134	169.819.134	169.819.134		INSPEKTOR AT
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	657.944.187	657.944.187	685.914.222		INSPEKTOR AT
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor ( Inspektorat )	100%	100%	100%	10.140.000	10.140.000	10.140.000		INSPEKTOR AT
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.140.000	10.140.000	10.140.000		INSPEKTOR AT
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat)	100%	100%	100%	673.512.850	673.512.850	661.943.750		INSPEKTOR AT
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.305.000	36.305.000	36.305.000		INSPEKTOR AT
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	36 Unit	36 Unit	36 Unit	444.030.000	444.030.000	423.370.000		INSPEKTOR AT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	140 Unit	10.530.800	10.530.800	10.530.800		INSPEKTOR AT
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	125 Unit	94.950.280	94.950.280	94.950.280		INSPEKTOR AT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	45 Unit	87.696.770	87.696.770	96.787.670		INSPEKTOR AT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.00 Leveling	3.797.522.358	3.797.522.358	3.560.560.806		INSPEKTOR AT
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal	100%	100%	100%	3.227.518.158	3.227.518.158	2.993.082.521		INSPEKTOR AT
				Persentase Tindak Lanjut Temuan	88.00 %	88.00 %	88.00 %					
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	385.000.000	385.000.000	323.153.000		INSPEKTOR AT
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	723.500.000	723.500.000	600.475.000		INSPEKTOR AT
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	498.778.300	498.778.300	498.778.300		INSPEKTOR AT
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	79.090.000	79.090.000	79.090.000		INSPEKTOR AT
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	15 Kesepakatan	15 Kesepakatan	15 Kesepakatan	1.122.612.649	1.122.612.649	1.193.999.012		INSPEKTOR AT
		Monitoring dan Evaluasi Tindak	Monitoring dan Evaluasi Tindak	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	418.537.209	418.537.209	297.587.209		INSPEKTOR AT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	570.004.200	570.004.200	567.478.285		INSPEKTOR AT
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	67.879.950	67.879.950	65.354.035		INSPEKTOR AT
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	502.124.250	502.124.250	502.124.250		INSPEKTOR AT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP	3.06 Nilai	3.06 Nilai	3.06 Nilai	4.718.857.110	4.718.857.110	4.136.467.218		INSPEKTOR AT
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100%	100%	100%	445.956.400	445.956.400	391.547.100		INSPEKTOR AT
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	76.556.400	76.556.400	69.926.100		INSPEKTOR AT
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	369.400.000	369.400.000	321.621.000		INSPEKTOR AT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Indeks penerapan manajemen risiko	3.00 Indeks	3.00 Indeks	3.00 Indeks	4.272.900.710	4.272.900.710	3.744.920.118		INSPEKTOR AT
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	60 perangkat daerah	895.608.800	895.608.800	727.741.800		INSPEKTOR AT
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	51 perangkat daerah	504.506.280	504.506.280	306.317.760		INSPEKTOR AT
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2.664.184.880	2.664.184.880	2.502.259.808		INSPEKTOR AT
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	208.600.750	208.600.750	208.600.750		INSPEKTOR AT
36	KECAMATAN SEMARANG SELATAN							39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510		
	KECAMATAN							39.687.929.216	40.010.644.416	40.227.766.510		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100 Persen	100 Persen	100 Persen	14.319.529.216	14.266.944.116	14.603.110.434		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	63.534.100	63.534.100	63.534.100		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.536.400	29.536.400	29.536.400		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300	2.107.300	2.107.300		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900	3.488.900	3.488.900		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.107.300	2.107.300	2.107.300		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.488.900	3.488.900	3.488.900		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	548.100	548.100	548.100		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.257.200	22.257.200	22.257.200		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	12.455.948.000	12.598.663.200	13.097.370.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	12.096.005.000	12.238.720.200	12.737.427.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	358.260.000	358.260.000	358.260.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	785.800	785.800	785.800		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	448.600	448.600	448.600		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	448.600	448.600		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100 persen	100 persen	100 persen	961.319.200	813.963.900	850.391.948		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	33.000.000	33.000.000	33.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	233.400.000	178.405.000	112.604.200		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.400.000	44.582.700	55.105.348		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.078.000	34.225.000	34.225.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.413.200	70.413.200	100.413.200		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	116.454.000	99.388.000	99.388.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	420.574.000	353.950.000	415.656.200		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	100.600.000	62.110.000	27.365.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.600.000	62.110.000	27.365.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	239.350.000	229.895.000	232.441.470		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	121.500.000	121.500.000	121.500.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	117.850.000	108.395.000	110.941.470		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	498.777.916	498.777.916	332.007.916		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 Unit	50 Unit	50 Unit	274.521.516	274.521.516	274.521.516		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								SEMARANG SELATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	73.000.000	73.000.000	27.400.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	59.856.400	59.856.400	14.856.400		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	91.400.000	91.400.000	15.230.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.866.500.000	3.395.367.000	3.293.638.370		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	142.100.000	479.600.000	406.400.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	142.100.000	479.600.000	406.400.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Presentase Penyelenggaraan Urusan	100 persen	100 persen	100 persen	1.735.300.000	1.926.667.000	1.906.838.370		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								SEMARANG SELATAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.135.300.000	1.096.667.000	1.128.930.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN BARUSARI
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN BULUSTALAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN LAMPER TENGAH
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN LAMPER KIDUL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	77.000.000		KELURAHAN LAMPERLOR
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN PETERONGAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN MUGASSARI
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN RANDUSARI
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	78.000.000		KELURAHAN PLEBURAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	83.000.000	76.908.370		KELURAHAN WONODRI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100 persen	989.100.000	989.100.000	980.400.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	989.100.000	989.100.000	980.400.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	22.290.100.000	22.141.533.300	22.124.217.706		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	11.945.500.000	11.800.533.300	11.783.217.706		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	172.000.000	172.000.000	172.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.275.000.000	1.175.000.000	1.175.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BARUSARI
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BULUSTALAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN LAMPER KIDUL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kelurahan yang Terbangun								
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN LAMPER LOR
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN LAMPER TENGAH
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN MUGASSARI
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PETERONGAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PLEBURAN
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN RANDUSARI
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN WONODRI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	498.500.000	453.533.300	436.217.706		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BARUSARI
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BULUSTALAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN LAMPER KIDUL
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN LAMPER LOR
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN LAMPER TENGAH
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PETERONGAN
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MUGASSARI
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PLEBURAN
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN RANDUSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN WONODRI
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	10.344.600.000	10.341.000.000	10.341.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	916.400.000	916.400.000	916.400.000		KELURAHAN BARUSARI
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	669.800.000	669.800.000	669.800.000		KELURAHAN BULUSTALAN
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	849.800.000		KELURAHAN LAMPER KIDUL
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	830.000.000	830.000.000	830.000.000		KELURAHAN LAMPER LOR
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.092.200.000	1.092.200.000	1.092.200.000		KELURAHAN LAMPER TENGAH
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.134.800.000	1.134.800.000		KELURAHAN MUGASSARI
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.045.400.000	1.045.400.000	1.045.400.000		KELURAHAN PETERONGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	977.600.000	977.600.000	977.600.000		KELURAHAN PLEBURAN
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.041.200.000	1.041.200.000	1.041.200.000		KELURAHAN RANDUSARI
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.619.600.000	1.619.600.000		KELURAHAN WONODRI
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.800.000	37.200.000	37.200.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	110.000.000	105.000.000	105.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	42 angka	42 angka	42 angka	110.000.000	105.000.000	105.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	110.000.000	105.000.000	105.000.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	95 Persen	95 Persen	95 Persen	101.800.000	101.800.000	101.800.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	101.800.000	101.800.000	101.800.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	60 Orang	101.800.000	101.800.000	101.800.000		KECAMATAN SEMARANG SELATAN
37	KECAMATAN SEMARANG UTARA							46.854.246.693	47.158.961.893	47.890.769.658		
	KECAMATAN							46.854.246.693	47.158.961.893	47.890.769.658		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.390.191.093	13.347.456.293	14.201.520.931		KECAMATAN SEMARANG UTARA
				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	62.931.400	62.931.400	60.503.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	35.463.900	35.463.900	35.463.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.537.900	2.537.900	2.537.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	463.900	463.900	0		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.537.900	2.537.900	1.037.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	463.900	463.900	0		KECAMATAN SEMARANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.463.900	21.463.900	21.463.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	12.192.747.400	12.335.462.600	13.309.976.500		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	11.648.540.000	11.791.255.200	12.748.050.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	539.560.000	539.560.000	558.800.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.537.900	1.537.900	1.537.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.145.600	2.145.600	1.588.600		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	963.900	963.900	0		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi	100 persen	100 persen	100 persen	583.690.000	398.240.000	369.101.860		KECAMATAN SEMARANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				umum - Kec. Semarang Utara								
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	8.000.000	8.000.000	7.572.320		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	430.000.000	244.550.000	238.243.040		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	30.000.000	30.000.000	25.792.500		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	3.824.000	3.824.000	3.824.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	58.000.000	58.000.000	53.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	33.866.000	33.866.000	32.620.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	20.000.000	8.050.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	186.000.000	186.000.000	186.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	186.000.000	186.000.000	186.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								SEMARANG UTARA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara	100 persen	100 persen	100 persen	364.822.293	364.822.293	275.938.971		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	113.210.000	113.210.000	113.210.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	14 Unit	123.781.800	123.781.800	87.940.900		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	26 Unit	67.280.493	67.280.493	58.482.469		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	60.550.000	60.550.000	16.305.602		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.299.030.600	3.736.972.000	3.640.208.127		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan	65 Angka	65 Angka	65 Angka	35.495.000	365.495.000	358.695.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kelurahan - Kec. Semarang Utara								
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	35.495.000	365.495.000	358.695.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.263.535.600	3.371.477.000	3.281.513.127		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	58.235.735		KELURAHAN BANDARHARJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2.803.535.600	2.749.477.000	2.715.396.820		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	69.000.000	64.275.100		KELURAHAN BULULOR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.000.000	71.000.000	68.731.820		KELURAHAN KUNINGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	66.000.000	54.025.288		KELURAHAN DADAPSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	43.000.000	61.000.000	56.484.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.000.000	76.000.000	73.215.390		KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.000.000	64.000.000	58.334.634		KELURAHAN PLOMBOKAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	46.000.000	64.000.000	59.846.650		KELURAHAN PURWOSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	78.000.000	72.967.690		KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								TANJUNGMAS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	29.906.400.000	29.886.508.600	29.873.234.200		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara	321 Kegiatan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	15.920.000.000	15.900.108.600	15.888.476.780		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	62.920.560	62.920.560	62.920.560		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit	23 Unit	2.663.000.000	2.663.000.000	2.663.000.000		KELURAHAN BANDARHARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.384.000.000	1.384.000.000	1.384.000.000		KELURAHAN BULULOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.152.000.000	1.152.000.000	1.152.000.000		KELURAHAN DADAPSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.456.000.000	1.456.000.000	1.456.000.000		KELURAHAN KUNINGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.304.000.000	1.304.000.000	1.304.000.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.187.000.000	1.187.000.000	1.187.000.000		KELURAHAN PLOMBOKAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.035.000.000	1.035.000.000	1.035.000.000		KELURAHAN PURWOSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	27 Unit	27 Unit	27 Unit	2.839.000.000	2.839.000.000	2.839.000.000		KELURAHAN TANJUNG MAS
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	312.079.440	292.188.040	280.556.220		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BANDARHARJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BULULOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN DADAPSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KUNINGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PLOMBOKAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PURWOSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TANJUNG MAS
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	13.986.400.000	13.986.400.000	13.984.757.420		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.959.800.000	1.959.800.000	1.959.800.000		KELURAHAN BANDARHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.557.200.000	1.557.200.000	1.557.200.000		KELURAHAN BULULOR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.241.000.000	1.241.000.000	1.241.000.000		KELURAHAN DADAPSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1.693.400.000	1.693.400.000	1.693.400.000		KELURAHAN KUNINGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	655.400.000	655.400.000	655.400.000		KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.318.600.000	2.318.600.000	2.318.600.000		KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	990.200.000	990.200.000	990.200.000		KELURAHAN PLOMBOKAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	974.600.000	966.800.000		KELURAHAN PURWOSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.451.800.000	2.451.800.000	2.451.800.000		KELURAHAN TANJUNG MAS
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	17.400.000	17.400.000	23.557.420		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	155.000.000	106.975.000	96.506.400		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan	35 Angka	35 Angka	35 Angka	155.000.000	106.975.000	96.506.400		KECAMATAN SEMARANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	155.000.000	106.975.000	96.506.400		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	103.625.000	81.050.000	79.300.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara	10 Angka	10 Angka	10 Angka	103.625.000	81.050.000	79.300.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	480 Orang	480 Orang	480 Orang	103.625.000	81.050.000	79.300.000		KECAMATAN SEMARANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
38	KECAMATAN SEMARANG BARAT							62.176.378.028	62.535.735.628	63.644.493.254		
	KECAMATAN							62.176.378.028	62.535.735.628	63.644.493.254		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	19.992.654.352	19.877.331.752	20.974.825.871		KECAMATAN SEMARANG BARAT
				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	63.093.104	63.093.104	63.093.104		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30.495.404	30.495.404	30.495.404		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.599.900	1.599.900	1.599.900		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.700	1.976.700	1.976.700		KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.841.700	1.841.700	1.841.700		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.700	1.976.700	1.976.700		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.599.900	1.599.900	1.599.900		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	23.602.800	23.602.800	23.602.800		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 dokumen	4.00 dokumen	4.00 dokumen	17.995.696.000	18.067.053.600	19.166.671.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	98 Orang/bulan	17.129.282.000	17.200.639.600	18.411.177.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	857.000.000	857.000.000	746.080.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN								SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.121.400	1.121.400	1.121.400		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.171.200	7.171.200	7.171.200		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.121.400	1.121.400	1.121.400		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 bulan	12.00 bulan	12.00 bulan	479.895.513	448.199.379	424.119.734		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	26.096.700	10.960.340	10.960.340		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	35.215.230	16.814.000	16.814.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	62.766.130	62.766.130	57.133.370		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	35.946.674	37.788.130	34.413.245		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86.550.950	86.550.950	86.550.950		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	107.525.620	107.525.620	92.453.620		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.794.209	125.794.209	125.794.209		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	369.323.344	292.974.278	313.385.192		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	165.570.650	89.221.584	89.221.584		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	203.752.694	203.752.694	224.163.608		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	272.594.310	272.594.310	274.139.760		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	246.804.000	246.804.000	246.804.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan Listrik yang Disediakan								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.790.310	25.790.310	27.335.760		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	812.052.081	733.417.081	733.417.081		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit	58 Unit	562.243.340	562.243.340	562.243.340		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	146.635.270	68.000.270	68.000.270		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	76.409.961	76.409.961	76.409.961		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	26.763.510	26.763.510	26.763.510		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	4.245.657.406	4.825.337.606	4.836.601.113		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				berbasiskan teknologi informasi (SPBE)								
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 angka	2.00 angka	2.00 angka	2.863.503.370	2.817.683.570	2.892.135.077		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.863.503.370	2.817.683.570	2.892.135.077		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.361.537.866	1.649.537.866	1.586.349.866		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	321.537.866	321.537.866	321.537.866		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	75.000.000		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	79.000.000		KELURAHAN BONGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN CABEAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN GISIKDRONO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN KARANGAYU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN KRAPYAK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN KEMBANG ARUM
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN MANYARAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN KROBOKAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.000.000		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	79.812.000		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	77.000.000		KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								TAWANGMAS
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	77.000.000		KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	77.000.000		KELURAHAN TAWANGSARI
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	20.616.170	358.116.170	358.116.170		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	20.616.170	358.116.170	358.116.170		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	37.849.776.170	37.744.776.170	37.744.776.170		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	18.607.376.170	18.502.376.170	18.502.376.170		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	83.376.170	83.376.170	83.376.170		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BONGSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN CABEAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.191.000.000	1.191.000.000	1.191.000.000		KELURAHAN GISIKDRONO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	999.000.000	999.000.000	999.000.000		KELURAHAN KARANGAYU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000		KELURAHAN KEMBARARUM
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KRAPYAK
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.170.000.000	1.170.000.000	1.170.000.000		KELURAHAN KROBOKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kelurahan yang Terbangun								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.029.000.000	1.029.000.000	1.029.000.000		KELURAHAN MANYARAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	994.000.000	994.000.000	994.000.000		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000		KELURAHAN TAWANGMAS
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN TAWANGSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	410.000.000	305.000.000	305.000.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BONGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN CABEAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GISIKDRONO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGAYU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KEMBANGARUM
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KRAPYAK
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KROBOKAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MANYARAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TAWANGMAS
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TAWANGSARI
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	17.00 Dokumen	19.242.400.000	19.242.400.000	19.242.400.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.190.000.000	1.190.000.000	1.190.000.000		KELURAHAN BOJONGSALAMAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.252.400.000	1.252.400.000	1.252.400.000		KELURAHAN BONGSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	556.400.000	556.400.000	556.400.000		KELURAHAN CABEAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.002.400.000	2.002.400.000	2.002.400.000		KELURAHAN GISIKDRONO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	783.200.000	783.200.000	783.200.000		KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	974.600.000	974.600.000	974.600.000		KELURAHAN KALIBANTENG KULON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	912.200.000	912.200.000	912.200.000		KELURAHAN KARANGAYU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.022.200.000	2.022.200.000	2.022.200.000		KELURAHAN KEMBANGARUM
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.034.000.000	1.034.000.000	1.034.000.000		KELURAHAN KRAPYAK
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.784.000.000	1.784.000.000	1.784.000.000		KELURAHAN KROBOKAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.880.600.000	1.880.600.000	1.880.600.000		KELURAHAN MANYARAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.263.800.000	1.263.800.000	1.263.800.000		KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	740.600.000	740.600.000	740.600.000		KELURAHAN SALAMAN MLOYO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	603.200.000	603.200.000	603.200.000		KELURAHAN TAMBAKHARJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.059.800.000	1.059.800.000	1.059.800.000		KELURAHAN TAWANGMAS
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.016.000.000	1.016.000.000	1.016.000.000		KELURAHAN TAWANGSARI
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	14.041.500	14.041.500	14.041.500		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	95.00 persen	95.00 persen	95.00 persen	14.041.500	14.041.500	14.041.500		KECAMATAN SEMARANG BARAT
				Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan	15.00 Angka	15.00 Angka	15.00 Angka					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	14.041.500	14.041.500	14.041.500		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	74.248.600	74.248.600	74.248.600		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 angka	5.00 angka	5.00 angka	74.248.600	74.248.600	74.248.600		KECAMATAN SEMARANG BARAT
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	20 Orang	20 Orang	20 Orang	74.248.600	74.248.600	74.248.600		KECAMATAN SEMARANG BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
39	KECAMATAN SEMARANG TIMUR							42.960.604.175	43.283.319.375	43.179.097.428		
	KECAMATAN							42.960.604.175	43.283.319.375	43.179.097.428		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	15.175.543.481	15.035.565.952	15.127.925.516		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD(Kec.Semarang Timur)	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur)	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Smg Timur	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	74.164.500	74.164.500	58.321.100		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
				Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31.565.700	31.565.700	29.615.700		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.544.500	4.544.500	3.127.700		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.544.500	4.544.500	1.627.700		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.544.500	4.544.500	1.020.500		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.544.500	4.544.500	818.100		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.447.900	1.447.900	383.300		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.972.900	22.972.900	21.728.100		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec.Smg Timur	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	13.160.027.400	13.302.742.600	13.700.243.600		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	12.626.334.000	12.769.049.200	13.173.075.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.560.000	528.560.000	526.160.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.186.000	3.186.000	561.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.086.200	1.086.200	336.200		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	861.200	861.200	111.400		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	777.164.428	703.171.862	699.285.531		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.750.840	8.750.840	8.750.840		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Bangunan Kantor yang Disediakan								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	157.479.505	136.933.246	132.059.287		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	45.688.590	35.029.590	35.029.590		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	16.985.170	16.985.170	17.002.864		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.665.000	24.665.000	13.165.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	274.210.000	250.631.000	172.868.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	249.385.323	230.177.016	320.409.950		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	36.136.400	55.580.320	89.231.836		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	36.136.400	55.580.320	89.231.836		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	525.372.419	297.228.336	259.707.346		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				kantor - Kec. Smg Timur								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	269.599.756	169.599.756	169.599.756		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	255.772.663	127.628.580	90.107.590		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	602.678.334	602.678.334	321.136.103		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	26 Unit	175.941.000	175.941.000	165.276.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	108.040.000	108.040.000	40.325.359		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	11 Unit	213.771.470	213.771.470	10.608.880		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	3 Unit	3 Unit	104.925.864	104.925.864	104.925.864		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dipelihara/Direhabilitasi								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93.00 Persen	93.00 Persen	93.00 Persen	3.166.742.614	3.627.735.343	3.456.912.962		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	67.846.980	405.177.967	393.917.257		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	67.846.980	405.177.967	393.917.257		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	2.134.173.104	2.257.834.846	2.131.047.901		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.407.173.104	1.350.834.846	1.324.047.901		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	82.000.000		KELURAHAN BUGANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	89.000.000	79.000.000		KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	76.000.000		KELURAHAN KARANGTURI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	76.000.000		KELURAHAN KEBONAGUNG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	84.000.000		KELURAHAN KEMIJEN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	78.000.000		KELURAHAN MLATIHARJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	82.000.000		KELURAHAN MLATIBARU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	78.000.000		KELURAHAN REJOMULYO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.000.000	102.000.000	92.000.000		KELURAHAN REJOSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	80.000.000		KELURAHAN SARIREJO
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	964.722.530	964.722.530	931.947.804		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	964.722.530	964.722.530	931.947.804		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99.00 Persen	99.00 Persen	99.00 Persen	24.475.968.080	24.477.668.080	24.451.208.950		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00 kegiatan	327.00 kegiatan	327.00 kegiatan	12.772.768.080	12.774.468.080	12.761.733.650		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga Kemasyarakatan	94 Lembaga Kemasyarakatan	94 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000	65.000.000	65.000.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.160.100.000	1.160.100.000	1.160.100.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BUGANGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KARANGTURI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KEBONAGUNG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.675.000.000	1.675.000.000	1.675.000.000		KELURAHAN KEMIJEN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN MLATIBARU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN MLATI HARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN REJOMULYO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.433.000.000	1.433.000.000	1.433.000.000		KELURAHAN REJOSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SARIREJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	339.668.080	341.368.080	328.633.650		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BUGANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGTEMPEL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGTURI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KEBONAGUNG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KEMIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MLATIBARU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MLATIHARJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN REJOMULYO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN REJOSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SARIREJO
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	11.703.200.000	11.703.200.000	11.689.475.300		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.319.000.000	1.319.000.000	1.319.000.000		KELURAHAN BUGANGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	813.200.000	813.200.000	813.200.000		KELURAHAN KARANGTEMPHEL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	627.200.000	627.200.000		KELURAHAN KARANGTURI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	615.800.000	615.800.000	615.800.000		KELURAHAN KEBONAGUNG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.619.600.000	1.619.600.000	1.619.600.000		KELURAHAN KEMIJEN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.283.600.000	1.283.600.000	1.283.600.000		KELURAHAN MLATIBARU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	869.600.000	869.600.000	869.600.000		KELURAHAN MLATIHARJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	885.200.000	885.200.000	885.200.000		KELURAHAN REJOMULYO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.443.400.000	2.443.400.000	2.443.400.000		KELURAHAN REJOSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.049.600.000	1.049.600.000	1.049.600.000		KELURAHAN SARIREJO
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	36.275.300		KECAMATAN SEMARANGTIMUR
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.00 Persen	20.00 Persen	20.00 Persen	38.150.000	38.150.000	38.150.000		KECAMATAN SEMARANGTIMUR
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan	30.00 angka	30.00 angka	30.00 angka	38.150.000	38.150.000	38.150.000		KECAMATAN SEMARANGTIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				ketertiban umum yang ditangani								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	38.150.000	38.150.000	38.150.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95.00 Persen	95.00 Persen	95.00 Persen	104.200.000	104.200.000	104.900.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	104.200.000	104.200.000	104.900.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	104.200.000	104.200.000	104.900.000		KECAMATAN SEMARANG TIMUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
40	KECAMATAN SEMARANG TENGAH							51.037.006.039	51.307.006.039	52.593.266.244		
	KECAMATAN							51.037.006.039	51.307.006.039	52.593.266.244		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	20.034.463.837	20.034.463.837	21.395.601.337		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD-Kec Smg Tgh	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah)	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	93.034.400	93.034.400	89.528.300		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	35.377.400	35.377.400	35.377.400		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.142.900	5.142.900	5.046.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.142.900	5.142.900	5.142.900		KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.573.900	3.573.900	2.647.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.573.900	3.573.900	2.679.900		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.990.100	15.990.100	14.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24.233.300	24.233.300	24.233.300		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	19.013.761.600	19.013.761.600	20.403.240.600		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	18.270.221.000	18.270.221.000	19.659.700.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	734.170.000	734.170.000	734.170.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN								SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.598.600	3.598.600	3.598.600		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4.498.200	4.498.200	4.498.200		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.273.800	1.273.800	1.273.800		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	229.950.417	229.950.417	203.654.995		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.500.000	7.500.000	7.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	16.450.417	16.450.417	16.450.417		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket	45 Paket	30.000.000	30.000.000	28.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	12.500.000	12.500.000	12.654.578		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	103.750.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	43.500.000	43.500.000	35.300.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	270.000.000	270.000.000	271.460.022		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000	130.000.000	131.460.022		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	427.717.420	427.717.420	427.717.420		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	323.328.700	323.328.700	323.328.700		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dipelihara/Direhabilitasi								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	79.388.720	79.388.720	79.388.720		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.689.542.202	3.924.518.617	3.863.966.322		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0 Persen	0 Persen	0 Persen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.556.063.236	2.826.063.236	2.774.819.576		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.506.063.236	1.506.063.236	1.507.319.576		KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN GABAHAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN BANGUNHARJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN JAGALAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN KAUMAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN KEMBANGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN KARANGKIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN KRANGGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN PANDANSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN MIROTO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN PEKUNDEN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN SEKAYU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	88.000.000	84.500.000		KELURAHAN PURWODINATAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.113.478.966	1.078.455.381	1.069.146.746		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.113.478.966	1.078.455.381	1.069.146.746		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	27.197.000.000	27.232.023.585	27.217.698.585		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	827 kegiatan	827 kegiatan	27.055.000.000	27.070.880.727	27.056.555.727		KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
												SEMARANG TENGAH
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	58.000.000	58.000.000	43.675.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.042.000.000	1.042.000.000	1.042.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN BANGUNH ARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN GABAHAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN JAGALAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN KAUMAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN KRANGGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN KEMBANGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	952.000.000	952.000.000	952.000.000		KELURAHAN MIROTO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN PEKUNDEN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN PANDANSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN PURWODINATAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	951.000.000	951.000.000	951.000.000		KELURAHAN SEKAYU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	400.000.000	415.880.727	415.880.727		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	606.400.000	606.400.000	606.400.000		KELURAHAN BANGUNHARJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	789.400.000	789.400.000	789.400.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	982.000.000	982.000.000	982.000.000		KELURAHAN GABAHAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	931.000.000	931.000.000	931.000.000		KELURAHAN JAGALAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	673.000.000	673.000.000	673.000.000		KELURAHAN KARANGKIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	512.800.000	512.800.000	512.800.000		KELURAHAN KAUMAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	766.600.000	766.600.000	766.600.000		KELURAHAN KEMBANGSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	711.400.000	711.400.000	711.400.000		KELURAHAN KRANGGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	907.000.000	907.000.000	907.000.000		KELURAHAN MIROTO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	579.400.000	579.400.000	579.400.000		KELURAHAN PANDANSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	786.400.00	786.400.000	786.400.00		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	762.400.00	762.400.000	762.400.00		KELURAHAN PEKUNDEN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	950.800.00	950.800.000	950.800.00		KELURAHAN PENDRIKAN LOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	524.200.00	524.200.000	524.200.00		KELURAHAN SEKAYU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	806.200.00	806.200.000	806.200.00		KELURAHAN PURWODINATAN
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	142.000.00	161.142.858	161.142.858		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.00	127.000.000	127.000.00		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	34.142.858	34.142.858		KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	14 Persen	14 Persen	14 Persen	33.600.000	33.600.000	33.600.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	30 angka	30 angka	30 angka	33.600.000	33.600.000	33.600.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	33.600.000	33.600.000	33.600.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Persen	40 Persen	40 Persen	82.400.000	82.400.000	82.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	82.400.000	82.400.000	82.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Organisasi Kepemudaan								
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 Orang	45 Orang	45 Orang	82.400.000	82.400.000	82.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH
41	KECAMATAN GUNUNG PATI							58.804.687.370	59.164.044.970	59.780.885.846		
	KECAMATAN							58.804.687.370	59.164.044.970	59.780.885.846		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	23.739.685.114	23.552.168.615	24.567.767.193		KECAMATAN GUNUNG PATI
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	62.805.700	59.933.600	56.931.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
				dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	29.940.800	29.808.800	28.789.200		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	1.518.000	1.265.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	1.788.000	1.490.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.036.000	3.036.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.020.500	894.000	894.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	337.200	172.400		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	22.667.100	22.551.600	21.284.400		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen	20.269.667.800	20.329.891.200	21.228.660.800		KECAMATAN GUNUNG PATI
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	19.449.922.000	19.521.279.600	20.421.874.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	818.400.000	807.600.000	806.000.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	337.200	337.200		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	337.200	224.800		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	448.600	337.200	224.800		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.054.686.574	1.854.818.775	1.842.790.463		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	15.759.370		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	826.047.055	688.159.137	688.159.137		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	57.000.000	57.000.000	45.544.767		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	21.345.028	21.345.028	17.585.219		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000	15.000.000	12.000.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.986.000	120.286.000	104.772.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	977.308.491	933.028.610	958.969.970		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Tersedianya peralatan dan	100 persen	100 persen	100 persen	117.208.680	117.208.680	117.208.680		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	perlengkapan kantor								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	117.208.680	117.208.680	117.208.680		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	226.635.360	226.635.360	217.230.250		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	109.735.360	109.735.360	155.867.160		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	116.900.000	116.900.000	61.363.090		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100 persen	1.008.681.000	963.681.000	1.104.946.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	38 Unit	218.601.000	218.601.000	215.046.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	471.600.000	471.600.000	619.100.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	2 Unit	90.000.000	45.000.000	45.000.000		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dipelihara/Direhabilitasi								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	228.480.000	228.480.000	225.800.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	4.321.397.256	4.874.816.795	4.515.301.982		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	73.400.000	407.397.089	385.065.600		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	73.400.000	407.397.089	385.065.600		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	2.525.186.886	2.798.295.986	2.667.979.798		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.396.186.886	1.381.295.986	1.344.619.228		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	80.420.000		KELURAHAN CEPOKO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	81.630.000		KELURAHAN KALISEGORO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.000.000	86.000.000	80.256.000		KELURAHAN JATIREJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.000.000	91.000.000	84.191.200		KELURAHAN GUNUNGPATI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.000.000		KELURAHAN MANGUNSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	83.230.000		KELURAHAN KANDRI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	80.250.000		KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	80.000.000		KELURAHAN NGIJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.813.000		KELURAHAN PATEMON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.893.000		KELURAHAN PAKINTELAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	82.000.000		KELURAHAN PLALANGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	85.925.000		KELURAHAN SADENG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	89.000.000	82.600.000		KELURAHAN SEKARAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	82.140.000		KELURAHAN PONGANGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	98.000.000	91.500.000		KELURAHAN SUKOREJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	81.512.370		KELURAHAN SUMURREJO
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 persen	100 persen	100 persen	1.722.810.370	1.669.123.720	1.462.256.584		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.722.810.370	1.669.123.720	1.462.256.584		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	30.586.330.000	30.579.784.560	30.558.766.671		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	150 kegiatan	150 kegiatan	150 kegiatan	18.234.930.000	18.228.384.560	18.207.366.671		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyar akatan	206.400.000	199.854.560	178.866.821		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.211.130.000	1.211.130.000	1.211.130.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN CEPOKO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	971.000.000	971.000.000	971.000.000		KELURAHAN GUNUNGPATI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN JATIREJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KALISEGORO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KANDRI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN MANGUNSAARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN NGIJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN NONGKOSAWIT
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PAKINTELAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PATEMON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PLALANGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.145.000.000	1.145.000.000	1.145.000.000		KELURAHAN PONGANGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SADENG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SEKARAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.228.000.000	1.228.000.000	1.228.000.000		KELURAHAN SUKOREJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SUMURREJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	323.400.000	323.400.000	323.369.850		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN CEPOKO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GUNUNGPATI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JATIREJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALISEGORO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KANDRI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MANGUNSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN NGIJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN NONGKOSAWIT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PAKINTELAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PATEMON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PLALANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PONGANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SADENG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SEKARAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SUKOREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SUMURREJO
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12.351.400.000	12.351.400.000	12.351.400.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	440.000.000	440.000.000	440.000.000		KELURAHAN CEPOKO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.015.400.000	1.015.400.000	1.015.400.000		KELURAHAN GUNUNGPATI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	404.600.000	404.600.000	404.600.000		KELURAHAN JATIREJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	573.200.000	573.200.000	573.200.000		KELURAHAN KALISEGORO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	591.800.000	591.800.000	591.800.000		KELURAHAN KANDRI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	682.400.000	682.400.000	682.400.000		KELURAHAN MANGUNSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	585.800.000	585.800.000	585.800.000		KELURAHAN NGIJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	627.200.000	627.200.000	627.200.000		KELURAHAN NONGKOSAWIT

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	635.600.000	635.600.000	635.600.000		KELURAHAN PAKINTELAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	858.200.000	858.200.000	858.200.000		KELURAHAN PATEMON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	537.800.000	537.800.000	537.800.000		KELURAHAN PLALANGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	651.200.000	651.200.000	651.200.000		KELURAHAN PONGANGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.127.600.000	1.127.600.000		KELURAHAN SADENG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	792.800.000	792.800.000	792.800.000		KELURAHAN SEKARAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.706.000.000	1.706.000.000	1.706.000.000		KELURAHAN SUKOREJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	744.800.000	744.800.000	744.800.000		KELURAHAN SUMURREJO
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	38.025.000	38.025.000	38.025.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan	4 angka	4 angka	4 angka	38.025.000	38.025.000	38.025.000		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				ketertiban umum yang ditangani								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	38.025.000	38.025.000	38.025.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	119.250.000	119.250.000	101.025.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	119.250.000	119.250.000	101.025.000		KECAMATAN GUNUNG PATI
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	119.250.000	119.250.000	101.025.000		KECAMATAN GUNUNG PATI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
42	KECAMATAN TUGU							32.370.394.980	32.567.752.580	32.971.968.356		
	KECAMATAN							32.370.394.980	32.567.752.580	32.971.968.356		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.842.262.980	11.781.055.737	12.346.852.001		KECAMATAN TUGU
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan - Kec. Tugu	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	53.343.800	53.343.800	53.343.800		KECAMATAN TUGU
				Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Tugu	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	29.536.400	29.536.400	29.536.400		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	383.300	383.300	383.300		KECAMATAN TUGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dokumen RKA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	413.300	413.300	413.300		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	383.300	383.300	383.300		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	413.300	413.300	413.300		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	447.600	447.600	447.600		KECAMATAN TUGU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.766.600	21.766.600	21.766.600		KECAMATAN TUGU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9.293.296.400	9.364.654.000	9.922.530.400		KECAMATAN TUGU
				Persentase Administrasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Keuangan SKPD - Kec. Tugu								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.938.565.000	9.009.922.600	9.567.799.000		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	354.060.000	354.060.000	354.060.000		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN TUGU
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN TUGU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.295.327.360	1.295.327.360	1.272.175.458		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10.446.950	10.446.950	10.446.950		KECAMATAN TUGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	238.422.000	238.422.000	156.895.098		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	115.459.410	115.459.410	115.459.410		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	21.141.000	21.141.000	21.141.000		KECAMATAN TUGU
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	134.332.000	134.332.000	179.332.000		KECAMATAN TUGU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	69.000.000	69.000.000	82.375.000		KECAMATAN TUGU
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	706.526.000	706.526.000	706.526.000		KECAMATAN TUGU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	470.690.000	338.125.157	367.651.473		KECAMATAN TUGU
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	470.690.000	338.125.157	367.651.473		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	330.485.800	330.485.800	332.031.250		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	234.000.000	234.000.000	234.000.000		KECAMATAN TUGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan Listrik yang Disediakan								
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	96.485.800	96.485.800	98.031.250		KECAMATAN TUGU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	399.119.620	399.119.620	399.119.620		KECAMATAN TUGU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	212.419.620	212.419.620	212.419.620		KECAMATAN TUGU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	86.700.000	86.700.000	86.700.000		KECAMATAN TUGU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KECAMATAN TUGU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KECAMATAN TUGU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.154.210.000	2.280.210.000	2.177.009.712		KECAMATAN TUGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu								
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Tugu	4 Nilai	4 Nilai	4 Nilai	10.500.000	10.500.000	10.500.000		KECAMATAN TUGU
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000	10.500.000	10.500.000		KECAMATAN TUGU
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.621.645.000	1.747.645.000	1.644.444.712		KECAMATAN TUGU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.096.645.000	1.096.645.000	1.097.498.692		KECAMATAN TUGU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	77.145.640		KELURAHAN JERAKAH
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000		KELURAHAN KARANGAN YAR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000		KELURAHAN MANGKANG KULON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000		KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	79.900.380		KELURAHAN MANGUNHARJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	78.000.000		KELURAHAN RANDUGARUT
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	77.900.000		KELURAHAN TUGUREJO
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100 Persen	100 Persen	100 Persen	522.065.000	522.065.000	522.065.000		KECAMATAN TUGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Tugu								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	522.065.000	522.065.000	522.065.000		KECAMATAN TUGU
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.210.681.600	18.343.246.443	18.284.866.243		KECAMATAN TUGU
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	13.718.661.000	13.851.225.843	13.792.845.643		KECAMATAN TUGU
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga Kemasyarakatan	94 Lembaga Kemasyarakatan	94 Lembaga Kemasyarakatan	59.924.000	59.924.000	59.924.000		KECAMATAN TUGU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1.299.950.000	1.299.950.000	1.299.950.000		KECAMATAN TUGU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN JERAKAH
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.648.000.000	1.648.000.000	1.648.000.000		KELURAHAN KARANGAN YAR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.921.000.000	1.921.000.000	1.921.000.000		KELURAHAN MANGKANG KULON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.742.000.000	1.742.000.000	1.742.000.000		KELURAHAN MANGKANG WETAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.085.000.000	2.085.000.000	2.085.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.576.000.000	1.576.000.000	1.576.000.000		KELURAHAN RANDUGARUT
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000		KELURAHAN TUGUREJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	640.787.000	773.351.843	714.971.643		KECAMATAN TUGU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JERAKAH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGAN YAR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MANGKANG KULON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN RANDUGAR UT
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TUGUREJO
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	4.492.020.600	4.492.020.600	4.492.020.600		KECAMATAN TUGU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	126.134.000	126.134.000	126.134.000		KECAMATAN TUGU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	462.800.000	462.800.000	462.800.000		KELURAHAN JERAKAH
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	564.800.000	564.800.000	564.800.000		KELURAHAN KARANGAN YAR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	557.600.000	557.600.000	557.600.000		KELURAHAN MANGKANG KULON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	902.000.000	902.000.000	902.000.000		KELURAHAN MANGKANG WETAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	699.200.000	699.200.000	699.200.000		KELURAHAN MANGUNHARJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	362.000.000	362.000.000	362.000.000		KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				yang Diselenggarakan								RANDUGAR UT
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	780.200.000	780.200.000	780.200.000		KELURAHAN TUGUREJO
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	37.286.600	37.286.600	37.286.600		KECAMATAN TUGU
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu	20 Persen	20 Persen	20 Persen	75.540.000	75.540.000	75.540.000		KECAMATAN TUGU
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Tugu	2 Nilai	2 Nilai	2 Nilai	75.540.000	75.540.000	75.540.000		KECAMATAN TUGU
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.540.000	75.540.000	75.540.000		KECAMATAN TUGU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	95 Persen	95 Persen	95 Persen	87.700.400	87.700.400	87.700.400		KECAMATAN TUGU

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ketahanan Nasional - Kec. Tugu								
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Tugu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	87.700.400	87.700.400	87.700.400		KECAMATAN TUGU
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	87.700.400	87.700.400	87.700.400		KECAMATAN TUGU
43	KECAMATAN MIJEN							58.338.860.881	58.733.576.081	59.182.465.649		
	KECAMATAN							58.338.860.881	58.733.576.081	59.182.465.649		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	22.347.815.281	22.179.379.081	22.857.119.985		KECAMATAN MIJEN
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
				Persentase Tersedianya	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	67.204.000	63.454.000	54.845.600		KECAMATAN MIJEN
				Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	31.471.000	30.346.000	29.606.600		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.381.000	4.006.000	1.265.000		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.056.000	4.681.000	1.490.000		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.480.000	1.105.000	506.000		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.000	970.000	596.000		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Perubahan DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	824.000	449.000	112.400		KECAMATAN MIJEN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.647.000	21.897.000	21.269.600		KECAMATAN MIJEN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	19.010.596.000	19.151.811.200	19.918.619.600		KECAMATAN MIJEN
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	18.236.540.000	18.379.255.200	19.147.410.000		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	770.760.000	770.760.000	770.760.000		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	824.000	449.000	112.400		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.648.000	898.000	224.800		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	824.000	449.000	112.400		KECAMATAN MIJEN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen	1.415.190.621	1.067.414.621	989.065.674		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.947.000	10.947.000	9.852.300		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	386.370.000	386.370.000	386.370.000		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	42.270.000	42.270.000	29.699.240		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.589.281	17.589.281	19.608.534		KECAMATAN MIJEN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32.656.000	32.656.000	26.100.000		KECAMATAN MIJEN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.151.000	129.151.000	96.789.600		KECAMATAN MIJEN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	796.207.340	448.431.340	420.646.000		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Elektronik pada SKPD								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	100 persen	235.977.999	267.794.599	256.021.500		KECAMATAN MIJEN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	235.977.999	267.794.599	256.021.500		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	100 persen	100 persen	323.356.661	323.356.661	339.920.541		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	193.623.900	193.623.900	187.474.681		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.732.761	129.732.761	152.445.860		KECAMATAN MIJEN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	1.295.490.000	1.305.548.000	1.298.647.070		KECAMATAN MIJEN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	34 Unit	173.710.000	183.768.000	183.768.000		KECAMATAN MIJEN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	62.410.000	62.410.000	56.849.070		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.000.102.000	1.000.102.000	1.000.102.000		KECAMATAN MIJEN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	59.268.000	59.268.000	57.928.000		KECAMATAN MIJEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.773.745.600	4.214.169.728	3.998.318.392		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	191.478.000	231.841.636	207.041.636		KECAMATAN MIJEN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	191.478.000	231.841.636	207.041.636		KECAMATAN MIJEN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	2.280.737.600	2.619.434.456	2.491.615.166		KECAMATAN MIJEN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.322.437.600	1.409.134.456	1.373.107.106		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.800.000	88.800.000	83.369.560		KELURAHAN CANGKIRAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.600.000	84.600.000	82.456.880		KELURAHAN BUBAKAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.200.000	97.200.000	77.200.000		KELURAHAN JATISARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.000.000	87.000.000	84.184.269		KELURAHAN JATIBARANG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68.800.000	86.800.000	83.949.536		KELURAHAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	64.900.000	82.900.000	79.915.701		KELURAHAN KARANGMALANG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.100.000	85.100.000	82.137.883		KELURAHAN KEDUNGPA NE
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.300.000	85.300.000	67.300.000		KELURAHAN PESANTREN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.500.000	85.500.000	79.997.863		KELURAHAN NGADIRGO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.700.000	83.700.000	81.690.780		KELURAHAN TAMBANGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66.400.000	84.400.000	81.971.011		KELURAHAN PURWOSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63.900.000	81.900.000	63.254.600		KELURAHAN POLAMAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.200.000	93.200.000	90.042.038		KELURAHAN WONOLOPO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.900.000	83.900.000	81.037.939		KELURAHAN WONOPLUMBON
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen	100 persen	1.301.530.000	1.362.893.636	1.299.661.590		KECAMATAN MIJEN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.301.530.000	1.362.893.636	1.299.661.590		KECAMATAN MIJEN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	32.075.800.000	32.137.163.636	32.137.163.636		KECAMATAN MIJEN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502 kegiatan	502 kegiatan	502 kegiatan	20.301.000.000	20.301.000.000	20.301.000.000		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KECAMATAN MIJEN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000		KECAMATAN MIJEN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BUBAKAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN CANGKIRAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.943.000.000	1.943.000.000	1.943.000.000		KELURAHAN JATIBARANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN JATISARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.375.000.000	1.375.000.000	1.375.000.000		KELURAHAN KARANGMALANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KEDUNGPA NE
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN MIJEN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.415.000.000	1.415.000.000	1.415.000.000		KELURAHAN NGADIRGO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PESANTREN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.153.000.000	1.153.000.000	1.153.000.000		KELURAHAN POLAMAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000		KELURAHAN PURWOSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.654.000.000	1.654.000.000	1.654.000.000		KELURAHAN TAMBANGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.908.000.000	1.908.000.000	1.908.000.000		KELURAHAN WONOLOPO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.535.000.000	1.535.000.000	1.535.000.000		KELURAHAN WONOPLUMBON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	225.000.000	225.000.000	225.000.000		KECAMATAN MIJEN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BUBAKAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN CANGKIRAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JATIBARANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JATISARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGMALANG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KEDUNGPA NE
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MIJEN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN NGADIRGO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PESANTREN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN POLAMAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PURWOSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TAMBANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN WONOLOPO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN WONOPLUMBON
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	11.774.800.000	11.836.163.636	11.836.163.636		KECAMATAN MIJEN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	188.363.636	188.363.636		KECAMATAN MIJEN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	549.200.000	549.200.000	549.200.000		KELURAHAN BUBAKAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	889.400.000	889.400.000	889.400.000		KELURAHAN CANGKIRAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	459.800.000	459.800.000	459.800.000		KELURAHAN JATIBARANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.120.000.000	2.120.000.000	2.120.000.000		KELURAHAN JATISARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	378.800.000	378.800.000	378.800.000		KELURAHAN KARANGMALANG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	896.600.000	896.600.000	896.600.000		KELURAHAN KEDUNGPA NE
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	991.400.000	991.400.000	991.400.000		KELURAHAN MIJEN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.008.200.000	1.008.200.000	1.008.200.000		KELURAHAN NGADIRGO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	876.800.000	876.800.000	876.800.000		KELURAHAN PESANTREN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	306.800.000	306.800.000	306.800.000		KELURAHAN POLAMAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	533.600.000	533.600.000	533.600.000		KELURAHAN PURWOSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	420.200.000	420.200.000	420.200.000		KELURAHAN TAMBANGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.199.600.000	1.199.600.000	1.199.600.000		KELURAHAN WONOLOPO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	607.400.000	607.400.000	607.400.000		KELURAHAN WONOPLUMBON
		Fasilitasi Pengembangan	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Laporan Fasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	410.000.000	410.000.000	410.000.000		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	49.500.000	110.863.636	110.863.636		KECAMATAN MIJEN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	72 angka	72 angka	72 angka	49.500.000	110.863.636	110.863.636		KECAMATAN MIJEN
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	49.500.000	110.863.636	110.863.636		KECAMATAN MIJEN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	92.000.000	92.000.000	79.000.000		KECAMATAN MIJEN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	92.000.000	92.000.000	79.000.000		KECAMATAN MIJEN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	92.000.000	92.000.000	79.000.000		KECAMATAN MIJEN
44	KECAMATAN GENUK							58.393.568.071	58.698.925.671	58.566.166.000		
	KECAMATAN							58.393.568.071	58.698.925.671	58.566.166.000		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	21.160.717.052	20.895.780.068	21.267.692.103		KECAMATAN GENUK
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	78.185.700	78.185.700	79.835.700		KECAMATAN GENUK
				Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Perangkat Daerah yang dihasilkan-Kecamatan Genuk								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	34.912.400	34.912.400	34.912.400		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.422.900	2.422.900	2.422.900		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.022.900	3.022.900	4.672.900		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.205.900	5.205.900	5.205.900		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.205.900	5.205.900	5.205.900		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.675.900	2.675.900	2.675.900		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	24.739.800	24.739.800	24.739.800		KECAMATAN GENUK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	18.555.988.400	18.627.346.000	19.036.457.400		KECAMATAN GENUK
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	17.926.611.000	17.997.968.600	18.407.080.000		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	624.120.000	624.120.000	624.120.000		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.936.200	2.936.200	2.936.200		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.797.400	1.797.400	1.797.400		KECAMATAN GENUK
		Penyusunan Pelaporan dan	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	523.800	523.800	523.800		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	100 persen	753.262.472	592.853.078	525.529.713		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	71.868.920	71.868.920	45.108.020		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	238.965.794	78.556.400	78.556.400		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	35 Paket	53.653.660	53.653.660	53.653.660		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	23.429.540	23.429.540	23.531.530		KECAMATAN GENUK
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.050.000	67.050.000	67.050.000		KECAMATAN GENUK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	131.528.000	131.528.000	90.863.545		KECAMATAN GENUK
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	166.766.558	166.766.558	166.766.558		KECAMATAN GENUK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan	100 persen	100 persen	100 persen	520.833.740	344.948.550	370.257.983		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				kantor - di Kecamatan Genuk								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	520.833.740	344.948.550	370.257.983		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	100 persen	291.967.540	291.967.540	293.427.562		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.902.700	150.902.700	152.362.722		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	141.064.840	141.064.840	141.064.840		KECAMATAN GENUK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD - di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	100 persen	960.479.200	960.479.200	962.183.745		KECAMATAN GENUK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	47 Unit	320.093.060	320.093.060	321.797.605		KECAMATAN GENUK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	182.877.000	182.877.000	182.877.000		KECAMATAN GENUK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	9 Unit	9 Unit	9 Unit	266.932.000	266.932.000	266.932.000		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Dipelihara/Direhabilitasi								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	190.577.140	190.577.140	190.577.140		KECAMATAN GENUK
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.259.461.720	3.829.756.304	3.544.107.128		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	1 angka	1 angka	1 angka	96.498.070	433.998.070	424.569.570		KECAMATAN GENUK
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	96.498.070	433.998.070	424.569.570		KECAMATAN GENUK
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	100 persen	2.144.341.210	2.377.135.794	2.100.915.118		KECAMATAN GENUK
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.169.341.210	1.168.135.794	1.121.864.239		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.000.000	97.000.000	73.000.000		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	81.000.000	99.000.000	75.236.280		KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	85.000.000		KELURAHAN GEBANGSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	76.000.000		KELURAHAN BANJARDOYO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	75.265.800		KELURAHAN KUDU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.000.000	97.000.000	77.634.903		KELURAHAN GENUKSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.000.000	102.000.000	89.702.200		KELURAHAN KARANGROTO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	67.700.000		KELURAHAN PENGGARON LOR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	96.000.000	75.277.700		KELURAHAN SEMBUNGHARJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	65.690.000		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.000.000	85.000.000	69.508.480		KELURAHAN TERBOYOKULON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.000.000	85.000.000	79.641.822		KELURAHAN TERBOYOWETAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	69.393.694		KELURAHAN TRIMULYO
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat- di Kecamatan Genuk	100 persen	100 persen	100 persen	1.018.622.440	1.018.622.440	1.018.622.440		KECAMATAN GENUK
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.018.622.440	1.018.622.440	1.018.622.440		KECAMATAN GENUK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	33.761.200.869	33.761.200.869	33.542.598.339		KECAMATAN GENUK
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk	236 kegiatan	236 kegiatan	236 kegiatan	18.482.305.144	18.482.305.144	18.263.702.614		KECAMATAN GENUK
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	127.638.515	127.638.515	127.638.515		KECAMATAN GENUK
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	1.125.000.000		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.151.000.000	1.151.000.000	1.151.000.000		KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.255.000.000	1.255.000.000	1.255.000.000		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	2.019.000.000	2.019.000.000	2.019.000.000		KELURAHAN BANJARDOWO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.092.000.000	1.092.000.000	1.092.000.000		KELURAHAN GEBANGSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.392.000.000	1.392.000.000	1.392.000.000		KELURAHAN GENUKSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.339.000.000	1.339.000.000	1.339.000.000		KELURAHAN KARANGROTO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.197.000.000	1.197.000.000	1.197.000.000		KELURAHAN KUDU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.078.000.000	1.078.000.000	1.078.000.000		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	1.058.000.000	1.058.000.000	1.058.000.000		KELURAHAN PENGGARON LOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.171.000.000	1.171.000.000	1.171.000.000		KELURAHAN SEMBUNG HARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN TERBOYO KULON

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.133.000.000	1.133.000.000	1.133.000.000		KELURAHAN TRIMULYO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	794.666.629	794.666.629	576.064.099		KECAMATAN GENUK
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BANJARDOWO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GEBANGSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GENUKSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGROTO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KUDU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PENGGARON LOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SEMBUNG HARJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TERBOYO KULON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TRIMULYO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk	11 angka	11 angka	11 angka	15.278.895.725	15.278.895.725	15.278.895.725		KECAMATAN GENUK
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyar akatan	4 Lembaga Kemasyar akatan	4 Lembaga Kemasyar akatan	117.000.000	117.000.000	117.000.000		KECAMATAN GENUK
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	2.057.600.000	2.057.600.000	2.057.600.000		KELURAHAN BANGETAYU KULON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	1.592.600.000	1.592.600.000	1.592.600.000		KELURAHAN BANGETAYU WETAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	1.214.000.000	1.214.000.000	1.214.000.000		KELURAHAN BANJARDOWO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	1.214.000.000	1.214.000.000	1.214.000.000		KELURAHAN GEBANGSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	1.663.400.000	1.663.400.000	1.663.400.000		KELURAHAN GENUKSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	2.189.600.000	2.189.600.000	2.189.600.000		KELURAHAN KARANGROTO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	1.299.200.000	1.299.200.000	1.299.200.000		KELURAHAN KUDU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembaga Kemasyar akatan	580.400.000	580.400.000	580.400.000		KELURAHAN MUKTIHARJO LOR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	838.400.000	838.400.000	838.400.000		KELURAHAN PENGGARON LOR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	1.432.400.000	1.432.400.000	1.432.400.000		KELURAHAN SEMBUNG HARJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	240.200.000	240.200.000	240.200.000		KELURAHAN TERBOYO KULON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	271.400.000	271.400.000	271.400.000		KELURAHAN TERBOYO WETAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	498.200.000	498.200.000	498.200.000		KELURAHAN TRIMULYO
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	70.495.725	70.495.725	70.495.725		KECAMATAN GENUK
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	109.662.510	109.662.510	109.242.510		KECAMATAN GENUK
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - di Kecamatan Genuk	26.5 persen	26.5 persen	26.5 persen	109.662.510	109.662.510	109.242.510		KECAMATAN GENUK
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	109.662.510	109.662.510	109.242.510		KECAMATAN GENUK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	102.525.920	102.525.920	102.525.920		KECAMATAN GENUK
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan- di Kecamatan Genuk	6 angka	6 angka	6 angka	102.525.920	102.525.920	102.525.920		KECAMATAN GENUK
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Orang	300 Orang	300 Orang	102.525.920	102.525.920	102.525.920		KECAMATAN GENUK
45	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR							33.815.043.611	34.101.758.811	34.371.340.291		

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
	KECAMATAN							33.815.04 3.611	34.101. 758.81 1	34.371.34 0.291		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	13.639.30 8.611	13.641. 517.83 9	13.885.41 2.985		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	85.050.00 0	75.477. 900	74.925.50 0		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	35.345.00 0	33.545. 000	33.206.60 0		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.770.000	3.958.4 00	3.958.400		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.780.000	5.968.0 00	5.968.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.220.000	1.206.8 00	1.206.800		KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								GAJAHMU NGKUR
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000	4.100.000	3.886.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.250.000	337.200	337.200		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	28.585.000	26.362.500	26.362.500		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	12.362.561.000	12.503.247.800	12.934.840.400		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	11.903.051.000	12.045.766.200	12.494.146.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	452.420.000	452.420.000	436.420.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.590.000	1.874.400	1.200.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.250.000	1.537.200	1.537.200		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000	1.650.000	1.537.200		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	517.590.000	443.017.802	272.489.048		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	5.925.000	5.925.000	5.925.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	126.690.000	121.174.402	29.130.242		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	60.500.000	60.500.000	58.892.600		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	14.935.000	14.935.000	14.935.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	11.000.000	11.000.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	173.040.000	173.040.000	141.317.526		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	122.500.000	56.443.400	11.288.680		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	80.070.000	43.918.526	43.918.526		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	80.070.000	43.918.526	43.918.526		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	274.400.000	256.218.200	252.309.650		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	207.300.000	207.300.000	207.300.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	67.100.000	48.918.200	45.009.650		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	319.637.611	319.637.611	306.929.861		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	165.000.000	165.000.000	165.000.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								GAJAHMU NGKUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	70.722.611	70.722.611	70.722.611		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	45.000.000	45.000.000	36.312.250		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.915.000	38.915.000	34.895.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	95 Persen	95 Persen	2.875.855.000	3.092.134.622	3.128.745.956		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	38.935.000	99.735.000	97.335.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	38.935.000	99.735.000	97.335.000		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Persentase Penyelenggaraan Urusan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.646.920.000	1.802.399.622	1.814.364.267		KECAMATAN N

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								GAJAHMU NGKUR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.067.920.000	1.079.399.622	1.091.364.267		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000		KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000		KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000		KELURAHAN BENDUNGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	98.000.000	98.000.000		KELURAHAN GAJAHMU NGKUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71.000.000	89.000.000	89.000.000		KELURAHAN KARANGREJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	90.000.000		KELURAHAN LEMPONGSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	90.000.000	90.000.000		KELURAHAN PETOMPON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	92.000.000		KELURAHAN SAMPANGAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.190.000.000	1.190.000.000	1.217.046.689		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.190.000.000	1.190.000.000	1.217.046.689		KECAMATAN GAJAHMU NGKUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	17.135.960.000	17.143.386.350	17.134.861.350		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	272 Kegiatan	9.573.760.000	9.581.186.350	9.572.661.350		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	51.040.000	44.156.350	44.156.350		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BENDANDUWUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BENDANGISOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BENDUNGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	963.000.000	963.000.000	963.000.000		KELURAHAN GAJAHMUNGGUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KARANGREJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN LEMPONGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PETOMPON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SAMPANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	459.720.000	474.030.000	465.505.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	124 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	122 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BENDUNGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	123 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	123 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GAJAHMUNGGUR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	125 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN LEMPONGSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PETOMPON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SAMPANGAN
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	7.562.200.000	7.562.200.000	7.562.200.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	678.200.000	678.200.000	678.200.000		KELURAHAN BENDAN DUWUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	674.000.000	674.000.000	674.000.000		KELURAHAN BENDAN NGISOR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	658.400.000	658.400.000		KELURAHAN BENDUNGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.669.400.000	1.669.400.000	1.669.400.000		KELURAHAN GAJAHMUNGGUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	756.200.000	756.200.000	756.200.000		KELURAHAN KARANGREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	849.800.000	849.800.000	849.800.000		KELURAHAN LEMPONGSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	814.400.000	814.400.000	814.400.000		KELURAHAN PETOMPON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.800.000	1.134.800.000	1.134.800.000		KELURAHAN SAMPANGAN
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	83.150.000	143.950.000	141.550.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	30.00 Angka	30.00 Angka	30.00 Angka	83.150.000	143.950.000	141.550.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.150.000	143.950.000	141.550.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	90 Persen	90 Persen	90 Persen	80.770.000	80.770.000	80.770.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	80.770.000	80.770.000	80.770.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	80.770.000	80.770.000	80.770.000		KECAMATAN GAJAHMUNGGUR
46	KECAMATAN TEMBALANG							65.831.788.734	66.119.146.334	66.112.960.552		
	KECAMATAN							65.831.788.734	66.119.146.334	66.112.960.552		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	19.939.835.067	19.756.926.480	20.094.636.127		KECAMATAN TEMBALANG
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokuman pelaporan - Kec Tembalang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	58.204.700	58.204.700	58.204.700		KECAMATAN TEMBALANG
				Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec Tembalang	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	29.300.000	29.300.000	29.300.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.590.100	1.590.100	1.590.100		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.234.900	2.234.900	2.234.900		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.417.700	1.417.700	1.417.700		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.100	1.830.100	1.830.100		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.600	448.600	448.600		KECAMATAN TEMBALANG
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.383.300	21.383.300	21.383.300		KECAMATAN TEMBALANG
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD - Kec Tembalang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	15.842.264.600	15.913.622.200	16.614.608.600		KECAMATAN TEMBALANG
				Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec Tembalang	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	15.226.656.000	15.298.013.600	16.000.900.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	614.600.000	614.600.000	612.700.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	336.200	336.200	336.200		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								TEMBALANG
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	336.200	336.200	336.200		KECAMATAN TEMBALANG
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec Tembalang	100 persen	100 persen	100 persen	2.674.961.387	2.420.695.200	2.371.875.872		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	50.339.593	50.339.593	40.344.038		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.392.689.624	1.238.036.581	1.239.268.370		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	26 Paket	26 Paket	26.660.407	26.660.407	26.660.407		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	9.866.213	9.866.213	8.083.111		KECAMATAN TEMBALANG
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	166.075.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	260.000.000	260.000.000	236.989.000		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				dan Konsultasi SKPD								
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	735.405.50	635.792.406	654.455.946		KECAMATAN TEMBALANG
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	89.170.380	89.170.380	89.170.380		KECAMATAN TEMBALANG
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	89.170.380	89.170.380	89.170.380		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec Tembalang	100 persen	100 persen	100 persen	496.000.000	496.000.000	286.442.028		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	237.000.000	237.000.000	157.078.265		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	259.000.000	259.000.000	129.363.763		KECAMATAN TEMBALANG
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	779.234.000	779.234.000	674.334.547		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	28 Unit	28 Unit	28 Unit	155.214.000	155.214.000	155.214.000		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	520.000.000	520.000.000	422.100.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	43.000.547		KECAMATAN TEMBALANG
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	54.020.000	54.020.000	54.020.000		KECAMATAN TEMBALANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	4.124.103.667	4.677.603.667	4.447.163.238		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec Tembalang	1 angka	1 angka	1 angka	309.500.000	647.000.000	600.141.235		KECAMATAN TEMBALANG
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	309.500.000	647.000.000	600.141.235		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan	100 persen	100 persen	100 persen	2.575.358.592	2.791.358.592	2.638.776.928		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec Tembalang								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.480.358.592	1.480.358.592	1.472.994.192		KECAMATAN TEMBALANG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	105.000.000	93.454.470		KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82.000.000	100.000.000	87.000.000		KELURAHAN JANGLI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	101.000.000	86.869.401		KELURAHAN BULUSAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	107.000.000	84.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	98.000.000	90.200.000		KELURAHAN KRAMAS
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000	101.000.000	86.000.000		KELURAHAN ROWOSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.000.000	109.000.000	103.980.086		KELURAHAN SAMBIROTO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000	126.000.000	119.052.799		KELURAHAN METESEH
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	121.000.000	139.000.000	119.550.000		KELURAHAN SENDANG MULYO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	112.000.000	105.820.800		KELURAHAN SENDANGG UWO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.000.000	114.000.000	98.355.150		KELURAHAN TANDANG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	81.000.000	99.000.000	91.500.030		KELURAHAN TEMBALANG
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat - Kec Tembalang	100 persen	100 persen	100 persen	1.239.245.075	1.239.245.075	1.208.245.075		KECAMATAN TEMBALANG
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.239.245.075	1.239.245.075	1.208.245.075		KECAMATAN TEMBALANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	41.577.800.000	41.494.566.187	41.390.276.187		KECAMATAN TEMBALANG
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan - Kec Tembalang	305 kegiatan	305 kegiatan	305 kegiatan	17.785.000.000	17.701.766.187	17.597.476.187		KECAMATAN TEMBALANG
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	178.000.000	178.000.000	103.710.000		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BULUSAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	18 Unit	18 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN JANGLI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KRAMAS
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit	23 Unit	23 Unit	1.501.000.000	1.501.000.000	1.501.000.000		KELURAHAN METESEH
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	21 Unit	2.261.000.000	2.261.000.000	2.261.000.000		KELURAHAN ROWOSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.309.000.000	1.309.000.000	1.309.000.000		KELURAHAN SENDANGGOWO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	20 Unit	1.901.000.000	1.901.000.000	1.901.000.000		KELURAHAN SENDANGMULYO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.635.000.000	1.635.000.000	1.635.000.000		KELURAHAN TANDANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN TEMBALANG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	475.000.000	391.766.187	361.766.187		KECAMATAN TEMBALANG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BULUSAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KEDUNGUMUNDU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JANGLI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KRAMAS
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN METESEH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN ROWOSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SENDANGG UWO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SENDANG MULYO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TANDANG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TEMBALANG
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	23.792.800.000	23.792.800.000	23.792.800.000		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				yang seharusnya - Kec Tembalang								
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	956.000.000	956.000.000	956.000.000		KELURAHAN BULUSAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	908.000.000	908.000.000		KELURAHAN JANGLI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.439.600.000	1.439.600.000	1.439.600.000		KELURAHAN KEDUNG MUNDU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	658.400.000	658.400.000	658.400.000		KELURAHAN KRAMAS
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.662.200.000	1.662.200.000	1.662.200.000		KELURAHAN MANGUN HARJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	3.840.800.000	3.840.800.000	3.840.800.000		KELURAHAN METESEH
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.174.400.000	1.174.400.000	1.174.400.000		KELURAHAN ROWOSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.928.600.000	1.928.600.000	1.928.600.000		KELURAHAN SAMBIROTO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.161.400.000	2.161.400.000	2.161.400.000		KELURAHAN SENDANGG UWO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.183.600.000	5.183.600.000	5.183.600.000		KELURAHAN SENDANG MULYO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.349.800.000	2.349.800.000	2.349.800.000		KELURAHAN TANDANG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	803.000.000	803.000.000	803.000.000		KELURAHAN TEMBALANG
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	600.000.000	600.000.000	600.000.000		KECAMATAN TEMBALANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	60.000.000	60.000.000	50.835.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	35 Angka	35 Angka	60.000.000	60.000.000	50.835.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	50.835.000		KECAMATAN TEMBALANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	75 Persen	75 Persen	75 Persen	130.050.000	130.050.000	130.050.000		KECAMATAN TEMBALANG

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ketahanan Nasional								
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan - Kec Tembalang	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	130.050.000	130.050.000	130.050.000		KECAMATAN TEMBALANG
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	150 Orang	150 Orang	130.050.000	130.050.000	130.050.000		KECAMATAN TEMBALANG
47	KECAMATAN CANDISARI							32.172.395.692	32.369.753.292	32.884.974.638		
	KECAMATAN							32.172.395.692	32.369.753.292	32.884.974.638		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	10.864.115.794	10.597.973.394	11.220.806.880		KECAMATAN CANDISARI
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				prasarana perkantoran SKPD								
				Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	77.106.200	77.106.200	74.556.200		KECAMATAN CANDISARI
				Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec.Candisari	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	31.636.400	31.636.400	33.286.400		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.556.200	3.556.200	2.206.200		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.098.900	4.098.900	2.748.900		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.034.900	4.034.900	2.684.900		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.098.900	4.098.900	2.748.900		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.660.000	2.660.000	1.910.000		KECAMATAN CANDISARI
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.020.900	27.020.900	28.970.900		KECAMATAN CANDISARI
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	9.360.600.600	9.431.958.199	10.116.246.600		KECAMATAN CANDISARI
				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Candisari	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	8.973.962.000	9.045.319.599	9.728.858.000		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500 Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	380.380.000	380.380.000	380.380.000		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.436.200	2.436.200	2.436.200		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.548.600	2.548.600	4.198.600		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.273.800	1.273.800	373.800		KECAMATAN CANDISARI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	636.487.709	398.540.876	369.772.321		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.898.990	21.898.990	21.898.990		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	156.074.214	85.660.609	55.679.054		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	52.967.990	52.967.990	52.967.990		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12.886.192	12.886.192	11.817.192		KECAMATAN CANDISARI
		Fasilitasi Kunjungan TamU	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	62.750.000	55.550.000	55.810.000		KECAMATAN CANDISARI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.154.000	63.554.000	67.076.000		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	255.756.323	106.023.095	104.523.095		KECAMATAN CANDISARI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	2.989.241	2.989.241	2.989.241		KECAMATAN CANDISARI
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	30 Unit	2.989.241	2.989.241	2.989.241		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	319.876.204	258.686.418	242.186.418		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	191.169.104	165.341.468	148.841.468		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.707.100	93.344.950	93.344.950		KECAMATAN CANDISARI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	467.055.840	428.692.460	415.056.100		KECAMATAN CANDISARI
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	11 Unit	11 Unit	11 Unit	183.979.620	183.979.620	170.343.260		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000		KECAMATAN CANDISARI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500 Unit	500 Unit	500 Unit	29.327.590	29.327.590	29.327.590		KECAMATAN CANDISARI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100 Unit	100 Unit	63.748.630	25.385.250	25.385.250		KECAMATAN CANDISARI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.681.453.414	3.144.953.414	3.131.343.724		KECAMATAN CANDISARI
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari	1 angka	1 angka	1 angka	22.300.000	359.800.000	363.600.000		KECAMATAN CANDISARI
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	22.300.000	359.800.000	363.600.000		KECAMATAN CANDISARI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	1.732.749.804	1.858.749.804	1.848.813.614		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	yang ada di kecamatan - Kec.Candisari								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.365.249.804	1.365.249.804	1.355.313.614		KECAMATAN CANDISARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.800.000	69.800.000	69.800.000		KELURAHAN JATINGALEH
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.200.000	71.200.000	71.200.000		KELURAHAN CANDI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.100.000	76.100.000	76.100.000		KELURAHAN JOMBLANG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.600.000	65.600.000	65.600.000		KELURAHAN KALIWIRU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000	68.400.000	68.400.000		KELURAHAN KARANGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								YAR GUNUNG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.000.000	74.000.000	74.000.000		KELURAHAN TEGALSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000	68.400.000	68.400.000		KELURAHAN WONOTINGAL
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec.Candisari	100 persen	100 persen	100 persen	926.403.610	926.403.610	918.930.110		KECAMATAN CANDISARI
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	926.403.610	926.403.610	918.930.110		KECAMATAN CANDISARI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.483.988.920	18.483.988.920	18.409.136.470		KECAMATAN CANDISARI
				Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari)	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	9.115.753.970	9.115.753.970	9.040.901.520		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kelurahan - Kec. Candisari								
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33.875.460	33.875.460	33.875.460		KECAMATAN CANDISARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000		KECAMATAN CANDISARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN CANDI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN JATINGALEH
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	22 Unit	22 Unit	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000		KELURAHAN JOMBLANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN KALIWIRU
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	972.000.000	972.000.000	972.000.000		KELURAHAN KARANGAN YAR GUNUNG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit	996.000.000	996.000.000	996.000.000		KELURAHAN TEGALSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN WONOTINGAL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	270.878.510	270.878.510	196.026.600		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN CANDI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JATINGALEH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JOMBLANG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALIWIRU
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KARANGAN YAR GUNUNG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TEGALSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN WONOTINGAL

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	9.368.234.950	9.368.234.950	9.368.234.950		KECAMATAN CANDISARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN CANDISARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.209.800.000	1.209.800.000	1.209.800.000		KELURAHAN JATINGALEH
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.385.600.000	1.385.600.000	1.385.600.000		KELURAHAN CANDI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.280.200.000	2.280.200.000	2.280.200.000		KELURAHAN JOMBLANG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	545.000.000	545.000.000	545.000.000		KELURAHAN KALIWIRU
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.005.800.000	1.005.800.000	1.005.800.000		KELURAHAN KARANGAN YAR GUNUNG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	1.842.200.000	1.842.200.000	1.842.200.000		KELURAHAN TEGALSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	959.000.000	959.000.000	959.000.000		KELURAHAN WONOTINGAL
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.634.950	13.634.950	13.634.950		KECAMATAN CANDISARI
		PROGRAM KOORDINASI	PROGRAM KOORDINASI	Persentase penurunan pelanggaran	20 Persen	20 Persen	20 Persen	53.268.650	53.268.650	42.268.650		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan Ketertiban Umum								
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec.Candisari	42 angka	42 angka	42 angka	53.268.650	53.268.650	42.268.650		KECAMATAN CANDISARI
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.268.650	53.268.650	42.268.650		KECAMATAN CANDISARI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	89.568.914	89.568.914	81.418.914		KECAMATAN CANDISARI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec.Candisari	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	89.568.914	89.568.914	81.418.914		KECAMATAN CANDISARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	89.568.914	89.568.914	81.418.914		KECAMATAN CANDISARI
48	KECAMATAN BANYUMANIK							52.367.810.941	52.637.168.541	53.272.013.060		
	KECAMATAN							52.367.810.941	52.637.168.541	53.272.013.060		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	43.00 OPD	43.00 OPD	43.00 OPD	18.269.516.930	18.003.374.530	18.774.762.061		KECAMATAN BANYUMANIK
				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				prasarana perkantoran SKPD								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	60.887.461	60.887.461	60.887.461		KECAMATAN BANYUMANIK
				Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.357.072	31.357.072	31.357.072		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.490.600	2.490.600	2.490.600		KECAMATAN BANYUMANIK
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.039.789	23.039.789	23.039.789		KECAMATAN BANYUMANIK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.590.404.100	15.661.761.700	16.699.900.100		KECAMATAN BANYUMANIK
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik	100 persen	100 persen	100 persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	93 Orang/bulan	15.003.488.000	15.074.845.600	16.112.984.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	581.640.000	581.640.000	581.640.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.758.700	1.758.700	1.758.700		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.758.700	1.758.700	1.758.700		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.758.700	1.758.700	1.758.700		KECAMATAN BANYUMANIK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.080.033.448	915.824.882	737.831.395		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	14.911.219	14.911.219	10.899.379		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	44.840.524	44.840.524	34.359.741		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	60.000.000	60.000.000	46.685.665		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	23.000.000	23.000.000	15.496.031		KECAMATAN BANYUMANIK
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	6.500.000	6.500.000	1.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	303.765.000	303.765.000	166.582.440		KECAMATAN BANYUMANIK
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	627.016.705	462.808.139	462.808.139		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	653.674.466	480.383.032	366.901.650		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	653.674.466	480.383.032	366.901.650		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	308.491.223	308.491.223	333.215.223		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	131.000.000	131.000.000	159.360.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	85.641.223	85.641.223	82.005.223		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.850.000	91.850.000	91.850.000		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	576.026.232	576.026.232	576.026.232		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	27 Unit	246.170.000	246.170.000	246.170.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	279.856.232	279.856.232	279.856.232		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.978.844.011	3.283.244.011	3.239.282.953		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	32.800.000	139.200.000	124.800.000		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kelurahan Kec.Banyumanik								
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	32.800.000	139.200.000	124.800.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.888.061.011	2.086.061.011	2.027.203.657		KECAMATAN BANYUMANIK
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.027.061.011	1.027.061.011	988.203.657		KECAMATAN BANYUMANIK
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.000.000	92.000.000	92.000.000		KELURAHAN BANYUMANIK
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	94.000.000		KELURAHAN GEDAWANG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.000.000	97.000.000	97.000.000		KELURAHAN NGESREP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	88.000.000	88.000.000		KELURAHAN JABUNGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	77.000.000	95.000.000	95.000.000		KELURAHAN PEDALANGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82.000.000	100.000.000	100.000.000		KELURAHAN PADANGSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.000.000	107.000.000	107.000.000		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	76.000.000	94.000.000	94.000.000		KELURAHAN SRONDOLKULON
		Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	105.000.000	105.000.000		KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								SRONDOL WETAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000	96.000.000	76.000.000		KELURAHAN SUMURBOTO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.000.000	91.000.000	91.000.000		KELURAHAN TINJOMOYO
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.057.983.000	1.057.983.000	1.087.279.296		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.057.983.000	1.057.983.000	1.087.279.296		KECAMATAN BANYUMANIK
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	30.928.850.000	31.080.850.000	31.030.768.046		KECAMATAN BANYUMANIK
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik	453 Kegiatan	453 Kegiatan	453 Kegiatan	13.735.500.000	13.811.500.000	13.797.918.046		KECAMATAN BANYUMANIK
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	46.500.000	46.500.000	44.879.500		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200 Unit	200 Unit	200 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.049.144.406		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN BANYUMANIK
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN GEDAWANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.353.000.000	1.353.000.000	1.353.000.000		KELURAHAN JABUNGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000		KELURAHAN NGESREP
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PADANGSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PEDALANGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	1.267.000.000	1.267.000.000	1.267.000.000		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000		KELURAHAN SRONDOLKULON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	19 Unit	1.220.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000		KELURAHAN SRONDOLWETAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN SUMURBOTO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	973.000.000	973.000.000	973.000.000		KELURAHAN TINJOMOYO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	450.000.000	526.000.000	514.894.140		KECAMATAN BANYUMANIK
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BANYUMANIK
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GEDAWANG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN JABUNGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN NGESREP
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PADANGSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PEDALANGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SRONDOLKULON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SRONDOLWETAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SUMURBOTO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TINJOMOYO
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	17.193.350.000	17.269.350.000	17.232.850.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	213.000.000	213.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.163.000.000	1.163.000.000	1.163.000.000		KELURAHAN BANYUMANIK
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.405.400.000	1.405.400.000	1.405.400.000		KELURAHAN GEDAWANG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	749.000.000	749.000.000		KELURAHAN JABUNGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.643.600.000	1.643.600.000	1.643.600.000		KELURAHAN NGESREP
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.968.200.000	1.968.200.000	1.968.200.000		KELURAHAN PADANGSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.373.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000		KELURAHAN PEDALANGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.825.600.000	2.825.600.000	2.825.600.000		KELURAHAN PUDAKPAYUNG
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.401.200.000	1.401.200.000	1.401.200.000		KELURAHAN SRONDOL KULON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.543.600.000	2.543.600.000	2.543.600.000		KELURAHAN SRONDOL WETAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	927.800.000	927.800.000	927.800.000		KELURAHAN SUMURBOTO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	983.000.000	983.000.000	983.000.000		KELURAHAN TINJOMOYO
		Fasilitasi Pengembangan	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah Laporan Fasilitasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	72.950.000	72.950.000	36.450.000		KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Usaha Ekonomi Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								BANYUMANIK
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	50.400.000	50.400.000	36.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik	30 Angka	30 Angka	30 Angka	50.400.000	50.400.000	36.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.400.000	50.400.000	36.000.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	140.200.000	219.300.000	191.200.000		KECAMATAN BANYUMANIK
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	140.200.000	219.300.000	191.200.000		KECAMATAN BANYUMANIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik								
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	140.200.000	219.300.000	191.200.000		KECAMATAN BANYUMANIK
49	KECAMATAN NGALIYAN							54.011.025.887	54.191.025.887	55.085.218.409		
	KECAMATAN							54.011.025.887	54.191.025.887	55.085.218.409		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.818.144.480	17.912.108.645	18.993.907.254		KECAMATAN NGALIYAN
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan	5.00 dokumen	5.00 dokumen	5.00 dokumen	74.884.400	74.884.400	73.254.800		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	31.404.400	31.404.400	31.404.400		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.086.000	4.086.000	4.086.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.036.000	5.036.000	4.631.200		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.362.000	2.362.000	2.362.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.012.000	3.012.000	3.012.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.449.600	2.449.600	1.224.800		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	26.534.400	26.534.400	26.534.400		KECAMATAN NGALIYAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	4.00 dokumen	4.00 dokumen	4.00 dokumen	14.764.412.000	14.764.412.000	15.833.155.000		KECAMATAN NGALIYAN
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	14.174.830.000	14.174.830.000	15.243.573.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	586.020.000	586.020.000	586.020.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.224.800	1.224.800	1.224.800		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.224.800	1.224.800	1.224.800		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.112.400	1.112.400	1.112.400		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.719.049.767	1.143.784.711	1.044.405.133		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	18.000.000	18.000.000	18.000.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	1.008.873.340	533.023.836	433.724.258		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	43.062.299	43.062.299	43.612.299		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	17.184.000	17.184.000	17.184.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.350.000	20.350.000	20.350.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	105.534.000	105.534.000	104.904.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	506.046.128	406.630.576	406.630.576		KECAMATAN NGALIYAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	880.854.131	520.083.352	521.801.355		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	880.854.131	520.083.352	521.801.355		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	315.645.000	345.645.000	374.455.450		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	155.360.000	185.360.000	224.860.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	160.285.000	160.285.000	149.595.450		KECAMATAN NGALIYAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.063.299.182	1.063.299.182	1.146.835.516		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	156.503.340	156.503.340	211.389.120		KECAMATAN NGALIYAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	260.000.000	260.000.000	309.244.072		KECAMATAN NGALIYAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	246.795.842	246.795.842	226.202.324		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000		KECAMATAN NGALIYAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.004.622.328	3.451.373.648	3.376.456.356		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	108.760.520	375.511.840	373.700.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	108.760.520	375.511.840	373.700.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.651.852.202	1.831.852.202	1.782.435.930		KECAMATAN NGALIYAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.001.852.202	1.001.852.202	952.435.930		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN BAMBANKE REP
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN GONDORIO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN BRINGIN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN KALIPANCUR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN NGALIYAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN PODOREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN WATES
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN PURWOYO SO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN WONOSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	83.000.000		KELURAHAN TAMBAKAJI
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.244.009.606	1.244.009.606	1.220.320.426		KECAMATAN NGALIYAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.244.009.606	1.244.009.606	1.220.320.426		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	32.025.26 2.879	32.664. 547.39 4	32.551.85 8.599		KECAMATAN NGALIYAN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	236.00 kegiatan	13.608.66 5.499	14.247. 950.01 4	14.274.11 1.219		KECAMATAN NGALIYAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	58.943.69 0	58.943. 690	48.348.24 0		KECAMATAN NGALIYAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.074.000 .000	1.074.0 00.000	1.074.000. 000		KELURAHAN BRINGIN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	950.000.0 00	950.00 0.000	950.000.0 00		KELURAHAN GONDORIO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.0 00	950.00 0.000	950.000.0 00		KELURAHAN NGALIYAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.153.000 .000	1.153.0 00.000	1.153.000. 000		KELURAHAN PURWOYOSO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.253.000 .000	1.253.0 00.000	1.253.000. 000		KELURAHAN TAMBAKAJI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	21 Unit	1.933.000 .000	1.933.0 00.000	1.933.000. 000		KELURAHAN WONOSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.0 00	950.00 0.000	950.000.0 00		KELURAHAN BAMBANKE REP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.154.000.000	1.154.000.000	1.154.000.000		KELURAHAN KALIPANCUR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000		KELURAHAN PODOREJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.034.000.000	1.034.000.000	1.034.000.000		KELURAHAN WATES
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.275.000.000	1.703.750.000	1.723.750.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BRINGIN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GONDORIO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN NGALIYAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PURWOYO SO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TAMBAKAJI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN WONOSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN BAMBANKE REP
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PODOREJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALIPANCUR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN WATES
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	373.721.809	584.256.324	601.012.979		KECAMATAN NGALIYAN
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	18.416.597.380	18.416.597.380	18.277.747.380		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	749.000.000	749.000.000	749.000.000		KELURAHAN BAMBANKE REP

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000	115.000.000	115.000.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.400.000	2.875.400.000	2.875.400.000		KELURAHAN BRINGIN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.374.200.000	1.374.200.000	1.374.200.000		KELURAHAN GONDORIO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.334.200.000	2.334.200.000	2.342.600.000		KELURAHAN KALIPANCUR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.296.200.000	1.296.200.000	1.296.200.000		KELURAHAN PODOREJO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.748.600.000	1.748.600.000	1.748.600.000		KELURAHAN NGALIYAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.878.800.000	1.878.800.000	1.878.800.000		KELURAHAN PURWOYOSO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.394.200.000	2.394.200.000	2.394.200.000		KELURAHAN TAMBAKAJI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.010.000.000	1.010.000.000	885.200.000		KELURAHAN WATES
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.513.600.000	2.513.600.000	2.513.600.000		KELURAHAN WONOSARI
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	127.397.380	127.397.380	104.947.380		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	81.896.200	81.896.200	81.896.200		KECAMATAN NGALIYAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan	30.00 Angka	30.00 Angka	30.00 Angka	81.896.200	81.896.200	81.896.200		KECAMATAN NGALIYAN
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	81.896.200	81.896.200	81.896.200		KECAMATAN NGALIYAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	95 Persen	95 Persen	95 Persen	81.100.000	81.100.000	81.100.000		KECAMATAN NGALIYAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	3.00 kegiatan	81.100.000	81.100.000	81.100.000		KECAMATAN NGALIYAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan								
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	81.100.000	81.100.000	81.100.000		KECAMATAN NGALIYAN
50	KECAMATAN GAYAMSARI							32.917.700.142	33.186.415.342	33.705.292.065		
	KECAMATAN							32.917.700.142	33.186.415.342	33.705.292.065		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	11.842.642.928	11.770.235.138	12.465.383.521		KECAMATAN GAYAMSARI
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.003.000	55.003.000	55.003.000		KECAMATAN GAYAMSARI
				Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.223.800	29.223.800	29.223.800		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.037.900	1.037.900	1.037.900		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	838.900	838.900	838.900		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.037.900	1.037.900	1.037.900		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.257.400	1.257.400	1.257.400		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN GAYAMSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21.383.300	21.383.300	21.383.300		KECAMATAN GAYAMSARI
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.984.844.400	11.127.559.600	11.845.703.400		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	10.624.923.000	10.767.638.200	11.471.022.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	359.250.000	359.250.000	374.010.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	223.800	223.800	223.800		KECAMATAN GAYAMSARI
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	325.957.628	246.196.748	231.693.241		KECAMATAN GAYAMSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	12.345.090	12.345.090	8.345.090		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	54.894.680	1.969.580	1.969.580		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	35.520.100	29.688.320	22.644.650		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	10.169.309	10.169.309	5.310.421		KECAMATAN GAYAMSARI
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	10.000.000	4.000.000	2.500.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	83.430.000	68.426.000	65.726.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	119.598.449	119.598.449	125.197.500		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.958.430	11.958.430	11.958.430		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	11.958.430	11.958.430	11.958.430		KECAMATAN GAYAMSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	176.541.360	172.318.910	169.003.450		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	154.296.000	145.419.000	147.783.540		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	22.245.360	26.899.910	21.219.910		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	288.338.110	157.198.450	152.022.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	105.310.000	105.310.000	105.310.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	74.844.460	10.000.000	10.000.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	15.587.450	15.587.450	10.411.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	92.596.200	26.301.000	26.301.000		KECAMATAN GAYAMSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	2.255.608.214	2.485.088.344	2.368.755.506		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	8 Angka	8 Angka	8 Angka	19.450.000	126.850.000	122.800.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.450.000	126.850.000	122.800.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.471.330.036	1.688.617.714	1.605.078.370		KECAMATAN GAYAMSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.065.330.036	1.156.617.714	1.132.794.753		KECAMATAN GAYAMSARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	70.930.600		KELURAHAN GAYAMSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	66.104.910		KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	62.661.667		KELURAHAN KALIGAWÉ
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	83.000.000	80.900.000		KELURAHAN SAMBIREJO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	62.497.370		KELURAHAN SIWALAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	56.000.000	74.000.000	69.268.700		KELURAHAN SAWAH BESAR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	73.000.000	59.920.370		KELURAHAN TAMBAKREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	764.828.178	669.620.630	640.877.136		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	764.828.178	669.620.630	640.877.136		KECAMATAN GAYAMSARI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99 Persen	99 Persen	99 Persen	18.727.449.000	18.839.091.860	18.776.603.038		KECAMATAN GAYAMSARI
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 Angka	80 Angka	80 Angka	9.387.415.050	9.509.415.050	9.448.852.278		KECAMATAN GAYAMSARI
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.986.000	36.286.000	35.336.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.275.000.000	1.275.000.000	1.273.500.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	949.040.000		KELURAHAN GAYAMSARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.218.000.000	1.218.000.000	1.214.820.000		KELURAHAN KALIGAWA
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	947.700.000		KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kelurahan yang Terbangun								PANDEAN LAMPER
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.169.000.000	1.169.000.000	1.165.200.000		KELURAHAN SAMBIREJO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	949.700.000		KELURAHAN SAWAH BESAR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	964.000.000	964.000.000	964.000.000		KELURAHAN SIWALAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.291.000.000	1.291.000.000	1.287.990.000		KELURAHAN TAMBAKREJO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	233.429.050	356.129.050	311.566.278		KECAMATAN GAYAMSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GAYAMSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALIGAWA
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SAMBIREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SAWAH BESAR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN SIWALAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TAMBAKREJO
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	768 Angka	768 Angka	9.340.033.950	9.329.676.810	9.327.750.760		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.354.400.000	1.354.400.000	1.354.400.000		KELURAHAN GAYAMSARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.506.200.000	1.506.200.000	1.506.200.000		KELURAHAN KALIGAWA
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.982.600.000	1.982.600.000	1.982.600.000		KELURAHAN PANDEAN LAMPER
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.096.400.000	1.096.400.000	1.096.400.000		KELURAHAN SAMBIREJO

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.147.400.000	1.147.400.000	1.147.400.000		KELURAHAN SAWAH BESAR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	779.000.000	779.000.000	779.000.000		KELURAHAN SIWALAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1.127.600.000	1.127.600.000	1.127.600.000		KELURAHAN TAMBAKREJO
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	219.433.950	209.076.810	207.150.760		KECAMATAN GAYAMSARI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 Persen	20 Persen	20 Persen	18.200.000	18.200.000	20.750.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	20 Angka	20 Angka	18.200.000	18.200.000	20.750.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.200.000	18.200.000	20.750.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti	95 Persen	95 Persen	95 Persen	73.800.000	73.800.000	73.800.000		KECAMATAN GAYAMSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	73.800.000	73.800.000	73.800.000		KECAMATAN GAYAMSARI
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	73.800.000	73.800.000	73.800.000		KECAMATAN GAYAMSARI
51	KECAMATAN PEDURUNGAN							61.420.879.401	61.636.879.401	63.119.985.773		
	KECAMATAN							61.420.879.401	61.636.879.401	63.119.985.773		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan)	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	18.940.208.588	18.819.852.633	20.238.309.349		KECAMATAN PEDURUNGAN
				Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja	100 Persen	100 Persen	100 Persen					

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				SKPD (Pedurungan)								
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Pedurungan)	100 Persen	100 Persen	100 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	71.097.200	71.097.200	71.097.200		KECAMATAN PEDURUNGAN
				jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	27.808.000	27.808.000	27.808.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.921.900	3.921.900	3.921.900		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.921.900	3.921.900	3.921.900		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.246.900	3.246.900		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.246.900	3.246.900	3.246.900		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								PEDURUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.154.400	2.154.400	2.154.400		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26.797.200	26.797.200	26.797.200		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	17.062.986.000	17.062.986.000	18.378.547.266		KECAMATAN PEDURUNGAN
				persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurangan	100 persen	100 persen	100 persen					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	16.494.410.000	16.494.410.000	17.805.679.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	561.440.000	561.440.000	565.732.266		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	981.000	981.000	981.000		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.324.000	5.324.000	5.324.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	831.000	831.000	831.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan	100 persen	100 persen	100 persen	923.574.256	873.815.056	972.495.056		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	257.608.590	235.386.390	235.386.390		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.000.000	45.000.000	45.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.415.000	17.415.000	17.415.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	120.029.17	120.029.117	217.029.17		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.164.000	52.627.000	54.307.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	378.357.549	378.357.549	378.357.549		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan	100 persen	100 persen	100 persen	171.557.832	103.114.699	103.114.699		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	171.557.832	103.114.699	103.114.699		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan	100 persen	100 persen	100 persen	400.832.300	398.678.678	402.894.128		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000	270.000.000	272.500.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	130.832.300	128.678.678	130.394.128		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan	100 persen	100 persen	100 persen	310.161.000	310.161.000	310.161.000		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	190.161.000	190.161.000	190.161.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	93 Persen	93 Persen	93 Persen	3.355.070.813	3.842.478.448	3.981.786.214		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurangan	1 angka	1 angka	1 angka	109.735.000	434.300.000	434.300.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	109.735.000	434.300.000	434.300.000		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan	100 persen	100 persen	100 persen	2.180.335.813	2.385.253.598	2.461.438.015		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.000.000	112.000.000	110.709.100		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	108.000.000	105.381.840		KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.246.335.813	1.235.253.598	1.340.487.755		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	93.000.000		KELURAHAN GEMAH
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	90.418.200		KELURAHAN PALEBON

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	90.418.200		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	90.322.770		KELURAHAN KALICARI
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	89.163.660		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	85.809.150		KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	89.163.660		KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Peningkatan Efektifitas	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	94.509.100		KELURAHAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								PEDURUNGAN TENGAH
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	89.054.580		KELURAHAN TLOGOMULYO
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	93.000.000	93.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan	100 persen	100 persen	100 persen	1.065.000.000	1.022.924.850	1.086.048.199		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.065.000.000	1.022.924.850	1.086.048.199		KECAMATAN PEDURUNGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan-Pedurungan	93 Persen	93 Persen	93 Persen	39.050.150.000	38.915.348.320	38.840.690.210		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan	393 kegiatan	393 kegiatan	393 kegiatan	15.518.000.000	15.383.198.320	15.309.440.210		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyar akatan	6 Lembaga Kemasyar akatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KECAMATAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								PEDURUNGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1.710.000.000	1.710.000.000	1.696.200.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.084.000.000	1.084.000.000	1.075.600.000		KELURAHAN TLOGOMULYO
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.000.000.000	950.000.000	950.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	1.083.000.000	1.083.000.000	1.074.000.000		KELURAHAN GEMAH
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	944.600.000		KELURAHAN KALICARI
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.084.000.000	1.084.000.000	1.075.600.000		KELURAHAN PALEBON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	997.000.000	997.000.000	988.600.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	950.000.000	950.000.000	942.800.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	950.000.000	950.000.000	946.200.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	1.029.000.000	1.029.000.000	1.022.400.000		KELURAHAN PLAMONGANSARI

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	1.681.000.000	1.681.000.000	1.671.400.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	941.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	14 Unit	14 Unit	950.000.000	950.000.000	939.800.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TLOGOMULYO
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	450.000.000	365.198.320	394.040.210		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN KALICARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN GEMAH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PALEBON

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN PLAMONGANSARI
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	50.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	50.000.000	50.000.000	47.200.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurangan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	23.532.150.000	23.532.150.000	23.531.250.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	33 Lembaga Kemasyarakatan	33 Lembaga Kemasyarakatan	33 Lembaga Kemasyarakatan	4.002.800.000	4.002.800.000	4.002.800.000		KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4.561.400.000	4.561.400.000	4.561.400.000		KELURAHAN TLOGOSARI KULON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	127.000.000	127.000.000	127.000.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.717.400.000	1.717.400.000	1.717.400.000		KELURAHAN GEMAH
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.229.600.000	1.229.600.000	1.229.600.000		KELURAHAN KALICARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.572.800.000	1.572.800.000	1.572.800.000		KELURAHAN PALEBON
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.487.600.000	1.487.600.000	1.487.600.000		KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.073.200.000	2.073.200.000	2.073.200.000		KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.331.600.000	1.331.600.000	1.331.600.000		KELURAHAN PEDURUNGAN LOR
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.843.400.000	1.843.400.000	1.843.400.000		KELURAHAN PLAMONGAN SARI
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	787.400.000	787.400.000	787.400.000		KELURAHAN PENGGARON KIDUL
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	1.866.200.000	1.866.200.000	1.866.200.000		KELURAHAN TLOGOMULYO
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	908.000.000	908.000.000	908.000.000		KELURAHAN TLOGOSARI WETAN
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.750.000	23.750.000	22.850.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurangan	20 Persen	20 Persen	20 Persen	50.000.000	33.750.000	33.750.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurangan	30 angka	30 angka	30 angka	50.000.000	33.750.000	33.750.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	33.750.000	33.750.000		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan	40 Persen	40 Persen	40 Persen	25.450.000	25.450.000	25.450.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi masyarakat , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan-Pedurungan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	25.450.000	25.450.000	25.450.000		KECAMATAN PEDURUNGAN
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	150 Orang	150 Orang	25.450.000	25.450.000	25.450.000		KECAMATAN PEDURUNGAN

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							97.338.097.480	101.780.812.680	103.123.968.498		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							97.338.097.480	101.780.812.680	103.123.968.498		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	6.813.370.840	6.956.086.040	6.998.307.580		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
				Persentase peningkatan kemampuan ASN	100.00 Persen	100.00 Persen	100.00 Persen					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	62.160.000	62.160.000	58.786.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	29.874.000	29.874.000	29.539.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.108.000	2.108.000	1.897.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000	2.640.000	2.429.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.108.000	2.108.000	1.380.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.235.000	2.235.000	2.024.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.073.000	1.073.000	345.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22.122.000	22.122.000	21.172.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5.101.157.000	5.243.872.200	5.115.817.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.799.407.000	4.942.122.200	4.824.924.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	296.750.000	296.750.000	289.880.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	788.000	788.000	225.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.766.000	3.766.000	675.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	446.000	446.000	113.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	29.984.000	29.984.000	29.984.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang	55 Orang	29.984.000	29.984.000	29.984.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	791.963.650	791.963.650	823.912.800		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.534.300	3.534.300	3.534.300		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	55.010.000	55.010.000	66.066.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	14.052.300	14.052.300	14.052.300		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	450.000	450.000	450.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	90.075.400	90.075.400	122.990.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	450.000.000	450.000.000	438.350.200		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	148.841.650	148.841.650	148.470.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	92.531.190	92.531.190	82.091.780		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	31.230.000	31.230.000	35.963.040		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	61.301.190	61.301.190	46.128.740		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	417.972.000	417.972.000	557.972.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.920.000	20.920.000	160.920.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	397.052.000	397.052.000	397.052.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	317.603.000	317.603.000	329.744.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.955.000	35.955.000	35.955.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	249.287.000	249.287.000	261.428.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	6.750.000	6.750.000	6.750.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	25.611.000	25.611.000	25.611.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Pengamalan Pancasila	2.20 Indeks	2.20 Indeks	2.20 Indeks	3.697.335.640	4.971.351.640	5.311.134.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahiran antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	3.697.335.640	4.971.351.640	5.311.134.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.242.185.000	2.316.201.000	2.036.619.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	209.135.000	209.135.000	889.785.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1527 Orang	1527 Orang	1527 Orang	1.936.760.640	1.936.760.640	1.920.520.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180 Orang	180 Orang	180 Orang	150.000.000	150.000.000	134.028.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	159.255.000	359.255.000	330.182.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	66.00 angka indeks	66.00 angka indeks	66.00 angka indeks	77.712.117.000	78.238.375.000	78.313.860.918		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70.00 Persen	70.00 Persen	70.00 Persen					
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6500 laporan dan usulan	6500 laporan dan usulan	6500 laporan dan usulan	77.712.117.000	78.238.375.000	78.313.860.918		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	65 Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	72.215.744.000	72.742.002.000	72.925.043.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	4.222.465.000	4.222.465.000	4.372.462.918		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun								
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	77.263.000	77.263.000	77.263.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	1.010.000.000	1.010.000.000	794.702.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	65 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	186.645.000	186.645.000	144.390.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	58.00 indeks	58.00 indeks	58.00 indeks	2.670.653.000	2.670.653.000	2.735.403.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	35%	35%	35%	2.670.653.000	2.670.653.000	2.735.403.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	29 Dokumen	29 Dokumen	29 Dokumen	1.812.153.000	1.812.153.000	1.812.153.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	150.000.000	214.750.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	250 Orang	250 Orang	500.000.000	500.000.000	500.000.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
				Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	208.500.000	208.500.000	208.500.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks kerukunan umat beragama	71.00 indeks	71.00 indeks	71.00 indeks	2.882.847.000	4.056.863.000	4.800.984.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	2.882.847.000	4.056.863.000	4.800.984.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	765.082.000	765.082.000	745.630.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	110.768.000	110.768.000	110.768.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	1.856.997.000	2.931.013.000	3.710.073.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	250.000.000	234.513.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	83.00 Persen	83.00 Persen	83.00 Persen	3.561.774.000	4.887.484.000	4.964.279.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	23 kejadian	23 kejadian	23 kejadian	3.561.774.000	4.887.484.000	4.964.279.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	200 Orang	200 Orang	913.960.000	913.960.000	817.967.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	200 Orang	200 Orang	422.764.000	1.748.474.000	2.425.927.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	377 Laporan	377 Laporan	377 Laporan	275.050.000	275.050.000	252.100.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			ALASAN PERUBAHAN	UNIT PERANGKAT DAERAH
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2024	APBD 2024	P RKPD 2024	RKPD 2024	APBD	P RKPD 2024		
		Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah								
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	1.950.000.000	1.950.000.000	1.468.285.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							5.381.127.963.269	5.460.613.175.269	5.957.063.431.486		

## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun untuk mawadahi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program ,antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Berbagai dinamika yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD ini. Konflik geopolitik berkepanjangan Rusia-Ukraina, Israel-Palestina, ancaman iklim, serta dinamika perekonomian yang terjadi pada level nasional maupun regional mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2024. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu-isu strategis terkini.

Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan hasil penyesuaian pada tahun berjalan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2024 yang ukuran kinerja dan penjabarannya berpangkal dari Perubahan RKPD Tahun 2024. Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2024 juga disusun sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Juli 2024  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001